



LAKIP

2021

Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah



Balai Besar POM di Banjarmasin

Email : bpom_banjarmasin@pom.go.id

Website : banjarmasin.pom.go.id

Kode Pos : 70124

Telp : (0511) 3305115



Kata Pengantar



Assalamu'alaikum Wr Wb.

Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan, rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2021 ini dapat disusun dengan baik.

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan Kinerja merupakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Seluruh instansi pemerintah wajib menyiapkan dan menyampaikan LAKIP sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh. Penyusunan Laporan Kinerja BBPOM di Banjarmasin ini mengacu kepada Petunjuk Teknis Penyajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin periode tahun 2020-2024. Pencapaian sasaran melalui program/kegiatan tahun 2021 diharapkan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran tahun-tahun berikutnya. Dalam Laporan Kinerja BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Reviu Rencana Strategis



BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja tahun 2021 terhadap target yang telah ditetapkan, perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target nasional dan UPT BPOM lain yang setara, evaluasi dan pemaparan secara memadai terkait hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, program/kegiatan penunjang pencapaian kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya dan rencana tindak lanjut yang telah dilakukan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas BBPOM di Banjarmasin kepada Kepala Badan POM, seluruh stakeholder (instansi Pemerintah Pusat/Daerah) dan juga masyarakat. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memberikan informasi tentang apa yang telah dicapai oleh BBPOM di Banjarmasin dan proses pencapaian yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin sepanjang tahun 2021.

Laporan Kinerja BBPOM di Banjarmasin juga diharapkan dapat memberikan gambaran manfaat atas kinerja yang telah dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban BBPOM di Banjarmasin dan umpan balik bagi organisasi dalam rangka mendorong upaya perbaikan dan *continuos improvement* sehingga senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja di sepanjang perjalanan BBPOM di Banjarmasin.

Banjarmasin, 18 Februari 2022

Kepala BBPOM di Banjarmasin



Drs. Leonard Durna, Apt., MM.



Ringkasan Eksekutif

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Banjarmasin atas penggunaan anggarannya sesuai amanah dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja BBPOM di Banjarmasin juga merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024 dengan memperhatikan hasil reviu Renstra.

Dalam rangka mendukung RPJMN 2020-2024, yaitu "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing", BBPOM di Banjarmasin mempunyai empat misi yaitu (1) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia; (2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa; (3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan (4) Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan public yang prima di bidang Obat dan Makanan.



Dalam mencapai visi dan misi, BBPOM di Banjarmasin menetapkan tujuan strategis sebagaimana tertuang sebagai arah kebijakan BBPOM di Banjarmasin dalam dokumen Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024 dan dokumen Reviu Rencana Strategis 2020-2024 yaitu (1) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM internal; (2) Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan SDM *stakeholder* dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan; (3) Peningkatan pelayanan publik dan pemberian KIE terkait keamanan Obat dan Makanan kepada masyarakat; (4) Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja pengawas Obat dan Makanan; (5) Pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka pemenuhan Good Manufacturing Practice dan Good Distribution Practice untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha; (6) Pendampingan UMKM pangan olahan, kosmetik dan obat tradisional dalam rangka memperoleh nomor izin edar; (7) Peningkatan efektivitas pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan; (8) Peningkatan persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat; (9) Peningkatan kerjasama/koordinasi dengan stakeholder dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan; (10) Peningkatan koordinasi rekomendasi dan tindak lanjut hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan; (11) Perkuatan penindakan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan melalui kerjasama dalam kerangka Criminal Justice System (CJS) dan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan; dan (12) Peningkatan indeks RB dan tercapainya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) BBPOM di Banjarmasin.

Terdapat 11 sasaran strategis BBPOM di Banjarmasin yang diturunkan dari sasaran strategis dari peta strategis level 0 Kepala Badan POM. Seluruh sasaran kegiatan tersebut telah berhasil mencapai target sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan hasil baik karena pencapaian indikator masing-masing mencapai lebih dari 90% dari target, yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada tahun 2021 memperoleh NPS 102,73% (**Baik**)



dengan 5 (lima) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Persentase Obat yang memenuhi syarat; target 82; realisasi 78,30; capaian kinerja 95,49% (**Baik**)
 - b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat; target 80; realisasi 84,86; capaian kinerja 106,07% (**Baik**)
 - c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; target 70; realisasi 76,6; capaian kinerja 108,65% (**Baik**)
 - d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; target 85,5; realisasi 89,12; capaian kinerja 104,23% (**Baik**)
 - e. Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat; target 92; realisasi 91,25; capaian kinerja 99,18% (**Baik**)
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada tahun 2021 memperoleh NPS 97,63% (**Baik**) dengan 1 (satu) indikator kinerja : engan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut : **Indeks kesadaran masyarakat (awareness index)** terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu; target 81; realisasi 79,08; capaian kinerja 97,63 % (**Baik**)
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada tahun 2021 memperoleh NPS 98,86% (**Baik**) dengan 3 (tiga) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
- a. **Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan**; target 91,1, realisasi 92,30; capaian kinerja 101,32% (**Baik**)
 - b. **Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan**; target 78,33; realisasi 73,03; capaian kinerja 93,23% (**Baik**)



- c. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM; target 90; realisasi 91,83; capaian kinerja 102,03% (**Baik**)
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada tahun 2021 memperoleh NPS 109,31% (**Baik**) dengan 6 (enam) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan; target 82; realisasi 92,4; capaian kinerja 112,68% (**Sangat Baik**)
 - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan; target 60; realisasi 71,79; capaian kinerja 119,65% (**Sangat Baik**)
 - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu; target 100; realisasi 100; capaian kinerja 100% (**Baik**)
 - d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; target 45; realisasi 50,67; capaian kinerja 112,59% (**Sangat Baik**)
 - e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; target 63; realisasi 68,77; capaian kinerja 109,16% (**Baik**)
 - f. Indeks pelayanan public; target 3,91; realisasi 3,98; capaian kinerja 101,79% (**Baik**)
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada tahun 2021 memperoleh NPS 100,70% (**Baik**) dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
 - a. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan; target 90; realisasi 92,51; capaian kinerja 102,79% (**Baik**)
 - b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman; target 40; realisasi 40; capaian kinerja 100% (**Baik**)



- c. Jumlah desa pangan aman; target 12; realisasi 12; capaian kinerja 100% (**Baik**)
 - d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas; target 4; realisasi 4; capaian kinerja 100% (**Baik**)
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada tahun 2021 memperoleh NPS 100% (**Baik**) dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar; target 100; realisasi 100; capaian kinerja 100% (**Baik**)
 - b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar; target 100; realisasi 100; capaian kinerja 100% (**Baik**)
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, pada tahun 2021 memperoleh NPS 106,14% (**Baik**) dengan 1 (satu) indikator kinerja : *Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan*; target 90; realisasi 95,53; capaian kinerja 106,14 % (**Baik**)
8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banjarmasin yang optimal, pada tahun 2021 memperoleh NPS 98,72% (**Baik**) dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
 - a. Indeks RB BBPOM di Banjarmasin; target 80,8; realisasi 80,76; capaian kinerja 99,95% (**Baik**)
 - b. Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin; target 78,1; realisasi 76,14; capaian kinerja 97,49% (**Baik**)
9. Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal, pada tahun 2021 memperoleh NPS 102,58% (**Baik**) dengan 1 (satu) indikator kinerja :



Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin; target 81; realisasi 83,09; capaian kinerja 102,58% (**Baik**)

10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan, pada tahun 2021 memperoleh NPS 100,90% (**Baik**) dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP; target 73; realisasi 73,40; capaian kinerja 100,55% (**Baik**)
 - b. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal; target 2; realisasi 2,025; capaian kinerja 101,25% (**Baik**)

11. Terkelolanya keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel, pada tahun 2021 memperoleh NPS 102,93% (**Baik**) dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
 - a. Nilai kinerja anggaran BBPOM di Banjarmasin; target 92,5; realisasi 89,87; capaian kinerja 97,16% (**Baik**)
 - b. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banjarmasin; target efisien (92%); realisasi efisien (100%); capaian kinerja 108,70% (**Baik**)

Pencapaian 11 sasaran kegiatan tersebut diukur dengan 29 indikator yang merupakan Indikator Kinerja (IK). Kualitas IK didasarkan pada kriteria SMART-C (Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded dan Continuously Improved). Dari 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja, terdapat 3 (tiga) indikator dengan kriteria Sangat Baik dan 26 (dua puluh enam) indikator dengan kriteria Baik.

Dua puluh Sembilan Indikator Kinerja dengan kriteria Sangat Baik dan Baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama yang terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga keamanan,



kemanfaatan dan mutu produk-produk Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan terjamin untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Pagu anggaran BBPOM di Banjarmasin sesuai DIPA tahun 2021 No. SP DIPA-063.01.2.432881/2021 tanggal 23 November 2020 sebesar **Rp. 55.781.064.000,-**. Pada bulan Juni dan Agustus 2021 mengalami refocusing anggaran melalui APBN tahap II, III dan IV, yang dimaksudkan untuk penanganan Pandemi Covid-19, dimana pagu anggaran tersebut dipotong 15% yaitu sebesar Rp 8.424.122.000,- sehingga pagu yang tersisa sebesar Rp.47.356.942.000,-. Realisasi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin pada tahun 2021 adalah Rp 47.356.942.000,- atau 94,38%.

Kualitas pemanfaatan anggaran tidak hanya direfleksikan dari besarnya penyerapan pagu anggaran, tetapi mempertimbangkan pula ketercapaian output, upaya efisiensi (reducing cost), peningkatan nilai tambah (value added) serta memberikan dampak signifikan dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, BBPOM di Banjarmasin memperoleh Indeks Efisiensi (IE) 1,08 dan Tingkat Efisiensi (TE) 0,08 sehingga Capaian Tingkat Efisiensi adalah Efisien dengan nilai 100%. Nilai tersebut berasal dari 29 Indikator Kinerja Utama, dimana 3 (tiga) dari 11 Sasaran Kinerja dan 25 (dua puluh lima) dari 29 Indikator Kinerja memperoleh Capaian Tingkat Efisiensi Efisien.

Pada tahun 2021, BBPOM di Banjarmasin mendorong inovasi dan terobosan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan baik pelayanan internal maupun eksternal. Inovasi dan terobosan tersebut antara lain FASE 24 (Fast Service 24 jam pengujian pihak ketiga berupa sampel NAPZA dan barang bukti dari kepolisian), Ganii UMKM (Pendampingan intensif dan jemput bola kepada UMKM Pangan Olahan, Kosmetik dan Obat Tradisional), Si Anang Galuh Banjar (Sistem Informasi Analisa Anggaran dan Gampang Laport Akuntabilitas Hasil Kerja BBPOM di Banjarmasin) AMDK (Aplikasi Manajemen Data Kepegawaian), BAP TWO (Percepatan timeline penyelesaian berkas perkara penindakan), SIMPEL SEHATI (Sistem Informasi Manajemen Pengujian Laboratorium Sampel Pihak Ketiga), KERLING (Kelotok Laboratorium Keliling), dan partisipasi layanan informasi di Mall Pelayanan Publik.



Hingga pada akhir tahun 2021, BBPOM di Banjarmasin berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.





Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	xi
<hr/>	
Bab I	1.1 Gambaran Umum Organisasi 1
Pendahuluan	1.2 Tugas dan Fungsi 2
	1.3 Isu Strategis 4
	1.4 Struktur Organisasi 11
	1.5 Lingkungan Internal 17
	5 Lingkungan External 22
<hr/>	
Bab II	2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis 25
Perencanaan Kinerja	2.2 Sasaran Strategis 30
	2.3 Kriteria Pencapaian Indikator 51
	2.4 Pengukuran Efisiensi Kegiatan 52
<hr/>	
Bab III	3.1 Capaian Kinerja Organisasi 53
Akuntabilitas Kinerja	3.2 Akuntabilitas Kinerja 56
	3.3 Realisasi Anggaran 58
<hr/>	
Bab IV	IV.1 Kesimpulan 289
Penutup	IV.2 Saran..... . 291
<hr/>	
Lampiran 293

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, pada 8 Juni 2018 diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Balai Besar POM di Banjarmasin termasuk klasifikasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang mengkoordinir 2 (dua) Loka POM yaitu Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memiliki wilayah kerja 3 (tiga) kabupaten, dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki wilayah kerja 2 (dua) kabupaten. Pembagian wilayah kerjanya sebagai berikut :



Gambar 1.1.1. Peta Wilayah Kerja

Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah kerja
Balai Besar POM di Banjarmasin	Kota Banjarmasin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Banjarmasin, 2. Kota Banjarbaru, 3. Kabupaten Banjar, 4. Kabupaten Tanah Laut, 5. Kabupaten Barito Kuala, 6. Kabupaten Tapin, 7. Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 8. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2. Kabupaten Balangan, 3. Kabupaten Tabalong
Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	Kabupaten Tanah Bumbu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Tanah Bumbu, 2. Kabupaten Kota Baru

Tabel 1.1.1. Wilayah Kerja

Balai Besar POM di Banjarmasin, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu adalah UPT yang dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

1.2. Tugas dan Fungsi

Balai Besar POM di Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar POM di Banjarmasin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;

- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai UPT Badan POM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

- 1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam pemeriksaan sarana produksi dalam rangka sertifikasi/pendaftaran produk;
- 2) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan;
- 3) Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- 4) Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Loka POM di Kabupaten HSU dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/ fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.3. Isu Strategis

Peran Balai Besar POM di Banjarmasin beserta 2 Loka POM (Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu) sebagai UPT Badan POM di Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai posisi yang strategis karena berkaitan dengan tugas utama pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen di bidang Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Selain merupakan kebutuhan dasar manusia, produk Obat dan Makanan juga memiliki risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar atau penggunaan produk-produk tersebut tidak tepat atau disalahgunakan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik (*Good Regulatory Practices*) agar produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut BBPOM di Banjarmasin perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian daerah dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kondisi sarana produksi di Provinsi Kalimantan Selatan baik industri makanan, obat tradisional dan kosmetik dengan kategori UMKM, pada umumnya masih lemah dalam pengetahuan maupun modal usaha. Hal ini berimplikasi pada perlunya pengawasan khusus yang mengedepankan aspek pembinaan, aspek pendampingan dan aspek fasilitasi

sehingga potensi daerah dan kearifan lokal dapat terjaga bahkan bila perlu dikembangkan. Oleh karena itu dalam menjalankan konsep pengawasan harus melibatkan dan bersinergi dengan lintas sektor terkait, khususnya untuk aspek pendanaan/fasilitas (bantuan modal/teknologi produksi).

Kapasitas BBPOM di Banjarmasin, Loka POM Kab. Hulu Sungai Utara dan Loka POM Kab. Tanah Bumbu sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efisien dan efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

BBPOM di Banjarmasin perlu mengidentifikasi dan melakukan langkah antisipasi terhadap berbagai permasalahan yang mungkin terjadi agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Berbagai isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja BBPOM di Banjarmasin, antara lain adalah :

- 1) Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Balai Besar POM di Banjarmasin. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
- 2) Kebijakan proteksionisme yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Cina membuat Cina akan mencari pasar-pasar alternative termasuk Indonesia. Kondisi ini akan berdampak pada membanjirnya produk-produk dari Cina di Provinsi Kalimantan selatan termasuk produk, obat, suplemen, kosmetik dan pangan. Hal ini menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam melakukan pengawasan dengan membanjirnya produk dari Cina.

- 3) Dalam upaya mendorong ekspor untuk mengurangi defisit neraca perdagangan, BBPOM di Banjarmasin dapat berperan dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sehingga dapat meningkatkan daya saing produk obat dan makanan dalam negeri serta pengawasan terhadap produk-produk luar negeri yang akan masuk ke Provinsi Kalimantan Selatan. Adanya perdagangan bebas, membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.
- 4) Adanya jejaring kerja yang dimiliki BBPOM di Banjarmasin diantaranya Jejaring Keamanan Pangan Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan ilegal, *Criminal Justice System (CJS)* guna meningkatkan jaminan kualitas dan mutu Obat dan Makanan. Tantangan yang dihadapi BBPOM di Banjarmasin terkait jejaring kerjasama ini diantaranya adalah kurang sinerginya program pengawasan obat dan makanan dengan lintas sektor terkait dimana anggaran yang dialokasikan lintas sektor untuk pengawasan obat dan makanan masih relatif kecil.
- 5) Berlakunya program *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang meliputi 17 *goals*/bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan:
 - a. Goal 2. *End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture*. Tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin ke depan adalah memberdayakan masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas melalui pelaksanaan KIE secara efektif.
 - b. Goal 3. *Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages*. Salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk didalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.
- 6) Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.

- 7) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi (RB) 2010-2025.
- 9) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongpraajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.
- 10) Banyaknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk dari luar negeri sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan sampling.
- 11) Rendahnya mutu produk terutama cemaran mikroba sehingga diperlukan proses pemeriksaan laboratorium yang cepat dan akurat.

- 12) Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans.
- 13) Munculnya banyak penyakit mendorong masyarakat banyak mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
- 14) Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM.
- 15) Banyaknya masalah keamanan dan mutu pangan terkait dengan produk UMKM pangan, pangan siap saji, jasa boga, dan pangan jajanan (*street foods*). Jumlah penduduk, penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), perubahan komposisi penduduk, peningkatan penduduk lansia, peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan usia harapan hidup, dan pergeseran situasi dan isu strategis kesehatan dan kebutuhan hidup. Kondisi diatas mendorong meningkatnya penggunaan obat, alat/obat kontrasepsi dan suplemen sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin untuk melakukan pengawasan *post-market*.
- 16) Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Beragamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan *leaflet*.
- 17) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi di bidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi *online* menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- 18) Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Balai Besar POM di Banjarmasin untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

- 19) Pandemi Covid-19 yang meningkatkan peran serta Balai Besar POM di Banjarmasin, utamanya dalam distribusi vaksin covid-19 untuk mengawal keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu vaksin terutama dalam pengawasan Cara Distribusi Obat yang Baik. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Badan POM berperan penting dalam pemberian persetujuan pelaksanaan uji klinik vaksin Covid-19, pemberian persetujuan pemasukan jalur khusus bahan baku atau produk yang diperlukan untuk pengembangan dan penggunaan vaksin Covid-19; pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat. Selain itu, peran Balai Besar POM di Banjarmasin dibutuhkan dalam mengawal pengembangan fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternatif dalam pengobatan COVID-19. Munculnya banyak alternatif bahan alam kekayaan hayati Kalimantan Selatan yang dianggap dapat mengobati/ memberikan daya tahan tubuh terhadap Covid-19, memberikan dampak pada meningkatnya animo pelaku usaha sebagai produsen Obat Tradisional.
- 20) BPOM diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BPOM mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

a. **Area ke-4 “Pengendalian Penyakit dan Imunisasi”**

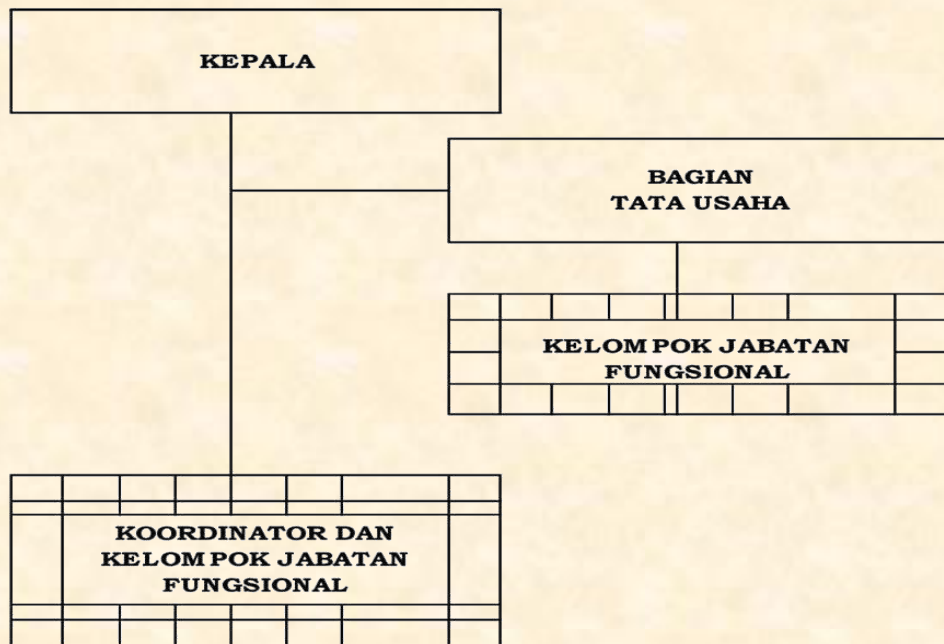
Kontribusi Badan POM pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin COVID-19, peningkatan akses vaksin COVID-19 dan vaksin pneumonia (PCV) melalui percepatan registrasi, intensifikasi pengawasan produksi dan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut *Monitoring* Efek Samping Obat Tradisional (MESOT).

- b. **Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan”** khususnya terkait dukungan/ pengawalan dalam produksi sediaan farmasi dalam negeri, riset dan regulasi pemanfaatan sediaan farmasi dalam negeri, riset vaksin bersertifikat halal dan produk biologi. Pada area ini Badan POM dapat berkontribusi melalui: relaksasi dan percepatan perizinan sediaan; deregulasi Standar/Peraturan/Pedoman/Kajian di bidang pengawasan obat; peningkatan akses dan ketersediaan serta pengembangan obat dan vaksin; percepatan Uji Praklinik/Klinik dalam rangka percepatan penanganan wabah Covid-19 melalui pendampingan dan koordinasi uji praklinik/klinik; penguatan pengawasan obat pasca pemberian EUA (*Post Authorization Safety Study/PASS*); pengawalan pengembangan industri fraksionasi plasma; hilirisasi inovasi herbal Indonesia melalui percepatan pengembangan dan pemanfaatan fitofarmaka melalui pendampingan penelitian praklinik/klinik.
- c. **Area ke-6 “Ketahanan Kesehatan (*Health Security*)”** khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi Badan POM dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium BPOM; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi *Grand Design* Penguatan laboratorium Badan POM; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium POM untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.
- d. **Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat”** melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini Badan POM dapat berkontribusi melalui penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang *real time* dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, patrol siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.

21) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan *omnibus law* yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Pengesahan Undang-Undang tersebut mendorong investasi dengan sistem perizinan yang sederhana. Proses perizinan kegiatan usaha kini telah diubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Sistem yang disebut Perizinan Berbasis Risiko bisa didapatkan secara daring melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Proses perizinan kegiatan usaha yang juga diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 termasuk juga perizinan Obat dan Makanan. Tantangan yang dihadapi BBPOM di Banjarmasin antara lain adanya masa peralihan proses perizinan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian pelaku usaha dalam perizinan terkait Obat dan Makanan; Koordinasi, sosialisasi dan bimbingan teknis yang belum optimal terkait peralihan proses perizinan Obat dan Makanan melalui OSS-RBA terhadap petugas yang berkaitan dengan pengawasan *premarket* Obat dan Makanan (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, Dinas Kesehatan dan dinas lain terkait) serta pelaku usaha; dan Masih banyaknya pelaku usaha yang kesulitan dan terkendala dalam menggunakan sistem online

1.4. Struktur Organisasi

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan dampak terhadap susunan organisasi Balai Besar POM di Banjarmasin, struktur Organisasi Balai Besar POM sebagai berikut :



Gambar 1.4.1. Struktur Organisasi Balai Besar POM

Pada struktur organisasi yang baru terdapat penyederhanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan organisasi unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional, ditetapkan Koordinator dan Subkoordinator yang bertugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan kelompok substansi masing-masing. Pejabat Eselon III atau Kepala Bidang berubah menjadi Koordinator Kelompok Substansi, sedangkan Pejabat Eselon IV atau Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian berubah menjadi Subkoordinator Subkelompok Substansi.

❖ **Kelompok Substansi Pengujian**

Tugas : Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Fungsi :

- penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

➤ **Subkelompok Substansi Pengujian Kimia ;**

Tugas : Melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.

➤ **Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi ;**

Tugas : Melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

❖ **Kelompok Substansi Pemeriksaan ;**

Tugas : Melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Fungsi :

- penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan;
- pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;

- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

➤ **Subkelompok Substansi Inspeksi ;**

Tugas : Melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

➤ **Subkelompok Substansi Sertifikasi;**

Tugas : Melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

❖ **Kelompok Substansi Penindakan**

Tugas : Melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

❖ **Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi**

Tugas : Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan informasi, komunikasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan informasi, komunikasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pengelolaan informasi, komunikasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

❖ **Bagian Tata Usaha**

Tugas : Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

➤ **Subkelompok Substansi Program & Evaluasi;**

Tugas : Melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

➤ **Subkelompok Substansi Umum;**

Tugas : Melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

❖ **Kelompok Jabatan Fungsional;**

Tugas: Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berikut struktur Organisasi Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 :



Gambar 1.4.2. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banjarmasin

1.5. Lingkungan Internal

Lingkungan internal yang berkorelasi secara langsung dengan upaya pencapaian target kinerja adalah tersedianya jumlah dan kompetensi SDM yang memadai dan ketersediaan sarana prasarana yang terkait langsung dengan pengawasan Obat dan Makanan.

1. Sarana Prasarana

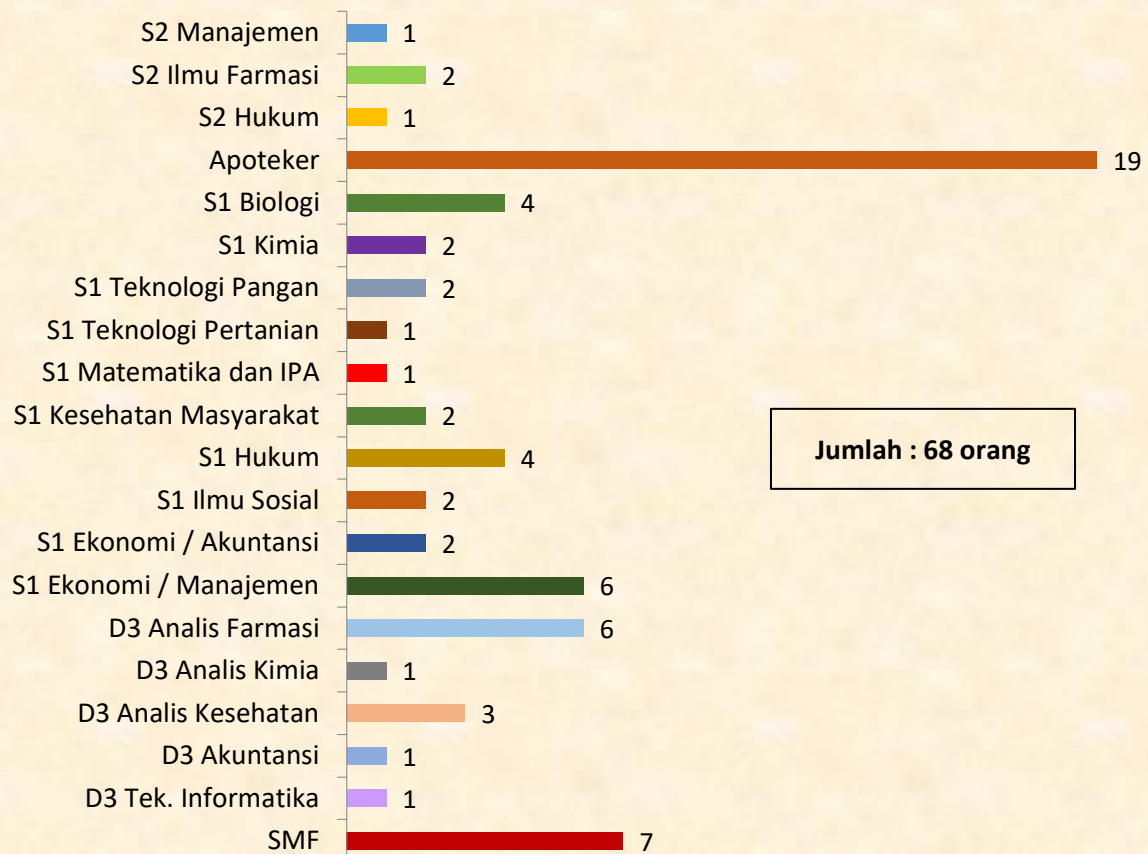
Ketersediaan sarana prasarana yang memenuhi standard secara memadai mutlak diperlukan agar BBPOM di Banjarmasin dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Ketersediaan sarana prasarana, terutama peralatan Laboratorium masih belum menggembirakan karena tingkat ketersediaannya pada tahun 2017 baru mencapai **74,1%**. Dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.04.18.2167 Tahun 2018 Tentang Standar Minimum Peralatan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, capaian terhadap Standar Minimum Peralatan Laboratorium turun menjadi **55,7%**, sehingga perlu dibuat roadmap prioritas pengadaan peralatan laboratorium untuk pemenuhannya mengingat anggaran yang diberikan tidak sekaligus, melainkan bertahap.

Sekaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan sistem pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan, harus dilakukan upaya perkuatan infrastruktur BBPOM di Banjarmasin beserta 2 Loka POM. Ketersediaan alat laboratorium terus diadakan setiap tahunnya namun demikian belum mencapai kondisi ideal dan masih memerlukan penambahan beberapa alat laboratorium utama seperti HPLC, FTIR, LC-MSMS dan alat untuk uji DNA babi. Akan tetapi mengingat keterbatasan ruang laboratorium maka pengadaan alat laboratorium dilakukan dengan skala prioritas. Kendala terhadap permasalahan keterbatasan ruangan laboratorium akan segera teratasi dengan telah mulai dilaksanakannya pembangunan gedung laboratorium kimia yang baru pada tahun 2018, di atas tanah hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berlokasi di kompleks Kantor Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

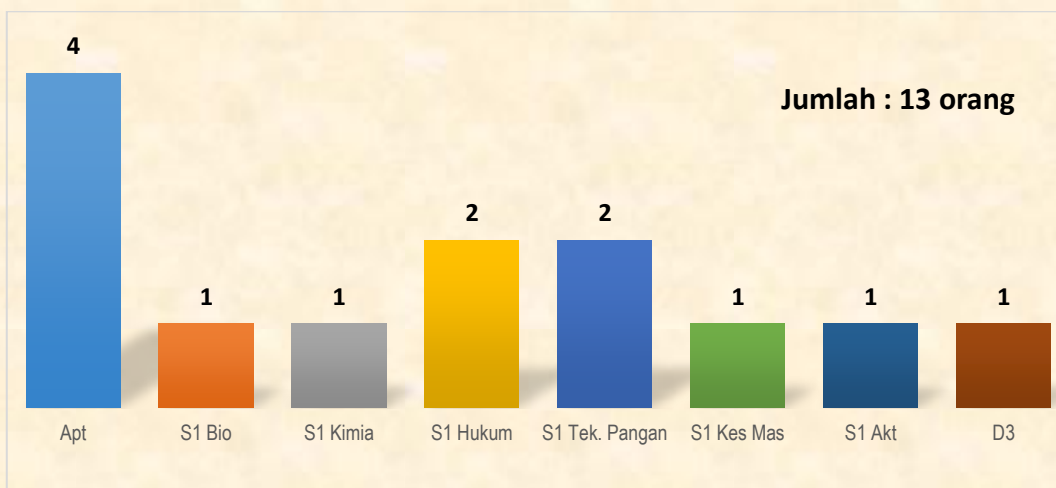
2. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Banjarmasin sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Banjarmasin untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun 2021 per Desember 2021 sejumlah 68 Orang dengan proporsi 66,18 % perempuan dan 33,82 % laki-laki.

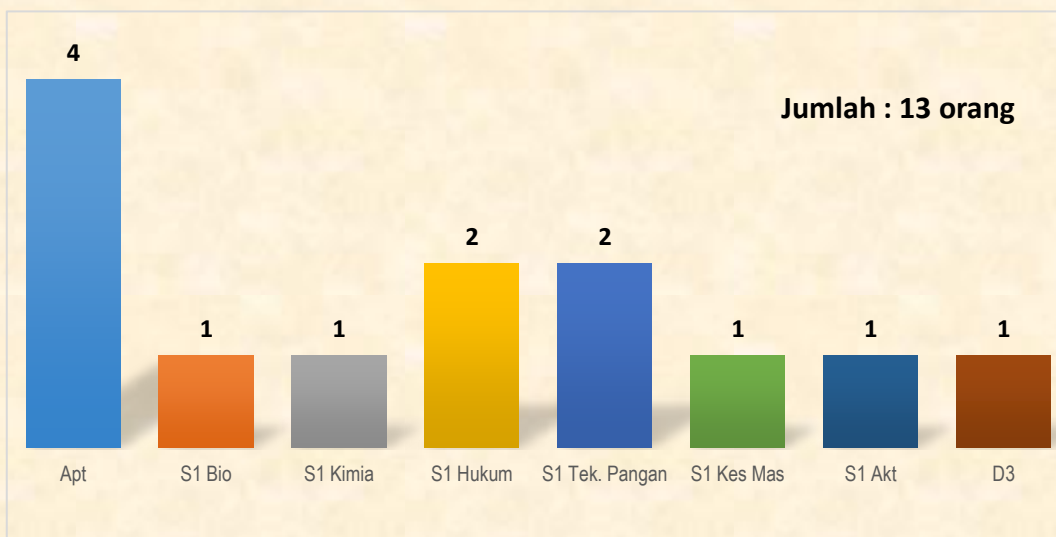
Berikut profil pegawai Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 berdasarkan tingkat pendidikan:



**Grafik 1.5.1. Profil Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021
Balai Besar POM di Banjarmasin**



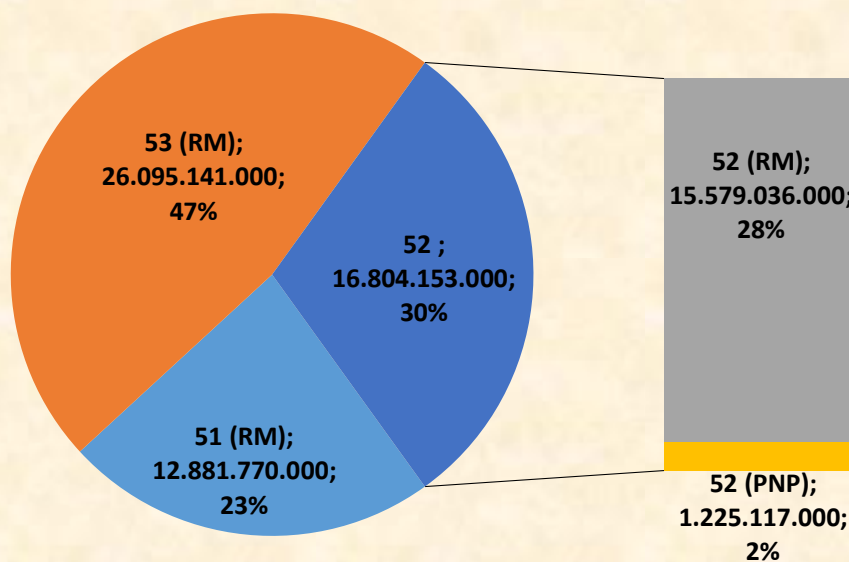
Grafik 1.5.2. Profil Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021
Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara



Grafik 1.5.3. Profil Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021
Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

3. Anggaran

Anggaran BBPOM di Banjarmasin dan 2 Loka POM bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2021 No. SP DIPA- 063.01.2.432881/2021 yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2020 sebesar **Rp. 55.781.064.000,-** (Lima Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah), dengan komposisi sesuai jenis belanja adalah sebagai berikut :



Grafik 1.5.1. DIPA BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021 - Awal

Dalam perjalanannya, terhadap anggaran tersebut terjadi beberapa perubahan komposisi anggaran baik berupa 3 kali refocussing APBNP , yaitu :

1. Refocussing APBNP Tahap II, tanggal 3 Juni 2021.

Pada refocussing ini dilakukan pemotongan anggaran belanja begawai, yaitu anggaran tunjangan kinerja yang disediakan untuk THR dan 13, sebesar Rp. 1.051.064.000,- sehingga sisa Pagu menjadi Rp.54.730.000.000,-

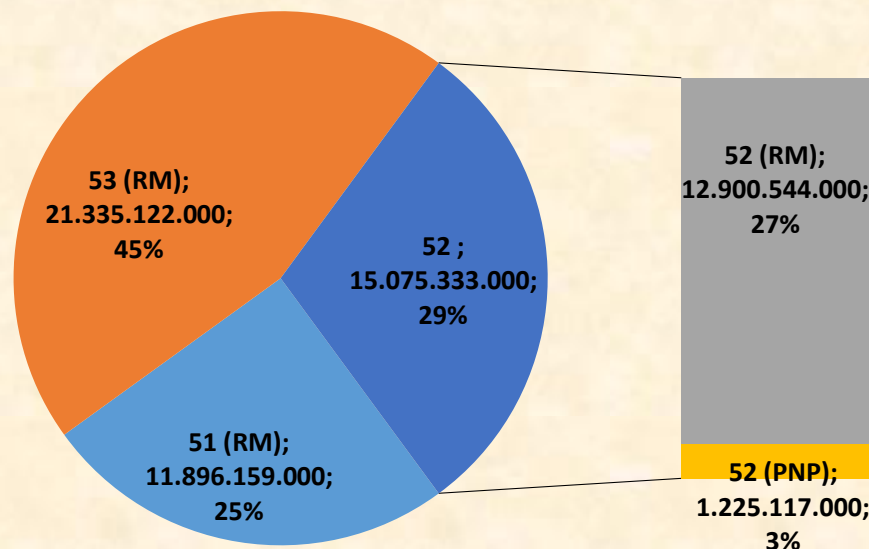
2. Refocussing APBNP Tahap III, tanggal 16 Juni 2021

Pada refocussing ini dilakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 3.346.378.000,- yang terdiri dari belanja barang sebesar Rp.1.617.558.000,- dan belanja modal sebesar Rp.1.728.620.000, sehingga sisa Pagu menjadi Rp.51.383.622.000,-

3. Refocussing APBNP Tahap IV, tanggal 5 Agustus 2021

Pada refocussing ini dilakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 4.026.680.000,- yang terdiri dari belanja barang sebesar Rp.884.219.000,- dan belanja modal sebesar Rp.3.142.461.000,- sehingga sisa Pagu menjadi Rp.47.356.942.000,-

Kemudian pada Revisi Pemutakhiran DIPA 2021, tanggal 09 Desember 2021 terjadi perubahan komposisi, dimana dilakukan penambahan anggaran untuk menutupi kekurangan belanja pegawai dari anggaran belanja barang, namun secara keseluruhan pagu tetap.



Grafik 1.5.2. DIPA BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021 – Revisi Pemutakhiran Data

1.6. Lingkungan Eksternal

1. Data Umum Wilayah Kerja

Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu dari 5 (lima) provinsi yang terletak di pulau Kalimantan, secara geografis antara : 114 19' 13" – 116 33' 28" Bujur Timur dan 1 21' 49" – 4 10' 14" Lintang Selatan. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah 37.530,52 km² yang secara Administratif wilayahnya terdiri dari 13 Kabupaten/Kota, 119 Kecamatan dan 1947 Desa/Kelurahan. Transportasi ke wilayah kerja melalui darat adalah sebesar 99,77%, melalui laut/selat 0,15%, melalui sungai 0,08%, dan melalui udara 0,00%. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja (diasumsikan ke Ibukota Kab/Kota) rata-rata 3,85 jam, dengan waktu terlama 8,50 jam dan waktu tersingkat 1 jam. Waktu untuk melaksanakan kegiatan di satu wilayah kerja rata-rata 2,75 hari dengan waktu terlama 4 hari dan tersingkat 1 hari.

Berdasarkan data dari website BPS Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2020 berjumlah 4.303.979 jiwa, dengan sebaran per kabupaten dan kota sebagai berikut :

Kabupaten / Kota	Jumlah (Jiwa)
TANAH LAUT	348.623
KOTABARU	347.399
BANJAR	596.001
BARITO KUALA	317.181
TAPIN	193.635
HULU SUNGAI SELATAN	240.279
HULU SUNGAI TENGAH	275.213
HULU SUNGAI UTARA	240.494
TABALONG	257.794
TANAH BUMBU	368.362

Kabupaten / Kota	Jumlah (Jiwa)
BALANGAN	133.274
BANJARMASIN	715.703
BANJAR BARU	270.021

Tabel 1.6.1. Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan

2. Jumlah Sasaran Pengawasan

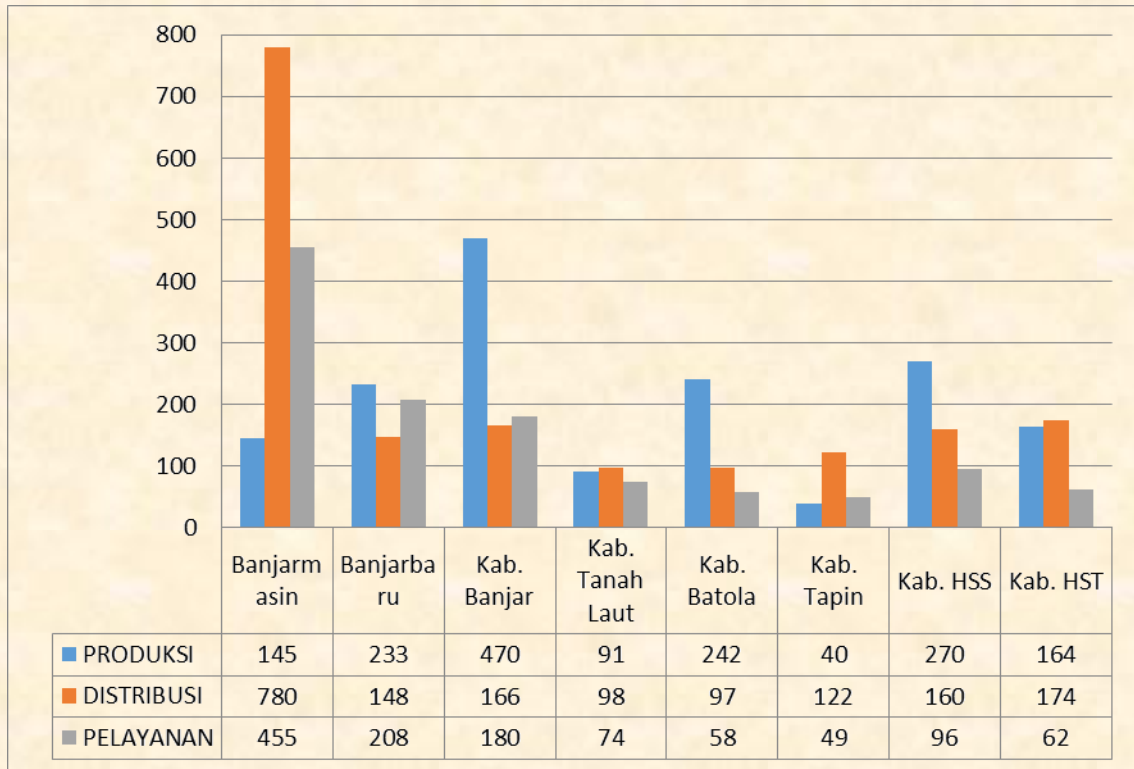
Sasaran pengawasan BBPOM di Banjarmasin (8 Kabupaten/Kota) sampai dengan akhir tahun 2021 berjumlah 4.582 sarana, yang terdiri dari 1.586 sarana produksi, 1.796 sarana distribusi, 1.131 sarana pelayanan dan 1.586 sarana IRTP sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini :

JENIS SARANA	PRODUKSI	DISTRIBUSI	PELAYANAN	Jumlah
Obat	-	51	1.131	1.182
Pangan MD	56	818	-	874
Kosmetika	9	481	-	490
Obat Tradisional	4	223	-	227
Suplemen Makanan	-	223	-	223
JUMLAH	69	1.796	1.131	2.996
IRTP	1.586			1.586

Tabel 1.6.2. Jumlah dan jenis Sasaran Pengawasan

Secara umum, sebaran sarana produksi dan distribusi/ pelayanan di Kalimantan Selatan sebagian besar berada di kota Banjarmasin sebagai Ibukota Provinsi, yaitu sebesar 30,12%, sisanya tersebar hampir merata di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota lainnya. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi di Kota Banjarmasin harus lebih intensif dengan proporsi yang lebih besar dibanding dengan kabupaten/kota lainnya.

Gambaran sebaran sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan pada setiap kabupaten/kota di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :



Grafik 1.6.1. Jumlah Sarana Per Kabupaten/Kota

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Visi Badan POM :

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

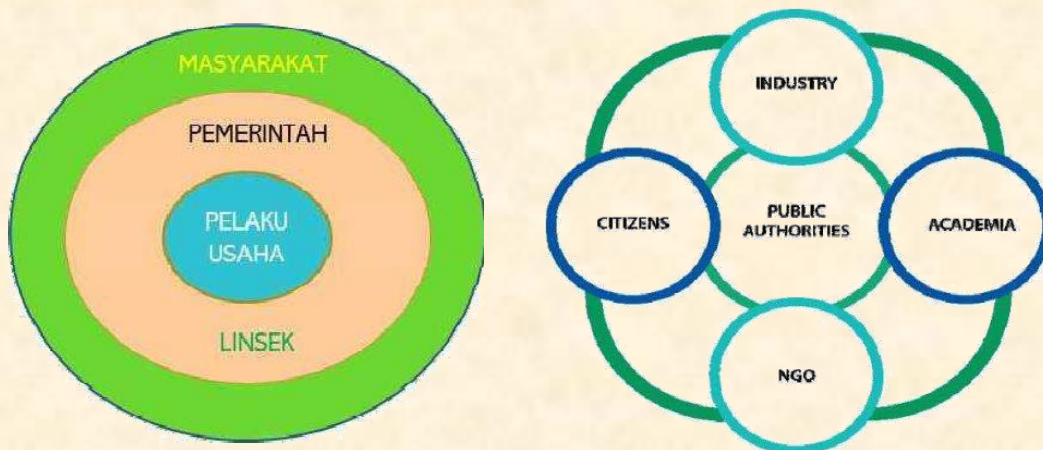
Misi Badan POM :

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Balai Besar POM di Banjarmasin kedepan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dari terhindar produk Obat dan Makanan yang membahayakan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Banjarmasin tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.1.1. Tiga Pilar dan Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain diantaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran dalam pengawawan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang ebih efektif.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Strategi untuk Makanan dan Minuman 4.0 diantaranya: Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring semakin meningkatnya permintaan konsumen.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, yang mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23% dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53%.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Demikian hanya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan *regulatory*, sehingga Balai Besar POM di Banjarmasin berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya

saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu Obat dan Makanan berupa pembinaan/pendampingan.

3. Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke-9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan melalui beberapa proses penting mulai dari *pre-market* (produk sebelum beredar) dan *post-market* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan yaitu :

a. Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat / manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi.

Dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Balai Besar POM di Banjarmasin dalam hal ini melakukan fungsi audit ke sarana produksi untuk memastikan bahwa sarana produksi tersebut sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan rekomendasi sebagai persyaratan registrasi ke Badan POM.

b. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan proses pengawasan yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kedaluwarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

c. Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/ manfaat dan Mutu Obat dan Makanan.

d. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

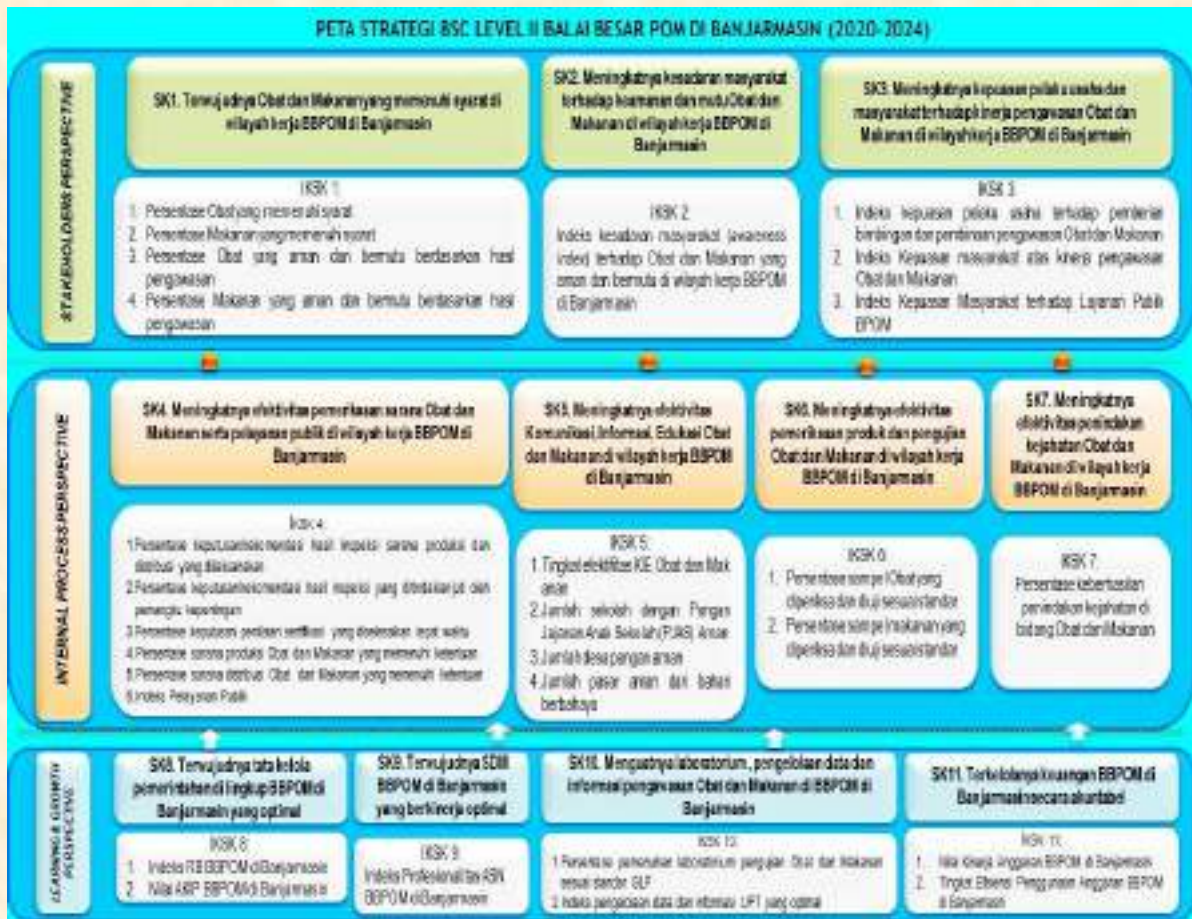
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap ini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai Besar POM di Banjarmasin juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.2. Sasaran Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin

Sasaran Strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Banjarmasin dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Banjarmasin. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Banjarmasin akan dapat mencapai Sasaran Strategis sebagaimana pada peta Strategis level II Balai Besar POM di Banjarmasin.

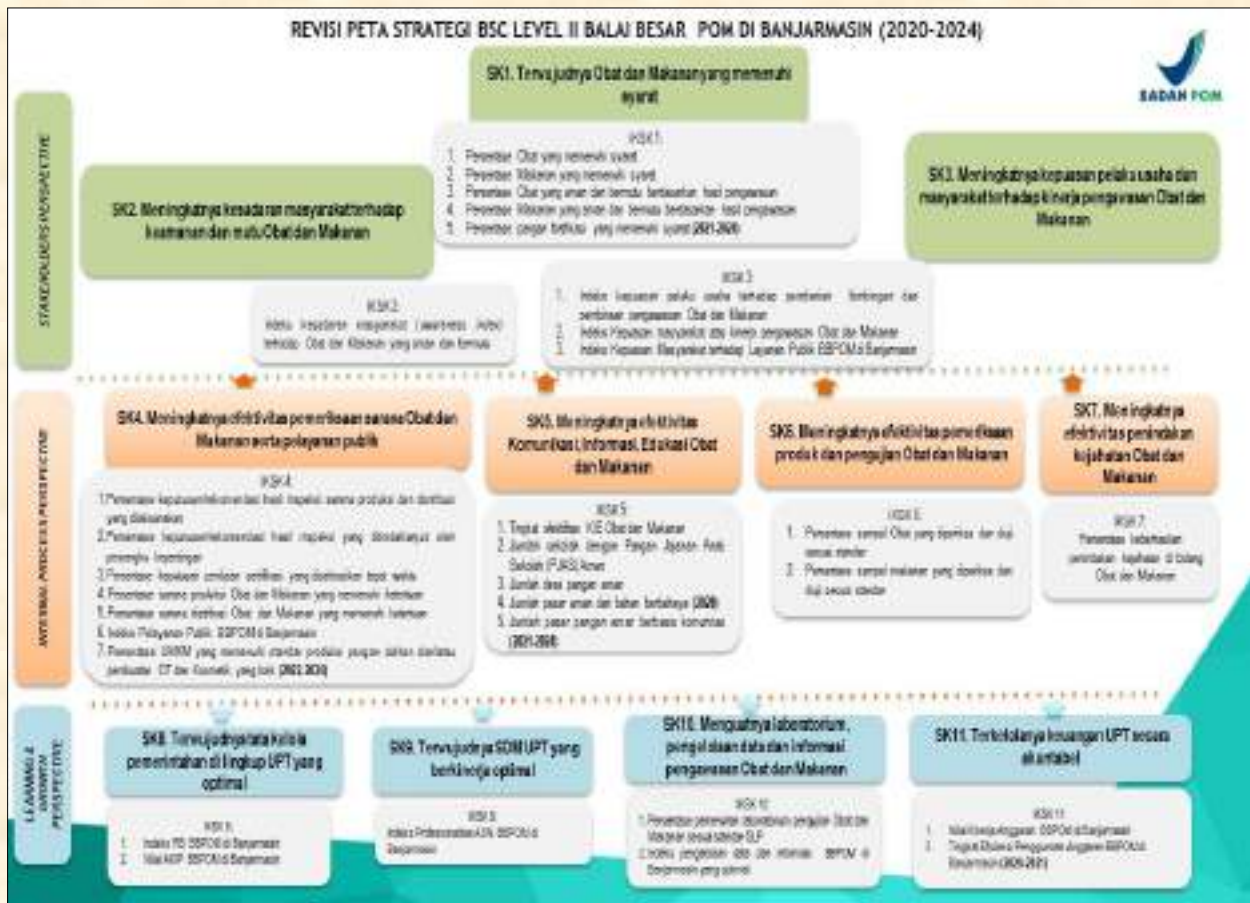
Berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024 yang disusun pada tahun 2020 telah ditetapkan Peta Strategis Level II sebagai berikut :



Gambar 2.2.1. Peta Strategis Level II Balai Besar POM di Banjarmasin

Namun seiring adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, yang didalamnya menyatakan tidak ada perubahan Peta Strategis level II, namun ada perubahan IKU dan targetnya.

Berikut adalah Peta Strategis Level II berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024 :



Gambar 2.2.2. Peta Strategis Level II Reviu Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024

Dan berikut adalah Sasaran Strategis Level II beserta Indikatornya berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024 :

PER SPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
<i>Stake holder</i>	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 1.1	Persentase obat yang memenuhi syarat
			IKSK 1.2	Persentase makanan yang memenuhi syarat
			IKSK 1.3	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 1.4	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 1.5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat (2021-2024)
	SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin
	SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
			IKSK 3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
			IKSK 3.3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

PER SPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
<i>Internal Process</i>	SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 4.1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK 4.2	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSK 4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSK 4.4	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 4.6	Indeks Pelayanan Publik
			IKSK 4.7	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik (2022-2024)
	SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 5.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
			IKSK 5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
			IKSK 5.3	Jumlah desa pangan aman
			IKSS 5.4	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (2020) • Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2021-2024)

PER SPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
		SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 6.1
			IKSK 6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IKSK 7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<i>Learning & Growth</i>	SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal	IKSK 8.1	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin
			IKSK 8.2	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin
	SK9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	IKSK 9.1	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin
	SK10	Menguatnya Laboratorim, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSK 10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
			IKSK 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal
	SK11	Terkelolana keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel	IKSK 11.1	Nilai kinerja anggaran BBPOM di Banjarmasin
			IKSK 11.2	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin (2020-2021)

Tabel 2.2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Level II Balai Besar POM di Banjarmasin

1. *Stakeholder Perspective:*

a. Sasaran Strategis ke-1 :

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Banjarmasin tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BB POM di Banjarmasin merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari :

- 1) Audit (*pre-market evaluation*) merupakan audit yang dilakukan kepada sarana produksi sebelum mengajukan permohonan nomor izin edar di BPOM akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen.
- 2) Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara konsisten, dan terstandar.
- 3) Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar

ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

- 4) Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka pelanggaran terhadap Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) :

- 1) **Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 85% di tahun 2024.**
- 2) **Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 83% di tahun 2024.**
- 3) **Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 76% di tahun 2024.**
- 4) **Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 86,7% di tahun 2024.**
- 5) **Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat, dengan target sebesar 95% di tahun 2024.**

Indikator ini sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan Balai Besar POM di Banjarmasin yaitu: "Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan

aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

b. Sasaran Strategis ke-2 :

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha di asumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BBPOM di Banjarmasin melalui kegiatan pembinaan dan

bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- 1) Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu, dengan target sebesar 89% di tahun 2024.**

c. Sasaran Strategis ke-3 :

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, dengan target sebesar 94,6 di akhir tahun 2024.**
- 2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 85,01 di akhir tahun 2024.**
- 3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target 92 di akhir tahun 2024.**

2. Internal Process Perspective:

a. Sasaran Strategis ke-4 :

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Banjarmasin, maka perlu disusun suatu strategis yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat. Karena pengawasan lintas sektor, BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 87% di tahun 2024.**
- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 70% di tahun 2024.**

- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 100% di tahun 2024.
- 4) Persentase produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 60% di tahun 2024.
- 5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 71% di tahun 2024.
- 6) Indeks Pelayanan Publik, dengan target sebesar 4,55 di tahun 2024.
- 7) Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik, dengan target sebesar 81% di tahun 2024.

b. Sasaran Strategis ke-5 :

Meningkatnya efektifitas komunikasi, Informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Banjarmasin melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- 1) **Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 95,5% di tahun 2024.**
- 2) **Jumlah sekolah dengan Pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, dengan target sebesar 100 di akhir tahun 2024.**
- 3) **Jumlah desa pangan aman, target 32 di akhir tahun 2024.**

- 4) Jumlah pasar aman berbasis komunitas, dengan target sebesar 10 di akhir tahun 2024

c. Sasaran Strategis ke-6 :

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Banjarmasin

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Banjarmasin mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Banjarmasin, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- 1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 100% di tahun 2024.
- 2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 100% di tahun 2024.

d. Sasaran Strategis ke-7 :

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam

mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Banjarmasin menjadi semakin kompleks.

Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Banjarmasin melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu: **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 96% di tahun 2024.**

3. Learning and Growth Perspective:

a. Sasaran Strategis ke-8 :

Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi andasan untuk memantapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah.

Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM) pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RG, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan roda penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan kekuatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk menguatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utamanya (IKU) adalah:

- 1) Nilai Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target 88,3 pada akhir 2024.**
- 2) Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target 84,1 pada akhir 2024.**

b. Sasaran Strategis ke-9 :

Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan ini dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target 84 di tahun 2024.**

c. Sasaran Strategis ke-10 :

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data, dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan databasenya belum diupdate secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah :

- 1) **Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target sebesar 88% di tahun 2024.**
- 2) **Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal, target sebesar 3 di tahun 2024.**

d. Sasaran Strategis ke-11:

Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke- 10, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- 1) **Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target sebesar 95,5 di tahun 2024.**
- 2) **Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target sebesar 92% di tahun 2021.**

Berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2021 versi Rensra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024, yang berlaku pada bulan Januari sampai dengan September 2021 :

PER SPEKTIF	SK	IK	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
Stake holder	SK 1	1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	
		1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	
		1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	
		1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	
	SK 2	2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	71	
	SK 3	3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,5	
		3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat & Makanan	75	
		3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	90,55	
	Internal Process	SK 4	4.1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
			4.2	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
4.3			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	
4.4			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	35	
4.5			Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	
4.6			Indeks Pelayanan Publik	3,46	
SK 5		5.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	83,73	

PER SPEKTIF	SK	IK	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		5.3	Jumlah desa pangan aman	12
		5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4
	SK 6	6.1	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	90
		6.2	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	90
	SK 7	7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	83
	Learning and Growth	SK 8	8.1	Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin
8.2			Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin	84
SK 9		9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin	77
SK 10		10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	77
		10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	2
SK 11		11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	94
		11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	Efisien (92%)

Kegiatan	Anggaran (Rp)
1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	37.769.707.000,-
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	18.011.357.000,-
Jumlah	55.781.064.000,-

Tabel 2.2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021
Versi Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024

Dan berikut adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2021 versi Reviu Rensra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024, yang berlaku mulai bulan Oktober 2021 :

PER SPEKTIF	SK	IK	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Stake holder	SK 1	1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	82
		1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70
		1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,5
		1.5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	92
	SK 2	2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
	SK 3	3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91,1
		3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat & Makanan	78,33
		3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	90
	Internal Process	SK 4	4.1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
4.2			Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
4.3			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
4.4			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	45
4.5			Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
4.6			Indeks Pelayanan Publik	3,91

PER SPEKTIF	SK	IK	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
	SK 5	5.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90	
		5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	
		5.3	Jumlah desa pangan aman	12	
		5.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas *)	4	
	SK 6	6.1	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	100	
		6.2	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	100	
	SK 7	7.1	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	90	
	Learning and Growth	SK 8	8.1	Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin	80,8
			8.2	Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin	78,1
		SK 9	9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin	81
SK 10		10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	73	
		10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	2	
SK 11		11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	92,5	
	11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	Efisien (92%)		

Kegiatan	Anggaran
1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	30.396.649.000
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	16.960.293.000
Jumlah	47.356.942.000

Tabel 2.2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021
Versi Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024

*) Perubahan nomenklatur pada IK 5.4 dari Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi Pasar Aman berbasis Komunitas.

2.3. Kriteria Pencapaian Indikator

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria	Rentang Capaian Lapkin 2020
Sangat Kurang	<50
Kurang	50 - <70
Cukup	70 - <90
Baik	90 - <110
Sangat Baik	110 - 120
Tidak dapat disimpulkan	> 120

Tabel 2.3.1. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja Perjanjian

2.4. Pengukuran efisiensi kegiatan

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \times 100\% = 1$$

Kriteria Tingkat Efisiensi Kegiatan :

- ✓ Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
- ✓ Tidak Efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja. Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021, BBPOM di Banjarmasin berkewajiban untuk mencapai target-target sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi. Pengukuran capaian kinerja organisasi dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja .

Dalam menganalisa capaian kinerja untuk memperoleh banyak informasi yang dapat dimanfaatkan dalam perumusan perbaikan capaian kinerja, dilakukan beberapa perbandingan, yaitu membandingkan antara target dengan realisasi di tahun 2021, membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun 2018, 2019 dan 2020, dan membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target nasional 2021, target Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2022 sebagai tahun yang sedang dijalani dan tahun 2024 sebagai tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dilakukan juga perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan capaian kinerja tahun 2020 dari 3 (tiga) Balai Besar/ Balai POM lainnya yang tergabung dalam Kluster 4, yaitu Balai Besar POM di Bandar Lampung, Balai POM di Bengkulu dan Balai **Besar** POM di Manado.

Berdasarkan hasil perbandingan antara target dengan realisasi indikator kinerja tahun 2021, diperoleh Nilai Pencapaian Strategis (NPS) yang dicapai Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020 adalah 101,69 dengan kriteria Baik, yang merupakan rata-rata dari 3 (tiga) Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Perspektif, yaitu :

No.	Perspektif	Nilai	Kriteria
1	<i>Stakeholder</i>	99,74	Baik
2	<i>Internal Process</i>	104,04	Baik
3	<i>Learning and Growth</i>	101,28	Baik
	NPS	101,69	Baik

Tabel 3.1.1. Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Perspektif Tahun 2021

Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Perspektif merupakan rata-rata dari Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Sasaran Keegiatannya masing-masing, yaitu :

No.	Sasaran Kegiatan	Nilai	Kriteria
A	<i>Perspektif Stakeholder</i>		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	102,73	Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	97,63	Baik
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	98,86	Baik
	NPS Perspektif <i>Stakeholder</i>	99,74	Baik
B	<i>Perspektif Internal Process</i>		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	109,31	Baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	100,70	Baik

No.	Sasaran Kegiatan	Nilai	Kriteria
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	100	Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	106,14	Baik
	NPS Perspektif <i>Internal Process</i>	104,04	Baik
C	<i>Perspektif Learn and Growth</i>		
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal	98,72	Baik
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin	102,58	Baik
10	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	100,90	Baik
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara Akuntabel	102,93	Baik
	NPS Perspektif <i>Learn and Growth</i>	101,28	Baik
	NPS Total	101,69	Baik

Tabel 3.1.2. Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Sasaran Kegiatan Tahun 2021

Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Sasaran Kegiatan merupakan rata-rata dari Nilai Pencapaian Strategis (NPS) tingkat Indikator Kinerja masing-masing, sebagai mana tabel pada lampiran dalam laporan ini. Dalam tabel tersebut telah dilakukan penyesuaian hasil perhitungan NPS dengan batas tertinggi NPS adalah 120%, namun pada tahun 2021 ini tidak terdapat capaian Indikator Kinerja yang melebihi 120%.

Nilai Pencapaian Strategis (NPS) Balai Besar POM di Banjarmasin sebagaimana tersebut di atas belum optimal dan masih jauh dari kriteria yang diharapkan yaitu Sangat Baik. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal, yang dapat dilihat dari analisis akuntabilitas kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021.

3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya manusia dan anggaran dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dan saling berhubungan. Dalam pelaksanaannya, Renstra akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja yang memuat prioritas program dan kegiatan untuk waktu satu tahun anggaran.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, yang mengacu kepada Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan, nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan (SK) Balai Besar POM di Banjarmasin (level 2) yang diturunkan dari Sasaran Strategis (SS) level 0 Kepala Badan POM, dimana pada tiap Sasaran Kegiatan terdapat satu atau lebih Indikator Kinerja, dengan jumlah seluruhnya 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja, yang menjadi ukuran keberhasilan suatu Sasaran Kegiatan.

Pada tahun 2021, capaian kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Stakeholder Perspective							
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	82	78,30	95,49	Baik
		IK 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	84,86	106,07	Baik
		IK 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70	76,06	108,65	Baik
		IK 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,5	89,12	104,23	Baik
		IK 1.5	Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	92	91,25	99,18	Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	81	79,08	97,63	Baik
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	91,1	92,30	101,32	Baik
		IK 3.2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	78,33	73,03	93,23	Baik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
		IK 3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	90	91,83	102,03	Baik
Internal Process Perspective							
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	82	92,4	112,68	Sangat Baik
		IK 4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	60	71,79	119,65	Sangat Baik
		IK 4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	100	100,00	100,00	Baik
		IK 4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	45	50,67	112,59	Sangat Baik
		IK 4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	63	68,77	109,16	Baik
		IK 4.6	Indeks Pelayanan Publik	3,91	3,98	101,79	Baik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	90	92,51	102,79	Baik
		IK 5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	40	40,00	100,00	Baik
		IK 5.3	Jumlah desa pangan aman	12	12,00	100,00	Baik
		IK 5.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	4,00	100,00	Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100,00	100,00	Baik
		IK 6.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100,00	100,00	Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di BBPOM di Banjarmasin	IK 7.1	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan Makanan	90	95,53	106,14	Baik
Learning & Growth Perspective							
8	Terwujudnya organisasi BBPOM di Banjarmasin yang efektif	IK 8.1	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	80,8	80,76	99,95	Baik
		IK 8.2	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	78,1	76,14	97,49	Baik
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	IK 9.1	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	81	83,09	102,58	Baik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
10	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IK 10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	73	73,40	100,55	Baik
		IK 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	2	2,03	101,25	Baik
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel	IK 11.1	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	92,5	89,87	97,16	Baik
		IK 11.2	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin	Efisien (92%)	Efisien (100%)	108,70	Baik

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel diatas Analisis Akuntabilitas Kinerjanya adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1 :

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Sasaran Kegiatan ini memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja, dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

Indikator Kinerja 1.1. :

Persentase Obat yang memenuhi syarat

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
82	78,30	95,49	Baik

Tabel 3.2.1.1.1. Realisasi Kinerja IK.1.1 Tahun 2021

Persentase Obat yang memenuhi syarat (MS) dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Obat Acak MS s. d. Triwulan } n}{\text{Total Obat Acak Diperiksa dan Diuji s. d. Triwulan } n} \times 100$$

Sesuai Renstra 2020-2024, definisi "Obat" pada indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat adalah Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disampling secara acak. Sampling dilakukan terhadap Obat yang beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar sesuai dengan kerangka sampling di tahun berjalan agar sampling yang dilakukan lebih representatif dengan memperhatikan jenis produk beredar di masyarakat.

Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi :

- 1) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya) ;
- 2) Produk kedaluarsa ;

- 3) Produk rusak ;
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan (kriteria baru); dan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

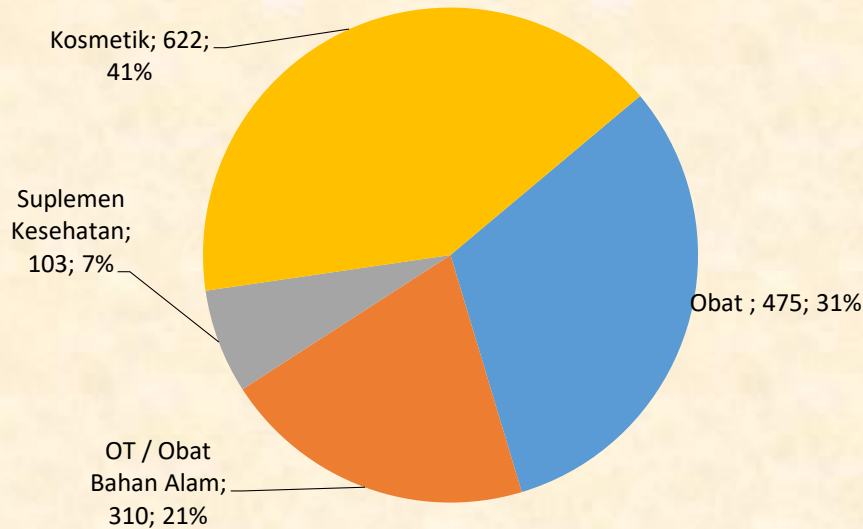
Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Semula	80,8	83,6	86,6	90	92,3
Menjadi	78,05 (Realisasi)	82	83	84	85

**Tabel 3.2.1.1.2. Perubahan Target IK 1.1.
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024**

Pada tahun 2021 jumlah target Sampel Obat Acak pada Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebanyak 1.510 sampel, dengan perincian per komoditi :



Grafik 3.2.1.1.1. Komposisi Sampel Obat Acak Tahun 2021

Sedangkan berdasarkan wilayah pengambilan, jumlah target Sampel Obat Acak yang diambil di:

1. wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin adalah sebanyak 1.216 sampel,
2. wilayah kerja Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara sebanyak 160 sampel
3. wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 134 sampel.

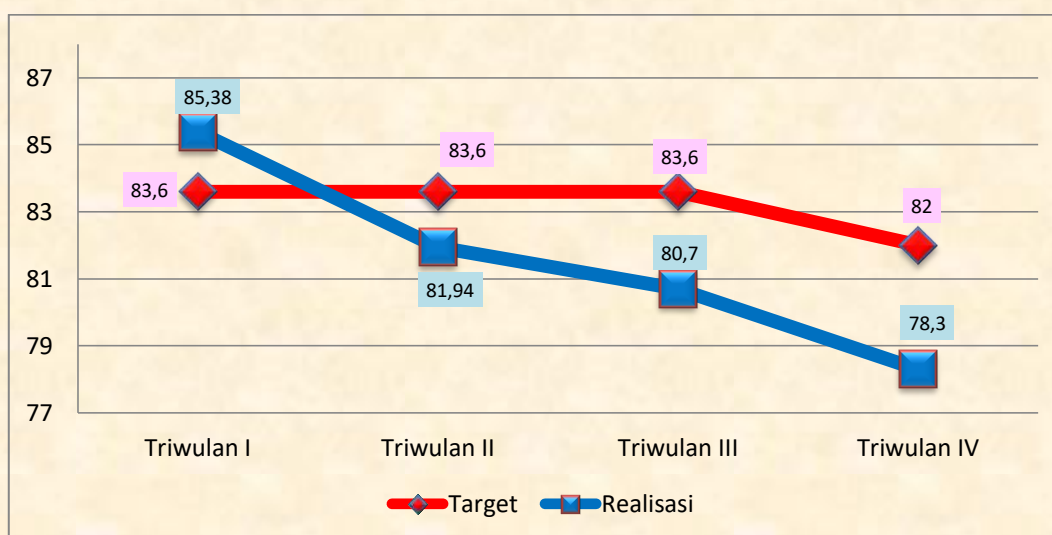
Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan tahun 2021, diperoleh data jumlah sampel Obat yang diperiksa dan diuji sebanyak 1.507 sampel dan yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 1.180 sampel atau 78,43%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel sebanyak 1.507 sampel, sudah mencapai 99,80% dari target Sampel Obat Acak yaitu 1.510 sampel, sedangkan 3 sampel Obat Acak telah dialihkan ke Obat Targeted sesuai ketersediaan di sarana distribusi/pelayanan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komoditi	Jumlah Sampel	Jumlah MS	%MS
a.	Obat	474	471	99,37
b.	Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	310	261	84,19
c.	Suplemen Kesehatan	103	96	93,20
d.	Kosmetik	620	352	56,77
Jumlah seluruhnya		1.507	1.180	78,30

Tabel 3.2.1.1.3 Sampel Obat Acak per Komoditi Tahun 2021

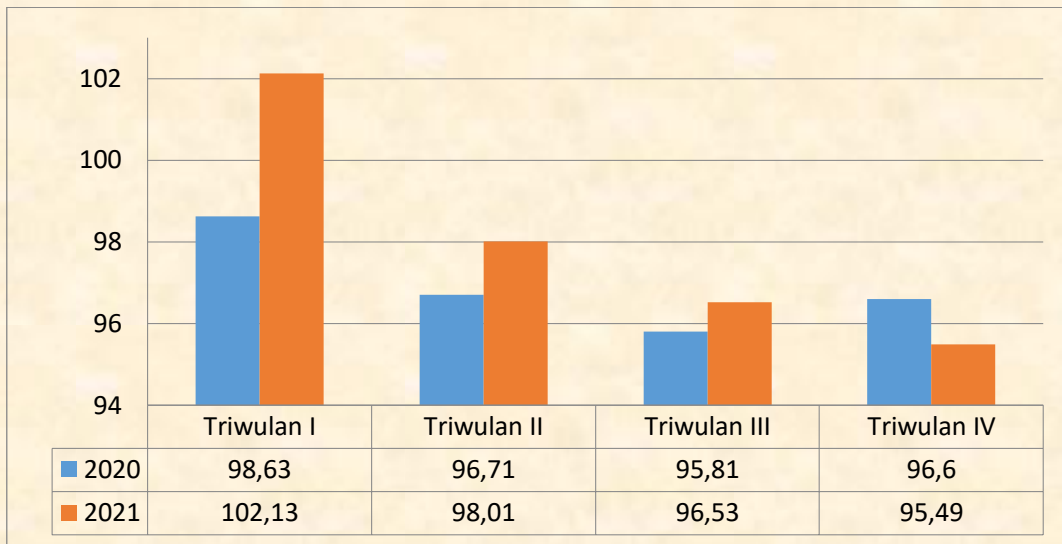
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 4 komoditi Sampel Obat Acak, Kosmetik menyumbangkan persentase sampel MS terendah (56.77%) sehingga tidak dapat mencapai target IKU.

Jika dilihat berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap triwulan sampai dengan akhir tahun 2021, diperoleh data sebagai berikut :



Grafik 3.2.1.1.2. Realisasi Kinerja IK.1.1 Pertriwulan Tahun 2021.

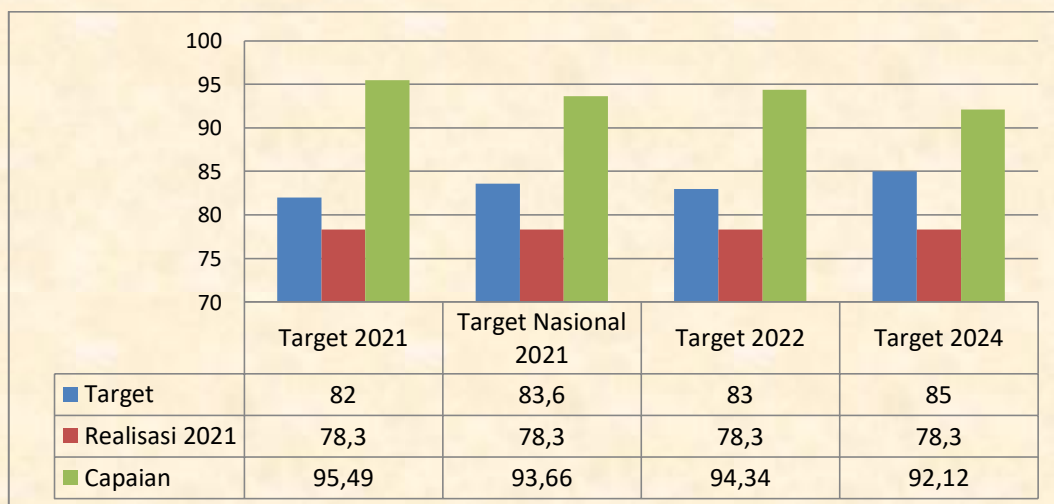
Apabila capaian kinerja per triwulan tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja per triwulan tahun 2020, tergambar pada grafik berikut :



Grafik 3.2.1.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 1.1. Tahun 2020-2021

Dapat terlihat bahwa terjadi penurunan capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2021 dibanding triwulan IV tahun 2020 karena adanya kriteria baru sebagai penyebut (bilangan pembagi) yaitu sampel yang tidak memenuhi ketentuan penandaan.

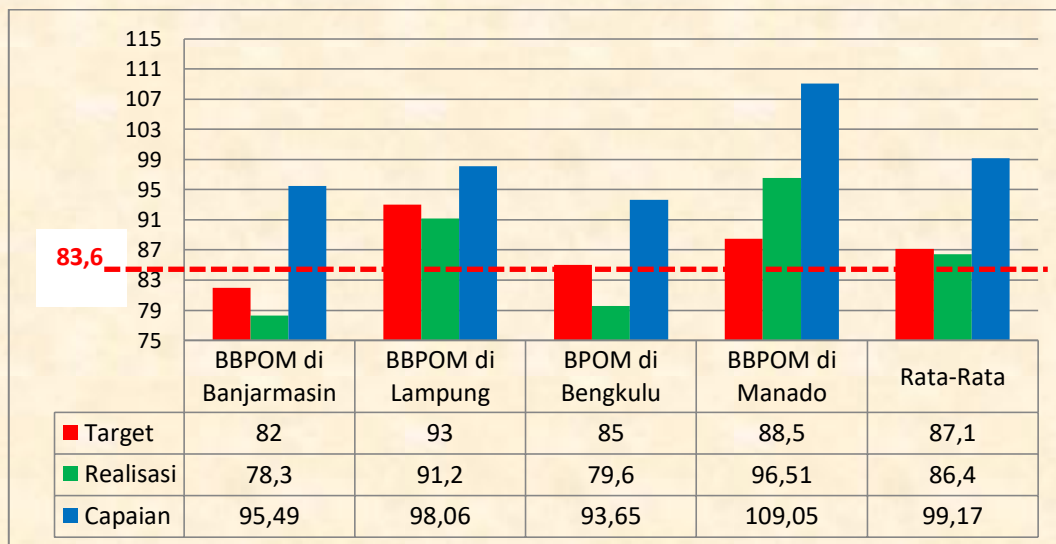
Realisasi kinerja tahun 2021 yang diperoleh apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :



Grafik 3.2.1.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.1.1 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024

Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 85%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 92,12% dengan kriteria "baik", namun masih perlu dilakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sehingga capaian kinerja tetap dipertahankan dalam kriteria "baik" atau ditingkatkan menjadi "sangat baik".

Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat pada Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 berada di posisi ke-3 dibandingkan dengan Balai Besar/Balai POM seklaster, yaitu sebagai berikut:



----- = Target Nasional tahun 2021 sebesar 83,6 %

**Grafik 3.2.1.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.1.1
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

Balai Besar POM di Banjarmasin telah berhasil mencapai target tahun 2021 dengan kriteria baik, dengan capaian 95,49%. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Pembinaan kepada sarana produksi dalam pemenuhan ketentuan pemerintah (CPOB/CPOTB/CPKB) serta mendorong tingkat kemandirian industri.

- b) Pemeriksaan dan pembinaan sarana distribusi obat sesuai dengan pedoman inspeksi yang diterbitkan oleh Badan POM agar para pelaku usaha turut serta menjamin bahwa produk yang didistribusikan merupakan produk yang legal, tidak kadaluwarsa dan tidak rusak.
- c) Memberikan KIE tentang produk Obat yang tidak memenuhi persyaratan mutu, tanpa izin edar melalui akun media sosial BBPOM di Banjarmasin (website, instagram, twitter, facebook), leaflet, brosur, pameran, talkshow di televisi/radio, dan penyuluhan agar diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan produk farmasi.
- d) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen.
- e) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

Sementara itu, terdapat faktor-faktor yang menghambat pencapaian keberhasilan tersebut, antara lain:

- a) Sampel Kosmetik dan Obat Tradisional yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) menghadapi kendala yaitu keterbatasan variasi jenis produk dan jumlah.
- b) Dari 1.507 sampel Obat yang disampling, terdapat 5 sampel yang tidak diuji (karena 3 sampel TIE dan 2 sampel kedaluarsa) dan 1.502 sampel yang diuji laboratorium. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium dan evaluasi penandaan, sebanyak 1.806 sampel memenuhi syarat (MS) dan 327 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Dari jumlah sampel TMS tersebut, sebanyak 29 sampel TMS uji laboratorium meskipun MK penandaan, 289 sampel TMK penandaan meskipun uji laboratoriumnya MS, 4 sampel TMS uji laboratorium sekaligus TMK penandaan, serta sisanya adalah 5 sampel TIE/kedaluarsa. Sampel yang tidak memenuhi

ketentuan (TMK) penandaan memiliki jumlah yang paling besar, terutama berasal dari produk Kosmetika hal ini disebabkan karena sistem perizinan Kosmetika berupa notifikasi sehingga tidak dilakukan evaluasi per market mengakibatkan masih terdapat penandaan produk kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan. Sebagai tindak lanjut perlu terus dilakukan pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap penandaan yang tidak memenuhi ketentuan.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat pada triwulan IV tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 426.642.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 426.612.908,- atau 99,99%. Dari data tersebut capaian efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 0,95 dengan tingkat efisiensi sebesar -0,05 sehingga capaian efisiensi pada triwulan IV tahun 2021 sebesar 75% (**Tidak Efisien**).

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
95,49 %	99,99 %	0,95	-0,05	75%	Tidak Efisien

Tabel 3.2.1.1.4. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 1.1. Tahun 2021

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase Obat yang memenuhi syarat antara lain:

- a) Sampling acak yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu terhadap sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dilaksanakan tepat waktu dalam satu tahun periode yaitu sebanyak 1507 sampel. Kegiatan sampling tersebut dilakukan terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat.

- b) Pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi yang beredar di pasaran.
- c) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen.
- d) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

Tindak lanjut hasil evaluasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi persentase Obat yang memenuhi syarat antara lain:

- a) Pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap produk Kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan penandaan.
- b) Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait Tata Cara Distribusi yang Baik.
- c) Peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi Obat.
- d) Peningkatan kegiatan sosialisasi/publikasi tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat termasuk penyebaran informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat tentang adanya Public Warning Obat yang diterbitkan oleh Badan POM.
- e) Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan KIE.
- f) Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana distribusi Obat serta masyarakat tentang Obat yang memenuhi ketentuan.
- g) Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justitia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Izin Edar (TIE).
- h) Meningkatkan kompetensi petugas.
- i) Membuat sistem yang memastikan kegiatan pengawasan sarana tetap berjalan secara komprehensif, efektif, dan efisien di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun realisasi Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 belum berhasil mencapai target, hanya memperoleh capaian 95,65%, namun pelaksanaan kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini dapat dikategorikan berhasil, dan Balai Besar POM di Banjarmasin optimis akan mampu mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

Indikator Kinerja 1.2 :

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
80	84,86	106,07	Baik

Tabel 3.2.1.2.1. Realisasi Kinerja IK.1.2 Tahun 2021

Persentase Makanan yang memenuhi syarat (MS) dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Makanan Acak MS s.d Triwulan } n}{\text{Total Makanan Acak Diperiksa dan Diuji s.d Triwulan } n} \times 100$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar sesuai dengan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat meliputi i:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya);
- 2) Produk kedaluarsa;
- 3) Produk rusak;
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label (kriteria baru); dan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

Tahap pemeriksaan hasil sampling produk Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5.

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Persentase Makanan yang memenuhi syarat, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Semula	78	80	82	84	86
Menjadi	81,54 (Realisasi)	80	81	82	83

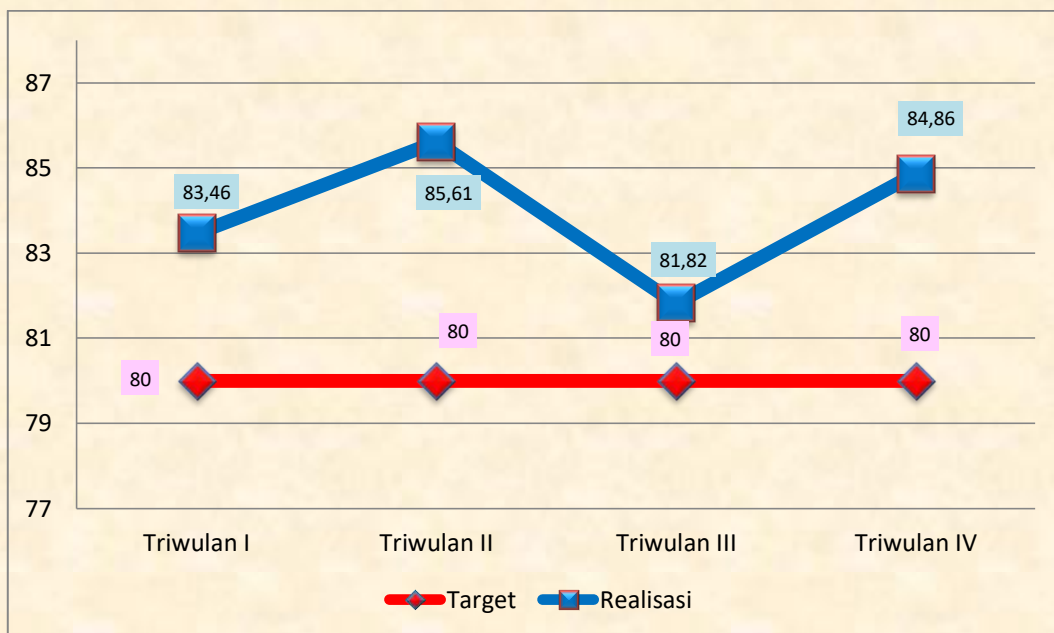
**Tabel 3.2.1.2.2. Perubahan Target IK 1.2.
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024**

Pada tahun 2021 jumlah target Sampel Makanan Acak pada Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebanyak 601 sampel, dengan perincian berdasarkan wilayah pengambilan, jumlah target Sampel Makanan Acak yang diambil/ disampling di:

1. wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebanyak 543 sampel,
2. wilayah kerja Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara sebanyak 29 sampel
3. wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 29 sampel.

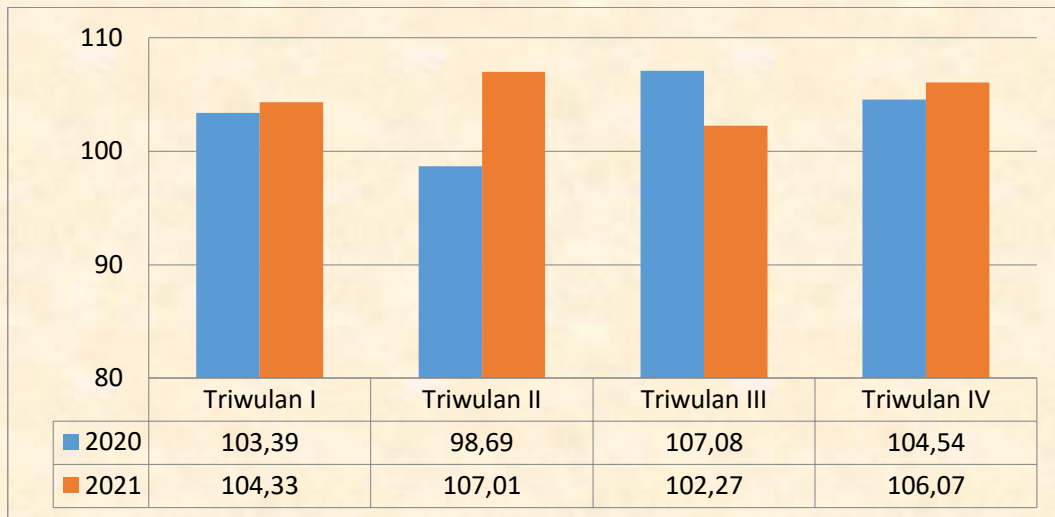
Berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan tahun 2021, diperoleh data jumlah sampel yang Memenuhi Syarat adalah 510 sampel dari 601 Sampel yang diperiksa dan diuji atau 84,86%, tergambar bahwa pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel sebanyak 601 sampel, sudah mencapai 100,00% dari target Sampel Makanan Acak yaitu 601 sampel.

Jika dilihat berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap triwulan sampai dengan akhir tahun 2021, diperoleh data sebagai berikut :



Grafik 3.2.1.2.1. Realisasi Kinerja IK.1.2 Pertriwulan Tahun 2021

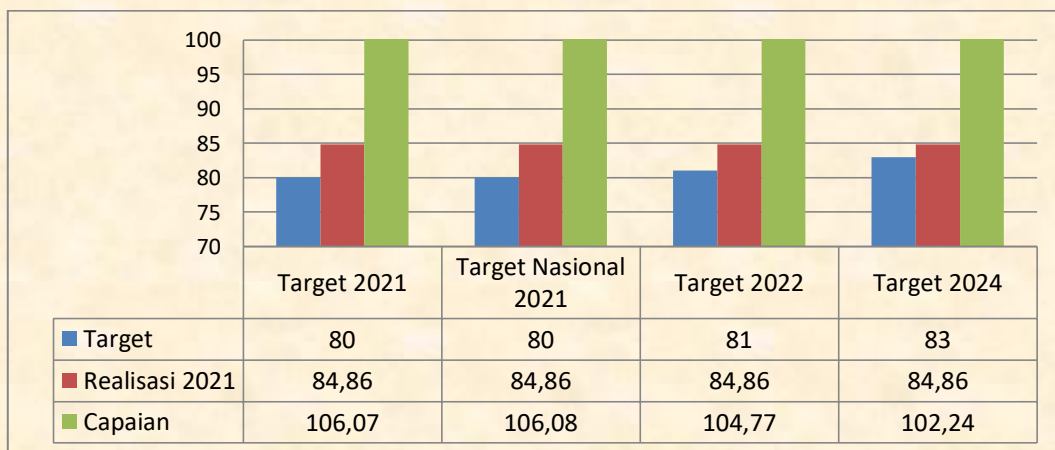
Apabila capaian kinerja pertriwulan tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pertriwulan tahun 2020, akan tergambar sebagaimana grafik berikut:



Grafik 3.2.1.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 1.2 Tahun 2020-2021

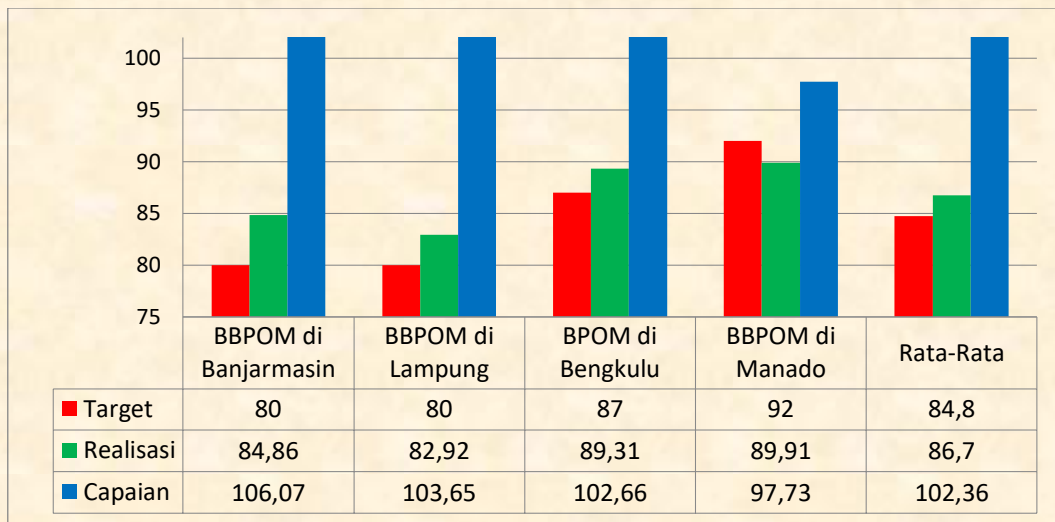
Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja pada akhir tahun 2021 dibanding tahun 2020, dari capaian sebesar 104,54% menjadi 106,07 %.

Realisasi kinerja yang diperoleh tersebut apabila dibandingkan dengan target triwulanan dan target tahunan tahun 2021 serta target akhir renstra tahun 2024, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :



Grafik 3.2.1.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.1.2 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024

Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat pada Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 berada di posisi pertama dibandingkan dengan Balai Besar/Balai POM seklastr 4, yaitu sebagai berikut :



**Grafik 3.2.1.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.1.2
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

Balai Besar POM di Banjarmasin telah berhasil mencapai target tahun 2021 dengan kriteria baik, dengan capaian 106,07%. Keberhasilan ini didorong oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Meningkatnya pemahaman terkait ketentuan label pangan yang beredar.
- Menurunnya peredaran Produk Pangan TIE (Tanpa Izin Edar) dan Produk Pangan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di wilayah Kalimantan Selatan baik dengan nomor izin edar MD atau PIRT.
- Penerapan sanksi administrasi maupun pro justitia kepada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang Makanan.
- Pemberian KIE tentang produk Makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, tanpa izin edar melalui akun media sosial BBPOM di Banjarmasin (website, instagram, twitter, facebook), leaflet, brosur, pameran, talkshow di televisi/radio, dan penyuluhan agar diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan produk Makanan.

- e) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen.
- f) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 233.876.400,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 233.862.186,- atau 99,99% , dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 1,06 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,06 sehingga capaian efisiensi pada tahun 2021 sebesar 100% (**Efisien**).

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
106,07%	99,99 %	1,06	0,06	100%	Efisien

Tabel 3.2.1.2.3. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 1.2. Tahun 2021

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase Makanan yang memenuhi syarat antara lain:

- a) Pembinaan dan pendampingan intensif kepada pelaku usaha dalam rangka permohonan izin produksi, berupa bimbingan teknis UMKM dan bantuan uji laboratorium untuk pendaftaran pangan pada UMKM.
- b) Kegiatan bersama lintas sektor untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pangan aman.
- c) Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan
- d) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017

yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen.

- e) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

Tindak lanjut hasil evaluasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi persentase Obat yang memenuhi syarat antara lain:

- a) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi standar melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat maupun publikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- b) Meningkatkan pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi tentang peraturan terkait Obat dan Makanan, Publik Warning System Obat dan Makanan yang diterbitkan oleh BPOM kepada masyarakat luas melalui media sosial, media masa melalui talkshow bekerjasama dengan radio dan televisi serta kerjasama dengan stakeholder antara lain instansi terkait, organisasi masyarakat dan organisasi profesi dalam pelaksanaan KIE melalui daring.
- c) Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi serta publikasi iklan layanan masyarakat.
- d) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi ketentuan.

Berdasarkan uraian di atas, realisasi Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 telah berhasil mencapai target dengan capaian 106,07%, dan realisasi ini juga telah berhasil melampaui target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM dengan capaian 102,36%.

Indikator Kinerja 1.3 :

Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
70	76,06	108,65	Baik

Tabel 3.2.1.3.1. Realisasi Kinerja IK.1.3 Tahun 2021

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ Obat Aman} = \frac{\text{Jumlah Obat Targeted MS s.d Triwulan } n}{\text{Total Obat Targeted Diperiksa dan Diuji s.d. Triwulan } n} \times 100$$

Sesuai Renstra 2020-2024, definisi "Obat" pada indikator kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan adalah Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disampling secara targeted/*purposive*. Yang dimaksud dengan bermutu adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/*purposive* di tahun berjalan.

Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya);
- 2) Produk kedaluarsa;
- 3) Produk rusak;
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan (kriteria baru); dan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana

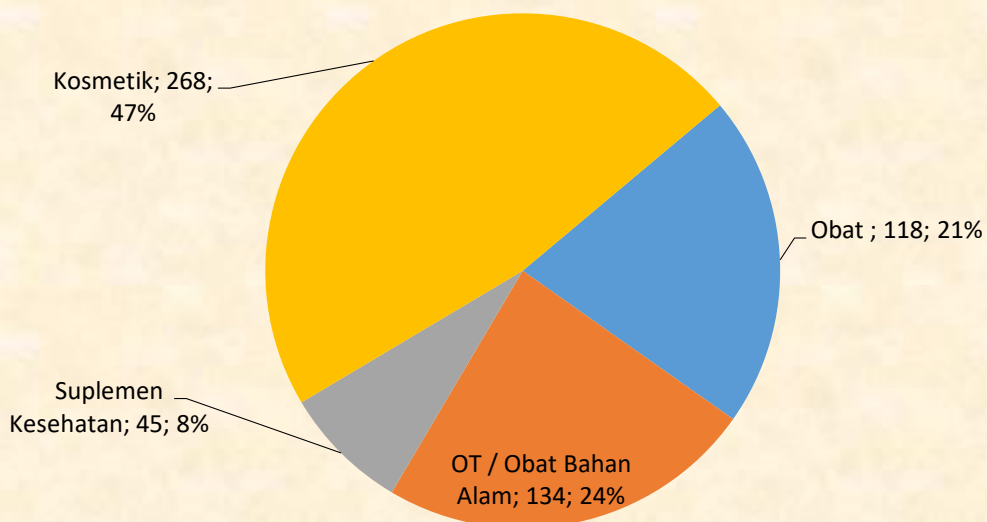
Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Semula	94	85	94	95	95
Menjadi	68,77 (Realisasi)	70	72	74	76

Tabel 3.2.1.3.2. Perubahan Target IK 1.3.
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024

Pada tahun 2021 jumlah target Sampel Obat *Targetted* pada Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebanyak 565 sampel, dengan perincian per komoditi :



Grafik 3.2.1.3.1. Komposisi Sampel Obat Targetted Tahun 2021

Sedangkan berdasarkan wilayah sampling, jumlah target Sampel Obat *Targeted* yang disampling di:

1. wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebanyak 455 sampel,
2. wilayah kerja Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara sebanyak 61 sampel,
3. wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 49 sampel.

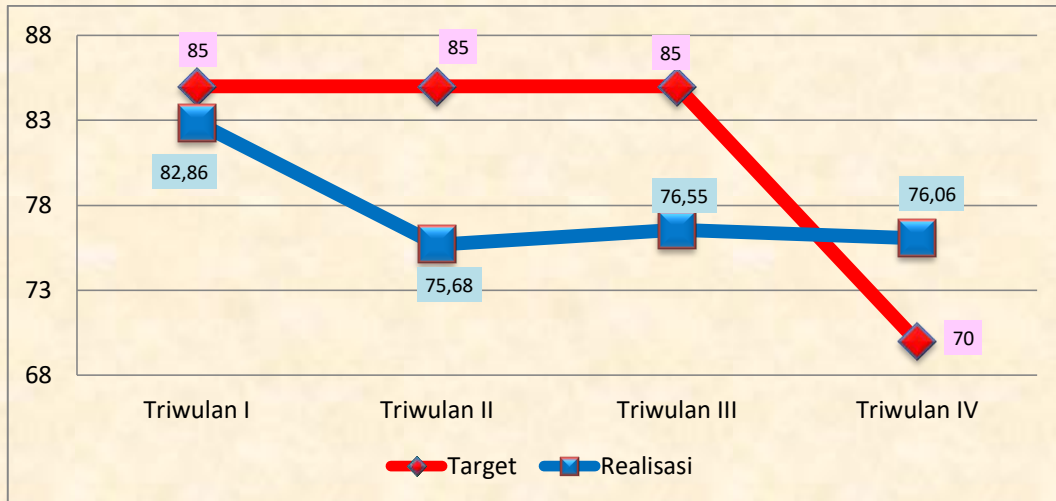
Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan triwulanan tahun 2021, diperoleh data Jumlah Sampel Obat *Targetted* yang Diperiksa dan Diuji sebanyak 568 sampel dengan hasil Memenuhi Syarat sebanyak 432 sampel atau 76,06%, dari data tersebut tergambar bahwa pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel sebanyak 568 sampel, sudah mencapai 100,53% dari target Sampel Obat *Targetted* yaitu 565 sampel, yang terdiri dari :

No.	Komoditi	Jumlah Sampel	Jumlah MS	%MS
a.	Obat	119	119	99,16
b.	Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	114	134	85,07
c.	Suplemen Kesehatan	45	45	100
d.	Kosmetik	115	270	57,41
Jumlah Seluruhnya		568	432	76,06

Tabel 3.2.1.3.3 Sampel Obat *Targetted* per Komoditi Tahun 2021

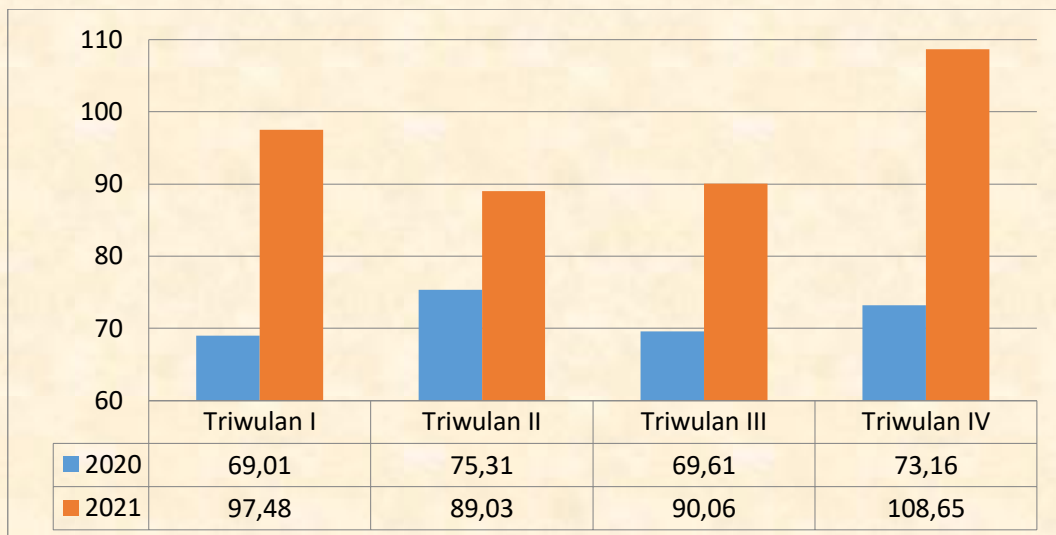
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 4 macam komoditi Sampel Obat Acak, Kosmetik menyumbangkan persentase sampel MS yang sangat rendah (57.41%). Meskipun demikian, target tetap tercapai karena adanya reuiu target kinerja tahun 2021 pada revisi rencana strategis 2020-2024, yang semula 85% diturunkan menjadi 70%, berdasar tren capaian sebelumnya dan dengan mempertimbangkan adanya kriteria baru yaitu tidak memenuhi ketentuan penandaan.

Jika dilihat berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap triwulan sampai dengan akhir tahun 2021, diperoleh data sebagai berikut :



Grafik 3.2.1.3.2. Realisasi Kinerja IK.1.3 Pertriwulan Tahun 2021

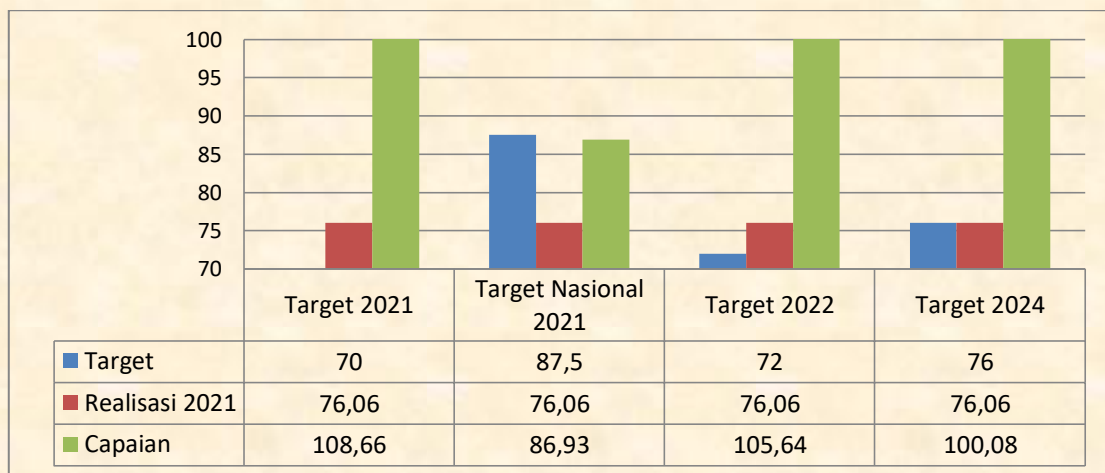
Apabila capaian kinerja triwulanan tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja triwulanan tahun 2020, tergambar sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.2.1.3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 1.3. Tahun 2020-2021

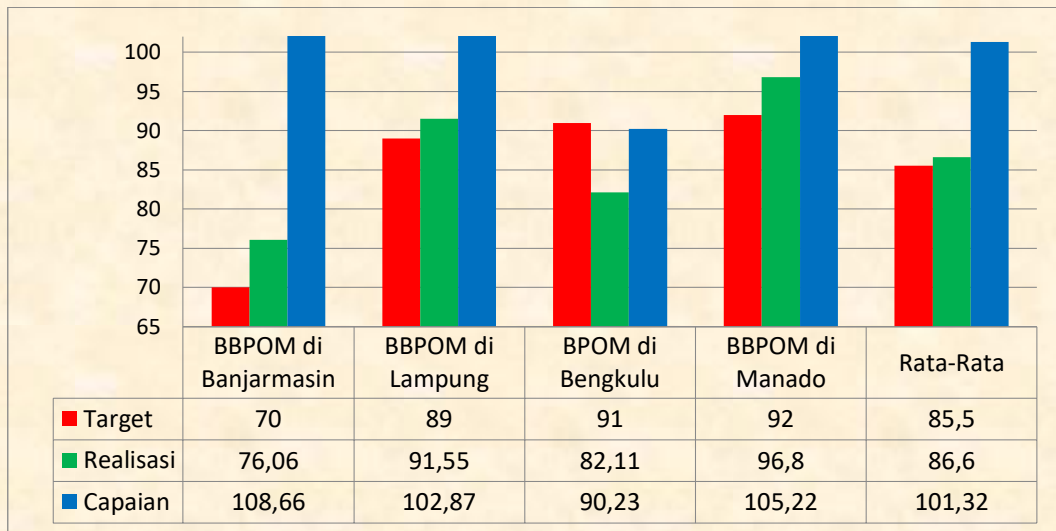
Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi kenaikan capaian kinerja yang sangat signifikan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh penetapan target tahun 2020 (94%) jauh lebih tinggi dibandingkan target nasional (85%), sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja (68,77%) sedangkan target nasional saat itu capaiannya adalah 80,91%. Sedangkan untuk tahun 2021, target triwulanan/tahunan disesuaikan dengan target nasional, sehingga capaian kinerja indikator ini pada tahun 2021 sebesar 108,65%.

Realisasi kinerja yang diperoleh tersebut apabila dibandingkan dengan target tahunan tahun 2021 serta target akhir renstra tahun 2024, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :



Grafik 3.2.1.3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.1.3 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024

Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 berada di posisi pertama dibandingkan dengan Balai Besar/Balai POM seklaster, yaitu sebagai berikut:



**Grafik 3.2.1.3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.1.3
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

Balai Besar POM di Banjarmasin telah berhasil mencapai target tahun 2021 dengan kriteria baik, dengan capaian 108,65%. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Semakin tingginya tingkat kepatuhan produsen terhadap peraturan di bidang Obat, baik terkait label atau mutu produk.
- b) Semakin meningkatnya pengetahuan dan kepatuhan para pelaku sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat tentang tata cara distribusi, pengelolaan dan penyimpanan Obat yang baik sehingga tidak ditemukan produk yang kedaluwarsa atau pun rusak.
- c) Pemeriksaan dan pembinaan sarana distribusi Obat sesuai dengan pedoman inspeksi yang diterbitkan oleh Badan POM agar para pelaku usaha turut serta menjamin bahwa produk yang didistribusikan merupakan produk yang legal, tidak kadaluwarsa dan tidak rusak.
- d) Memberikan KIE tentang produk Obat yang tidak memenuhi persyaratan mutu, tanpa izin edar melalui akun media sosial BBPOM di Banjarmasin (website, instagram, twitter, facebook), leaflet, brosur, pameran, talkshow di televisi/radio, dan penyuluhan agar diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan produk farmasi.

- e) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen.
- f) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

Di sisi lain, terdapat kendala dalam pencapaian kinerja indikator tersebut, yaitu sangat rendahnya persentase sampel Kosmetik yang memenuhi syarat (57,41%). 115 sampel Kosmetik yang tidak memenuhi syarat (TMS), terdiri dari 7 sampel TMS uji laboratorium meskipun MK penandaan, 104 sampel TMK penandaan meskipun MS uji laboratorium, dan 4 sampel TMS uji laboratorium sekaligus TMK penandaan. Hal ini berarti 93,91% sampel Kosmetik yang TMS disebabkan TMK penandaan. Dapat dilihat bahwa sampel yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan memiliki jumlah yang paling besar, sehingga diperlukan tindak lanjut berupa pembinaan ke pelaku usaha serta pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku terkait produk kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan penandaan.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 426.642.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 426.612.908,- atau 99,99%.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
104,23%	99,99 %	1,09	0,09	100%	Efisien

Tabel 3.2.1.3.4. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 1.3. Tahun 2021

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan antara lain:

- a) Sampling targeted/purposive yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu terhadap sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dilaksanakan tepat waktu dalam satu tahun periode yaitu sebanyak 658 sampel. Kegiatan sampling tersebut dilakukan terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat.
- b) Pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi yang beredar di pasaran.
- c) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen.
- d) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

Tindak lanjut hasil evaluasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi persentase Obat yang memenuhi syarat antara lain:

- a) Pembinaan dan atau pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku terkait produk Kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan.
- b) Intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti distributor terkait Tata Cara Distribusi yang Baik.
- c) Peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi Obat.
- d) Peningkatan kegiatan sosialisasi/publikasi tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat termasuk penyebaran informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat tentang adanya Public Warning Obat yang diterbitkan oleh Badan POM.

- e) Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi.
- f) Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana distribusi Obat serta masyarakat tentang Obat yang memenuhi ketentuan.
- g) Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justitia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Izin Edar (TIE).
- h) Meningkatkan kompetensi petugas.

Berdasarkan uraian di atas, realisasi Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 telah berhasil dengan memperoleh capaian 108,66% , dan juga telah mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024 dengan capaian 100,08%.

Indikator Kinerja 1.4 :

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
85,5	89,12	104,23	Baik

Tabel 3.2.1.4.1. Realisasi Kinerja IK.1.4 Tahun 2021

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung dengan rumus:

% Makanan Aman

$$= \frac{\text{Jumlah Makanan Targeted MS s.d Triwulan } n}{\text{Total Makanan Targeted Diperiksa dan Diuji s.d Triwulan } n} \times 100$$

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Yang dimaksud dengan aman dan bermutu adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Pada tahun 2021 jumlah target Sampel Makanan *targeted* pada Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebanyak 147 sampel. Sedangkan perincian berdasarkan wilayah sampling, jumlah target Sampel Makanan *targeted* yang disampling di :

- a) wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebanyak 123 sampel,
- b) wilayah kerja Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara sebanyak 12 sampel, dan
- c) wilayah kerja Loka POM di Kab. Tanah Bumbu sebanyak 12 sampel.

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, sebagai berikut :

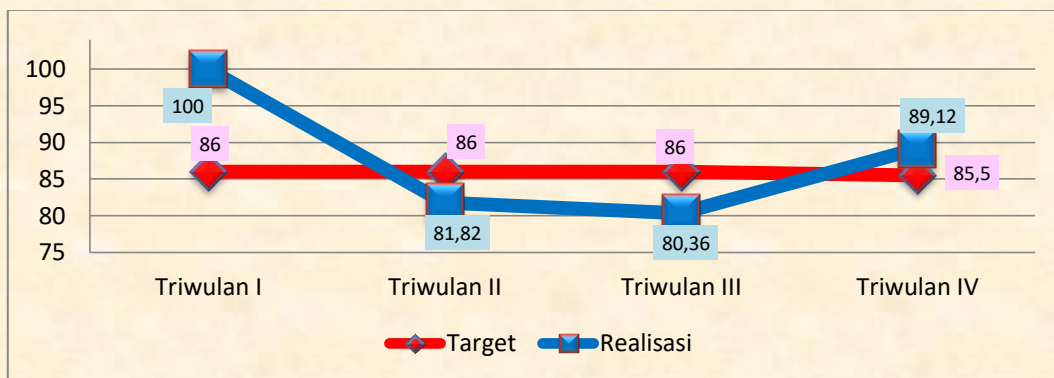
Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Semula	85	86	87	88	89
Menjadi	68,77 (Realisasi)	85,5	86	86,5	86,7

Tabel 3.2.1.4.2. Perubahan Target IK 1.4.

Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024

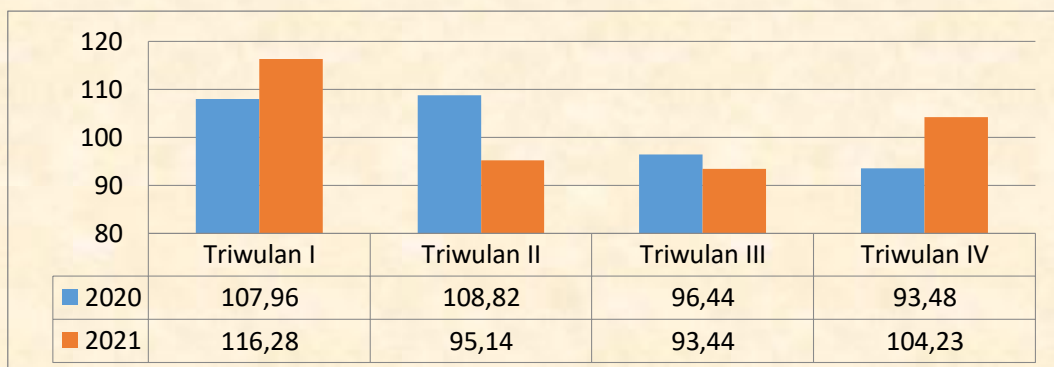
Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan triwulanan tahun 2021, diperoleh data Sampel Makanan Targetted yang Diperiksa dan Diuji sebanyak 147 sampel dengan hasil Menenuhi Syarat sebanyak 89,12% atau 131 sampel. Dari data tersebut tergambar bahwa pelaksanaan sampling dan pengujian sampel sebanyak 147 sampel, sudah mencapai 100% dari target Sampel Makanan *targetted* yaitu 147 sampel.

Jika dilihat berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap triwulan sampai dengan akhir tahun 2021, diperoleh data sebagai berikut :



Grafik 3.2.1.4.1. Realisasi Kinerja IK.1.4 Pertriwulan Tahun 2021

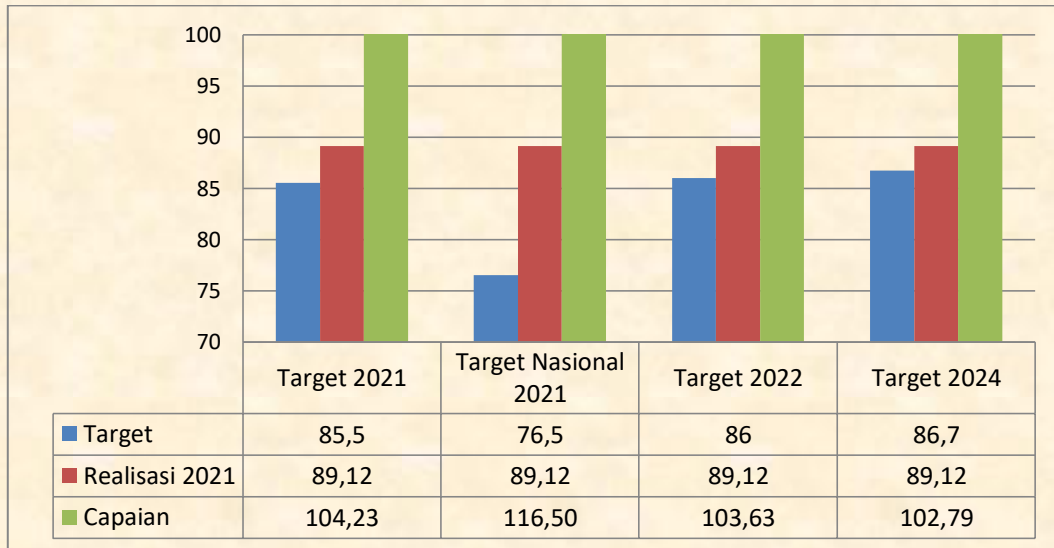
Apabila capaian kinerja per triwulan tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja per triwulan tahun 2020, tergambar pada grafik berikut :



Grafik 3.2.1.4.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 1.4. Tahun 2020-2021

Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi kenaikan capaian kinerja di akhir tahun 2021 dibanding tahun 2020.

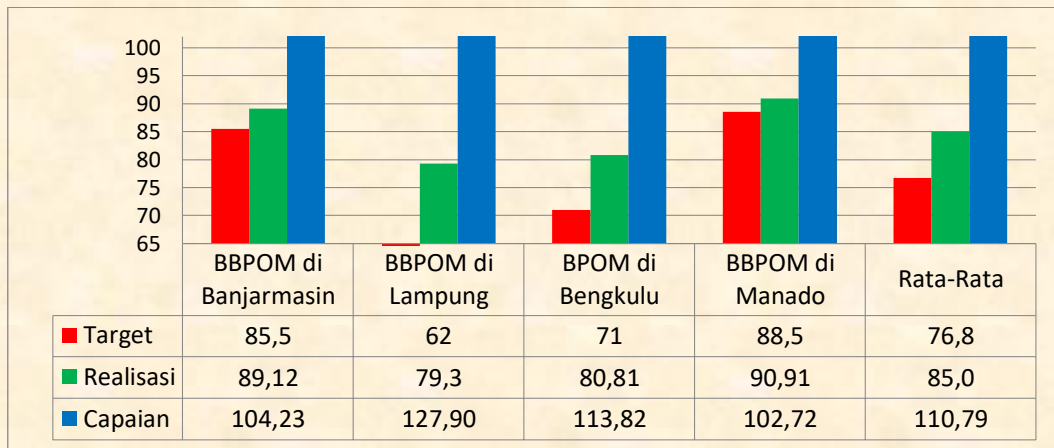
Realisasi kinerja tahun 2021 yang diperoleh apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :



Grafik 3.2.1.4.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.1.4 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024

Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 86,7%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 102,79% dengan kriteria "baik", namun masih perlu dilakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sehingga capaian kinerja tetap dipertahankan dalam kriteria "baik" atau ditingkatkan menjadi "sangat baik".

Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat pada Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 berada di posisi ke-3 dibandingkan dengan Balai Besar/Balai POM sekluster 4, yaitu sebagai berikut :



**Grafik 3.2.1.4.4. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.1.4
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

Balai Besar POM di Banjarmasin telah berhasil mencapai target tahun 2021 dengan kriteria baik, dengan capaian 104,23%. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Meningkatnya pemahaman terkait ketentuan label pangan yang beredar.
- Menurunnya peredaran Produk Pangan TIE (Tanpa Izin Edar) dan Produk Pangan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di wilayah Kalimantan Selatan baik dengan nomor izin edar MD atau PIRT.
- Penerapan sanksi administrasi maupun pro justitia kepada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang Makanan.
- Pemberian KIE tentang produk Makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, tanpa izin edar melalui akun media sosial BBPOM di Banjarmasin (website, instagram, twitter, facebook), leaflet, brosur, pameran, talkshow di televisi/radio, dan penyuluhan agar diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan produk Makanan.
- Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen.
- Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan

reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.233.876.400,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.233.862.186,- atau 99,99% , dicapai indeks efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 1,04 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,04 sehingga capaian efisiensi tahun 2021 sebesar 100% (**Efisien**).

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
91,88%	99,99 %	1,04	0,04	100%	Efisien

Tabel 3.2.1.4.4. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 1.4. Tahun 2021

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator kinerja ini antara lain:

- a) Sampling acak yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu terhadap sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dilaksanakan tepat waktu dalam satu tahun periode yaitu sebanyak 1507 sampel. Kegiatan sampling tersebut dilakukan terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat.
- b) Pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi yang beredar di pasaran.
- c) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen.

- d) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

Tindak lanjut hasil evaluasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi persentase Makanan aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan antara lain:

- a) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi standar melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat maupun publikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- b) Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi serta publikasi iklan layanan masyarakat.
- c) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk Makanan mengenai Makanan yang memenuhi ketentuan.
- d) Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi Makanan.

Berdasarkan uraian di atas, realisasi Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 telah berhasil dengan memperoleh capaian 104,23% , dan juga telah mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024 dengan capaian 102,79%.

Indikator Kinerja 1.5 :

Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
92	91,25	99,18	Baik

Tabel 3.2.1.5.1. Realisasi Kinerja IK.1.5 Tahun 2021

Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat merupakan indikator yang baru dimunculkan tersendiri di tahun 2021 ini, yang sebelumnya masih dihitung sebagai IKU Persentase Pangan yang Memenuhi Syarat.

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Reviu Renstra 2020-2024	-	92	93	94	95

Tabel 3.2.1.5.2. Perubahan Target IK 1.5.

Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024

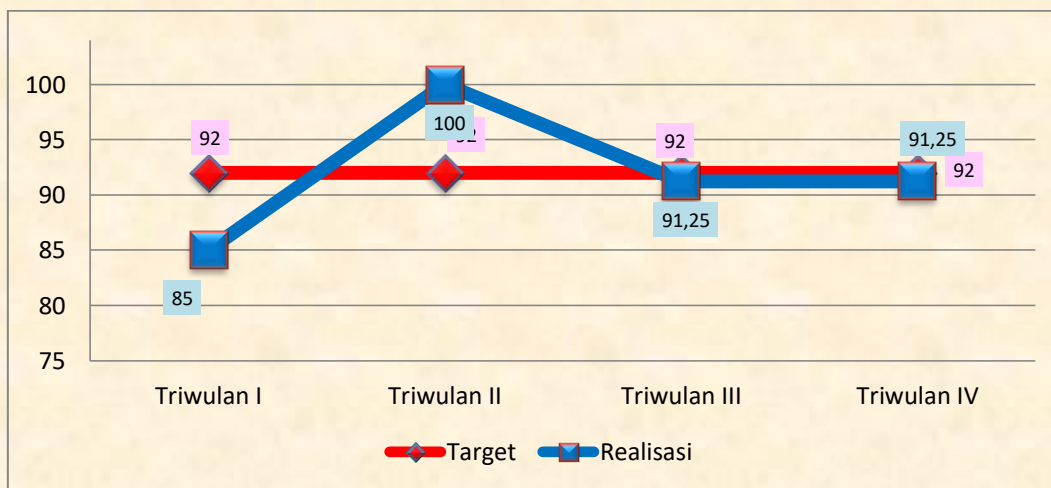
Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat (MS) dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ Pangan Fortifikasi MS} = \frac{\text{Jumlah Pangan Fortifikasi MS s. d Triwulan } n}{\text{Total Pangan Fortifikasi Diperiksa dan Diuji s. d. Triwulan } n} \times 100$$

Pada tahun 2021 jumlah target Sampel Pangan Fortifikasi pada Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebanyak 105 sampel yang disampling dari wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin dan dilaksanakan pada bulan Maret sebanyak 40 sampel dan bulan Juli sebanyak 65 sampel.

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan tahun 2021, diperoleh data Jumlah sampel Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji sebanyak 105 sampel, dan yang memenuhi syarat sebanyak 86 sampel atau 81,9%, menggambarkan bahwa pelaksanaan sampling dan pengujian sampel sebanyak 105 sampel, sudah mencapai 100 % dari target Sampel Pangan Fortifikasi yaitu 105 sampel.

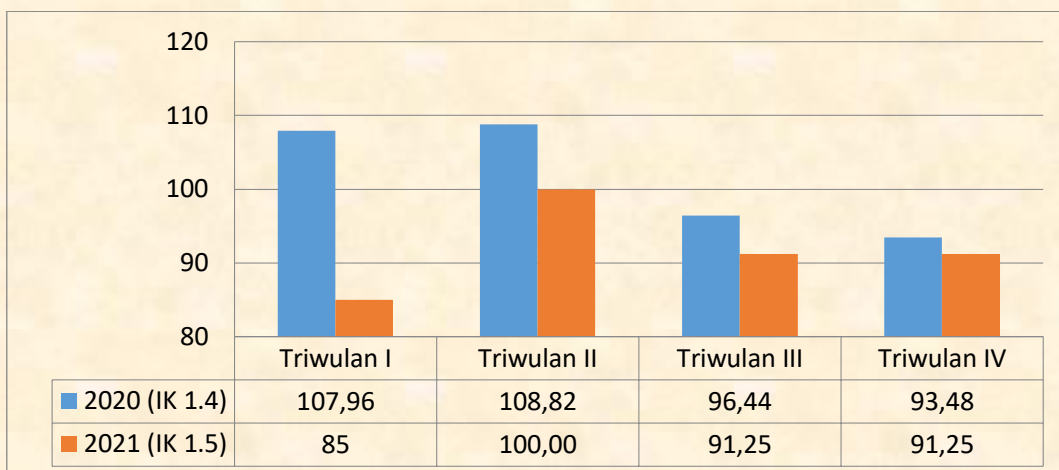
Jika dilihat berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap triwulan sampai dengan akhir tahun 2021, diperoleh data sebagai berikut :



Grafik 3.2.1.4.1. Realisasi Kinerja IK.1.4 Pertriwulan Tahun 2021

Indikator kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2021 yang merupakan turunan dari indikator kinerja persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (IKSK 1.4) tahun 2020, sehingga dapat dilakukan perbandingan antar keduanya.

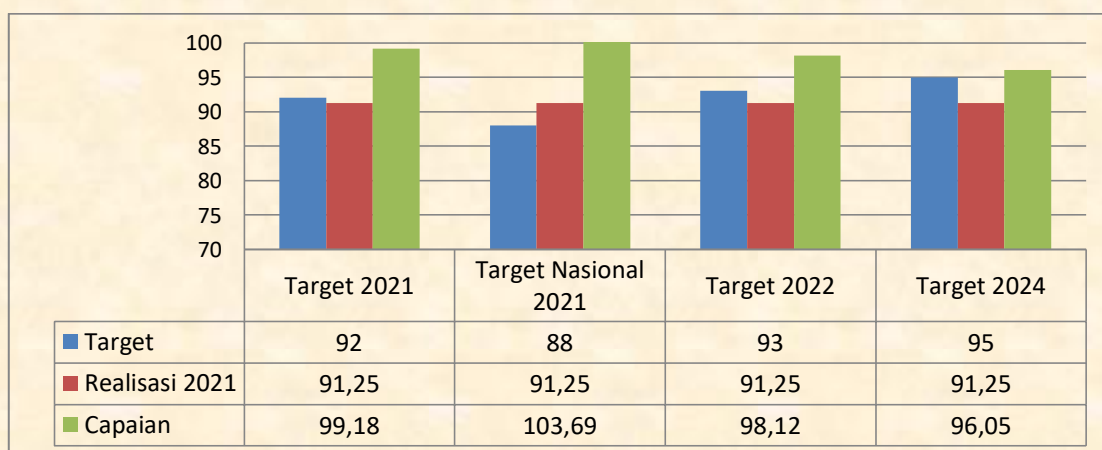
Apabila capaian kinerja tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja indikator persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020, akan tergambar sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.2.1.4.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 1.5. Tahun -2021 dengan Realisasi Kinerja IK 1.4 Tahun 2020

Dari Grafik tersebut terlihat indikator kinerja persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2021 memiliki capaian yang lebih tinggi dibanding indikator kinerja persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (IKSK 1.4) tahun 2020.

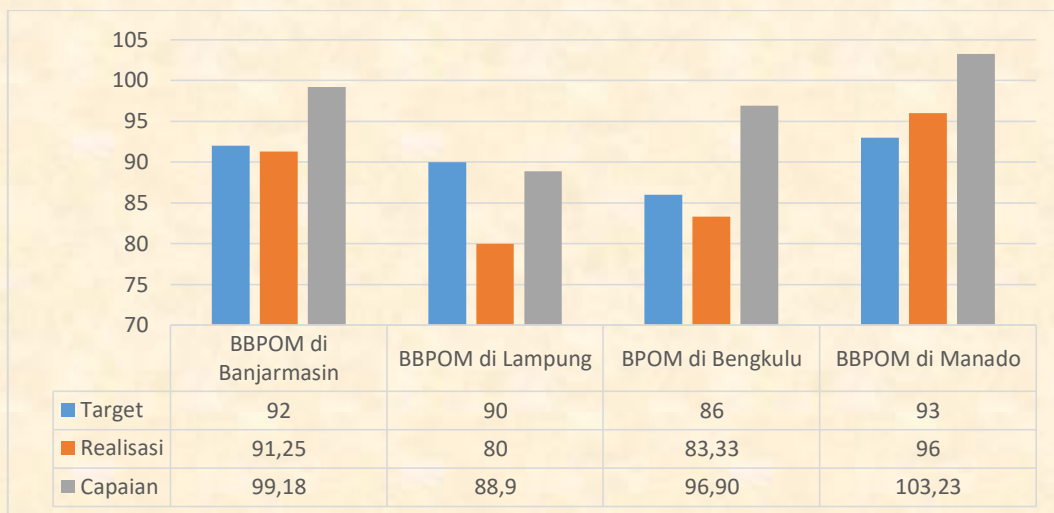
Realisasi kinerja yang diperoleh tersebut apabila dibandingkan dengan target renstra tahun 2024, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut:



Grafik 3.2.1.5.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.1.5 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024

Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 92. Jika realisasi kinerja pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 99,18% dengan kriteria “baik”, namun masih perlu dilakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sehingga capaian kinerja tetap dipertahankan dalam kriteria “Baik” atau ditingkatkan menjadi “Sangat Baik”.

Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat pada Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 berada di posisi ke-2 dibandingkan dengan Balai Besar/Balai POM seklaster, yaitu sebagai berikut:



**Grafik 3.2.1.5.4. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.1.5
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

Balai Besar POM di Banjarmasin belum berhasil mencapai target tahun 2021 dengan kriteria baik, dengan capaian 99,18%, namun telah melampaui target nasional yaitu sebesar 88%. Hal ini disebabkan target yang ditetapkan lebih tinggi dari target nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatnya pemahaman terkait ketentuan label pangan Fortifikasi yang beredar.

- b) Menurunnya peredaran Produk Pangan Fortifikasi TIE (Tanpa Izin Edar) dan Produk Pangan Fortifikasi yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di wilayah Kalimantan Selatan baik dengan nomor izin edar MD atau PIRT.
- c) Penerapan sanksi administrasi maupun pro justitia kepada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang Makanan.
- d) Pemberian KIE tentang produk Makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, tanpa izin edar melalui akun media sosial BBPOM di Banjarmasin (website, instagram, twitter, facebook), leaflet, brosur, pameran, talkshow di televisi/radio, dan penyuluhan agar diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan produk Makanan.
- e) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen.
- f) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.13.700.800,- dengan serapan sebesar Rp.13.688.480,- atau 99,91%.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
99,18%	99,91 %	0,99	-0,01	75%	Tidak Efisien

Tabel 3.2.1.5.4. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 1.5. Tahun 2021

Dari data tersebut dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 0,99 dengan tingkat efisiensi sebesar -0,01 sehingga capaian efisiensi pada tahun 2021 sebesar 75% (**Tidak Efisien**).

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat antara lain:

- a) Sampling Pangan Fortifikasi yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin, dilaksanakan tepat waktu dalam satu tahun periode yaitu sebanyak 105 sampel Pangan Fortifikasi. Kegiatan sampling tersebut dilakukan terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi Pangan Fortifikasi.
- b) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen.
- c) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

Tindak lanjut hasil evaluasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi persentase indikator kinerja ini, antara lain:

- a) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk Pangan Fortifikasi yang memenuhi standar melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat maupun publikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- b) Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi serta publikasi iklan layanan masyarakat.
- c) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap produsen, distributor dan penjual retail produk Pangan Fortifikasi mengenai Pangan Fortifikasi yang memenuhi ketentuan.
- d) Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi Pangan Fortifikasi.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun realisasi Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 hanya memperoleh capaian 99,18% dari target yang ditetapkan, namun kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini dapat dinyatakan berhasil, dan Balai Besar POM di Banjarmasin optimis akan berhasil mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024..

Sasaran Kegiatan 2 :

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja, dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

Indikator Kinerja 2.1 :

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
81	79,08	97,63 %	Baik

Tabel 3.2.2.1.1. Realisasi Kinerja IK.2.1 Tahun 2021

Indeks kesadaran masyarakat merupakan ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan.

Kesadaran (*Awareness*) bertujuan untuk menggali sejauh mana kesadaran masyarakat terhadap keamanan produk Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan

Makanan dengan benar. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi “pengetahuan” dari masyarakat. **Ketertarikan (*Interest*)** bertujuan untuk menggali ketertarikan masyarakat untuk tahu dan mempelajari tentang keamanan produk. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi “sikap” dari masyarakat. **Keinginan (*Desire*)** bertujuan untuk menggali keinginan masyarakat untuk mendapatkan produk yang aman. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi “sikap” dari masyarakat. **Tindakan (*Action*)** bertujuan untuk menggali tindakan masyarakat saat memilih dan mengonsumsi produk Obat dan Makanan dengan benar. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi “**perilaku**” dari masyarakat.

Pengukuran indikator kinerja digunakan untuk mengetahui dan mengevaluasi sudah sejauh mana sistem pengawasan Obat dan Makanan efektif dilakukan. Pengukuran dilakukan terhadap tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terkait bagaimana cara memilih produk Obat dan Makanan sebelum digunakan.

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat Dan Makanan Aman Dan Bermutu Balai Besar POM di Banjarmasin, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Semula	68	71	74	78	81
Menjadi	78,36 (Realisasi)	81	84	86	89

Tabel 3.2.2.1.2. Perubahan Target IK 2.1.

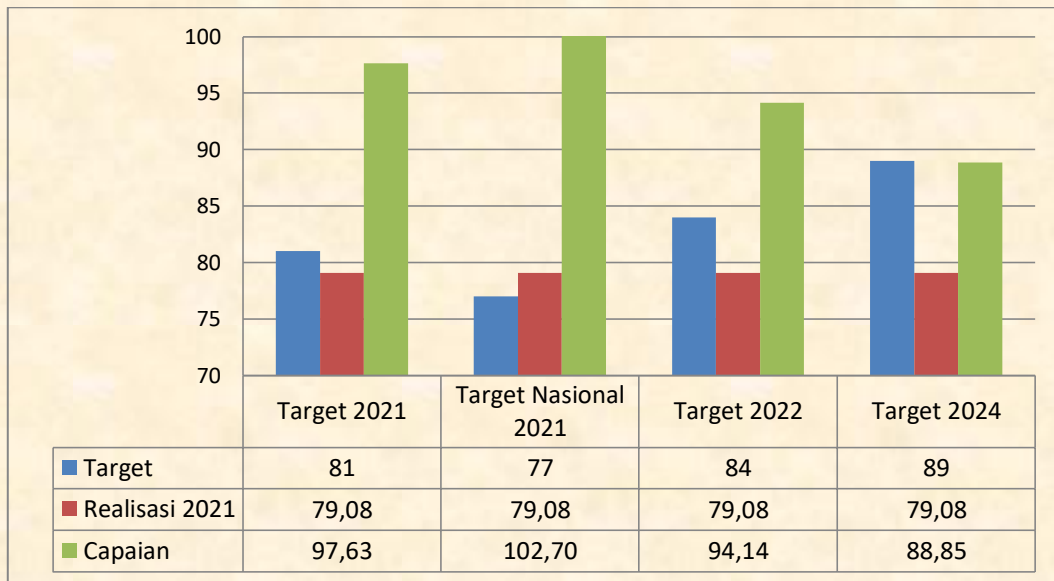
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024

Untuk tahun 2021 target indikator kinerja indeks kesadaran masyarakat yang ditetapkan adalah 81,00, dengan realisasi 79,08 dan capaian yang diperoleh sebesar 97,63%. Realisasi yang tidak mencapai target dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya tingkat pendidikan masyarakat yang berbeda-beda, mulai dari yang tidak bersekolah hingga berpendidikan di perguruan tinggi. Perbedaan tingkat pendidikan menyebabkan perbedaan pula dalam aspek pengetahuan, sikap dan perilaku. Semakin tinggi jenjang pendidikan, menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi.

Hasil survei ada yang tingkat pengetahuan tinggi, tetapi sikap dan perilaku rendah. Ada juga tingkat pengetahuan rendah, sikap rendah tetapi perilaku tinggi, dan ada juga semua aspeknya tinggi, baik pengetahuan, sikap dan perilaku. Pengetahuan yang ditanyakan di dalam survei adalah terkait informasi kedaluwarsa, petunjuk penyimpanan dan produk yang terdaftar di BPOM. Berdasar hasil survei, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap informasi tanggal kedaluwarsa dan petunjuk penyimpanan produk memiliki nilai persentase yang tinggi, tetapi perlu peningkatan pada pengetahuan masyarakat terhadap produk yang tidak terdaftar di BPOM.

Capaian Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap target tahun 2021 dibandingkan dengan target yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah 88,85%, masih dalam kriteria cukup. Perlu peningkatan dari segala aspek agar tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman juga dapat meningkat.

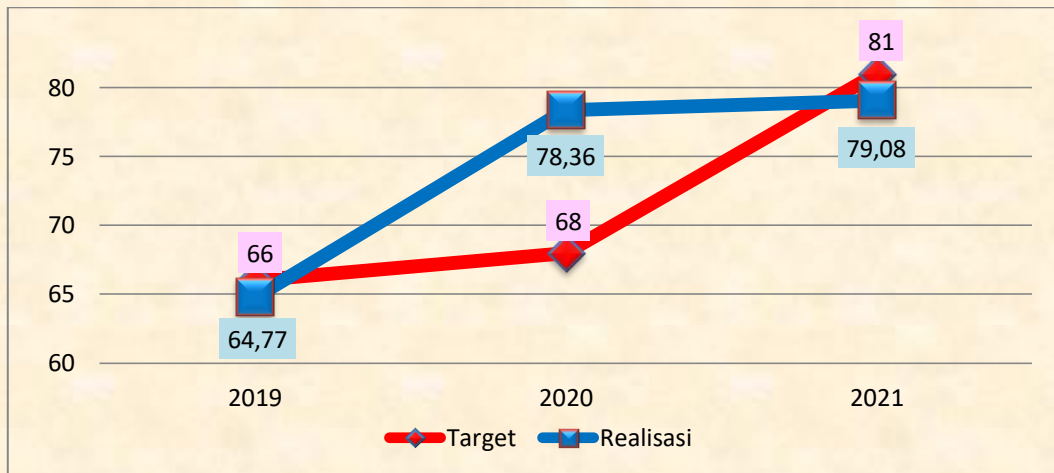
Dengan capaian kinerja pada tahun 2021 mendapat kriteria baik, ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024 BBPOM di Banjarmasin mampu mencapai target jangka menengah dengan melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah Kalimantan Selatan secara berkesinambungan.



Grafik 3.2.2.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.2.1 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024

Realisasi kinerja Indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2021 yang mencapai nilai 79,08 lebih tinggi dibandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan nilai 78,36. Tetapi capaian kinerja tahun 2021 yaitu 97,63% lebih rendah jika dibandingkan dengan dengan capaian kinerja tahun 2020 yang mencapai 115,24%. Pada tahun 2021, indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman memiliki target 81,00, target ini lebih tinggi dari target di tahun 2020 yang hanya sebesar 68,00.

Dengan perbedaan target yang signifikan, menghasilkan perbedaan capaian yang juga signifikan, meskipun realisasi di tahun 2021 lebih tinggi dibanding realisasi kinerja di tahun 2020. Dari hasil survei dapat terlihat, bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 sebenarnya meningkat jika dilihat dengan membandingkan target dan realisasi antara tahun 2020 dan 2021, sebagai berikut :



Grafik 3.2.2.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.2.1 Tahun 2019-2021

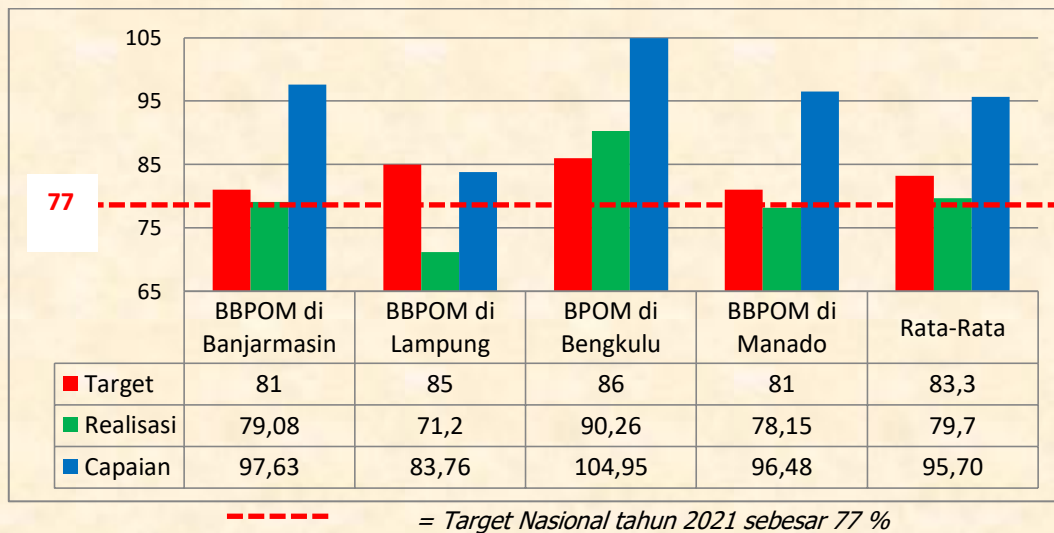
Ini artinya tingkat kesadaran masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan telah cukup baik, dan masih dapat ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya. Dengan realisasi indeks 79,08 dapat dikatakan bahwa masyarakat Kalimantan Selatan memiliki tingkat pemahaman yang baik dalam memilih Obat dan Makanan aman, seperti membaca dan memahami aturan pakai yang tepat, tidak menggunakan produk yang tidak terjamin keamanannya seperti ilegal, palsu dan kedaluwarsa, mengetahui bahan berbahaya yang tidak boleh terandung dalam pangan, kosmetik dan obat tradisional, serta menyimpan produk secara baik dan benar.

Adapun Kegiatan-kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah :

1. Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan melalui penyuluhan bagi masyarakat, ritel, PKK dan mahasiswa.
2. Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan di media cetak dan media *online* dalam artikel Anda Bertanya BPOM menjawab.
3. Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan di media televisi, baliho, spanduk dan *banner*.
4. Pelayanan informasi di Unit Layanan Pengaduan Konsumen BBPOM di Banjarmasin, serta layanan di Mal Pelayanan Publik Barokah Martapura, Kabupaten Banjar.

5. Pelaksanaan KIE pada kegiatan Kelotok Laboratorium Keliling.
6. Pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektor.

Perbandingan Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat Dan Makanan Aman Dan Bermutu BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 dengan Balai Besar / Balai POM dalam kluster 4 tahun 2021 adalah sebagai berikut :



Grafik 3.2.2.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.2.1 Balai Besar/ Balai POM dalam Kluster 4 Tahun 2021

Capaian indeks kesadaran terhadap Obat dan Makanan Aman BBPOM di Banjarmasin (97,63%), lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian BBPOM di Bandar Lampung yaitu 83,76% dan capaian BBPOM di Manado sebesar 96,48%, tetapi lebih rendah dibandingkan capaian Balai POM di Bengkulu dengan indeks 104,95%. Perbedaan tingkat pendidikan masyarakat, wilayah survei antara perkotaan (urban) dan pedesaan (rural), usia responden, pola KIE yang diterapkan, kompetensi petugas pemberi informasi, materi yang disampaikan, serta sebaran masyarakat yang telah terpapar informasi Obat dan Makanan merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil survei yang diberikan di masing-masing cakupan wilayah kerja Balai/Balai Besar POM.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator kinerja Indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin pada tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebagaimana dalam DIPA tahun anggaran 2021 sebesar Rp.394.579.242,- atau 99,85% dari pagu anggaran sebesar Rp.395.172.000,- , dengan capaian kinerja sebesar 97,63 %.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
97,63	99,85	0,98	-0,02	75%	Tidak Efisien

Tabel 3.2.2.1.3. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 2.1. Tahun 2021

Dari data tersebut dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 0,98 dengan tingkat efisiensi sebesar -0,02 sehingga capaian efisiensi pada tahun 2021 sebesar 75 %. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin belum digunakan secara efisien, karena output/capaian terhadap target yang ditetapkan belum direalisasikan secara optimal.

Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan indeks kesadaran masyarakat, perlu peningkatan kerjasama dengan lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Meningkatkan strategi komunikasi dan sosialisasi yaitu :

- 1) Memfokuskan pemahaman tentang Obat dan Makanan aman dan bermutu kepada masyarakat. Petugas pemberi informasi harus memiliki kompetensi baik dalam teknis maupun pengetahuan terkait materi yang akan disampaikan. Petugas akan diikutsertakan dalam pelatihan dan bimtek baik secara luring maupun daring. Cara

petugas memberikan informasi juga sangat penting, agar masyarakat dengan mudah memahami apa yang disampaikan. Materi Obat dan Makanan yang kompleks harus sedapat mungkin diterima masyarakat dengan mudah dan dalam bahasa yang sederhana, sehingga petugas perlu menguasai materi yang akan disampaikan dengan baik;

- 2) Menyusun disain/bahan KIE dengan memperhatikan kebutuhan informasi masyarakat, serta memperhatikan target penerima KIE yang disesuaikan dengan gender, usia, latar belakang pendidikan dan cakupan wilayah;
- 3) Menggunakan media yang banyak diakses masyarakat, seperti televisi, media sosial dan media luar ruang (spanduk, reklame, poster, baliho) yang dapat dipasang di tempat umum sehingga dapat membantun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
- 4) Selain itu, dilakukan juga pengembangan metoda KIE, antara lain dengan mengaktifkan grup WhatsApp yang beranggotakan Dinas Kesehatan di kabupaten/kota, dengan harapan grup ini dapat sebagai perpanjangan tangan dari balai untuk menyampaikan kembali informasi terkait Obat dan Makanan.
- 5) Metode KIE lainnya adalah bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal pemasangan poster Obat dan Makanan di halte-halte bus, mengingat tempat ini setiap hari banyak disinggahi pengguna angkutan, sehingga diharapkan masyarakat akan lebih mengetahui keberadaan dan tupoksi BPOM.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap indeks kesadaran masyarakat adalah sebaran masyarakat yang terpapar informasi Obat dan Makanan. Setiap tahun Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan KIE dan pembinaan kepada masyarakat di kabupaten/kota yang termasuk wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, tetapi tidak menutup kemungkinan, responden yang ditentukan surveyor adalah komunitas yang belum pernah mendapat informasi secara langsung dari petugas balai, karena belum semua kecamatan dan desa di kabupaten/kota wilayah Kalimantan Selatan menjadi binaan Balai Besar POM di Banjarmasin.

Alternatif solusi yang akan dilakukan di tahun mendatang adalah memperluas cakupan wilayah KIE dengan pemasangan poster, pembagian brosur, serta bekerjasama dengan media cetak dan media elektronik di kabupaten/kota. Diharapkan dengan cara ini dapat memfasilitasi masyarakat akan kebutuhan informasi Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Survei dalam rangka pengukuran indeks kesadaran masyarakat akan terus dilakukan minimal selama dua tahun ke depan, hingga tahun 2024. Target yang telah ditetapkan untuk indeks kepuasan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Balai Besar POM di Banjarmasin pada tahun 2024 adalah 89,00. Agar dapat mencapai indeks ini, perlu peningkatan dan pengembangan dalam metode KIE, serta diperlukan suatu acuan, bagaimana cara agar daerah yang terpapar informasi Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Selatan tersebar merata. Diharapkan juga pada pelaksanaan program ini, lokasi yang menjadi tempat survei adalah kecamatan/desa yang masyarakatnya telah pernah dibina dan diintervensi oleh petugas BBPOM di Banjarmasin, agar dapat dievaluasi tingkat keberhasilan program/kegiatan yang telah dilaksanakan di beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun realisasi Indikator Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 hanya memperoleh capaian 97,63% dari target yang ditetapkan, namun kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini dapat dinyatakan berhasil, dan Balai Besar POM di Banjarmasin optimis akan berhasil mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

Sasaran Kegiatan 3 :

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin

Sasaran Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja, dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

Indikator Kinerja 3.1 :

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
91,1	92,30	101,32%	Baik

Tabel 3.2.3.1.1. Realisasi Kinerja IK.3.1 Tahun 2021

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) diukur menggunakan survei yang terdiri dari 10 pertanyaan yang mewakili tiap aspek, menggunakan skala *Likert 1-4*. Adapun aspek yang diukur :

- Kemanfaatan memperoleh informasi/undangan (P1),
- Kemudahan menjangkau lokasi untuk layanan tatap muka langsung atau kemudahan akses terhadap layanan yang menggunakan telepon/ internet (P2),
- Kemanfaatan materi (P3), Materi mudah dipahami (P4),
- Mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan perijinan/ sertifikasi (P5),
- Kecukupan waktu (P6),
- Narasumber/petugas menguasai materi (P7),
- Tanggapan (respons) narasumber/ petugas/ panitia terhadap pertanyaan/ permasalahan/ kritik/ saran anda (P8),

- Keramahan petugas/ panitia/ penyelenggara (P9),
- Fasilitas pendukung bila ada (toilet, tempat ibadah, alat peraga, platform/ aplikasi, fitur bantuan untuk layanan online) (P10).

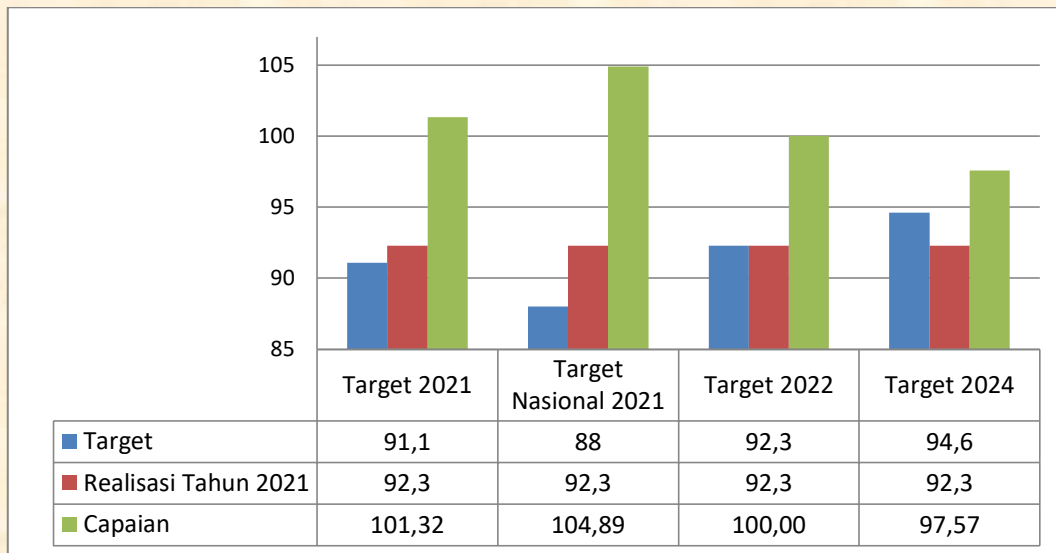
Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Semula	86	87,5	89	90.5	92
Menjadi	96,35 (Realisasi)	91.1	92.3	93.4	94.6

**Tabel 3.2.3.1.2. Perubahan Target IK 3.1.
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024**

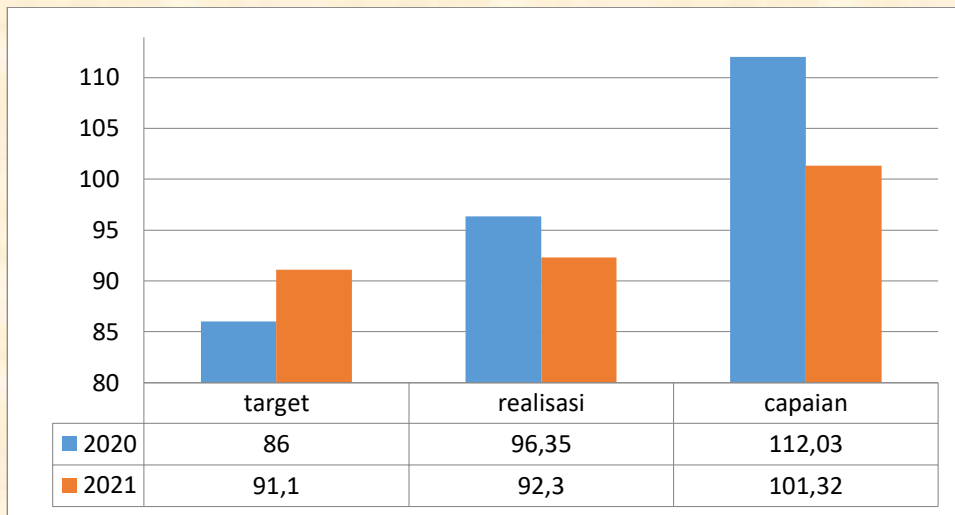
Realisasi kinerja yang diperoleh apabila dibandingkan dengan target target tahunan tahun 2021 dan target nasional tahunan tahun 2021 serta target akhir renstra tahun 2024, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :



Grafik 3.2.3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 3.1 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Balai Tahun 2022 dan 2024

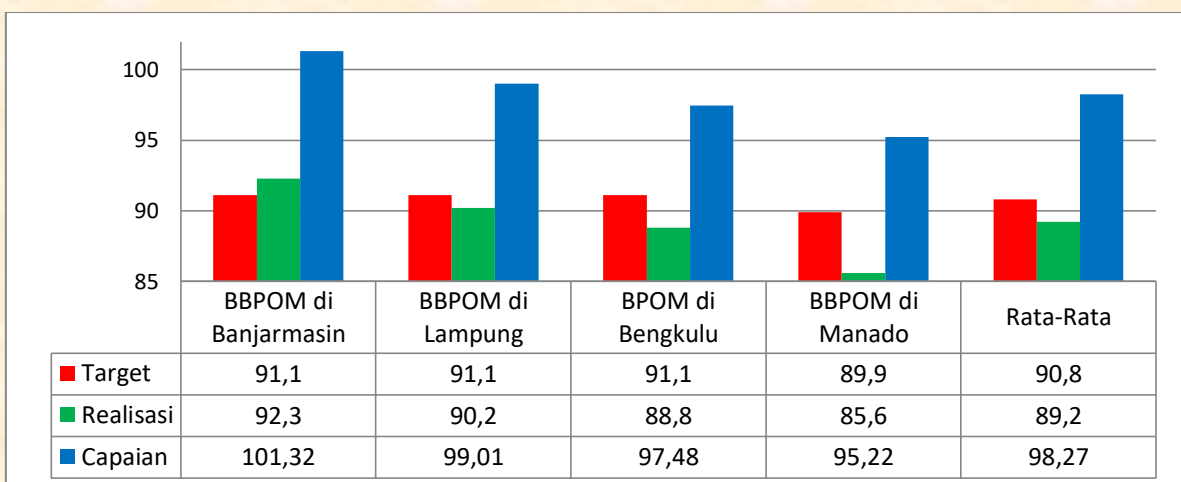
Pada tabel di atas dapat diketahui Target Rencana Strategis tahun 2021 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 91,1. Jika realisasi kinerja pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 101,32 % dengan kriteria Baik. Realisasi indikator ini untuk tahun 2021 (91,1) masih berada di bawah target jangka menengah tahun 2024 (94,6). Oleh karena itu, diperlukan pengawalan terhadap pencapaian target dengan menambahkan langkah-langkah strategis untuk peningkatan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 agar capaian kinerja mencapai target jangka menengah tahun 2024 dan tetap masuk dalam kriteria baik atau bisa menjadi sangat baik. Jika realisasi tahun 2021 dibandingkan dengan target Nasional pada tahun 2021 sebesar 88 maka capaian menunjukkan 103,49% dengan kriteria Baik.

Apabila capaian kinerja tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, tergambar sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.2.3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 3.1. Tahun 2020-2021

Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 yang memperoleh capaian sebesar 112,03%. Apabila dicermati capaian tahun 2020 yang lebih tinggi tersebut disebabkan oleh penetapan target tahun 2021 lebih tinggi dari target tahun 2020 namun realisasi pada tahun 2021 lebih rendah dibanding realisasi pada tahun 2020. Karena adanya selisih target dan realisasi yang lebih rendah pada tahun 2021, maka capaian tahun 2021 juga lebih rendah dibanding capaian pada tahun 2020.

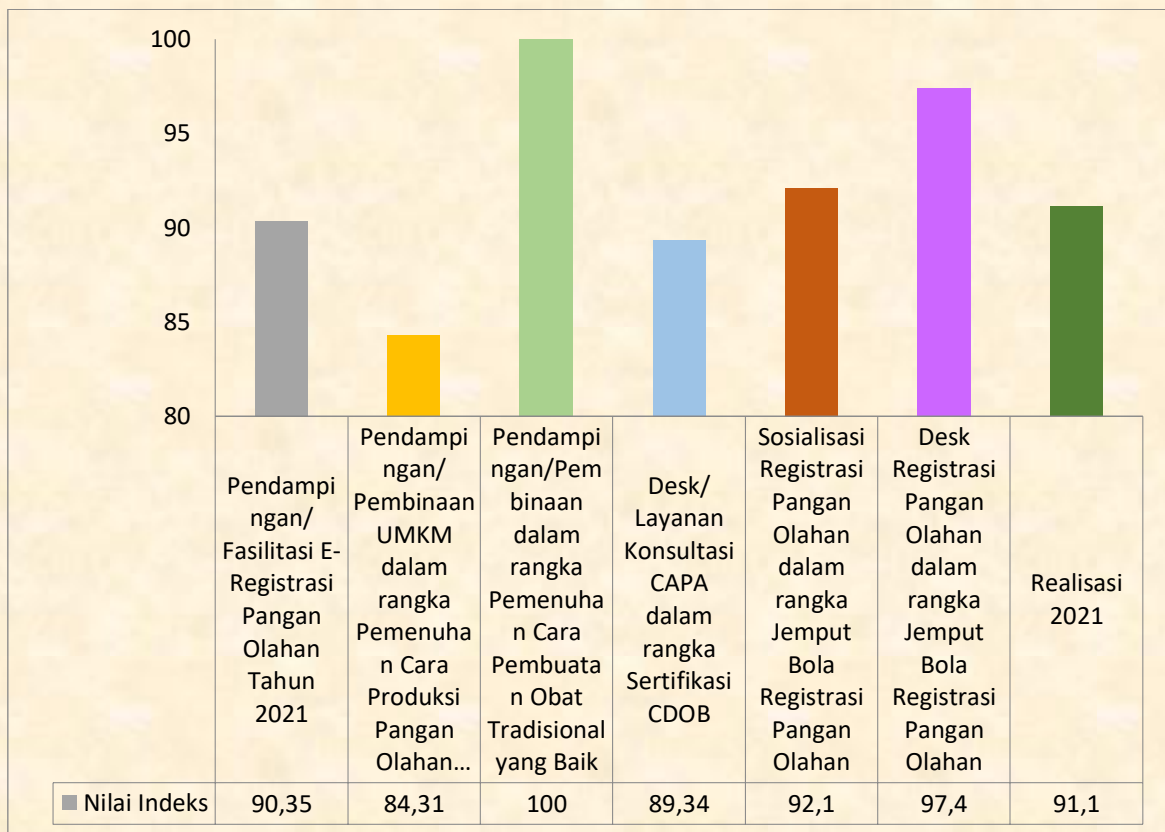


Grafik 3.2.3.1.4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IK 3.1 Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021

Dari grafik di atas terlihat bahwa realisasi persentase Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin telah berhasil mencapai target nasional yang ditetapkan (89) yaitu sebesar 91,1. Realisasi UPT BPOM lain yang setara yaitu BBPOM di Bandar Lampung telah melebihi standar Nasional. Namun untuk realisasi BBPOM di Manado dan BPOM di Bengkulu belum mencapai target nasional. Diantara keempat UPT BPOM lain yang setara, realisasi tertinggi dicapai oleh BBPOM di Banjarmasin dan terendah dicapai oleh BBPOM di Manado.

Capaian indikator ini pada tahun 2021 berbeda dengan capaian tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, capaian untuk indikator ini yaitu 112,03% dengan kriteria Sangat Baik, sedangkan capaian untuk indikator ini pada tahun 2021 yaitu 101,32% dengan kriteria Baik.

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survey kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perizinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Survey indeks kepuasan pelaku usaha dilakukan BBPOM di Banjarmasin terhadap 6 jenis kegiatan berikut: Pendampingan/Fasilitasi E-Registrasi Pangan Olahan Tahun 2021, Pendampingan/Pembinaan UMKM dalam rangka Pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, Pendampingan/Pembinaan dalam rangka Pemenuhan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik, Desk/Layanan Konsultasi CAPA dalam rangka Sertifikasi CDOB, Sosialisasi Registrasi Pangan Olahan dalam rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan dan Desk Registrasi Pangan Olahan dalam rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan, dengan masing-masing hasil indeks sebagaimana terlihat pada grafik berikut :



Grafik 3.2.3.1.5. Nilai Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan pada setiap jenis Kegiatan Pembinaan Tahun 2021

Dari keenam jenis kegiatan sebagai target survey, nilai survey tertinggi terdapat pada kegiatan Pendampingan/Pembinaan dalam rangka Pemenuhan CPOTB dengan indeks kepuasan 100. Untuk kegiatan Pendampingan/ Fasilitasi E-Registrasi Pangan Olahan, Pendampingan/ Pembinaan UMKM dalam rangka Pemenuhan CPOOB dan Desk/ Layanan Konsultasi CAPA dalam rangka Sertifikasi CDOB, nilai indeks kepuasan berada di bawah nilai indeks kepuasan yang dicapai BBPOM di Banjarmasin tahun 2021.

Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan pembinaan intensif baik melalui tatap muka langsung maupun media komunikasi online (*whatsapp*). Kecukupan waktu dan fasilitas memiliki nilai yang lebih rendah dibanding yang lainnya. Adanya puncak

gelombang kedua pandemic Covid-19 dan kebijakan *Work From Home* (WFH) bagi petugas BBPOM di Banjarmasin selama Juli-September 2021. memberikan dampak pada kemudahan tatap muka dengan petugas. Padahal pembinaan/bimbingan/konsultasi secara tatap muka intensif biasanya memberikan waktu cukup bagi pelaku usaha dan tersedia fasilitas secara riil. Adanya kecenderungan pelaku usaha yang lebih menyukai pembinaan tatap muka dibandingkan melalui media komunikasi online dapat menjadi faktor capaian nilai indeks pada ketidakegiatan tersebut menjadi lebih rendah dibanding kegiatan lain. Meskipun begitu, indeks yang dicapai masing-masing kegiatan masuk dalam kriteria Sangat Puas menurut kriteria tingkat kepuasan pada Tabel 3.2.3.1.2.

Nilai Indeks	Tingkat Kepuasan
0.00-25.00	Tidak Puas
26-50	Kurang Puas
51-75	Puas
76-68	Sangat Puas I
86-95	Sangat Puas II
96-100	Sangat Puas III

Tabel 3.2.3.1.3. Kriteria Tingkat Kepuasan pada Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Perencanaan yang matang memudahkan langkah BBPOM di Banjarmasin dalam menentukan arah kegiatan sehingga kepuasan kerja dan kepuasan pelaku dapat tercapai. Sesuai dengan perspektif teori *stakeholder*, dan atau pemenuhan kebutuhan *stakeholders* merupakan elemen penting dalam perencanaan di semua bidang. *Stakeholder* (dalam hal ini pelaku usaha) yang telah terpenuhi kebutuhannya terhadap pembinaan yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin secara otomatis akan mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi dari BBPOM di Banjarmasin. Oleh karena itu, untuk memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha, BBPOM di

Banjarmasin melakukan upaya perencanaan, monitoring dan evaluasi secara rutin sehingga dapat memberikan pembinaan yang tepat sasaran dan efektif sesuai kebutuhan pelaku usaha.

Target pelaku usaha penerima bimbingan/pembinaan ditentukan berdasarkan analisa risiko dan prioritas. Setiap bulan dilakukan identifikasi target berdasarkan antara lain : (1) Jenis produk dan legalitas produk; (2) Kesiapan dan komitmen pelaku usaha; (3) Hasil pengawasan *post market*; (4) Riwayat pembinaan sebelumnya; (5) Jenis kebutuhan pembinaan pelaku usaha. Monitoring dan evaluasi dilakukan dan menjadi salah satu dasar penetapan target pembinaan selanjutnya. Selain itu, perencanaan survey juga sangat diperlukan, antara lain menentukan jenis kegiatan pembinaan target survey, menentukan target jumlah responden serta menentukan rentang waktu survey.

Di awal tahun 2021, BBPOM di Banjarmasin telah menetapkan rencana pelaksanaan survey dengan target 6 jenis kegiatan dan 104 responden. Pada pelaksanaannya, survey dilakukan pada 6 jenis kegiatan dengan jumlah responden 82 (78,85% dari target jumlah responden). Ketidaktercapaian target jumlah responden ini dapat dikarenakan kurangnya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan survey IKEPU tahun 2021.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) pada tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.37.533.500,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 37.532.764,- atau 100%.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
101,32 %	100 %	1,01	0,01	100%	Efisien

Tabel 3.2.3.1.4 Efisiensi Anggaran IK.3.1 Tahun 2021

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebagaimana dalam DIPA tahun anggaran 2021 hingga diperoleh serapan anggaran sebesar 100%, dengan capaian kinerja sebesar 101,32 %. Dari data tersebut (sebagaimana dalam tabel di bawah) dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 1,01 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,01, sehingga capaian efisiensi pada tahun 2021 sebesar 100 %. Indeks efisiensi (IE) sebesar 1,01 dan capaian Tingkat Efisiensi (TE) 100 % menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dinilai efektif dalam mencapai output berupa Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi anggaran sebanding dengan capaian kinerja sehingga menghasilkan tingkat efisiensi yang baik atau efisien.

BBPOM di Banjarmasin telah melakukan upaya pendampingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha, utamanya UMKM, baik dalam komoditi pangan, kosmetik maupun obat tradisional. Dari tahun ke tahun, jumlah UMKM/pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan/pendampingan BBPOM di Banjarmasin terus meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari peningkatan animo masyarakat dalam memproduksi produk Obat dan Makanan dan juga adanya inovasi pendampingan jemput bola yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin yang disebut dengan inovasi "Ganii UMKM".

GANII UMKM merupakan salah satu inovasi BBPOM di Banjarmasin dalam memberikan pelayanan publik kepada pelaku usaha/UMKM di bidang pangan, kosmetik maupun obat tradisional secara jemput bola. Inovasi Ganii UMKM tertuang pada Surat Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin Nomor HK.02.02.109.1091.01.20.0105B tanggal 3 Januari 2020 tentang Inovasi Ganii UMKM dan Surat Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin Nomor HK.02.02.109.1091.01.21.0117B tanggal 4 Januari 2021 tentang Inovasi Ganii UMKM. Berdasarkan SOP Mikro Ganii UMKM Nomor SOP POM-04.01/CFM.01/SOP.01/IK.22A.01 tanggal 4 Januari 2021, kegiatan Ganii UMKM dimulai dari kegiatan identifikasi/inventarisasi target UMKM.

Identifikasi target UMKM dapat diperoleh dari informasi data Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK), data hasil pengawasan subkelompok substansi inspeksi, maupun data/informasi dinas terkait dari hasil koordinasi yang dilakukan oleh tim sertifikasi BBPOM di Banjarmasin.

Pendampingan yang dilakukan meliputi pelayanan konsultasi pelaku usaha *start up* jemput bola (petugas melakukan kontak telepon kepada pelaku usaha), pendampingan denah/layout bangunan, pendampingan penerapan GMP/GDP, pendampingan pemenuhan Corrective Action Preventive Action (CAPA), sampling dan pengujian produk UMKM dalam rangka registrasi serta pendampingan dalam registrasi online maupun notifikasi. Pendampingan dilakukan secara on site maupun secara online (via whatsapp dan telepon).

Koordinasi dan sosialisasi Inovasi Ganii UMKM juga dilakukan kepada instansi perizinan dan Pembina UMKM antara lain; Mall Pelayanan Publik / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota serta asosiasi pelaku usaha.

Pada tahun 2021, BBPOM di Banjarmasin menyediakan proporsi target sampel pangan olahan dan obat tradisional sebagai sampel UMKM dalam rangka registrasi. BBPOM di Banjarmasin melakukan sampling terhadap UMKM binaan yang telah menunjukkan pemenuhan sarana/prasarana dan mencapai tahap audit PSB. Jumlah sampel UMKM yang disampling dan diuji oleh BBPOM di Banjarmasin sejumlah 55 sampel pangan olahan dan 8 sampel obat tradisional. Pengujian dilakukan dengan parameter uji yang dipersyaratkan dalam registrasi sehingga selain dapat digunakan sebagai pemastian keamanan sampel UMKM oleh petugas balai, UMKM juga dapat menggunakan hasil uji sebagai salah satu persyaratan registrasi.

Selain Inovasi Ganii UMKM, BBPOM di Banjarmasin juga melaksanakan sinergisme dukungan terhadap UMKM yaitu melalui program kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak Kementerian Pertanian, dimana peran BBPOM di Banjarmasin melalui pendampingan intensif menuju izin edar, sedangkan Kementerian Pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi. UMKM

potensial menjadi target program tersebut yaitu Kelompok Tani Sehati (Produsen Telur Asin Rempah Zen Ahbab), pendampingan telah dilaksanakan mulai bulan Februari hingga Desember 2021 dan telah mendapatkan NIE.

Pada tahun 2021, BBPOM di Banjarmasin juga melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam melakukan registrasi produk maupun notifikasi. Pada akhir bulan September 2021, BBPOM di Banjarmasin bersama Direktorat Registrasi Pangan Olahan menyelenggarakan pelayanan prima berupa Sosialisasi dan Desk Registrasi Pangan Olahan. Pada kegiatan tersebut, sebanyak 15 Nomor Izin Edar MD terbit. Fasilitasi registrasi terus berlanjut setelah kegiatan berlangsung. Fasilitasi tersebut dilakukan melalui media komunikasi online maupun secara langsung. Hingga akhir tahun 2021, pendampingan membuahkan hasil terbitnya 26 NIE pangan olahan dan 2 notifikasi kosmetik.

Selain pendampingan terhadap pelaku usaha bidang pangan, BBPOM di Banjarmasin juga melakukan pembinaan/bimbingan terhadap distributor obat/ PBF serta produsen/ UMKM Obat Tradisional. Bentuk pembinaan berupa Pendampingan/ Pembinaan dalam rangka Pemenuhan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik dan Desk/ Layanan Konsultasi CAPA dalam rangka Sertifikasi CDOB. Pendampingan tersebut dilakukan melalui media whatsapp grup sehingga jam konsultasi terbuka tanpa harus menjadwalkan pertemuan layanan konsultasi mengingat adanya kendala jadwal inspektur CDOB pada jam kerja di kantor dikarenakan tingginya mobilitas kerja petugas.

Rencana atau tindak lanjut yang akan dilakukan dari hasil evaluasi adalah :

1. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi inovasi Ganii UMKM serta pembinaan/pendampingan yang dilaksanakan BBPOM di Banjarmasin sehingga dapat mendukung pencapaian target kinerja
2. Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan survey. Dengan adanya monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan survey, dapat diidentifikasi secara awal hambatan maupun peluang perbaikan yang muncul sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelaku usaha terhadap upaya pembinaan/pendampingan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, realisasi indikator kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 telah berhasil dengan memperoleh capaian 101,32% dari target yang ditetapkan, dan Balai Besar POM di Banjarmasin optimis akan berhasil mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

Indikator Kinerja 3.2 :

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
78,33	73,03	93,23%	Baik

Tabel 3.2.3.2.1. Realisasi Kinerja IK.3.2 Tahun 2021

Tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan (Kotler, 1997). Indeks kepuasan masyarakat adalah ukuran kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dari produk Obat dan Makanan. Untuk mengukur indikator Kinerja ini dilakukan Survei Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan oleh Pusat Riset Obat dan Makanan (PRKOM) Badan POM di 34 provinsi dengan estimasi level provinsi.

Ada 5 (lima) indikator pembentuk tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan BPOM yaitu :

- 1) reliability, kemampuan/upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk;

- 2) assurance, kemampuan dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan;
- 3) tangible, layanan informasi tentang keamanan produk Obat dan Makanan;
- 4) empathy, kepedulian atas kebutuhan masyarakat untuk produk yang aman;
- 5) responsiveness, tindakan atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM merupakan hasil survei terhadap lima komoditi yaitu obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Materi yang ditanyakan dalam survei adalah terkait kepuasan terhadap upaya pengawasan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; kepuasan terhadap tindakan BPOM terhadap obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan yang berbahaya bagi masyarakat; kepuasan terhadap kemampuan melindungi masyarakat dari obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan yang berbahaya; serta kepuasan terhadap perhatian BPOM atas jaminan keamanan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan

Interpretasi indeks mengacu pada kategori sangat tidak puas, tidak puas, biasa saja/tidak tahu, puas dan sangat puas.

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

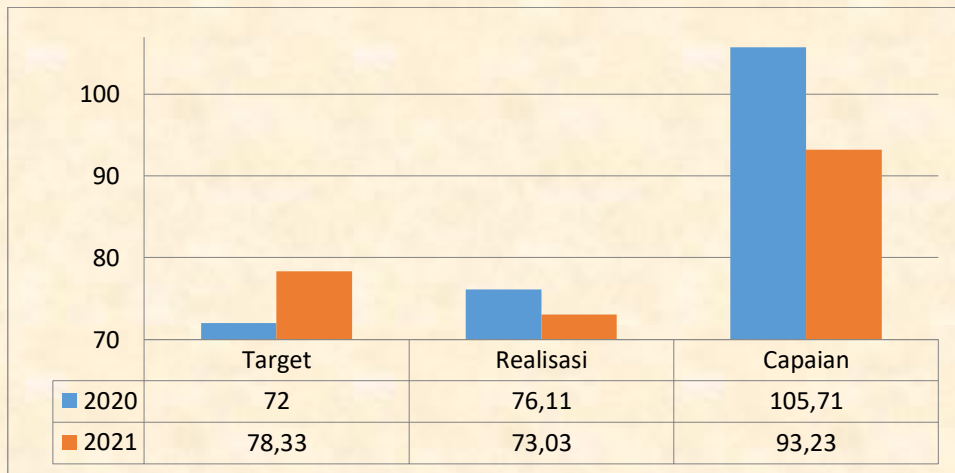
Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Semula	72	75	77	80	83
Menjadi	76,11 (Realisasi)	78.33	80.56	82.78	85.01

Tabel 3.2.3.2.2. Perubahan Target IK 3.2.
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024

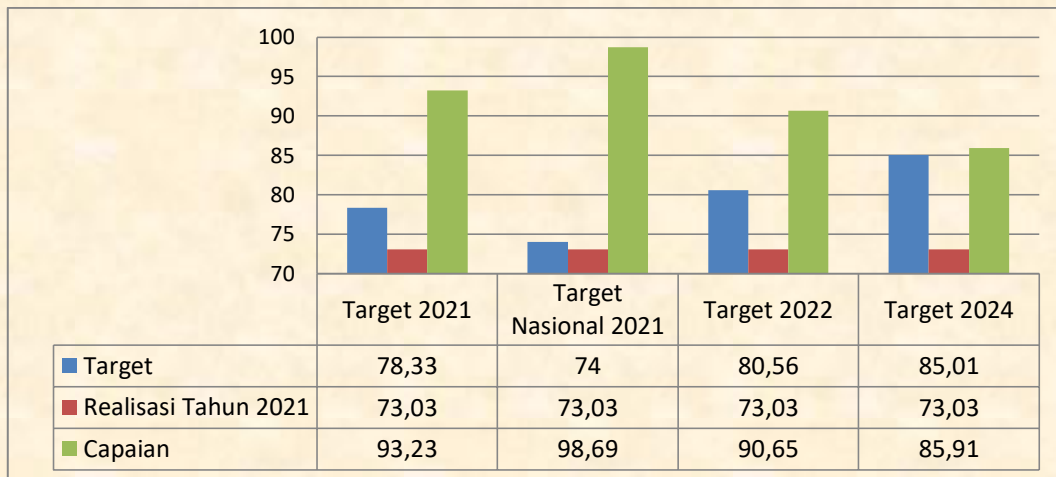
Target indikator kinerja indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin yang ditetapkan untuk tahun 2021 adalah 78,33 dengan realisasi 73,03 (Kategori Cukup Puas) dan capaian 93,23%. Belum tercapainya indeks sesuai target dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor demografi, yaitu usia responden (dengan range antara kurang dari 25 tahun sampai lebih dari 50 tahun), tingkat pendidikan (tidak bersekolah hingga perguruan tinggi), wilayah demografi (perkotaan/urban dan pedesaan/rural), serta perbedaan jenis kelamin (laki-laki dan wanita).

Target Indeks Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 yaitu 78,33 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 72,00. Namun realisasi dibanding target dan capaian kinerja tahun 2021 (93,23%) lebih rendah dibanding capaian kinerja tahun 2020 yang mencapai 105,71%.



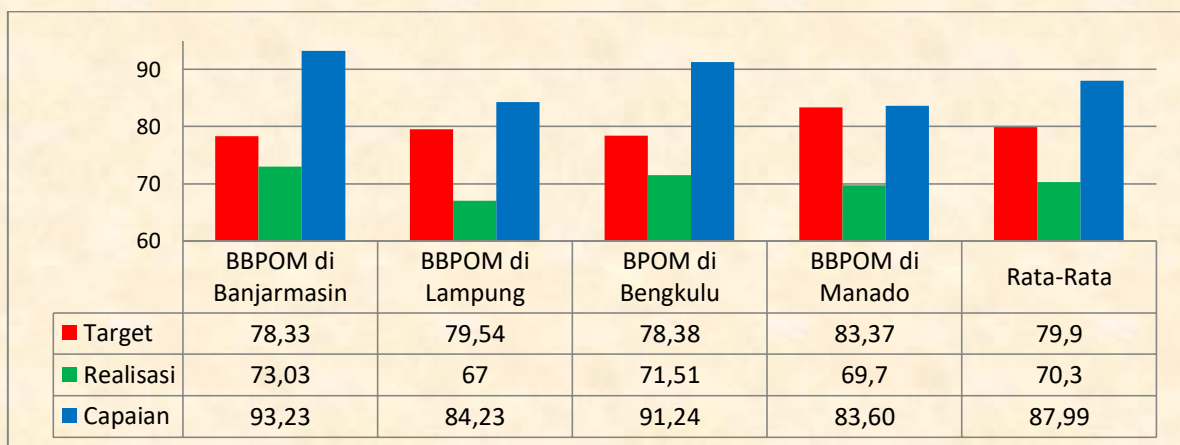
Grafik 3.2.3.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 3.2. Tahun 2020-2021

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya capaian kinerja tahun 2021, yaitu lokus survei yang berbeda dengan kondisi demografi yang juga berbeda, baik tingkat pendidikan, wilayah penyebaran survei dan usia responden. Materi informasi yang disampaikan, metode penyampaian serta sebaran masyarakat penerima informasi yang heterogen, juga dapat berpengaruh pada penilaian survei.



Grafik 3.2.3.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 3.2 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Balai Tahun 2022 dan 2024

Pada akhir Renstra tahun 2024, target kinerja indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Banjarmasin adalah 83,00, namun dengan realisasi indeks pada tahun 2021 baru mencapai 73,03 diperlukan perbaikan dan peningkatan dalam publikasi hasil kegiatan pengawasan Obat dan Makanan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin, baik melalui media sosial maupun media massa (cetak dan elektronik), sehingga masyarakat dapat melihat dan merasakan langsung hasil kinerja pengawasan obat dan makanan.



Grafik 3.2.3.2.3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IK 3.2 Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021

Dibandingkan dengan balai-balai lain, indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Banjarmasin (73,03) lebih tinggi dari indeks BBPOM di Bandar Lampung dengan capaian 67,00, BBPOM di Manado dengan capaian indeks 69,70, serta Balai POM di Bengkulu yang memperoleh indeks 71,51. Perbedaan perolehan indeks ini tergantung dari faktor demografi masing-masing wilayah kerja balai.

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM di wilayah perkotaan (urban) lebih tinggi dibanding perdesaan (rural), masyarakat dengan usia di bawah 35 tahun cenderung memiliki indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM yang tinggi dibanding kelompok usia di atasnya, serta semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi pula indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebagaimana dalam DIPA tahun anggaran 2021 hingga diperoleh serapan anggaran sebesar 99,76%, dengan capaian kinerja sebesar 93,23%, efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 0,93 dengan tingkat efisiensi sebesar -0,07, sehingga capaian efisiensi pada tahun 2021 sebesar 75%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penggunaan anggaran yang dilaksanakan BBPOM di Banjarmasin dinilai belum efisien dalam mencapai output target indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Banjarmasin.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
93,23 %	99,76 %	0,93	-0,07	75%	Tidak Efisien

Tabel 3.2.3.2.4 Efisiensi Anggaran IK.3.2 Tahun 2021

Sebagai tindak lanjut agar target indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan pada tahun-tahun berikutnya dapat tercapai, diperlukan berbagai upaya peningkatan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kegiatan publikasi (liputan media massa) dan sosialisasi di berbagai media massa dan media sosial terkait berbagai aktivitas BPOM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti razia obat dan makanan yang kedaluwarsa, tidak memiliki izin edar dan produk ilegal. Pesan/tema utama yang disampaikan adalah BPOM melindungi masyarakat.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah terutama lintas sektor yang menangani bidang Obat dan Makanan.
- 3) Perbaikan dan pengembangan materi sosialisasi, tidak hanya sebatas informasi Obat dan Makanan aman, tetapi juga pemberitaan tentang kegiatan pemeriksaan dan penindakan yang dilakukan BPOM.
- 4) Memperluas sasaran penerima informasi ke kabupaten/kota hingga tingkat

kecamatan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin.

- 5) Bekerjasama dengan media lokal (media cetak, media elektronik) di kabupaten/kota dalam menunjang publikasi hingga ke daerah pedesaan.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun realisasi Indikator Kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 belum berhasil mencapai target, hanya memperoleh capaian 93,23%, namun pelaksanaan kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini dapat dikategorikan berhasil, dan Balai Besar POM di Banjarmasin optimis akan mampu mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

Indikator Kinerja 3.3 :

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Banjarmasin

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
90	91.83	102.03%	Baik

Tabel 3.2.3.3.1. Realisasi Kinerja IK.3.3 Tahun 2021

Jenis pelayanan publik di Balai Besar POM di Banjarmasin ada 3 (tiga) :

- a. pelayanan informasi dan pengaduan,
- b. pelayanan penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI)/ Surat Keterangan Ekspor (SKE), dan
- c. pelayanan pengujian sampel eksternal.

Survei kepuasan masyarakat diberikan kepada responden yang menerima manfaat dari masing-masing layanan, pada periode tertentu, dengan jumlah tertentu, yang menilai 9 (sembilan) unsur pelayanan :

- 1) persyaratan pelayanan ;
- 2) sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan ;

- 3) waktu penyelesaian ;
- 4) biaya/ tarif pelayanan ;
- 5) produk spesifikasi jenis pelayanan ;
- 6) kompetensi pelaksana ;
- 7) perilaku pelaksana ;
- 8) penanganan pengaduan, saran dan masukan bagi pelayanan yang diberikan
- 9) sarana dan prasarana pelayanan.

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar POM di Banjarmasin, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Semula	88,5	90,55	91	91,5	92
Menjadi	89,18 (Realisasi)	90	91	91,5	92

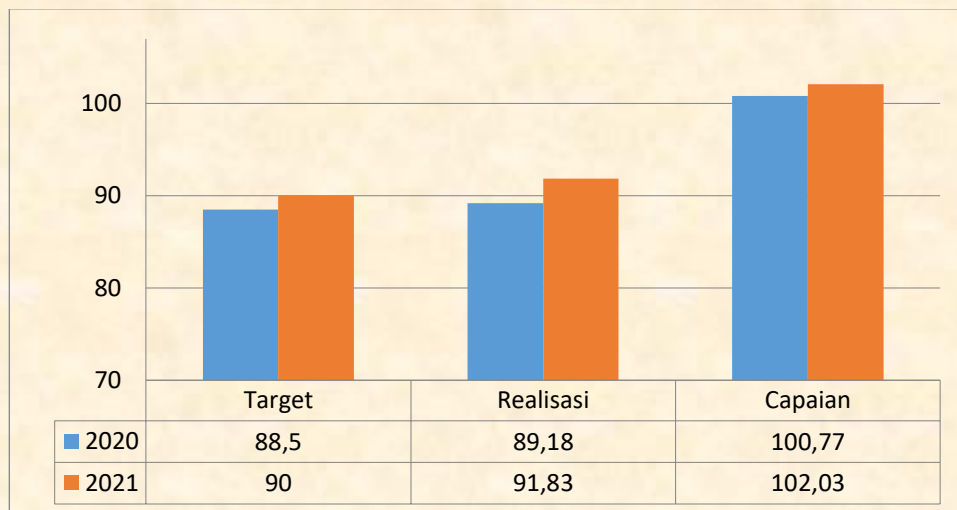
**Tabel 3.2.3.3.2. Perubahan Target IK 3.3.
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024**

Pada tahun 2021, telah ditetapkan target indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar POM di Banjarmasin sebesar 90,00 dengan realisasi 91,83 dan capaian terhadap target sebesar 102,03%. Ini artinya mutu

pelayanan yang diberikan Balai Besar POM di Banjarmasin kepada masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan masuk dalam kategori baik.

Tiga aspek yang memperoleh nilai tertinggi (kategori sangat baik) adalah perilaku pelaksana layanan, kompetensi pelaksana layanan, serta penanganan pengaduan, saran dan masukan. Tiga aspek terendah (kategori baik) adalah sarana dan prasarana, persyaratan pelayanan, serta biaya pelayanan. Terhadap aspek yang memperoleh nilai tertinggi, diupayakan agar tetap dapat dipertahankan dan nilainya bertambah. Sedangkan terhadap aspek terendah namun nilainya masih masuk kategori baik, perlu perbaikan secara menyeluruh agar indeks kepuasan masyarakat di tahun-tahun berikutnya meningkat.

Indeks kepuasan masyarakat Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 (91,83) meningkat dibanding tahun 2020, yaitu 87,90. Aspek pelayanan yang masih kurang pada tahun 2020 diperbaiki dan ditingkatkan di tahun 2021.

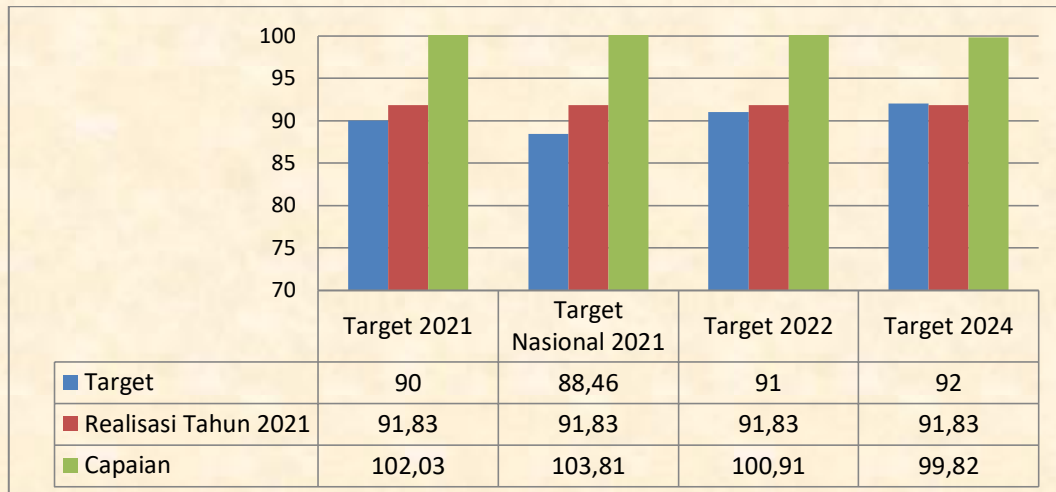


Grafik 3.2.3.3.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 3.3 Tahun 2020-2021

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja ini adalah :

1. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang mengakomodir saran dan masukan masyarakat serta lintas sektor dalam penyusunan standar pelayanan.
2. Peningkatan kompetensi petugas layanan, baik pengetahuan teknis terkait Obat dan Makanan, maupun softskill, seperti rasa empati kepada konsumen, cepat tanggap

- dan cara penanganan aduan yang disampaikan direspon dengan sangat baik.
3. Penerapan sistem *reward* dan *punishment* bagi petugas layanan.
 4. Evaluasi terhadap capaian kinerja di tahun sebelumnya serta menindaklanjuti saran dan masukan yang disampaikan konsumen.



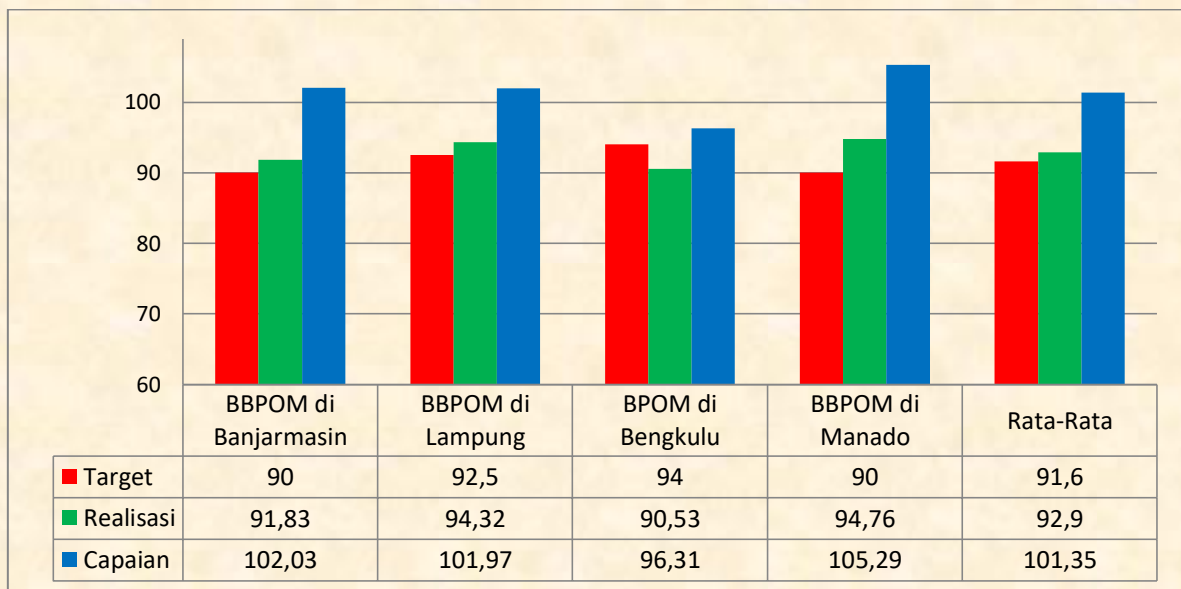
Grafik 3.2.3.3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 3.3 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Balai Tahun 2022 dan 2024

Pada tahun 2024, target indeks kepuasan masyarakat Balai Besar POM di Banjarmasin yang tertuang dalam rencana strategis adalah 92,00, sedangkan realisasi indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh pada tahun 2021 adalah 91,83. Dengan data realisasi tahun 2021 yang tidak jauh dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2024, BBPOM di Banjarmasin akan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, tetap diperlukan upaya-upaya perbaikan agar indeks kepuasan masyarakat meningkat, yaitu dengan mengkaji ulang kebijakan, prosedur, instruksi kerja, sistem pengarsipan dan dokumentasi yang memadai, perbaikan sarana prasarana, peningkatan kompetensi petugas pelayanan serta penyediaan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan.

Jika dibandingkan dengan balai lain, capaian BBPOM di Banjarmasin lebih rendah dibanding capaian BBPOM di Manado sebesar 105,29%. Sedangkan jika

dibandingkan dengan Balai POM di Bengkulu yang mencapai 73,33% dan BBPOM di Bandar Lampung dengan capaian 101,97% BBPOM di Banjarmasin lebih tinggi indeks kepuasan masyarakatnya. Perbedaan hasil survei kepada masyarakat ditentukan banyak hal, seperti penyediaan sarana prasarana, kemampuan petugas dalam pelayanan, sikap dan perilaku petugas, serta bimbingan petugas dalam pengisian survei kepada konsumen, karena ada konsumen yang kurang memahami tujuan pertanyaan yang diajukan, sehingga berpengaruh dalam penilaian.



Grafik 3.2.3.3.3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IK 3.3 Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar POM di Banjarmasin pada tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebesar Rp.32.576.500,- atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp.32.575.883,-, dengan capaian kinerja sebesar 102,03%. Dari data tersebut (sebagaimana dalam tabel di bawah) dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 1,02 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,02, sehingga capaian efisiensi pada tahun 2021 sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam rangka kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan BBPOM di Banjarmasin dinilai efisien

dalam mencapai output berupa indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Banjarmasin.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
102,03%	100 %	1,02	0,02	100%	Efisien

Tabel 3.2.3.3.3 Efisiensi Anggaran IK 3.3 Tahun 2021

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan perbaikan dan pemenuhan saran/masukan masyarakat. Dari hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2021, terdapat masukan dan saran dari konsumen yang sebagian besar merespon positif dan memberikan apresiasi terhadap layanan petugas. Tetapi ada beberapa hal yang masih perlu ditindaklanjuti agar pelayanan dapat lebih memberikan kemudahan, efektif waktu dan menimbulkan rasa puas bagi masyarakat. Yang perlu dievaluasi adalah :

- 1) Cara pembayaran PNBP dipermudah, dapat dilakukan pembayaran di kantor BBPOM di Banjarmasin, sehingga konsumen tidak perlu membayar ke bank dan kemudian kembali lagi ke BPOM untuk mengurus administrasi.
- 2) Layanan pengujian dipercepat, sehingga hasil uji laboratorium untuk sampel pihak ke-3 dapat kurang dari tiga hari.
- 3) Belum ada layanan pengiriman dokumen permohonan atau laporan hasil uji secara online (menggunakan *email*).

Terhadap saran/masukan dari konsumen dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti. Terkait pembayaran PNBP, di tahun 2021 telah disediakan mesin EDC untuk pembayaran biaya pengujian, sehingga konsumen tidak perlu membayar ke bank, hal ini akan mempermudah dan mempercepat pelayanan. Untuk layanan

pengujian sampel napza sudah mulai dilakukan percepatan dari 3 hari kerja menjadi 1 hari kerja (1 x 24 jam), namun belum semua sampel dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Kedepannya akan lebih ditingkatkan terkait pelayanan pengujian dengan mengatur petugas penguji serta penyediaan fasilitas dan sarana prasarana. Untuk pengiriman hasil uji, akan ditindaklanjuti dengan mendata email konsumen/instansi yang mengujikan produk di laboratorium BBPOM di Banjarmasin.

Dengan menindaklanjuti saran dan masukan dari masyarakat, serta melaksanakan perbaikan secara maksimal akan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik BBPOM di Banjarmasin.

Berdasarkan uraian di atas, realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 telah berhasil dengan memperoleh capaian 102,03% dari target yang ditetapkan, dan Balai Besar POM di Banjarmasin optimis akan berhasil mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

Sasaran Kegiatan 4 :

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin.

Sasaran Kegiatan ini memiliki 6 (enam) Indikator Kinerja, dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

Indikator Kinerja 4.1 :

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
82	92,40%	112,68%	Sangat Baik

Tabel 3.2.4.1.1. Realisasi Kinerja IK.4.1 Tahun 2021

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

A = Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

B = *Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%*

C = *Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%*

D = *Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%*

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/ distribusi.

Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi Penghentian Sementara Kegiatan (PSK)/ Pencabutan Ijin/ Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :

- A. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT;
- B. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT;

- C. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat;
- D. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/ lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai Besar POM di Banjarmasin, sebagai berikut :

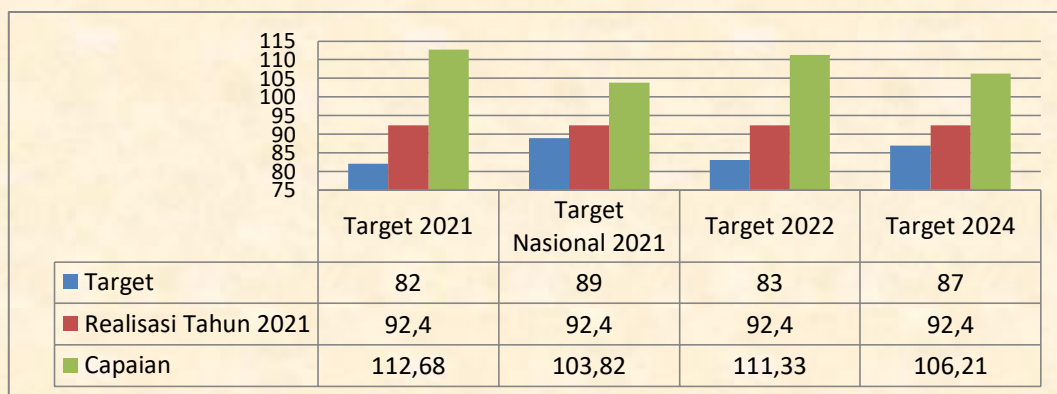
Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Semula	87	89	91	93	95
Menjadi	81,64 (Realisasi)	82	83	85	87

**Tabel 3.2.4.1.2. Perubahan Target IK 4.1.
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024**

Pada tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin telah menindaklanjuti keputusan/ rekomendasi sebanyak 749 keputusan/ rekomendasi dari 776 keputusan/

rekomendasi yang diterima. Sehingga realisasi persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin sebesar 92,40 %.

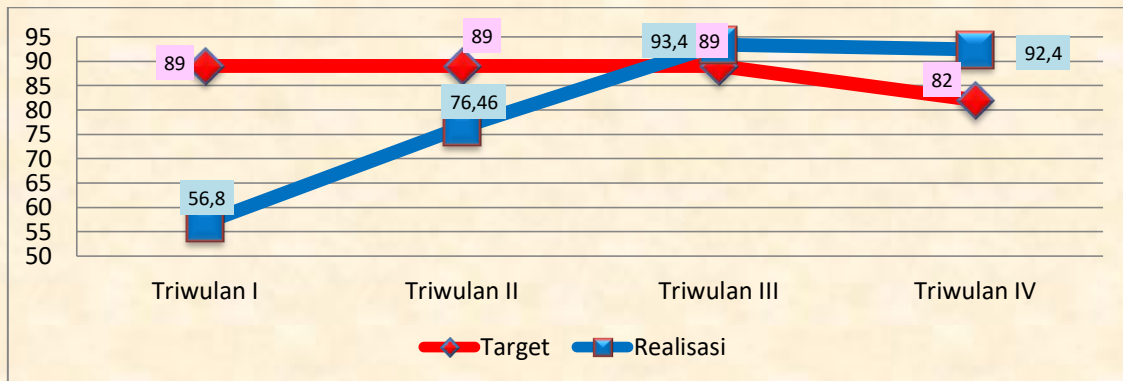
Realisasi kinerja yang diperoleh tersebut apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 serta target akhir renstra tahun 2024, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :



Grafik 3.2.4.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.1 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024

Pada tabel di atas dapat diketahui Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 89 %. Jika realisasi kinerja pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 103,82 % dengan kriteria baik, Realisasi indikator ini untuk tahun 2021 (92,40%) berada diatas target jangka menengah tahun 2024 (89%), sehingga perlu dipertahankan monitoring dan evaluasi kinerja dan pengawalan pencapaian yang telah dilaksanakan dengan menambahkan langkah-langkah strategis untuk peningkatan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sehingga capaian kinerja tetap masuk dalam kriteria baik atau bisa menjadi sangat baik.

Jika dilihat berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap triwulan sampai dengan akhir tahun 2021, diperoleh data sebagai berikut :



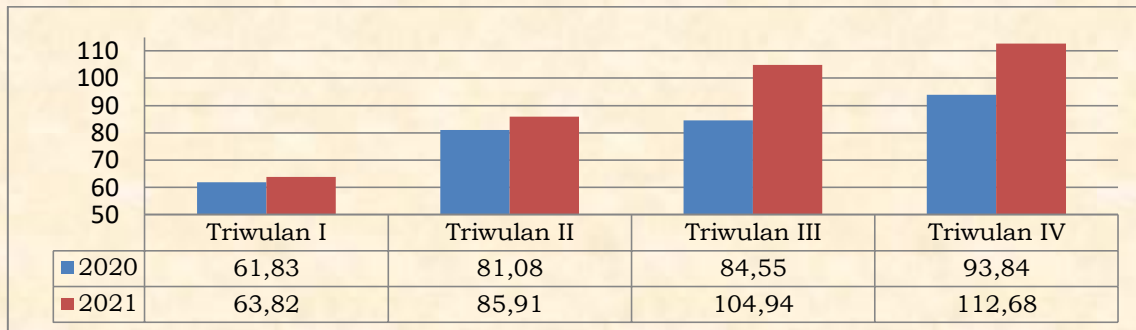
Grafik 3.2.4.1.2. Realisasi Kinerja IK.4.1 Pertriwulan Tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas, terlihat adanya perubahan target, dimana pada triwulan I, II dan III targetnya adalah 89, sedangkan pada triwulan IV sesuai dengan Reviu Renstra 2021-2024 targetnya adalah 82.

Realisasi indikator kinerja ini sangat bergantung dengan jumlah tindak lanjut yang diterbitkan atau dilaksanakan atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan POM/ UPT lain/ lintas sektor. Tindak lanjut yang dilaksanakan dapat dari pihak internal ataupun dari eksternal yaitu Badan POM/ UPT lain/lintas sektor. Komunikasi dan koordinasi secara formal maupun non formal kepada UPT lain dan lintas sektor harus selalu ditingkatkan dalam meningkatkan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan. Komitmen dan kedisiplinan setiap petugas untuk segera membuat surat tindak lanjut setelah hasil pemeriksaan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan atau perlu dilakukan perbaikan atas hasil inspeksi juga sangat dibutuhkan.

Capaian di tahun 2021 adalah persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan merupakan gabungan realisasi di BBPOM di Banjarmasin, Loka POM Kab. Hulu Sungai Utara dan Loka POM Kab. Tanah Bumbu. Nilai persentase terendah didapatkan dari persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT dengan nilai 0 untuk semua wilayah baik Balai maupun Loka.

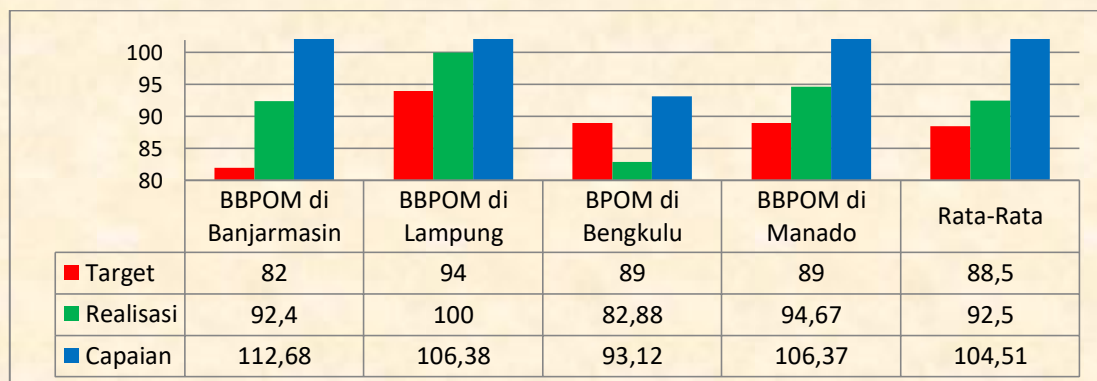
Apabila capaian tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu triwulan IV tahun 2020, tergambar sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.2.4.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.1 Tahun 2020-2021

Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja antara triwulanan tahun 2021 dibandingkan dengan triwulanan tahun 2020. Realisasi persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin **telah mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 112,68%, dengan kriteria **Sangat Baik**.

Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021, berada di posisi ke 3 dibandingkan dengan Balai Besar/Balai POM seklaster, yaitu sebagai berikut :



Grafik 3.2.4.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.1 Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021

Dari grafik di atas terlihat bahwa realisasi **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan** di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin telah berhasil mencapai target nasional yang ditetapkan yaitu sebesar 89 %. Diantara keempat UPT BPOM lain yang tergabung dalam Klaster 4, realisasi terendah dicapai oleh BPOM di Bengkulu dan tertinggi dicapai oleh BBPOM di Bandar Lampung

Dalam meraih capaian kinerja, diperlukan sumber daya yang mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan, Selain SDM, diperlukan anggaran dalam pencapaian output. Dalam meraih capaian kinerja tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran indikator kinerja ini Rp.172.515.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.172.428.743,- atau 99,95%, Indeks Efisiensi sebesar 1,13 tingkat efisiensi sebesar 0,13 capaian efisiensi tahun 2021 sebesar 100% (**Efisien**).

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
112,68	99,95	1,13	0,13	100%	Efisien

Tabel 3.2.4.1.3 Efisiensi Anggaran IK.4.1 Tahun 2021

Pada tahun 2021, persentase hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 82,40 %. Persentase/rekomendasi dari hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT merupakan hasil yang paling rendah dibandingkan dengan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain dan Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT diperoleh sebesar 100%, persentase

keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain sebesar 94,79%.

Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah :

1. Keberhasilan pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan metode pemeriksaan sarana produksi dan distribusi dilakukan secara onsite di masa pandemic dengan selalu memperhatikan protocol kesehatan yang ketat. Terhadap surat rekomendasi yang dikeluarkan BBPOM di Banjarmasin berupa surat perintah pemeriksaan sarana dapat semua ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh BBPOM di Banjarmasin.
2. Demikian juga surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pusat yang berupa perintah pemeriksaan setempat ke sarana terkait temuan produk illegal, produk palsu maupun produk yang tidak memenuhi ketentuan dapat ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh BBPOM di Banjarmasin maupun Loka POM di Kab Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu.

Agar indikator ini tetap mencapai kriteria baik / sangat baik, perlu dilakukan :

1. Koordinasi dengan Badan POM (kedeputian 1 dan kedeputian 2) terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari BBPOM di Banjarmasin, Loka POM Kab, Hulu Sungai Utara dan Loka POM Kab. Tanah Bumbu yang memerlukan tindak lanjut dari Pusat.
2. UPT lebih konsisten memberikan laporan kepada Badan POM (kedeputian 1 dan kedeputian 2) sebagai tindak lanjut UPT atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pusat.

Berdasarkan uraian di atas, realisasi indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan BPOM Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 telah berhasil dengan memperoleh capaian sangat baik, yaitu 112,68% dari target yang ditetapkan, dan Balai Besar POM di Banjarmasin optimis akan berhasil mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

Indikator Kinerja 4.2 :

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
60	71,79	119,65%	Sangat Baik

Tabel 3.2.4.2.1. Realisasi Kinerja IK.4.2 Tahun 2021

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = $(A+B)/2$

A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Balai Besar POM kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/ Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Balai Besar POM di Banjarmasin, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Semula	55	60	65	70	75
Menjadi	53,52 (Realisasi)	60	62	65	70

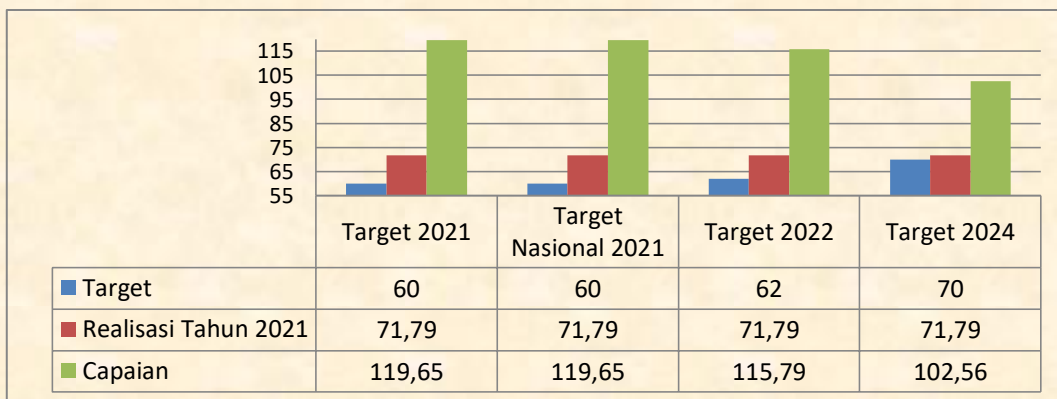
Tabel 3.2.4.2.2. Perubahan Target IK 4.2.

Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024

Sampai dengan akhir tahun 2021 Balai Besar POM di Banjarmasin telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 312 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 214 sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/ feedback. Realisasi **Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi**

sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin sebesar 71,79 %.

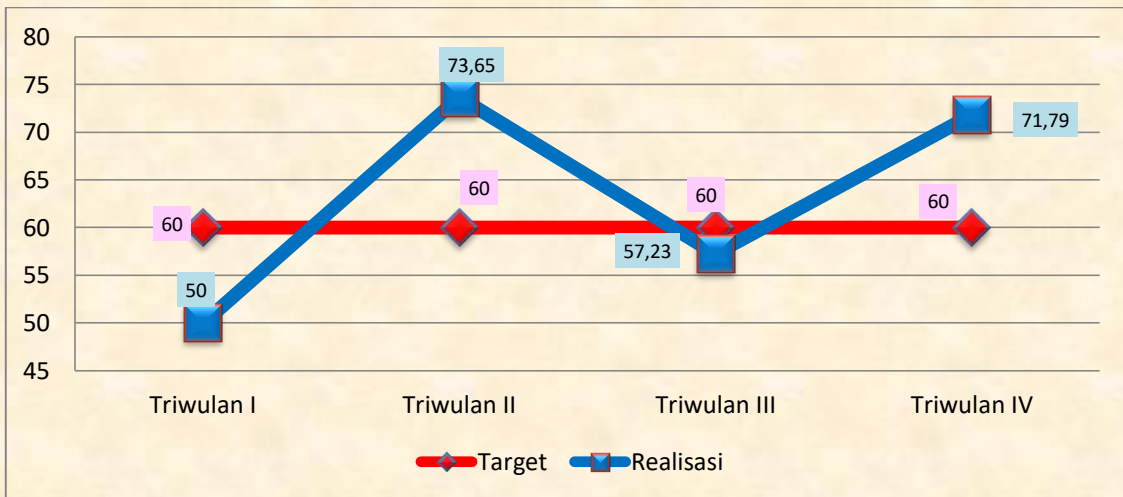
Realisasi kinerja yang diperoleh tersebut apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 serta target akhir renstra tahun 2024, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :



Grafik 3.2.4.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.2 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024

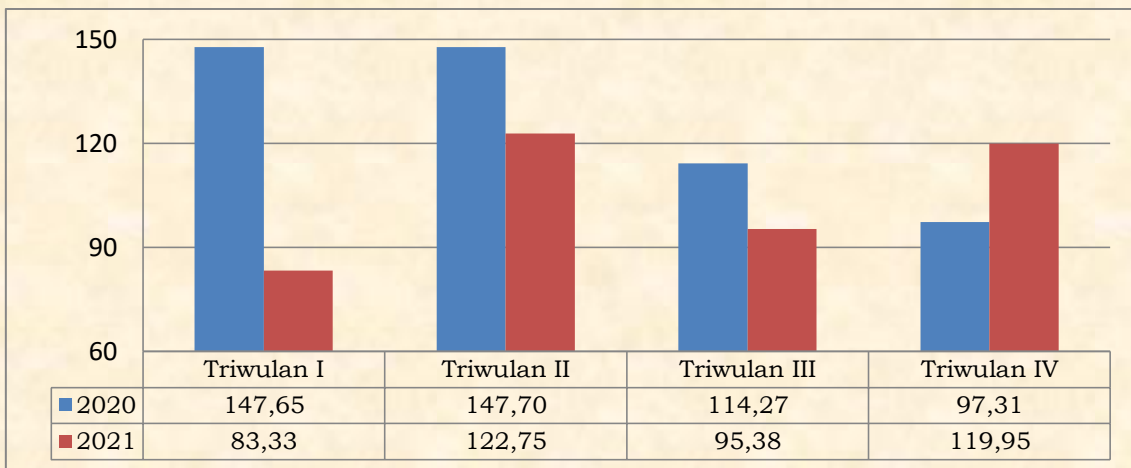
Pada grafik di atas dapat diketahui Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 70 %. Jika realisasi kinerja pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 102,56 % dengan kriteria baik, Realisasi indikator ini untuk tahun 2021 (71,79 %) berada diatas target jangka menengah tahun 2024 (70%), sehingga perlu dipertahankan monitoring dan evaluasi kinerja dan pengawasan pencapaian yang telah dilaksanakan dengan menambahkan langkah-langkah strategis untuk peningkatan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sehingga capaian kinerja tetap masuk dalam kriteria baik atau bisa menjadi sangat baik.

Jika dilihat berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap triwulan sampai dengan akhir tahun 2021, diperoleh data sebagai berikut :



Grafik 3.2.4.2.2. Realisasi Kinerja IK.4.2 Pertriwulan Tahun 2021

Apabila capaian kinerja triwulan IV tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu triwulan IV tahun 2020, tergambar sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.2.4.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.2 Tahun 2020-2021

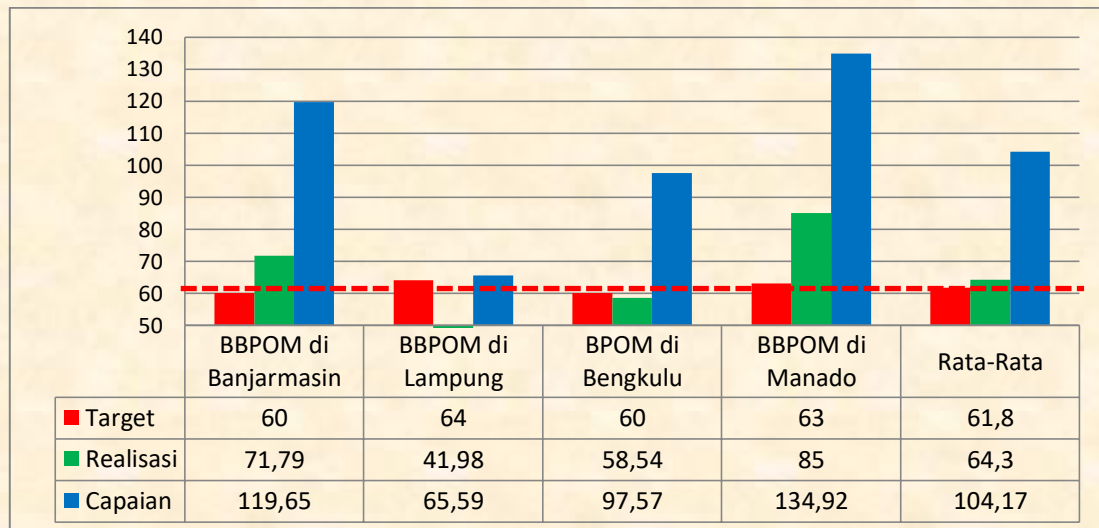
Dari grafik tersebut terlihat bahwa pada tahun 2020 capaian melebihi 120 % karena target yang ditetapkan bersifat kumulatif di tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 target yang ditetapkan adalah sama di setiap triwulan

Dalam meraih capaian kinerja, diperlukan sumber daya yang mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan. Selain sumber daya manusia, diperlukan anggaran dalam pencapaian output. Dalam meraih capaian kinerja pada tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran indikator kinerja ini Rp.122.179.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.122.117.911,- atau 99,95%, Indeks Efisiensi sebesar 1,20 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,2 sehingga capaian efisiensi pada tahun 2021 sebesar 100% (**Efisien**).

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
119,95	99,95	1,20	0,20	100%	Efisien

Tabel 3.2.4.2.3 Efisiensi Anggaran IK.4.2 Tahun 2021

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021, dibandingkan dengan Balai Besar/Balai POM seklaster, yaitu sebagai berikut :



----- = Target Nasional tahun 2021 sebesar 60 %

Grafik 3.2.4.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.2 Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021

Dari grafik di atas terlihat bahwa realisasi **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan** di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin telah berhasil mencapai target nasional yang ditetapkan yaitu sebesar 60 %. Diantara keempat UPT BPOM lain yang setara, realisasi terendah dicapai oleh BPOM di Bengkulu dan tertinggi dicapai oleh BBPOM di Manado

Pada tahun 2021, capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pelaku usaha sebesar 66,53 %, persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh lintas sektor sebesar 77,05 %. Dengan demikian, persentasi rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/lintas sektor mencapai target yang ditetapkan yaitu 71,79 %.

Keberhasilan pencapaian target indikator persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pelaku usaha disebabkan adanya kesadaran dari pelaku usaha memberikan respon feedback berupa CAPA dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Banjarmasin. Keberhasilan pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor disebabkan adanya komunikasi dan kuatnya koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan tindak lanjut kepada sarana produksi PIRT atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh BBPOM di Banjarmasin.

Kendala dari pencapaian target indikator persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pelaku usaha dan lintas sektor yaitu tidak adanya peraturan atau sanksi yang mewajibkan setiap sarana obat dan makanan yang memiliki temuan saat diperiksa untuk membuat laporan perbaikan secara tertulis kepada petugas BBPOM di Banjarmasin.

Kegiatan yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan adalah :

1. Dilakukannya pemeriksaan diiringi dengan pembinaan kepada pelaku usaha agar melakukan perbaikan dengan menyampaikn CAPA atas temuan hasil inspeksi sarana

2. Koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Kesehatan terkait tindak lanjut hasil pengawasan seiring dengan pengawasan PIRT yang menjadi menu pengawasan anggaran DAK NF POM tahun 2021
3. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dan lintas sektor dalam memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan

Berdasarkan evaluasi pada sebelumnya, untuk mempertahankan capaian persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha /lintas sektor, maka Balai Besar POM di Banjarmasin :

1. Melakukan pendekatan/sosialisasi ke pelaku pada saat melakukan inspeksi sarana agar pelaku usaha memberikan feedback /perbaikan CAPA atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Banjarmasin.
2. Melakukan evaluasi dan monitoring feedback dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dalam memberikan tindak lanjut kepada sarana produksi PIRT atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh BBPOM di Banjarmasin

Berdasarkan uraian di atas, realisasi indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan BPOM Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 telah berhasil dengan memperoleh capaian sangat baik, yaitu 119,65% dari target yang ditetapkan, dan Balai Besar POM di Banjarmasin optimis akan berhasil mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

Indikator Kinerja 4.3 :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
100	100	100%	Baik

Tabel 3.2.4.3.1. Realisasi Kinerja IK.4.3 Tahun 2021

Definisi operasional dan cara perhitungan realisasi Indikator Kinerja ini adalah Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) sampai dengan triwulan n (sebagai pembilang) dibandingkan dengan Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) sampai dengan triwulan n (sebagai penyebut).

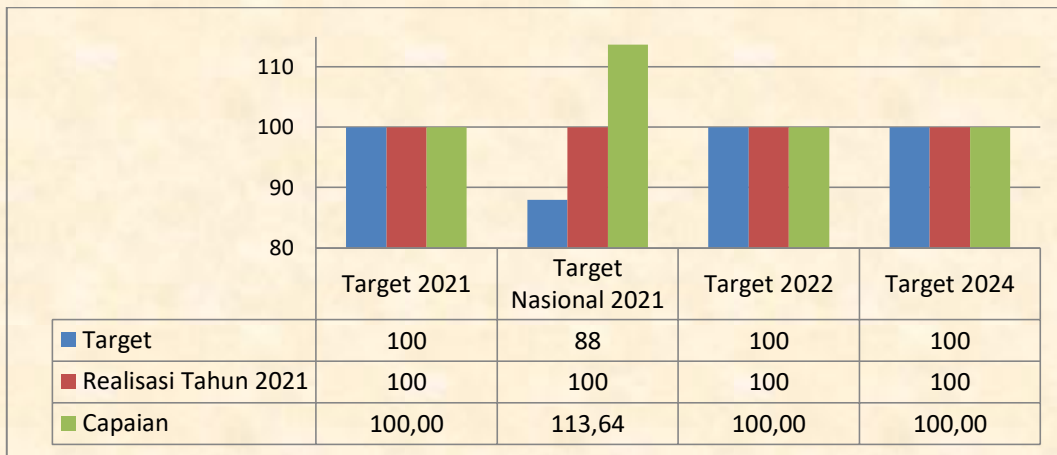
Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Semula	82	88	86	88	90
Menjadi	99,81 (Realisasi)	100	100	100	100

**Tabel 3.2.4.3.2. Perubahan Target IK 4.3.
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024**

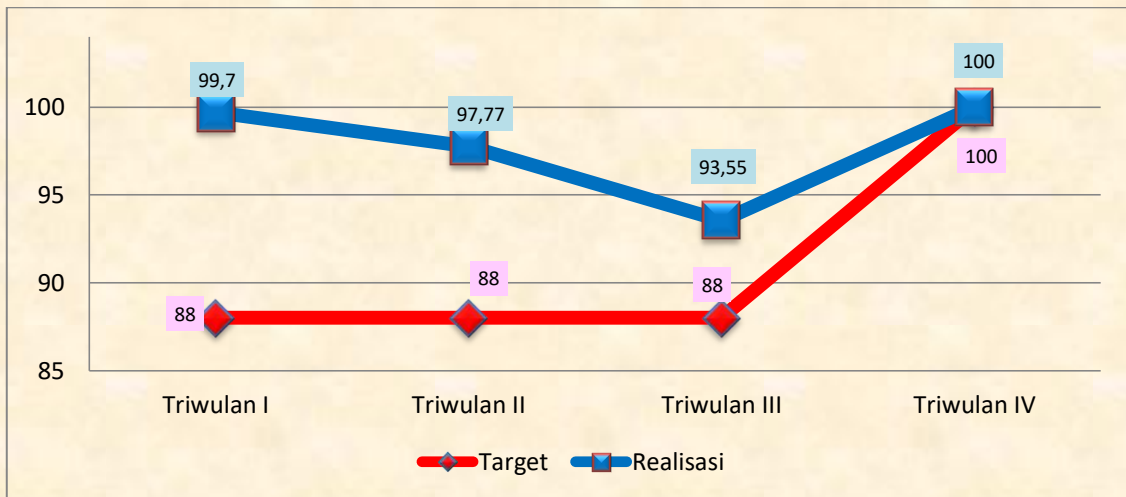
Realisasi kinerja yang diperoleh tersebut apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 serta target akhir renstra tahun 2024, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :



Grafik 3.2.4.3.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.3 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024

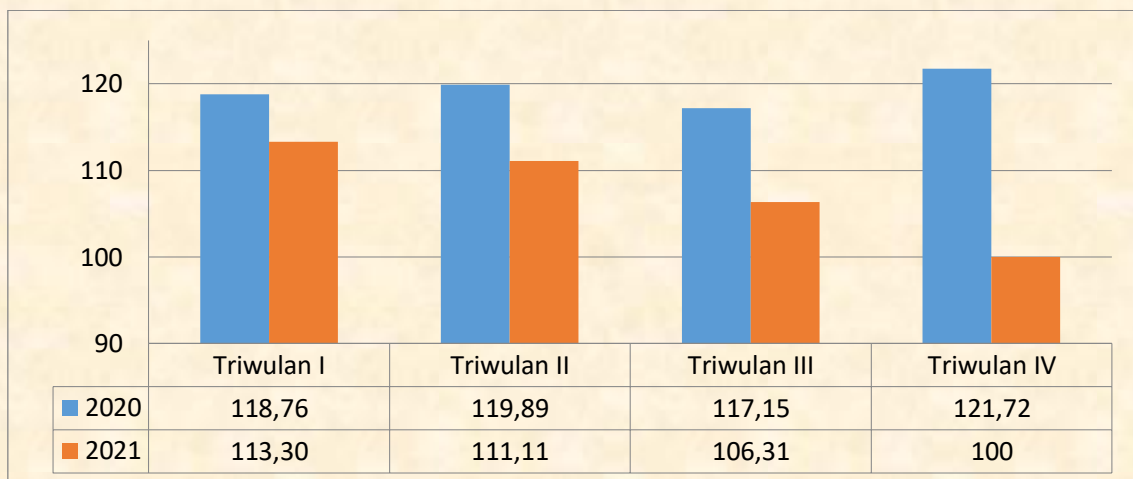
Pada tabel di atas dapat diketahui Target Rencana Strategis tahun 2021 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 100 %. Jika realisasi kinerja pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 100% dengan kriteria Baik. Realisasi indikator ini untuk tahun 2021 (100%) berada pada target jangka menengah tahun 2024 (100%), sehingga perlu dipertahankan monitoring dan evaluasi kinerja dan pengawalan pencapaian yang telah dilaksanakan dengan menambahkan langkah-langkah strategis untuk peningkatan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 agar capaian kinerja tetap masuk dalam kriteria baik atau bisa menjadi sangat baik. Jika realisasi tahun 2021 dibandingkan dengan target Nasional pada tahun 2021 sebesar 88 % maka capaian menunjukkan 113,64 % dengan kriteria sangat baik.

Jika dilihat berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap triwulan sampai dengan akhir tahun 2021, diperoleh data sebagai berikut :



Grafik 3.2.4.3.2. Realisasi Kinerja IK.4.3 Pertriwulan Tahun 2021

Apabila capaian kinerja tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, tergambar sebagaimana grafik berikut :



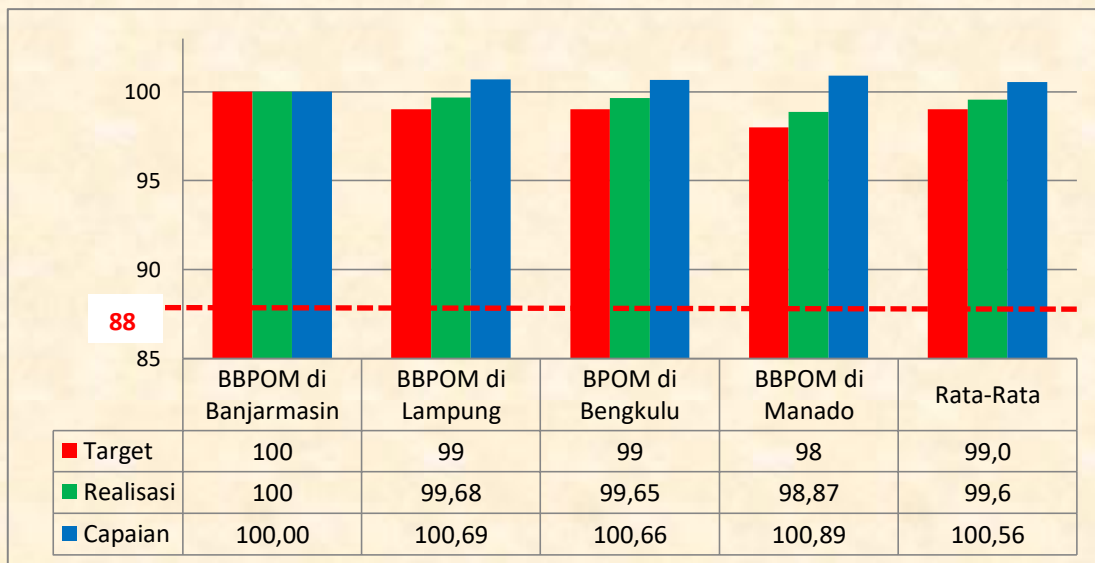
Grafik 3.2.4.3.3. Perbandingan Capaian Kinerja IKSK.4.3 Tahun 2020-2021

Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 yang memperoleh capaian sebesar 121,72%. Apabila dicermati capaian tahun 2020 yang lebih tinggi tersebut disebabkan oleh penetapan

target tahun 2020 (82%) lebih rendah dari target nasional (85%), dengan realisasi 97,38%. Sedangkan target tahun 2021, lebih tinggi dibanding target nasional yang ditetapkan 88%, dengan realisasi 100 %. Karena adanya selisih target dan realisasi yang lebih rendah pada tahun 2021, maka capaian tahun 2021 juga lebih rendah dibanding capaian pada tahun 2020.

Begitu juga apabila dibandingkan lebih terinci berdasarkan jumlah rekomendasi/sertifikat maka terjadi penurunan dimana pada tahun 2020; jumlah permohonan adalah sebanyak 1573, dengan jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan tepat waktu sebanyak 1570. Pada tahun 2021; jumlah permohonan adalah sebanyak 1471, dengan jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan tepat waktu sebanyak 1471. Penurunan jumlah tersebut terdapat pada kedua jenis rekomendasi/sertifikasi, dimana yang paling besar penurunannya adalah sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021, dibandingkan dengan Balai Besar/Balai POM seklaster, yaitu sebagai berikut :



----- = Target Nasional tahun 2021 sebesar 88 %

Grafik 3.2.4.3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.3 Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021

Dari grafik di atas terlihat bahwa realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin telah berhasil mencapai target nasional yang ditetapkan (88 %) yaitu sebesar 100%. Realisasi UPT BPOM lain yang seklastr yaitu BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Manado, dan BPOM di Bengkulu seluruhnya juga telah melebihi standar Nasional. Diantara keempat UPT BPOM lain yang setara, realisasi tertinggi dicapai oleh BBPOM di Banjarmasin dan terendah dicapai oleh BBPOM di Manado.

Capaian indikator ini pada tahun 2021 berbeda dengan capaian tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, capaian untuk indikator ini yaitu 121,72% dengan kriteria Sangat Baik, sedangkan capaian untuk indikator ini pada tahun 2021 yaitu 100% dengan kriteria Baik.

Tidak adanya *carryover* pengujian sampel pihak ketiga pada tahun 2021 menunjukkan adanya ketepatan waktu penyelesaian pengujian sampel pihak ketiga. Hal ini tidak lepas dari komitmen petugas laboratorium dalam memenuhi timeline Pengujian Sampel Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh BBPOM di Banjarmasin pada tanggal 1 Januari 2021. Timeline tersebut ditetapkan sebagai standar pelayanan publik pada kegiatan pengujian sampel pihak ketiga.

Jenis layanan pengujian sampel pihak ketiga terdiri atas pengujian sampel barang bukti/kasus dari Kepolisian/BNN (timeline 3 HK); pengujian sampel NAPZA selain barang bukti/kasus (timeline 30 HK) dan pengujian sampel Obat, Kosmetika, Obat Tradisional, Pangan dan Bahan Berbahaya (timeline 30 HK). Dari 1441 sampel, 86,12 % (1241 sampel) merupakan sampel barang bukti/kasus dari Kepolisian/BNN dengan timeline pengujian relative cepat (3 HK).

Meskipun jumlah layanan sertifikasi CPOTB/CPKB/CPMB/ CDOB/SKI/SKE/GDP sangat sedikit dibanding dengan jumlah layanan pengujian sampel pihak ketiga, kontribusi keberhasilan capaian layanan CPOTB/CPKB/CPMB/CDOB/SKI/SKE/GDP tidak dapat diabaikan. Pada tahun 2021, tidak ada *carryover* proses layanan sertifikasi CPOTB/CPKB/CPMB/ CDOB/SKI/SKE/GDP. Hal ini tidak lepas dari upaya pembinaan

terhadap pelaku usaha sesuai dengan misi Badan POM kedua “Mendorong Pelaku Usaha dalam Memberikan Jaminan Keamanan Obat dan Makanan”.

Selain itu, kecepatan respon petugas dalam melakukan evaluasi juga dapat mempengaruhi hasil keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu. Pada setiap proses layanan sertifikasi, dilakukan pendampingan secara intensif terhadap pelaku usaha melalui keterbukaan kesempatan untuk konsultasi bagi pelaku usaha dengan media telepon maupun *whatsapp grup*. Dalam hal ini, adanya konsistensi percepatan respon pelaku usaha maupun petugas dalam penyelesaian proses sertifikasi juga mendukung terselesaikannya 100% permohonan layanan sertifikasi yang masuk.

Meskipun telah mencapai target yang ditetapkan, terdapat kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini antara lain :

1. Proses perizinan kegiatan usaha kini telah diubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko dampak dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tidak diimbangi dengan kemampuan pelaku usaha dalam menggunakan sistem *online* yang tersedia.
2. Koordinasi, sosialisasi dan bimbingan teknis terkait peralihan proses perizinan Obat dan Makanan melalui OSS-RBA terhadap petugas yang berkaitan dengan pengawasan *premarket* Obat dan Makanan (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, Dinas Kesehatan dan dinas lain terkait) serta pelaku usaha belum optimal

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
100	100	1,00	0,00	100%	Efisien

Tabel 3.2.4.3.3 Efisiensi Anggaran IK.4.3 Tahun 2021

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2021, Balai Besar POM di

Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.16.920.500,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 16.920.487,- atau 100%, dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,00, sehingga capaian efisiensi pada tahun 2021 sebesar 100 %. Indeks efisiensi (IE) sebesar 1,00 dan capaian Tingkat Efisiensi (TE) 100 % menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dinilai efektif dalam mencapai output berupa persentase keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi anggaran sebanding dengan capaian kinerja sehingga menghasilkan tingkat efisiensi yang baik atau efisien.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu antara lain :

1. Pendampingan intensif terhadap pelaku usaha dalam rangka percepatan penyelesaian proses sertifikasi, antara lain pendampingan CAPA maupun layanan prima konsultasi melalui media *online chat*, telepon maupun *whatsapp grup*.
2. Adanya Inovasi Ganii UMKM atau jemput bola pendampingan UMKM. Kegiatan inovasi jemput bola pembinaan pelaku usaha dalam rangka pemenuhan Good Manufacturing Practise (GMP) secara intensif menjadi salah satu pendukung capaian kinerja. Pendampingan/pembinaan terhadap pelaku usaha dan UMKM Pangan Olahan, Kosmetik maupun Obat Tradisional yang dilaksanakan lebih intensif tersebut dapat mendorong proses layanan sertifikasi CPOTB/CPKB/CPMB/CDOB/SKI/SKE/GDP lebih efektif dan selesai sesuai timeline yang ditetapkan. Dengan kegiatan tersebut pelaku usaha mendapatkan bimbingan, pendampingan dan fasilitasi sehingga pemenuhan GMP lebih baik yang berdampak pada minimnya temuan ketidaksesuaian dan CAPA yang harus diselesaikan pasca audit.
3. Adanya inovasi FASE 24 (Fast Service 24) merupakan inovasi peningkatan pelayanan publik BBPOM di Banjarmasin terkait percepatan proses pelayanan pengujian sampel NAPZA/barang bukti dari kepolisian yang semula 3 hari (3x24 jam) menjadi 1x24 jam. Inovasi ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin Nomor PI.06.06.109.1091.03.21.0992 tanggal 10 Maret 2021 tentang Inovasi FASE 24.

Rencana atau tindak lanjut yang akan dilakukan dari hasil evaluasi adalah:

1. Koordinasi, sosialisasi dan bimbingan teknis terkait perubahan proses perizinan Obat dan Makanan melalui OSS-RBA terhadap petugas yang berkaitan dengan pengawasan *premarket* Obat dan Makanan (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, Dinas Kesehatan dan dinas lain terkait) serta pelaku usaha
2. Peningkatan kompetensi SDM petugas pelayanan publik, baik petugas penerimaan sampel, petugas penguji maupun petugas sertifikasi sehingga dapat meningkatkan kinerja dan melahirkan inovasi-inovasi baru percepatan pelayanan publik sertifikasi
3. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi inovasi Ganii UMKM maupun inovasi FASE 24 yang dapat mendukung pencapaian target kinerja

Berdasarkan uraian di atas, realisasi indikator kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 telah berhasil dengan memperoleh capaian yang baik, yaitu 100% dari target yang ditetapkan, dan Balai Besar POM di Banjarmasin optimis akan berhasil mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

Indikator Kinerja 4.4 :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
45	50,67%	112,59%	Sangat Baik

Tabel 3.2.4.4.1. Realisasi Kinerja IK.4.4 Tahun 2021

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = (Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sarana Produksi yang diperiksa di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin meliputi sarana produksi IOT, UKOT, Industri Kosmetik golongan A dan B, MD dan IRTP/ UMKM. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan.

Pada tahun 2021, terdapat pemotongan anggaran melalui Revisi APBNP tahap III dan IV, dimana anggaran untuk pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan juga terkena pemotongan sehingga perlu dilakukan penyesuaian target jumlah sarana produksi obat yang diperiksa pada tahun 2021, yaitu dari 148 sarana menjadi 132 sarana.

Sarana Produksi	BBPOM Bjm		Loka HSU		Loka TanBu		Jumlah	
	JS	T 1 thn	JS	T 1 thn	JS	T 1 thn	JS	T 1 thn
Industri Obat Tradisional	2	2	0	0	0	0	2	2
Usaha Kecil OT	2	2	0	0	0	0	2	2
Industri Kosmetik	9	8	0	0	0	0	9	9
Industri Pangan	54	45	2	2	9	9	65	56
Industri RT Pangan	983	35	247	18	182	11	1.412	64
Jumlah	1.050	92	249	20	191	20	1.490	132

Keterangan JS = Jumlah Sarana yang Ada
T1thn = Target sarana yang diperiksa 1 tahun

Tabel 3.2.4.4.2. Jumlah Sarana Produksi dan Target dalam 1 Tahun - Tahun 2021

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana

Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, sebagai berikut :

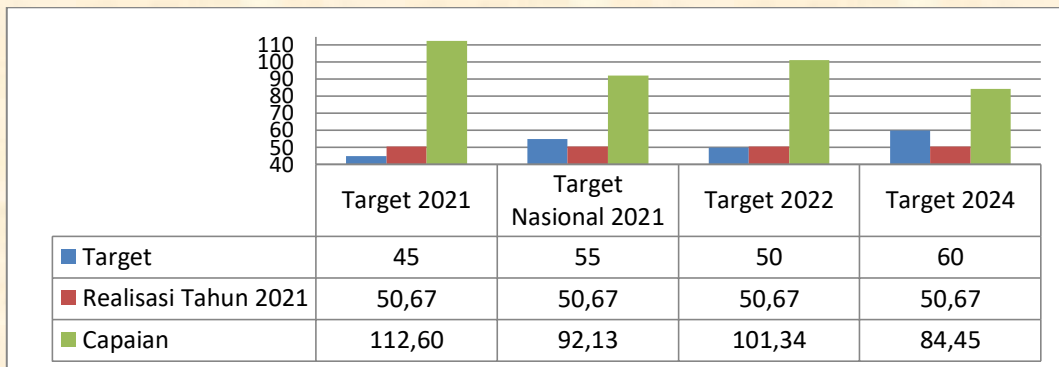
Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Semula	20	35	22	23	24
Menjadi	36,59 (Realisasi)	45	50	55	60

Tabel 3.2.4.4.3. Perubahan Target IK 4.4.

Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024

Pada tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 150 sarana produksi di wilayah Kalimantan Selatan oleh petugas BBPOM di Banjarmasin, Loka POM Kab Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kab Tanah Bumbu, dengan hasil 76 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 74 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 50,67 %.

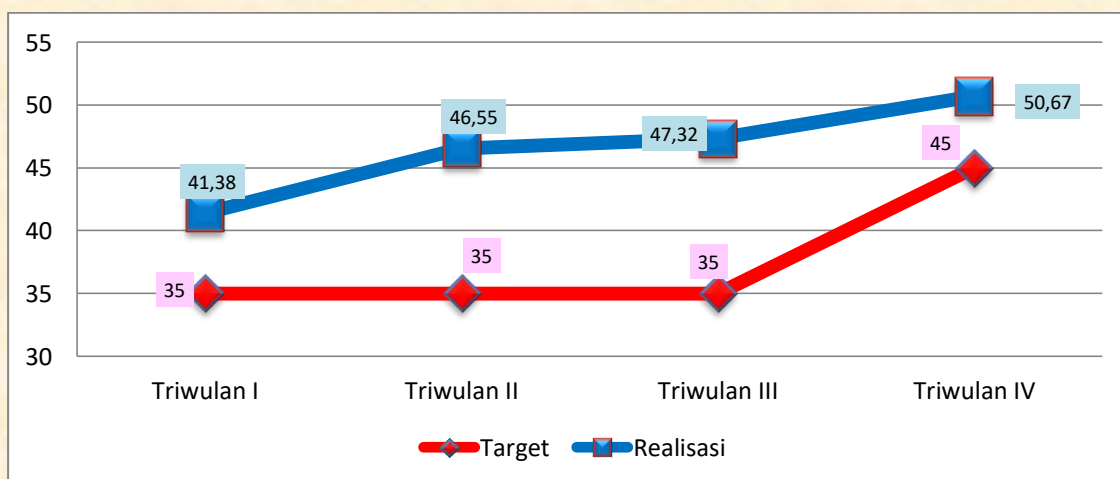
Realisasi kinerja yang diperoleh tersebut apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 serta target akhir renstra tahun 2024, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :



Grafik 3.2.4.4.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.4 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024

Pada grafik di atas dapat diketahui Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 60 %. Jika realisasi kinerja pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 84,45% dengan kriteria Cukup, Realisasi indikator ini untuk tahun 2021 (50,67%) masih berada dibawah target jangka menengah tahun 2024 (60%), sehingga perlu disusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian kinerja tahun 2024 menjadi kriteria baik atau sangat baik.

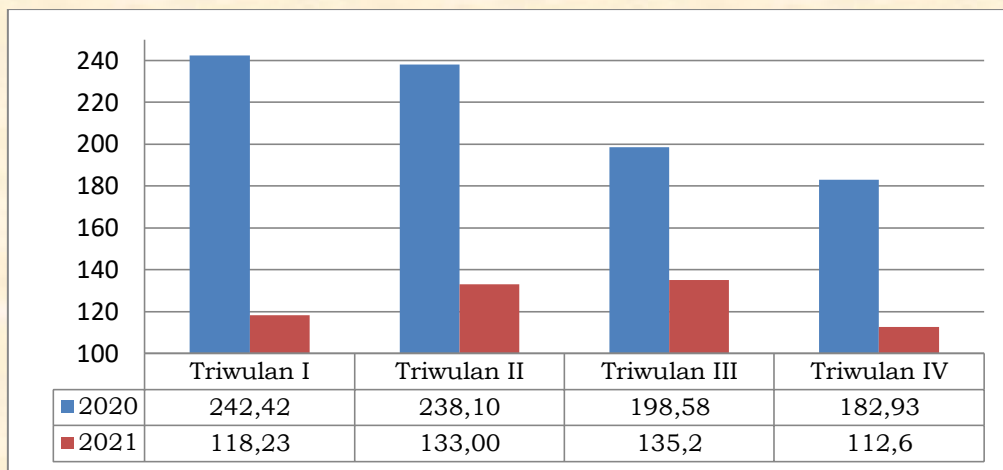
Jika dilihat berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap triwulan sampai dengan akhir tahun 2021, diperoleh data sebagai berikut :



Grafik 3.2.4.4.2. Realisasi Kinerja IK.4.4 Pertriwulan Tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas, terlihat adanya perubahan target, dimana pada triwulan I, II dan III targetnya adalah 35, sedangkan pada triwulan IV sesuai dengan Reviu Renstra 2021-2024 targetnya adalah 45.

Apabila capaian kinerja triwulanan tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, tergambar sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.2.4.4.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.4 Tahun 2020-2021

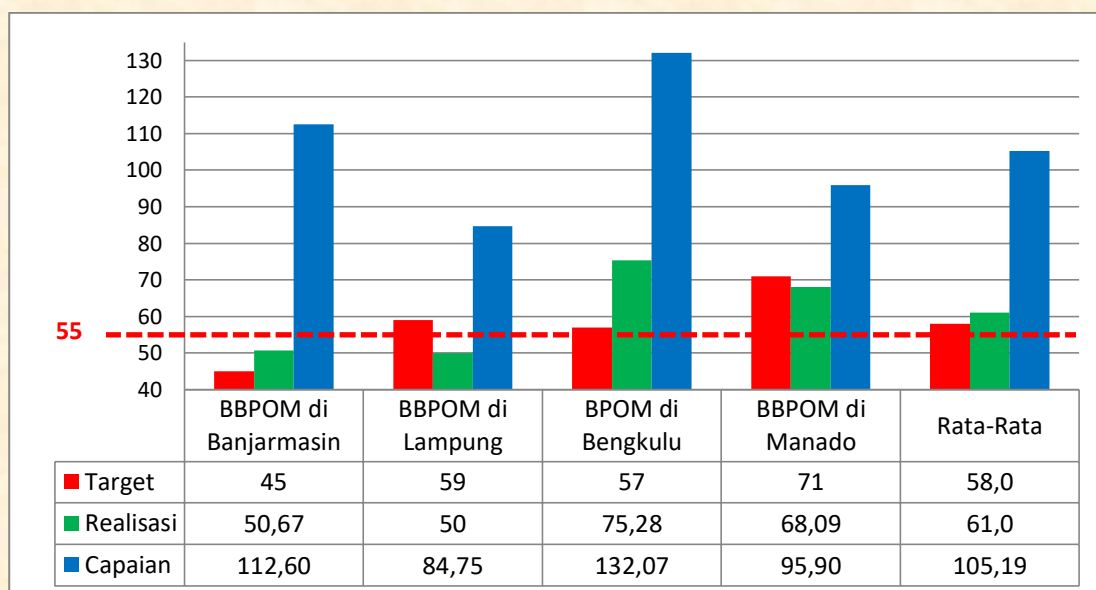
Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan capaian kinerja yang sangat signifikan antara triwulan IV tahun 2021 dengan triwulan IV tahun 2020 yang memperoleh capaian sebesar 112,60%. Pada tahun 2020 target yang ditetapkan setiap triwulan bersifat kumulatif sedangkan pada tahun 2021 target yang ditetapkan sama setiap triwulan. Pada triwulan IV tahun 2021, target berdasarkan reviu Renstra mengalami perubahan menjadi 45% dari awalnya sebesar 35 %. Apabila dibandingkan lebih terinci berdasarkan jumlah sarana produksi maka terjadi peningkatan jumlah yang diperiksa dimana pada triwulan IV tahun 2020 adalah sebanyak 123 sarana, dengan yang memenuhi ketentuan 45 sarana, sedangkan tahun 2021 sebanyak 150 sarana dengan yang memenuhi ketentuan 76 sarana

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat pada triwulan IV tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.114.442.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.114.442.000,- atau 100,0%. Dari data tersebut dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 1.12 dengan tingkat efisiensi sebesar 0.12 sehingga capaian efisiensi pada triwulan IV tahun 2021 sebesar 100,0 % (**Efisien**).

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
112,60%	100,00%	1.12	0.12	100%	Efisien

Tabel 3.2.4.4.4 Efisiensi Anggaran IK.4.4 Tahun 2021

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021, berada di posisi ke 3 dibandingkan dengan Balai Besar/Balai POM sekluster 4, yaitu sebagai berikut :



----- Target Nasional tahun 2021 sebesar 55 %

Grafik 3.2.4.4.4. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.4 Balai Besar/ Balai POM dalam Kluster 4 Tahun 2021

Dari grafik di atas terlihat bahwa realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin dan BBPOM di Bandar Lampung masih berada dibawah target nasional yang ditetapkan yaitu sebesar 55%. BBPOM Manado telah melebihi target nasional dan BPOM di Bengkulu mencapai realisasi paling tinggi jika dibandingkan 4 UPT BPOM lain yang seklaster

Capaian indikator ini pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 karena terdapat perbedaan penetapan target akan tetapi masuk dalam kriteria Baik. Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi syarat adalah keterbatasan jenis sarana produksi obat dan makanan di Provinsi Kalimantan Selatan. Tidak terdapat sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan rumah sakit). Sarana produksi yang ada adalah kosmetik golongan A dan B, sarana IOT, UKOT dan produksi pangan olahan MD dan PIRT. Sesuai dengan karakteristik daerahnya, maka Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan optimalisasi pembinaan pemenuhan aspek CPPB pada sarana IRTP dan seluruh sarana MD dan pembinaan kepada UKOT dan IOT untuk pemenuhan CPOTB serta meningkatkan monitoring surat tindak lanjut hasil pemeriksaan IRTP ke Dinas Kesehatan.

Beberapa hal yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja tahun 2022 antara lain :

- Pemutakhiran data sarana produksi
- Peningkatan koordinasi dengan stakeholder Dinas Kesehatan dalam pembinaan sarana produksi UMKM
- Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan perbaikan yang dilakukan bersifat permanen, tidak hanya dalam rangka memperbaiki temuan
- Menyediakan pelayanan help desk untuk pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana produksi

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan antara lain :

- Jumlah target sarana produksi MD sebesar 42 % dari target sarana produksi pada tahun 2021. Jumlah sarana produksi MD yang memenuhi ketentuan pada sebesar sejumlah 81.03 %. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dari para pelaku usaha
- Kuatnya sinergisme pengawasan antara BBPOM di Banjarmasin dengan Dinas Kesehatan setempat yang selaras dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) NF Pangan BPOM untuk pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan sehingga pengawasan IRTP semakin baik.

Berdasarkan capaian tahun 2021 untuk mencapai target persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, perlu dilakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, petugas melaksanakan pengawasan diiringi dengan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar melakukan perbaikan CAPA sebagai komitmen dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, realisasi indikator kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 telah berhasil dengan memperoleh capaian yang sangat baik, yaitu 112,59% dari target yang ditetapkan, dan Balai Besar POM di Banjarmasin optimis akan berhasil mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

Indikator Kinerja 4.5 :

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
63	68,77%	109,16%	Baik

Tabel 3.2.4.5.1. Realisasi Kinerja IK.4.5 Tahun 2021

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = (Jumlah Sarana distribusi obat dan makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan/ jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa) x 100%

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala

Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Semula	55	57	60	63	65
Menjadi	59,69 (Realisasi)	63	66	68	71

Tabel 3.2.4.5.2. Perubahan Target IK 4.5.

Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024

Pada tahun 2021, terdapat pemotongan anggaran melalui Revisi APBD tahap III dan IV, dimana anggaran untuk pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan juga terkena pemotongan sehingga perlu dilakukan penyesuaian target jumlah sarana distribusi obat yang diperiksa pada tahun 2021, yaitu dari 629 sarana menjadi 553 sarana.

Sarana Distribusi	BBPOM Bjm		Loka HSU		Loka TanBu		Jumlah	
	JS	T 1 thn	JS	T1thn	JS	T 1 thn	JS	T 1 thn
<i>Pedagang Besar Farmasi</i>	38	11	0	0	1	1	39	12
<i>Apotek</i>	390	36	56	19	60	13	506	68
Toko Obat	222	8	50	5	44	4	316	17
Instalasi Sediaan Farmasi/ Instalasi Farmasi Pemerintah	9	9	3	3	2	2	14	14
Rumah Sakit	34	15	5	5	4	4	43	24

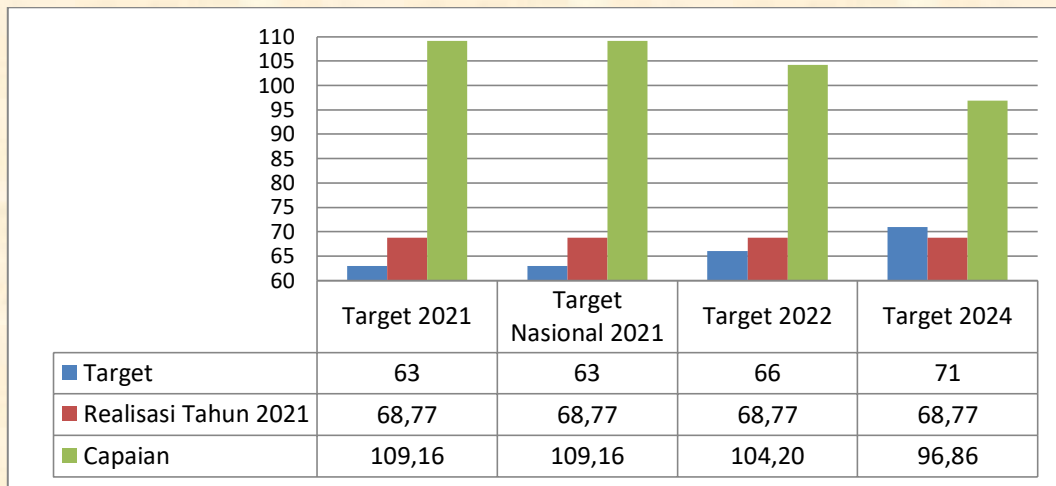
Sarana Distribusi	BBPOM Bjm		Loka HSU		Loka TanBu		Jumlah	
	JS	T 1 thn	JS	T1thn	JS	T 1 thn	JS	T 1 thn
Puskesmas	148	74	43	34	42	29	233	137
Klinik	139	10	9	8	54	6	202	24
Fasilitas Dist. Obat Tradisional	205	19	59	8	71	3	335	30
Fasilitas Dist Suplemen Kes.	205	19	59	8	60	2	324	29
Fasilitas Distribusi Kosmetik	312	42	111	14	89	3	512	59
Fasilitas Dist Pangan Olahan	719	67	298	38	895	34	1.912	139
Jumlah	2.421	310	693	142	1.322	101	4.436	553

Keterangan JS = Jumlah Sarana yang Ada
T1thn = Target sarana yang diperiksa 1 tahun

Tabel 3.2.4.5.2. Jumlah Sarana Distribusi dan target dalam 1 tahun – Tahun 2021

Pada tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 618 sarana distribusi di wilayah Kalimantan Selatan oleh petugas BBPOM di Banjarmasin, Loka POM Kab Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kab Tanah Bumbu, dengan hasil sebanyak 425 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 193 sarana masih belum memenuhi ketentuan.

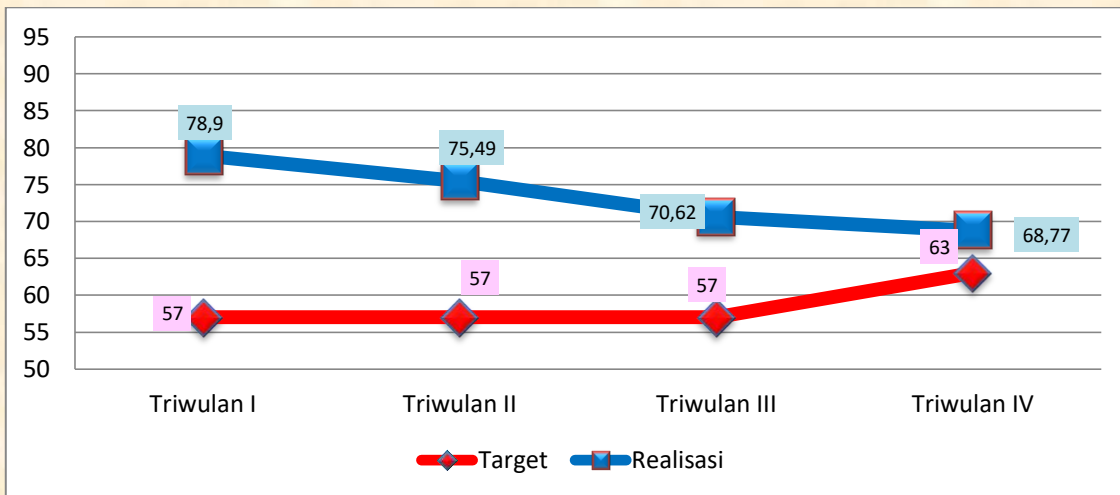
Realisasi kinerja yang diperoleh tersebut apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 serta target akhir renstra tahun 2024, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :



Grafik 3.2.4.5.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.5 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024

Pada grafik di atas dapat diketahui Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 71 %. Jika realisasi kinerja pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 96,79% dengan kriteria Baik, Realisasi indikator ini untuk tahun 2021 (68,77%) masih sedikit berada dibawah target jangka menengah tahun 2024 (71%), sehingga perlu dipertahankan monitoring dan evaluasi kinerja dan pengawalan pencapaian yang telah dilaksanakan dengan menambahkan langkah-langkah strategis untuk peningkatan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sehingga capaian kinerja tetap masuk dalam kriteria baik atau bisa menjadi sangat baik.

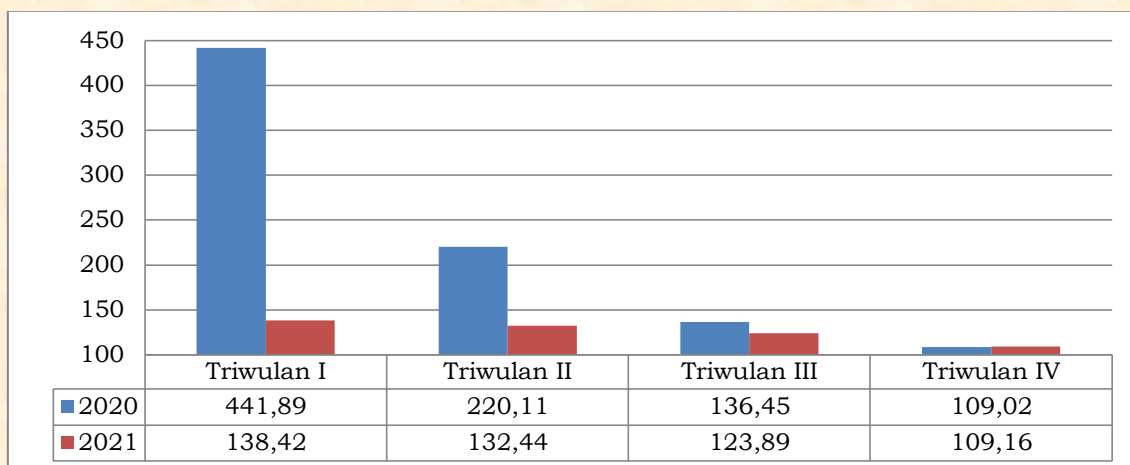
Apabila dibandingkan berdasarkan jumlah sarana distribusi maka terjadi peningkatan jumlah yang diperiksa dimana pada triwulan IV tahun 2020 adalah 542 sarana, dan jumlah yang memenuhi ketentuan 325 sarana. Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2021 adalah sebesar 68,77%. Data lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut



Grafik 3.2.4.5.2. Realisasi Kinerja IK.4.5 Pertriwulan Tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas, terlihat adanya perubahan target, dimana pada triwulan I, II dan III targetnya adalah 57, sedangkan pada triwulan IV sesuai dengan Reviu Renstra 2021-2024 targetnya adalah 63.

Apabila capaian kinerja triwulan IV tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu triwulan IV tahun 2020, tergambar sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.2.4.45.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.5 Tahun 2020-2021

Dari grafik tersebut terlihat bahwa pencapaian antara triwulan IV tahun 2021 dengan triwulan IV tahun 2020 yang memperoleh capaian yang hampir sama sebesar 109,16%. Namun apabila dicermati terdapat perbedaan capaian triwulan IV tahun 2021 yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya karena terdapat perubahan target pada triwulan IV tahun 2021 menjadi sebesar 63%. Penentuan target triwulanan tahun 2020 juga ditetapkan kumulatif, sedangkan tahun 2021 tetap dan sama dengan target tahunan.

Target triwulanan tahun 2021 bersifat tetap selama triwulan 1 sampai dengan triwulan III yaitu sebesar 57%, dan pada triwulan IV terdapat perubahan target menjadi 63% maka capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin dengan capaian triwulan IV tahun 2021 (109,16%).

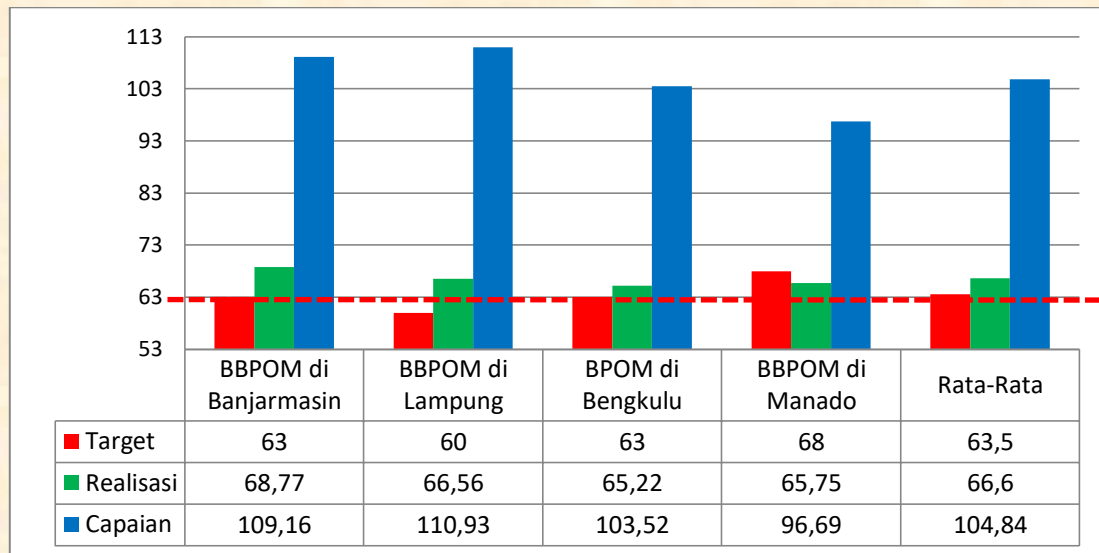
Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat pada triwulan IV tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.213.526.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.213.440.590,- atau sebesar 99,96 %.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
109,16	99,96	1,09	0,09	100%	Efisien

Tabel 3.2.4.5.4 Efisiensi Anggaran IK.4.5 Tahun 2021

Dari data tersebut dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 1,09 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,09 sehingga capaian efisiensi pada triwulan IV tahun 2021 sebesar 100% (**Efisien**).

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021, berada di posisi pertama dibandingkan dengan Balai Besar/Balai POM seklaster, yaitu sebagai berikut :



----- = Target Nasional tahun 2021 sebesar 63 %

**Grafik 3.2.4.5.4. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.5
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

Dari grafik di atas terlihat bahwa realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin telah berhasil mencapai target nasional yang ditetapkan yaitu sebesar 63%. Realisasi UPT BPOM lain yang sekluster yaitu BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Manado, dan BPOM di Bengkulu seluruhnya juga telah melebihi standar Nasional. Diantara keempat UPT BPOM lain yang setara, realisasi tertinggi dicapai oleh BBPOM di Banjarmasin dan terendah dicapai oleh BPOM di Bengkulu

Capaian indikator ini pada tahun 2021 sama dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 109 % dengan kriteria Baik, meskipun terdapat perbedaan target pada triwulan IV pada tahun 2021. Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target persentase distribusi obat yang memenuhi syarat adalah :

1. Berlakunya aturan yang mewajibkan PBF mempunyai sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sehingga pihak sarana berupaya untuk memenuhi persyaratan /perundang-undangan yang berlaku

2. Dalam melakukan pemeriksaan sarana diiringi dengan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pemenuhan CAPA sebagai perbaikan terhadap temuan hasil pemeriksaan. Dengan adanya perbaikan CAPA, diharapkan menjadi komitmen para pelaku usaha dalam memenuhi peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam hal ini Dinas Kesehatan kabupaten/kota sehingga tindak lanjut pada tahun 2021 yang masih berupa rekomendasi dapat ditindaklanjuti oleh sarana dengan efektif dan maksimal;
4. Adanya pandemi covid-19, terdapat fokus pengawasan kepada sarana pelayanan kefarmasian (Intensifikasi Puskesmas dan RS) terhadap kesiapan sarana dalam melakukan pengelolaan vaksin Covid-19. Pemenuhan CAPA sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan mendorong sarana Puskesmas dan RS dalam melakukan perbaikan sarana.

Beberapa langkah penting yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 antara lain :

1. Pengelolaan vaksin Covid-19 dan monitoring ketersediaan obat anti viral untuk pengobatan Covid-19 di sarana pelayanan kesehatan masih merupakan isu penting di tahun 2021. Hal yang masih menjadi fokus dalam pengawasan adalah pengelolaan vaksin Covid-19 di, monitoring mutu dan penandaan vaksin Covid-19 serta mendorong kepatuhan pelaku usaha dalam hal ini PBF dan saryanfar pengelola obat anti viral Covid-19 registrasi EUA untuk menyampaikan laporan melalui e-was.pom.go.id. Untuk menunjang tugas ini, kompetensi petugas BBPOM di Banjarmasin dan koordinasi dengan lintas sektor terkait perlu ditingkatkan.
2. Pengawasan rutin terhadap sarana distribusi masih terus dilakukan dengan menetapkan prioritas pengawasan berdasarkan analisis risiko seiring dengan diadakan sosialisasi peraturan kepada pelaku usaha, membuka forum komunikasi untuk konsultasi CAPA dari pelaku usaha, serta meningkatkan kompetensi petugas

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan antara lain :

1. Sesuai dengan program dari Badan POM bahwa pada tahun 2021 Balai Besar POM di Banjarmasin fokus kepada pengawalam pendistribusian Covid-19 di IFP/ IFK dimana persen MKnya cukup tinggi sebesar 100 % dan juga melakukan Intensifikasi pengelolaan Vaksin Covid-19 sehingga lebih banyak melakukan pemeriksaan ke Puskesmas dan RS dimana persen MKnya sebesar 94.29 %.
2. Koordinasi dan advokasi yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin dengan lintas sektor Dinas Kesehatan bersinergi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pelaku usaha cukup efektif didukung dengan adanya dana alokasi khusus non fisik pengawasan obat dan makanan.

Berdasarkan capaian tahun 2021, untuk mencapai target persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan, perlu dilakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan dilapangan, meningkatkan komitmen petugas serta tetap melakukan perencanaan pengawasan dengan lebih cermat berdasarkan analisis risiko.

Berdasarkan uraian di atas, realisasi indikator kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 telah berhasil dengan memperoleh capaian yang baik, yaitu 109,16% dari target yang ditetapkan, dan Balai Besar POM di Banjarmasin optimis akan berhasil mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

Indikator Kinerja 4.6 :

Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
3,91	3,98	101,8%	Baik

Tabel 3.2.4.6.1. Realisasi Kinerja IK.4.6 Tahun 2021

Penilaian internal kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Badan POM secara berkala setiap tahun dilakukan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima dan mendorong terciptanya inovasi di bidang pelayanan. Unsur yang dinilai terdiri dari 6 (enam) aspek, yaitu:

- 1) Aspek kebijakan pelayanan berisi tentang standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat.
- 2) Aspek Profesionalisme SDM memuat kompetensi, responsivitas, integritas.
- 3) Aspek sarana prasarana meliputi kelayakan ruang parkir, ruang tunggu, fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus, dan *front office*.
- 4) Aspek sistem informasi pelayanan publik terdiri dari sarana konsultasi dan pengaduan, dan inovasi.
- 5) Aspek konsultasi dan pengaduan meliputi media konsultasi dan media pengaduan.
- 6) Aspek inovasi

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Semula	3,11	3,46	3,81	4,16	4,51
Menjadi	3,69 (Realisasi)	3.91	4.12	4.34	4.55

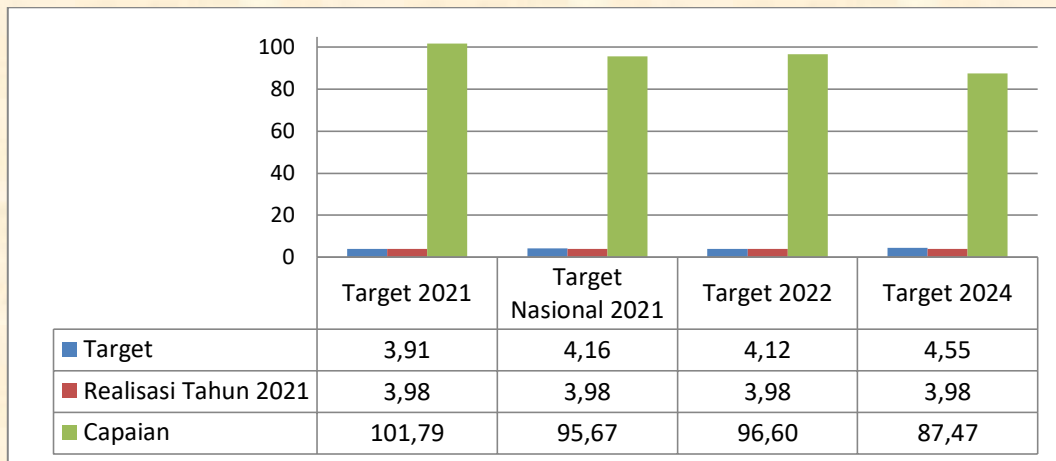
Tabel 3.2.4.6.2. Perubahan Target IK 4.6.

Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024

Untuk tahun 2021 target indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik yang ditetapkan adalah 3,91, dengan realisasi 3,98 dan capaian sebesar 101,8%. Capaian yang diperoleh masuk dalam kriteria baik, masih perlu perbaikan dan peningkatan, terutama dalam hal sarana prasarana dan dokumentasi, yaitu penyediaan mesin EDC untuk pembayaran PNBPN, penyediaan toilet jongkok, penyediaan area merokok, penyediaan antrian elektronik, penyempurnaan toilet difabel, SK petugas layanan beserta sertifikat penunjang, kecepatan tindak lanjut hasil SKM, Standar Pelayanan belum melibatkan masyarakat dan *stakeholder* dalam penyusunannya.

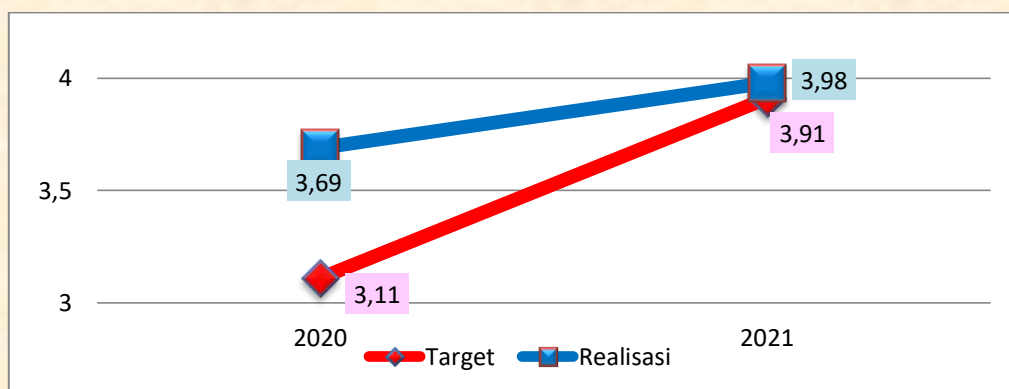
Indeks pelayanan publik dengan tahun 2020, ditetapkan target sebesar 3,11 dengan realisasi 3,69 (capaian di tahun 2020 adalah 118,65%), sedangkan indeks pelayanan publik tahun 2021 dengan target 3,75 dan realisasi yang diperoleh adalah 3,98 (capaian di tahun 2021 adalah 106,13%). Jika dilihat dari capaian terdapat target, capaian indeks pelayanan publik tahun 2021 lebih rendah dibanding capaian di tahun 2020. Namun jika dilihat dari besaran target dan realisasi, indeks pelayanan publik BBPOM di Banjarmasin mengalami peningkatan, di tahun 2021.

Kekurangan yang ditemukan pada penilaian tahun 2020 telah diperbaiki di tahun 2021, yaitu standar pelayanan dan maklumat pelayanan dipublikasikan tidak hanya di area ruang pelayanan tetapi juga di media sosial, media cetak dan brosur, pengisian kuesioner survei kepuasan masyarakat dilakukan pertriwulan, telah disusun Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Layanan, telah ditetapkan sistem reward dan punishment bagi petugas layanan, telah disediakan karcis parkir dan CCTV di area parkir, disediakan loket khusus bagi orang berkebutuhan khusus, serta telah tersedia kantin dan alat fotocopy.



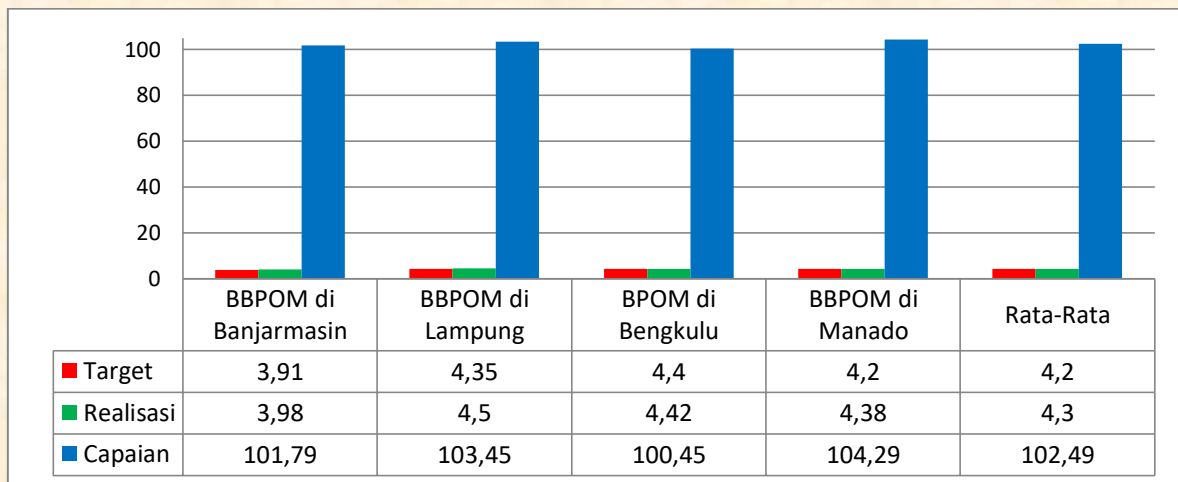
Grafik 3.2.4.6.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.6 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024

Indeks pelayanan publik tahun 2021 realisasinya adalah 3,98, dibandingkan dengan target indeks pelayanan publik BBPOM di Banjarmasin pada tahun 2024 adalah 4,51. Gap yang cukup jauh ini memerlukan dukungan semua pihak untuk melakukan perbaikan dan pembenahan pada semua aspek penilaian. Untuk aspek yang nilainya masih kurang perlu peningkatan baik dari segi anggaran maupun kerjasama dan komitmen dari semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di bidang pelayanan. Dan untuk aspek yang telah mendapat nilai sangat baik, perlu strategi dalam mempertahankannya, hal ini ditujukan agar pelayanan prima dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan.



Grafik 3.2.4.6.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.6 Tahun 2020-2021

Capaian indeks pelayanan publik tertinggi diperoleh BBPOM di Manado sebesar 104,29%, diikuti BBPOM di Bandar Lampung yaitu 103,45%, BBPOM di Banjarmasin 101,79 dan Balai POM di Bengkulu dengan capaian 100,45%. Walaupun capaian indeks pelayanan publik BBPOM di Banjarmasin lebih tinggi dibanding Balai POM di Bengkulu, namun jika dibandingkan ketiga balai lainnya, target indeks pelayanan publik yang ditetapkan lebih rendah. Dari penilaian tahun 2021, masih perlu perbaikan dan peningkatan dalam hal sarana prasarana serta dalam hal pengarsipan dan dokumentasi.



**Grafik 3.2.4.6.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.4.6
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

Untuk mendorong pencapaian target kinerja indeks pelayanan publik, Balai Besar POM di Banjarmasin telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.40.628.000,- dengan realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp.40.611.749,- atau 99,96%.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
101,79	99,96%	1,02	0,02	100%	Efisien

Tabel 3.2.4.6.3. Efisiensi Anggaran IK.4.6 Tahun 2021

Dari data tersebut dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 1,02 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,02 sehingga capaian efisiensi tahun 2021 sebesar 100% (**Efisien**).

Dilihat dari aspek standar pelayanan publik, yang perlu dilakukan kedepannya adalah pada saat proses penyusunan standar pelayanan, Balai Besar POM di Banjarmasin harus melibatkan masyarakat dan lintas sektor, selama ini standar disusun berdasarkan kebijakan dan peraturan dari sudut pandang pemerintah sebagai pembuat kebijakan, belum mengakomodir kebutuhan dan harapan masyarakat. Untuk sarana prasarana, masih ada yang perlu ditingkatkan, seperti loket untuk pelanggan berkebutuhan khusus, penyediaan kloset jongkok, penyediaan mesin EDC, serta penyediaan nomor antrian elektronik. Pelayanan informasi, pengaduan dan konsultasi sudah sangat baik, yang masih perlu dikembangkan adalah dokumentasi pelayanan informasi dan pengaduan memudahkan untuk diakses di website.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja indeks pelayanan publik tahun 2021 adalah peningkatan kompetensi petugas layanan dalam memahami setiap aspek yang dinilai, kerjasama yang baik antara Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi dan Bagian Tata Usaha yang saling berkaitan dalam pemenuhan aspek-aspek pelayanan, serta dukungan penuh Pimpinan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian di atas, realisasi indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 telah berhasil dengan memperoleh capaian yang baik, yaitu 101,79% dari target yang ditetapkan, dan Balai Besar POM di Banjarmasin optimis akan berhasil mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

Sasaran Kegiatan 5 :

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Sasaran Kegiatan ini memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja, dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

Indikator Kinerja 5.1 :

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
90	92,51	102,79%	Baik

Tabel 3.2.5.1.1. Realisasi Kinerja IK.5.1 Tahun 2021

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan ditetapkan sebagai indikator kinerja pada Renstra 2020–2024, dan tidak ada pengukuran di tahun-tahun sebelumnya. Ada 4 (empat) aspek yang dinilai yaitu penilaian masyarakat terhadap ragam sumber informasi KIE, pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang disampaikan, penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE, dan minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Banjarmasin, sebagai berikut :

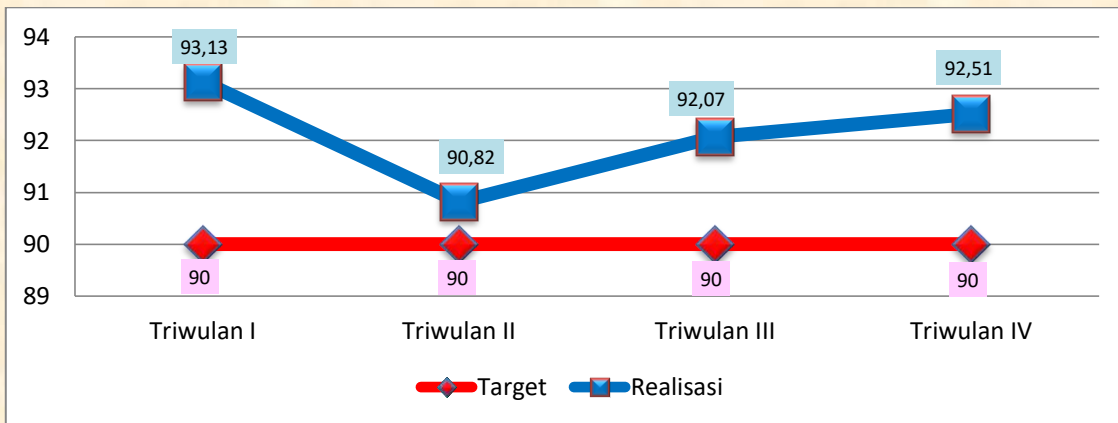
Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Semula	83,73	85,41	78	81	85
Menjadi	88,8 (Realisasi)	90	91,8	93,6	95,5

Tabel 3.2.5.1.2. Perubahan Target IK 5.1.

Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024

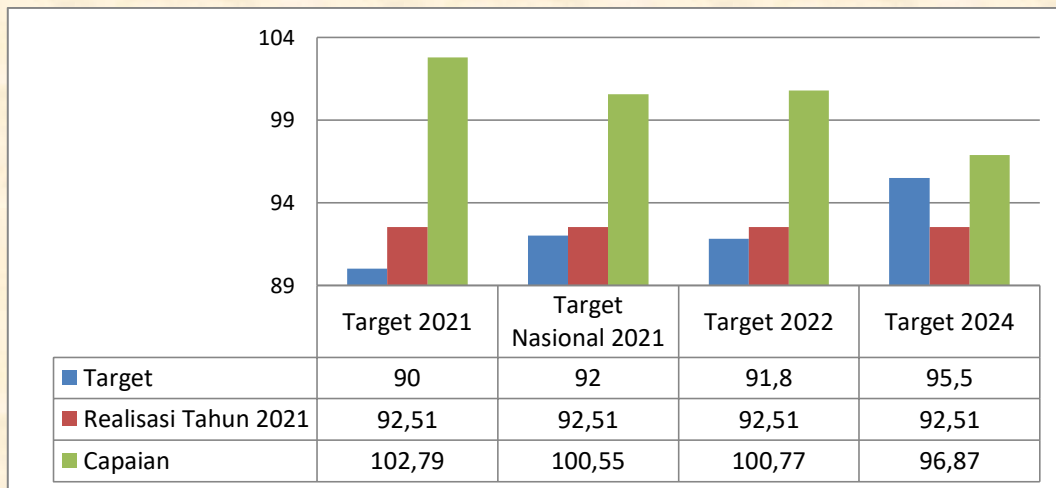
Untuk tahun 2021 target indikator kinerja Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang ditetapkan adalah 90, dengan realisasi 92,51 dan capaian yang diperoleh adalah 102,79%. Realisasi yang melebihi target merupakan keberhasilan dari kegiatan KIE yang dilaksanakan bagi masyarakat wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin.

Responden survei adalah peserta KIE baik secara langsung melalui penyebaran informasi, bimtek bagi kader sekolah, maupun KIE secara tidak langsung melalui media sosial. Tanggapan yang diberikan responden adalah ingat akan materi yang disampaikan, paham sehingga berminat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, informasi bermanfaat sehingga ingin menyampaikan kembali kepada orang lain, serta puas akan informasi Obat dan Makanan maupun cara penyampaiannya. Ini artinya petugas telah berhasil membuat materi yang sederhana sehingga mudah diterima, diingat dan dipahami, dan disertai juga dengan teknis atau cara penyampaian yang baik dari petugas sehingga masyarakat puas akan informasi yang didapat.



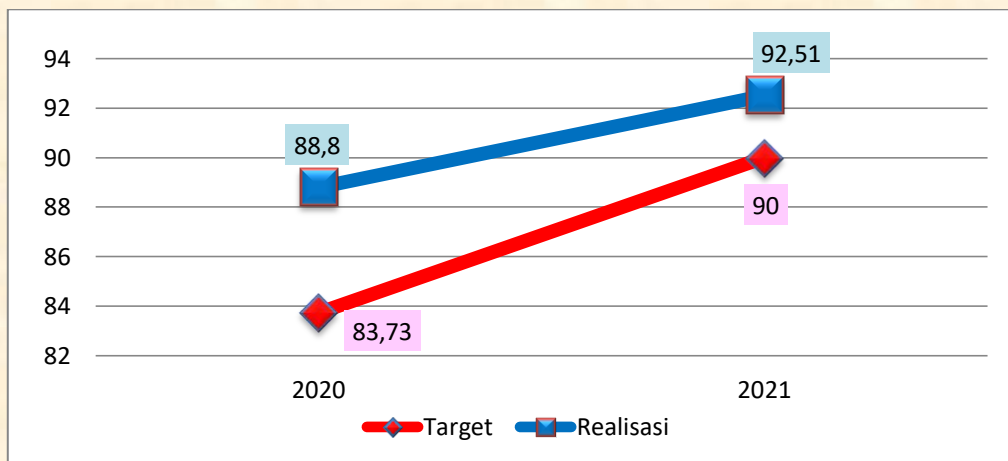
Grafik 3.2.5.1.1. Realisasi Kinerja IK.5.1 Pertriwulan Tahun 2021

Target indeks tingkat efektivitas KIE pada akhir Renstra tahun 2024 adalah 90,46. Dengan realisasi yang diperoleh di tahun 2021 pada nilai 92,51, BBPOM di Banjarmasin akan dapat mencapai target di tahun 2024, seperti tercantum dalam tabel berikut :



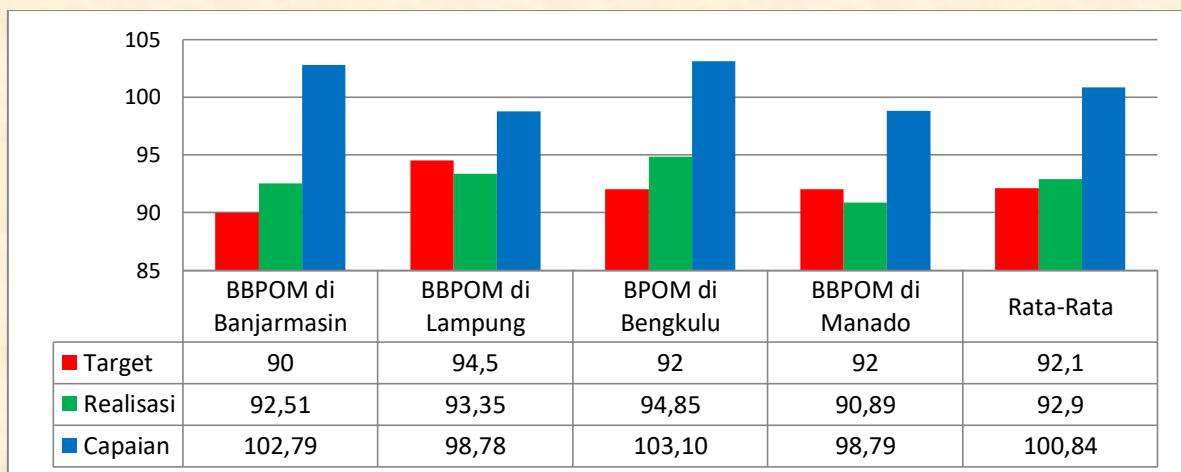
Grafik 3.2.5.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.5.1 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2020, dapat terlihat sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.2.5.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.5.1 Tahun 2020-2021

Meskipun target Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan tahun 2021 lebih tinggi dari target tahun 2020, Balai Besar POM di Banjarmasin mampu mencapai target tersebut dengan baik.



Grafik 3.2.5.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.5.1 Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021

Jika dibandingkan dengan capaian BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai 98,78%, BBPOM di Manado dengan capaian 98,79%, serta Balai POM di Bengkulu yang memperoleh 103,10%, maka capaian BBPOM di Banjarmasin berada di posisi

kedua. Perbedaan capaian ditentukan banyak hal, diantaranya keberagaman responden yang memiliki latar belakang berbeda, seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, budaya, lokasi survei. Selain itu metode KIE juga dapat berpengaruh terhadap penilaian, apakah KIE dilaksanakan secara langsung yang dapat dibimbing oleh petugas dalam memberikan jawaban jika responden yang belum memahami isi pertanyaan, atau KIE dilaksanakan melalui media sosial sehingga survei yang juga disampaikan melalui media sosial, memungkinkan ada pertanyaan yang tidak sesuai dengan tujuan survei.

Walaupun demikian, tetap perlu upaya untuk terus meningkatkan dan mengembangkan metode KIE, memperbarui materi, meningkatkan kompetensi petugas, serta memperluas sasaran penerima informasi agar KIE yang disampaikan tidak terbatas hanya sebagai pengetahuan, tetapi juga dapat mempengaruhi dan mengubah sikap serta perilaku masyarakat terhadap pemilihan dan penggunaan Obat dan Makanan aman.

Untuk mendorong pencapaian target kinerja, Balai Besar POM di Banjarmasin telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.146.092.000,- dan terserap terserap Rp.145.553.067,- atau 99,63%. Efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja dicapai sebesar 1,03 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,003 sehingga capaian efisiensi tahun 2021 sebesar 100% (**Efisien**).

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
102,79	99,63%	1,03	0,03	100%	Efisien

Tabel 3.2.5.1.3. Efisiensi Anggaran IK.5.1 Tahun 2021

Keberhasilan capaian kinerja ditunjang oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021, yaitu :

- 1). Pelaksanaan sosialisasi keamanan Obat dan Makanan bagi mahasiswa, ritel dan PKK.

- 2). Pelaksanaan bimbingan teknis bagi kader sekolah.
- 3). Pelaksanaan forum konsultasi publik.
- 4). Pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektor di kabupaten/kota.
- 5). Pelaksanaan KIE melalui media sosial, baliho, banner, spanduk, brosur, poster.
- 6). Peningkatan kompetensi petugas secara daring dalam pelatihan teknis dan pelayanan prima.

Untuk peningkatan indeks efektivitas KIE di tahun-tahun mendatang, perlu dilakukan upaya perbaikan dan pengembangan metode KIE. Dari aspek materi, informasi yang ditampilkan harus lebih menarik dengan animasi dan bahasa yang mudah dipahami, video sederhana, poster dan brosur yang singkat, padat dan bermutu. Selain materi, sasaran KIE juga perlu ditambah baik jumlah maupun komunitasnya, sehingga masyarakat yang terpapar informasi Obat dan Makanan semakin luas khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan uraian di atas, realisasi indikator kinerja Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 telah berhasil dengan memperoleh capaian yang baik, yaitu 102,79% dari target yang ditetapkan, dan Balai Besar POM di Banjarmasin optimis akan berhasil mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

Indikator Kinerja 5.2 :

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
40	40	100%	Baik

Tabel 3.2.5.2.1. Realisasi Kinerja IK.5.2 Tahun 2021

Pada tahun 2021, target untuk indikator PJAS aman yang diintervensi BBPOM di Banjarmasin adalah 40 sekolah. Jumlah ini terdiri dari 24 sekolah baru ditambah dengan pengawasan terhadap 16 sekolah yang telah dilaksanakan di tahun 2020. Target 24 sekolah merupakan penambahan dari target tahun 2020 yang berkurang 4 sekolah. Perubahan target sekolah dikarenakan pada tahun 2020, kasus Covid 19 di wilayah Kalimantan Selatan sangat tinggi dan sebagian besar kabupaten/kota termasuk zona merah, sehingga pembelajaran dilangsungkan secara daring. Ini sebagai dasar dilakukannya penyesuaian jumlah sekolah yang diintervensi, baik pada tahun 2020 maupun 2021, dengan tujuan agar total jumlah sekolah yg diintervensi keamanan pangannya hingga 2024 tidak berubah.

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Semula	16 (20)	40	62	82	104
Menjadi	16 (Realisasi)	40	60	80	100

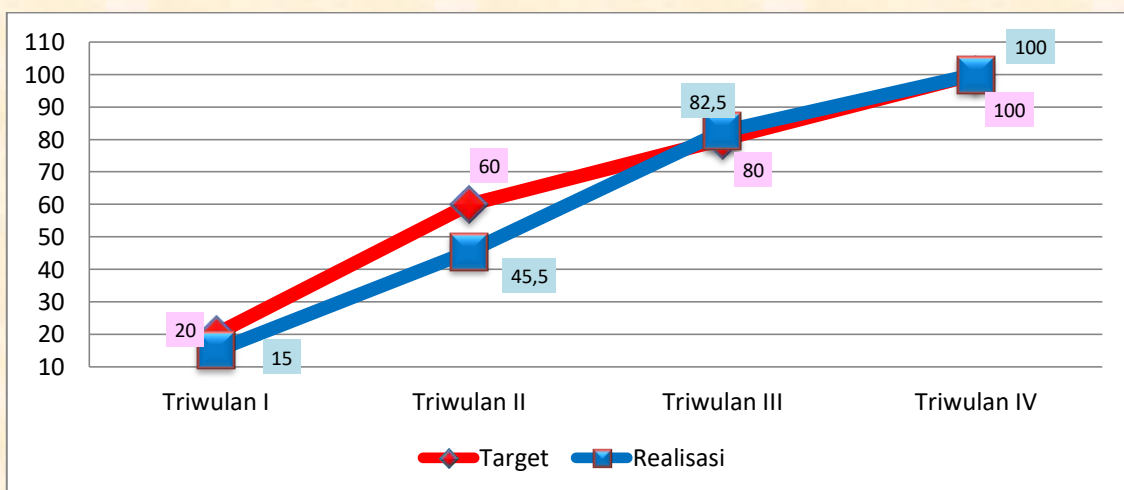
**Tabel 3.2.5.2.2. Perubahan Target IK 5.2.
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024**

Target Jumlah sekolah dengan PJAS aman pada tahun 2021 adalah 40 sekolah, yang terdiri dari 24 sekolah yang diintervensi tahun 2021 dan 16 sekolah

yang diintervensi tahun 2020. Realisasi yang dicapai sesuai target yaitu 40 sekolah, jadi capaian terhadap target adalah 100%.

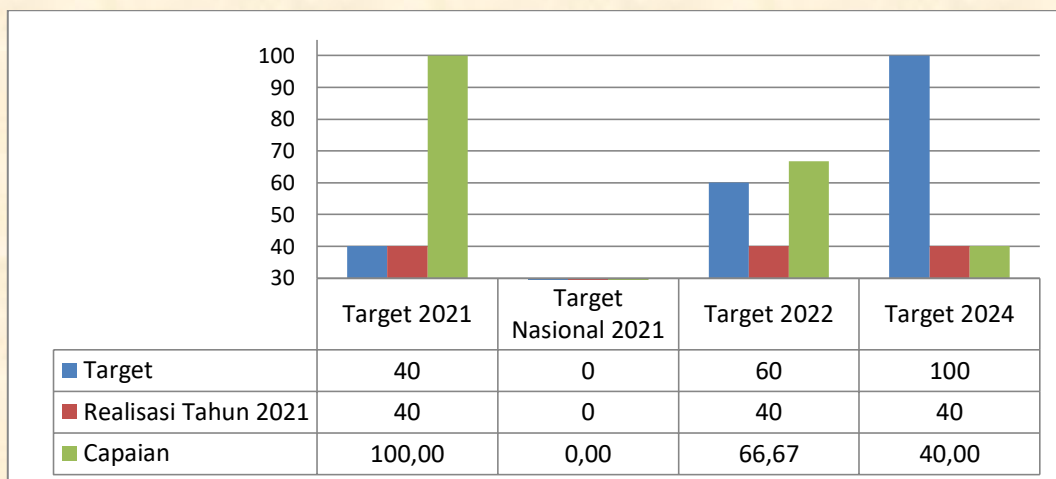
Tahapan yang dilaksanakan adalah advokasi lintas sektor PJAS, sosialisasi keamanan pangan, bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi/produk informasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah yang meliputi dua tahapan, yaitu pembentukan tim keamanan pangan sekolah dan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah oleh kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi sekolah dengan PJAS aman level 1, serta sertifikasi sekolah dengan PJAS aman level 2 (sekolah yang diintervensi pada tahun 2020 dan 2021).

Sebagaimana kegiatan di tahun 2020, pada tahun 2021 di masa pandemi Covid 19 belum berakhir, kegiatan pertemuan tatap muka seperti pelatihan Piagam Bintang Keamanan Pangan di Kantin Sekolah yang melibatkan komunitas sekolah sebagai peserta, kegiatan mobil laboratorium keliling di kantin dan sekitar sekolah, audit kantin sekolah dan audit surveilans kantin sekolah yang melibatkan kantin dan penjual pangan di sekitar sekolah, ditiadakan. Untuk kegiatan mobil laboratorium keliling masih dilaksanakan tetapi dengan lokus yang berbeda, yaitu sampling, pengujian dan KIE dilaksanakan di jalur distribusi PJAS pada kabupaten/kota yang diintervensi tahun 2021.



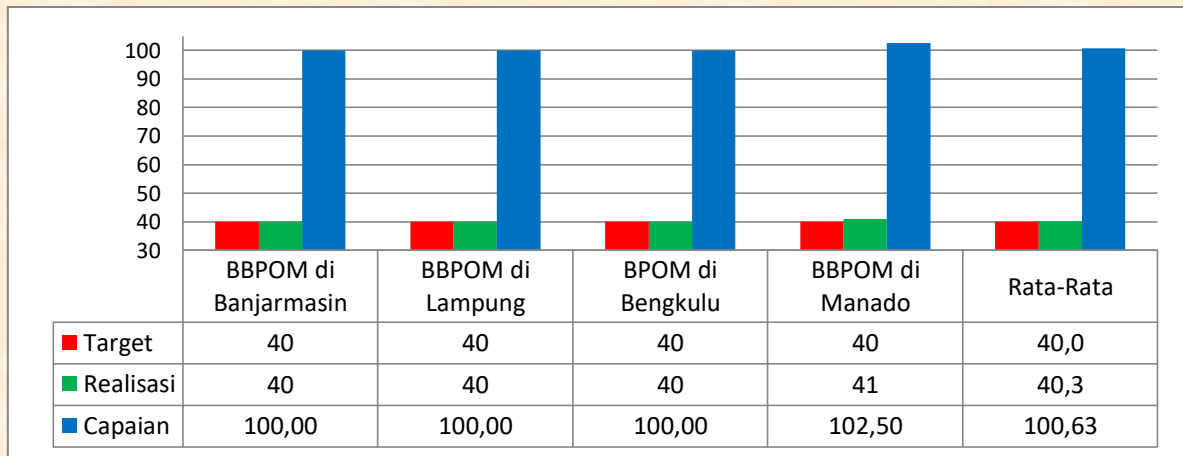
Grafik 3.2.5.2.1. Realisasi Kinerja IK.5.2 Pertriwulan Tahun 2021

Capaian program PJAS tahun 2020 dan 2021 adalah 100%. Realisasi jumlah sekolah yang diintervensi sesuai jumlah target yang ditetapkan secara nasional. Di dalam pencapaian target, ada kendala yang dihadapi selama kegiatan intervensi PJAS aman berlangsung di tahun 2021, karena beberapa sekolah masih dilaksanakan secara daring, sehingga terbatas dalam cara penyampaian informasi atau materi kepada komunitas sekolah. Monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, bagaimana petugas balai mendorong agar terbentuknya tim keamanan pangan sekolah hingga memantau kader keamanan pangan untuk mengintervensi komunitas sekolah, memerlukan upaya dan semangat yang tinggi kepada pihak sekolah. Petugas balai harus mampu mengkomunikasikan tujuan, manfaat dan harapan yang akan dicapai pada setiap proses kegiatan dengan baik dan tepat. Penyampain informasi yang dilakukan dengan tatap muka akan berbeda hasilnya dengan informasi yang disampaikan secara daring. Pertanyaan dan jawaban yang diterima terbatas, selain kurang jelasnya materi yang disampaikan, juga terkendala pada fasilitas dan jaringan. Sehingga dapat dimengerti jika pemahaman yang diterima peserta dan komunitas sekolah belum seperti yang dipersyaratkan



Grafik 3.2.5.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.5.2 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024

Target sekolah di setiap UPT berbeda, disesuaikan dengan jumlah sekolah dan kondisi wilayah. Untuk ke-4 Balai Besar/Balai POM berikut, target sekolah yang diintervensi pada tahun 2021 jumlahnya adalah 40 sekolah, yaitu BBPOM di Banjarmasin, BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Manado dan di Balai POM di Bengkulu, dengan capaian masing-masing balai terhadap target adalah 100%, kecuali BBPOM di Manado yang realisasinya 41 sekolah dengan capaian 102,5%



**Grafik 3.2.5.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.5.2
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

Pada tahun 2024 target yang diintervensi Program PJAS BBPOM di Banjarmasin berjumlah 100 sekolah, target ditetapkan dengan sistem akumulasi. Di setiap tahunnya ada target sekolah baru berjumlah 20 sekolah dan ada sekolah yang dikawal di tahun sebelumnya. Dengan terealisasinya target di tahun 2021 sebanyak 40 sekolah, maka BBPOM di Banjarmasin akan dapat mencapai target 100 sekolah pada akhir Renstra tahun 2024.

Dalam meraih capaian kinerja pada tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebesar Rp.530.668.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.530.651.312,- atau capaian kinerja sebesar 100 %. Indeks Efisiensi yang dicapai adalah 1,00 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,00 sehingga capaian efisiensi pada tahun 2021 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan penggunaan

anggaran dinilai efisien karena dapat mencapai capaian sesuai target yang telah ditetapkan.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
100%	100%	1,00	0,00	100%	Efisien

Tabel 3.2.5.2.3. Efisiensi Anggaran IK.5.2 Tahun 2021

Keberhasilan capaian program PJAS di tahun 2021, selain dilaksanakan tahapan kegiatan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan, program PJAS ini juga ditunjang dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1). Kerjasama dan koordinasi intensif dengan pihak sekolah terkait pembentukan tim keamanan pangan sekolah dan pengumpulan dokumen yang dipersyaratkan.
- 2). Pembentukan *whatsapp group* yang anggotanya berisi petugas BBPOM di Banjarmasin dan tim keamanan pangan sekolah. Grup ini sebagai media komunikasi pelaksanaan kegiatan serta berbagi informasi Obat dan Makanan untuk komunitas sekolah.

Program intervensi PJAS aman secara kontinyu dilaksanakan hingga tahun 2024. Dengan bertambahnya jumlah sekolah yang diintervensi, jumlah kader keamanan pangan sekolah juga bertambah, sehingga sekolah yang menerapkan keamanan pangan juga akan meningkat, baik peningkatan dari segi kuantitas maupun kualitas. Di tahun-tahun mendatang, keamanan pangan tidak hanya slogan tetapi sudah menjadi suatu kebutuhan.

Berdasarkan uraian di atas, realisasi indikator kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 telah berhasil dengan memperoleh capaian yang baik, yaitu 100% dari target yang ditetapkan, dan Balai Besar POM di Banjarmasin optimis akan berhasil mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

Indikator Kinerja 5.3 : Jumlah desa pangan aman

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
12	12	100%	Baik

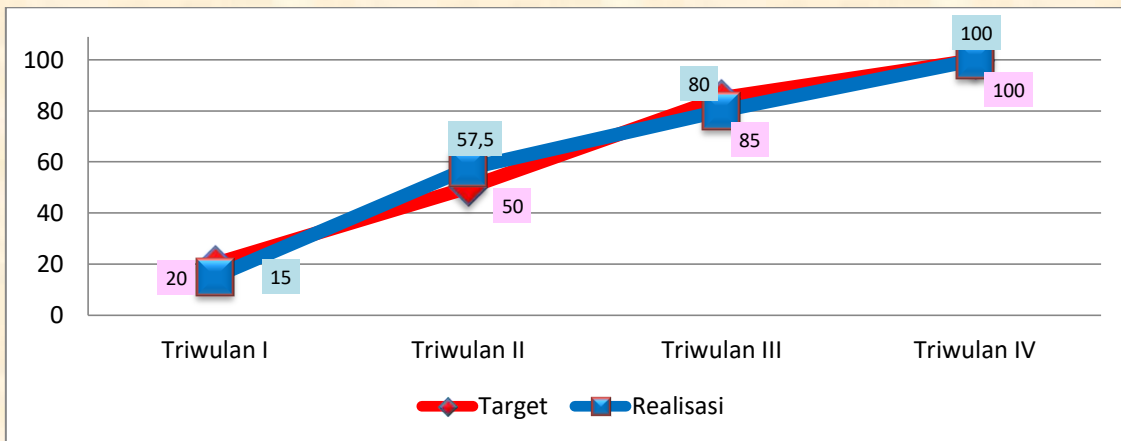
Tabel 3.2.5.3.1. Realisasi Kinerja IK.5.3 Tahun 2021

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, namun untuk target Jumlah Desa Pangan Aman tidak mengalami perubahan.

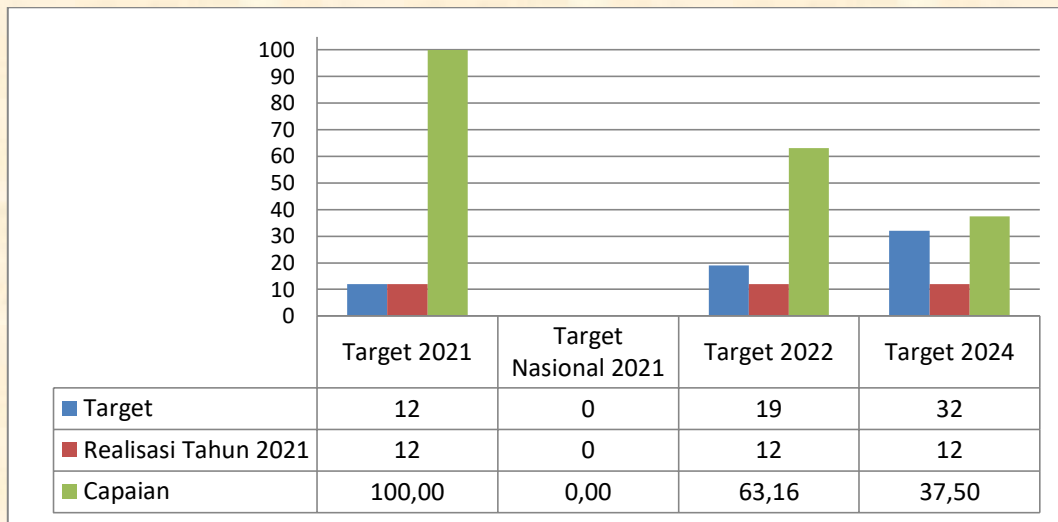
Target untuk indikator Jumlah Desa Pangan Aman Pada tahun 2021 adalah 12 (dua belas) desa yang terdiri dari 8 (delapan) desa baru ditambah dengan pengawasan terhadap 4 (empat) desa yang telah dilaksanakan di tahun 2020. Target desa yang diintervensi keamanan pangan tahun 2021 mengalami perubahan dari target awal yaitu enam desa. Bertambahnya target desa karena mengakomodir kekurangan dua desa di tahun 2020.

Masa pandemi Covid 19 pada tahun 2020 di kabupaten/kota wilayah Kalimantan Selatan, sebagian besar berstatus zona merah, sehingga Pemerintah Daerah membatasi pertemuan tatap muka dan kegiatan yang mengundang kerumunan orang banyak.



Grafik 3.2.5.3.1. Realisasi Kinerja IK.5.3 Pertriwulan Tahun 2021

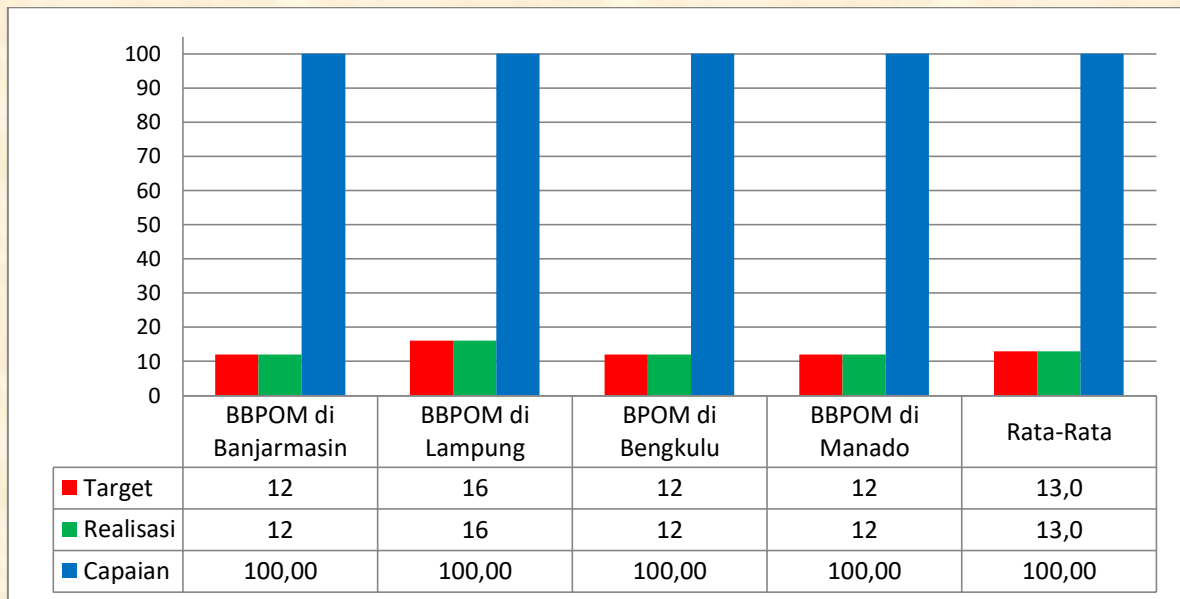
Tahapan kegiatan Desa Pangan Aman adalah advokasi kelembagaan desa, pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit, pelatihan kader keamanan pangan, bimtek komunitas desa, survei pre intervensi untuk komunitas, fasilitasi keamanan pangan, intensifikasi pengawasan, pengawalan desa yang diintervensi tahun sebelumnya, monitoring dan evaluasi, serta lomba Desa Pangan Aman tahun 2021. Komunitas masyarakat yang diintervensi keamanan pangan adalah komunitas rumah tangga, ritel, industri rumah tangga pangan, sekolah dan karang taruna. Di tahun 2021 sekolah tidak aktif, pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga tidak ada sampling dan pengujian pangan jajanan di kantin dan lingkungan sekolah. Kader keamanan pangan yang dibentuk dari komunitas sekolah juga tidak melibatkan siswa, kader hanya terdiri dari guru dan komite sekolah. Ini dikarenakan kasus Covid 19 cukup tinggi di daerah sehingga tidak memungkinkan siswa untuk beraktivitas langsung di luar rumah.



Grafik 3.2.5.3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.5.3 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024

Realisasi jumlah desa pangan aman yang diintervensi tahun 2021 dan pengawalan desa yang diintervensi tahun 2020 adalah 12 (dua belas) desa, dan diperoleh capaian terhadap target sebesar 100%. Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program adalah status PPKM Level III di salah satu kabupaten yang diintervensi keamanan pangan, sehingga pelaksanaan advokasi kelembagaan desa baru terlaksana di bulan April. Tertundanya awal tahapan kegiatan ini berpengaruh terhadap tahapan kegiatan selanjutnya.

Program Desa Pangan Aman di tahun 2021 dan tahun 2020 mencapai realisasi 100% terhadap target desa yang diintervensi, meskipun dilaksanakan di masa pandemi Covid 19. Kendala yang ada disiasati dengan pembatasan waktu pelaksanaan, penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan disertai dengan menjalin komunikasi secara intensif dengan tim keamanan pangan desa, kader keamanan pangan dan komunitas.



**Grafik 3.2.5.3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.5.3
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

Target desa pangan aman di setiap UPT berbeda, disesuaikan dengan jumlah desa dan kondisi wilayah. Pada tahun 2021, target desa BBPOM di Banjarmasin adalah 12 (dua belas), BBPOM di Bandar Lampung 16 (enam belas) desa, BBPOM di Manado target desa adalah 12 (dua belas) dan target di Balai POM di Bengkulu juga 12 (dua belas) desa, dengan capaian masing-masing balai terhadap target adalah 100%.

Pada tahun 2024 target desa yang diintervensi Program Desa Pangan Aman oleh BBPOM di Banjarmasin berjumlah 32 desa, target ditetapkan dengan sistem akumulasi. Di setiap tahunnya ada target desa baru berjumlah 4 desa dan ada desa yang dikawal di tahun sebelumnya. Dengan terealisasinya target desa pangan aman di tahun 2021 sebanyak 12 desa, maka BBPOM di Banjarmasin akan dapat mencapai target 32 desa pada akhir Renstra tahun 2024.

Dalam meraih capaian kinerja pada tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebagaimana dalam DIPA sebesar Rp.720.093.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.720.091.400,- atau 100%. Indeks Efisiensi yang dicapai adalah 1,00 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,00 sehingga capaian efisiensi pada tahun 2021 sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan

bahwa penggunaan anggaran dinilai efisien karena kegiatan yang berkaitan telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
100%	100%	1,00	0,00	100%	Efisien

Tabel 3.2.5.3.3. Efisiensi Anggaran IK.5.3 Tahun 2021

Keberhasilan capaian Program Desa Pangan Aman tahun 2021 ditunjang oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1). Koordinasi secara internsif kepada lintas sektor, tim keamanan pangan desa, kader keamanan pangan serta komunitas desa.
- 2). Pembentukan grup *whatsapp* yang beranggotakan petugas BBPOM di Banjarmasin serta kader keamanan pangan desa sebagai media komunikasi dan berbagi informasi terkait Obat dan Makanan.
- 3). Selain melaksanakan kegiatan untuk desa yang diintervensi tahun 2021 dan 2020, BBPOM di Banjarmasin juga mengawal Desa Sungai Rasau, Kabupaten Tanah Laut yang diintervensi BPOM tahun 2019. Desa Sungai Rasau telah menganggarkan secara mandiri kegiatan replikasi Desa Pangan Aman bersumber dari APB Desa tahun 2021.

Program Desa Pangan Aman secara kontinyu dilaksanakan hingga tahun 2024, dengan sistem akumulasi. Di setiap tahunnya ada target desa baru dan ada desa yang dikawal di tahun sebelumnya. Dengan bertambahnya jumlah desa yang diintervensi, jumlah kader keamanan pangan desa juga bertambah, sehingga desa yang menerapkan keamanan pangan juga akan meningkat, baik peningkatan dari segi kuantitas maupun kualitas. Pada tahun 2021, Desa Sungai Rasau yang diintervensi program Desa Pangan Aman tahun 2019 masuk kategori 10 besar dalam Lomba Desa

Pangan Aman, begitu juga dengan kader keamanan Desa Sungai Rasau, masuk nominator 10 besar Lomba Kader Keamanan Pangan. Kegiatan keamanan pangan yang telah dilaksanakan tim keamanan pangan dan kader Desa Sungai Rasau didokumentasikan dan diunggah di akun media sosial *Facebook* desa, sehingga pengalaman dan penerapan keamanan dapat menjadi contoh bagi desa lain. Hal ini juga sebagai penguatan, bahwa penerapan keamanan pangan tidak selalu memerlukan banyak anggaran. Dengan semangat dan kemauan para kader yang didukung oleh perangkat desa serta Pemerintah Daerah, keamanan pangan dapat diterapkan dalam berbagai aspek, mulai dari proses penyiapan bahan pangan, produksi, penyiapan, penyajian hingga pangan siap dikonsumsi.

Berdasarkan uraian di atas, realisasi indikator kinerja Jumlah desa pangan aman Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 telah berhasil dengan memperoleh capaian yang baik, yaitu 100% dari target yang ditetapkan, dan Balai Besar POM di Banjarmasin optimis akan berhasil mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

Indikator Kinerja 5.4 :

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
4	4	100%	Baik

Tabel 3.2.5.4.1. Realisasi Kinerja IK.5.4 Tahun 2021

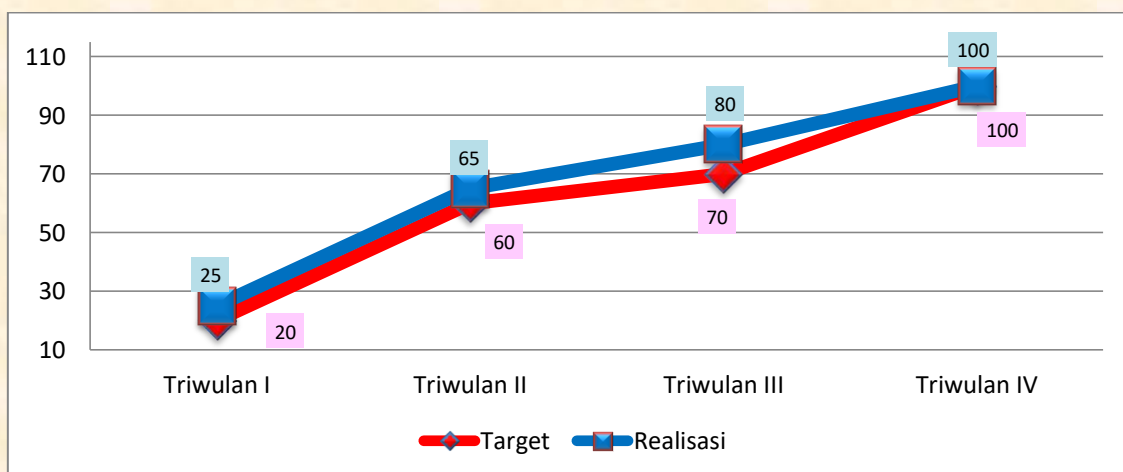
Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala

Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, selain dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, juga terdapat perubahan nomenklatur indikator kinerja, yaitu yang semula nama indikator kinerjanya adalah Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, berubah menjadi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, namun untuk targetnya tidak mengalami perubahan.

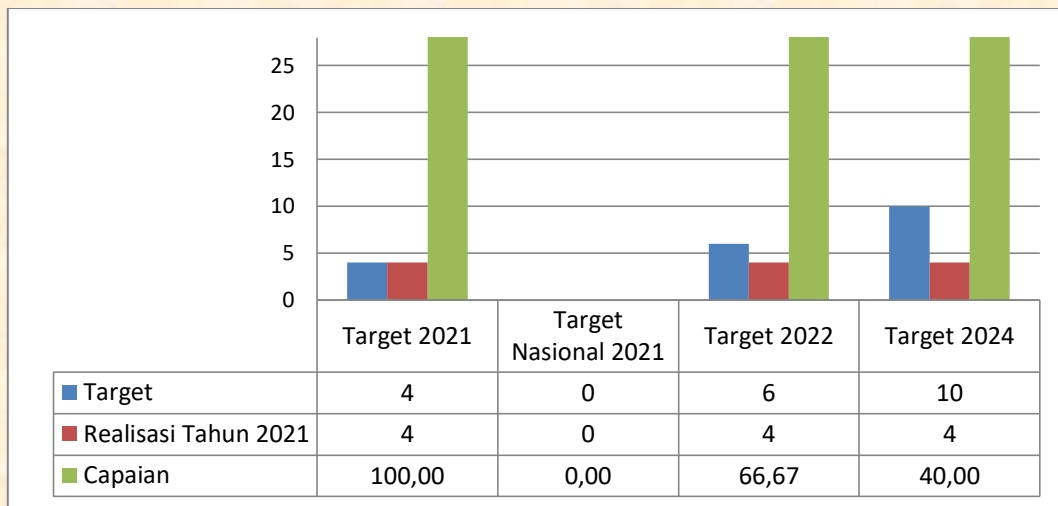
Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada tahun 2021, memiliki target sebanyak 4 (empat) Pasar. Jumlah ini terdiri dari 2 (dua) pasar yang baru diintervensi di tahun 2021 ditambah dengan pengawalan terhadap 2 (dua) Pasar yang telah dilaksanakan di tahun 2020.

Delapan tahapan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya adalah advokasi, survei pasar, bimtek pengelola pasar, monitoring dan evaluasi tahap 1, penyuluhan pasar aman dari bahan berbahaya, kampanye pasar aman dari bahan berbahaya, monitoring dan evaluasi tahap 2 dan lomba pasar aman dari bahan berbahaya. Capaian program pasar aman dari bahan berbahaya tahun 2021 adalah 100%, karena seluruh tahapan kegiatan telah selesai dilaksanakan di empat pasar yang difokuskan sebagai target.



Grafik 3.2.5.4.1. Realisasi Kinerja IK.5.4 Pertriwulan Tahun 2021

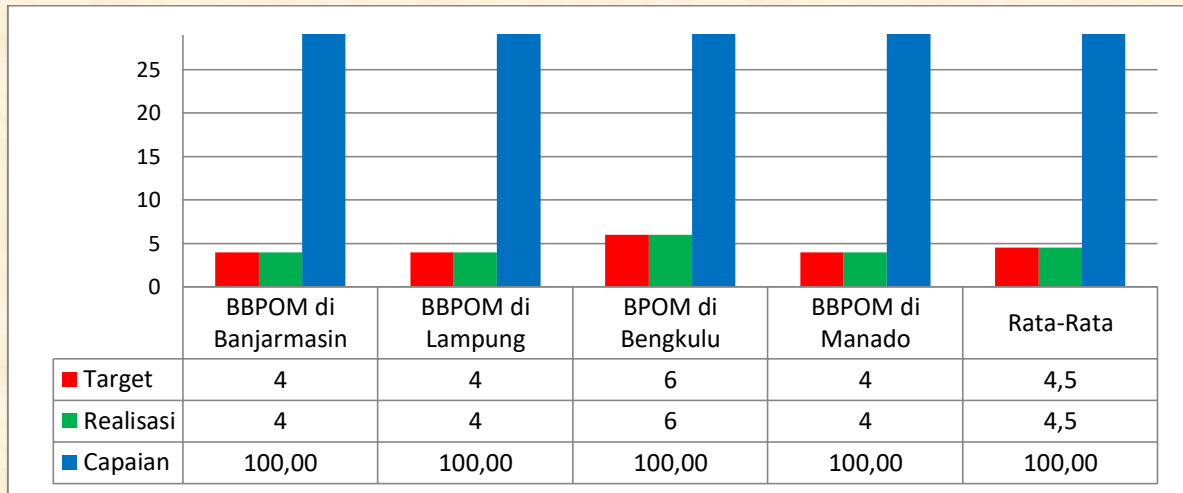
Pada tahun 2021, selain pelaksanaan target pasar tahun 2021 dan pengawalan pasar tahun 2020, terlaksana juga pengawalan kepada pasar aman dari bahan berbahaya yang diintervensi tahun 2016, berupa penyediaan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk kegiatan sampling pangan, pembelian test kit dan permohonan tenaga instruktur BBPOM di Banjarmasin untuk melatih petugas dinas perdagangan dalam pengujian bahan berbahaya pada pangan dengan uji cepat.



Grafik 3.2.5.4.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.5.4 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024

Untuk target pasar aman dari bahan berbahaya pada tahun 2021 dan 2020 berbeda jumlahnya, tetapi realisasi sama yaitu mencapai 100%. Kegiatan ini dilaksanakan pada masa pandemi Covid 19 dengan banyak kendala yang dihadapi. Agar dapat dilaksanakan secara baik dan mencapai target, kegiatan berupa pertemuan tatap muka dilakukan dengan pembatasan waktu, penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan disertai dengan menjalin komunikasi secara intensif dengan Dinas Perdagangan kabupaten/kota sebagai instansi penanggungjawab dan petugas pasar sebagai pelaksana teknis kegiatan. Terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya, dilakukan pengawalan dalam bentuk kegiatan sampling dan pengujian sampel di area pasar. Menurunnya jumlah sampel yang tidak memenuhi syarat dan

tindak lanjut dari Pemerintah Daerah, merupakan sasaran dari intervensi pasar aman dari bahan berbahaya.



**Grafik 3.2.5.4.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.5.4
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

Target Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di setiap UPT berbeda, disesuaikan dengan jumlah pasar dan kondisi wilayah. Pada tahun 2021, target pasar aman dari bahan berbahaya BBPOM di Banjarmasin, BBPOM di Bandar Lampung dan BBPOM di Manado masing-masing 4 (empat) pasar, sedangkan target di Balai POM di Bengkulu adalah 6 (enam) pasar, dengan capaian masing-masing balai terhadap target adalah 100%. Kendala yang dihadapi masing-masing balai tentunya berbeda, untuk BBPOM di Banjarmasin, kasus Covid 19 yang tinggi dan berstatus zona merah hingga triwulan satu, menyebabkan kegiatan advokasi baru terlaksana di bulan April dan berpengaruh terhadap tahapan berikutnya.

Kendala lainnya yaitu adanya petugas pasar yang dimutasi sehingga memerlukan koordinasi kembali dalam penunjukkan petugas pengganti serta melatih petugas pengujian dengan *test kit*. Perubahan petugas pelaksana dan penanggungjawab kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya BBPOM di Banjarmasin, sehingga perlu pembelajaran dan pendampingan berkesinambungan dalam pelaksanaan.

Dalam meraih capaian kinerja tahun 2021, diperlukan anggaran dalam pencapaian output. Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.160.438.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.160.437.720,- atau 100%. Dengan realisasi anggaran sebesar 100,00 %, dengan capaian kinerja sebesar 100 %, Indeks Efisiensi sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,00 sehingga capaian efisiensi pada tahun 2021 sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran terkait paspasar aman dari bahan berbahaya dinilai telah **efisien**.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
100%	100%	1,00	0,00	100%	Efisien

Tabel 3.2.5.4.2. Efisiensi Anggaran IK.5.4 Tahun 2021

Keberhasilan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya tahun 2021 ditunjang dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi intensif kepada Dinas Perdagangan dan petugas pasar sebagai pelaksana pengawas kegiatan.
- 2) Pendampingan kepada petugas BBPOM di Banjarmasin yang baru terhadap pelaksanaan tahapan kegiatan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.
- 3) Pendampingan kepada petugas pasar yang baru dalam pelaksanaan uji sampel pangan untuk kegiatan monev tahap dua.
- 4) Pembentukan grup Whatsapp yang beranggotakan petugas balai, petugas pasar dan komunitas pasar untuk berbagi informasi Pangan Aman.
- 5) Pendampingan dan pelaksanaan lomba Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang mengajukan Pasar Pangeran Bumi Raya, Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu sebagai peserta.
- 6) Koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten tanah Bumbu sebagai salah satu narasumber pada kegiatan Kampanye Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya secara kontinyu dilaksanakan hingga tahun 2024, dengan sistem akumulasi. Di setiap tahunnya ada target pasar baru dan ada pasar yang dikawal di tahun sebelumnya. Dengan bertambahnya jumlah pasar yang diintervensi, jumlah fasilitator dan pengelola pasar juga bertambah, sehingga pasar yang menerapkan keamanan pangan juga akan meningkat, baik peningkatan dari segi kuantitas maupun kualitas.

Berdasarkan uraian di atas, realisasi indikator kinerja Jumlah pasar aman berbasis komunitas Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 telah berhasil dengan memperoleh capaian yang baik, yaitu 100% dari target yang ditetapkan, dan Balai Besar POM di Banjarmasin optimis akan berhasil mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

Sasaran Kegiatan 6 :

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja, dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

Indikator Kinerja 6.1 :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
100	100	100%	Baik

Tabel 3.2.6.1.1. Realisasi Kinerja IK.6.1 Tahun 2021

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dengan rumus:

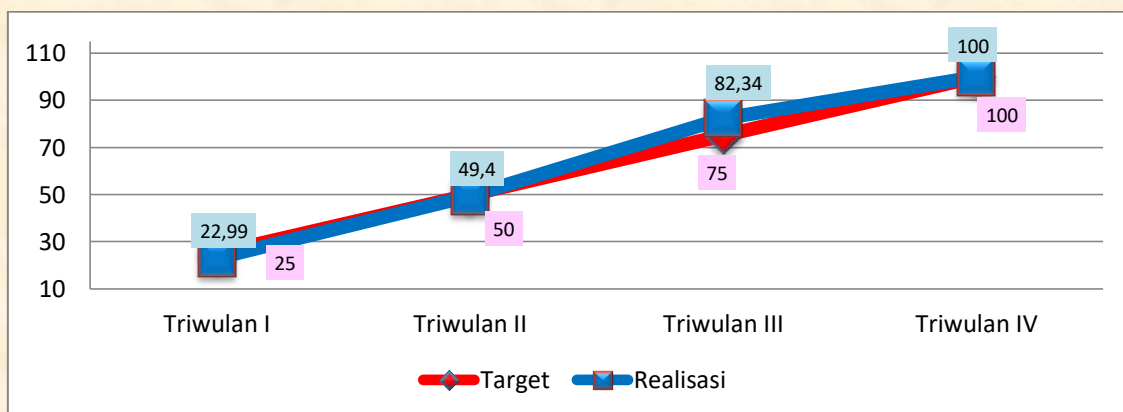
$$\% \text{ Obat Std} = \frac{\text{Jumlah Obat Diperiksa sesuai Standar} + \text{Jumlah Obat Diuji sesuai Standar s.d Triwulan } n}{\text{Jumlah Target Obat Diperiksa} + \text{Jumlah Target Obat Diuji Tahun } n} \times 100$$

Obat yang dimaksud dalam indikator ini mencakup Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium, baik pengujian kimi maupun mikrobiologi.

Berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan tahun 2021, diperoleh Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 100%, yang diperhitungkan dari :

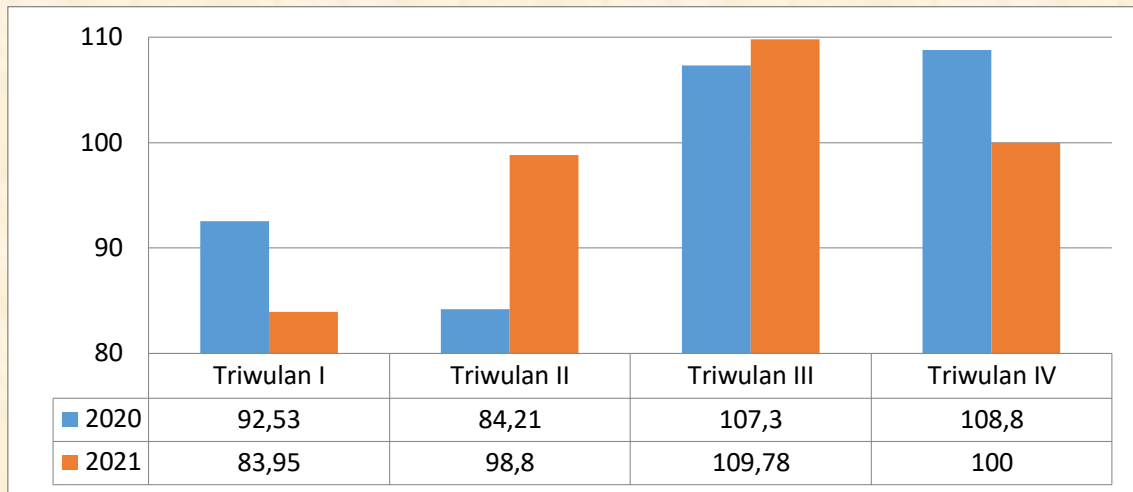
- Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar 2.075 sampel
- Jumlah target sampel Obat yang diperiksa 2.075 sampel
- Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar 2.070 sampel
- Jumlah target sampel Obat yang diuji dikurangi sampel TIE, rusak, kadaluarsa 2.070 sampel

Rangkuman target, realisasi, capaian dan kriteria triwulanan tahun 2021 adalah sebagai berikut :



Grafik 3.2.6.1.1. Realisasi Kinerja IK.6.1 Pertriwulan Tahun 2021

Apabila capaian kinerja triwulan I, II, III dan IV tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, tergambar sebagaimana grafik berikut:

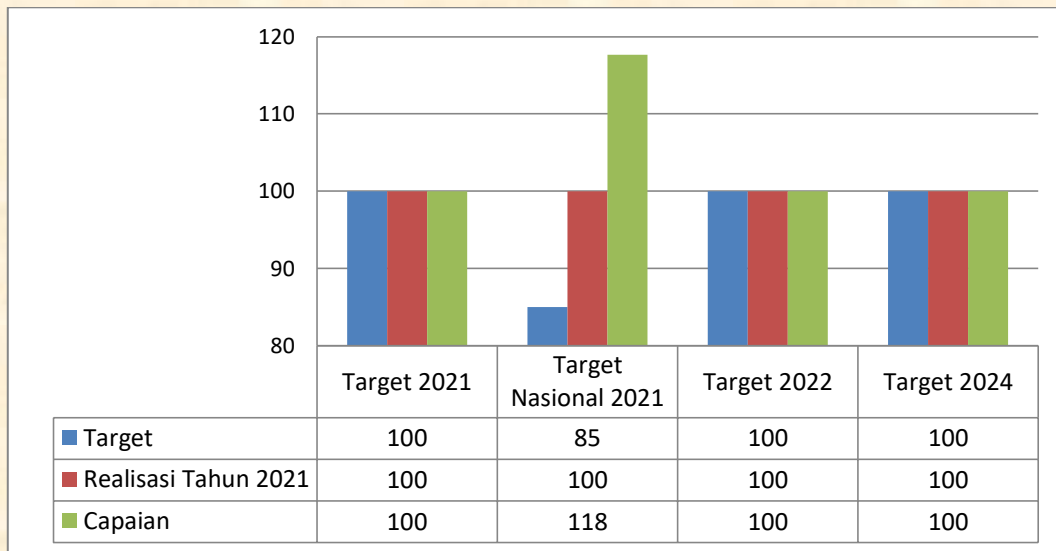


Grafik 3.2.6.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.6.1 Tahun 2020-2021

Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan capaian kinerja triwulan IV tahun 2021 dibanding triwulan IV tahun 2020 yang memperoleh capaian sebesar 108,8%, dengan jumlah target sampel Obat, baik yang diperiksa sesuai standar maupun yang diuji sesuai standar sama yaitu 2.075 sampel. Namun, untuk perhitungan capaian tersebut pada akhir tahun, penyebut dikoreksi dengan mengurangi target sampel Obat yang diuji dengan jumlah sampel Obat TIE, rusak dan kadaluarsa sehingga jumlahnya akan sama dengan jumlah sampel Obat yang masuk ke laboratorium untuk diuji.

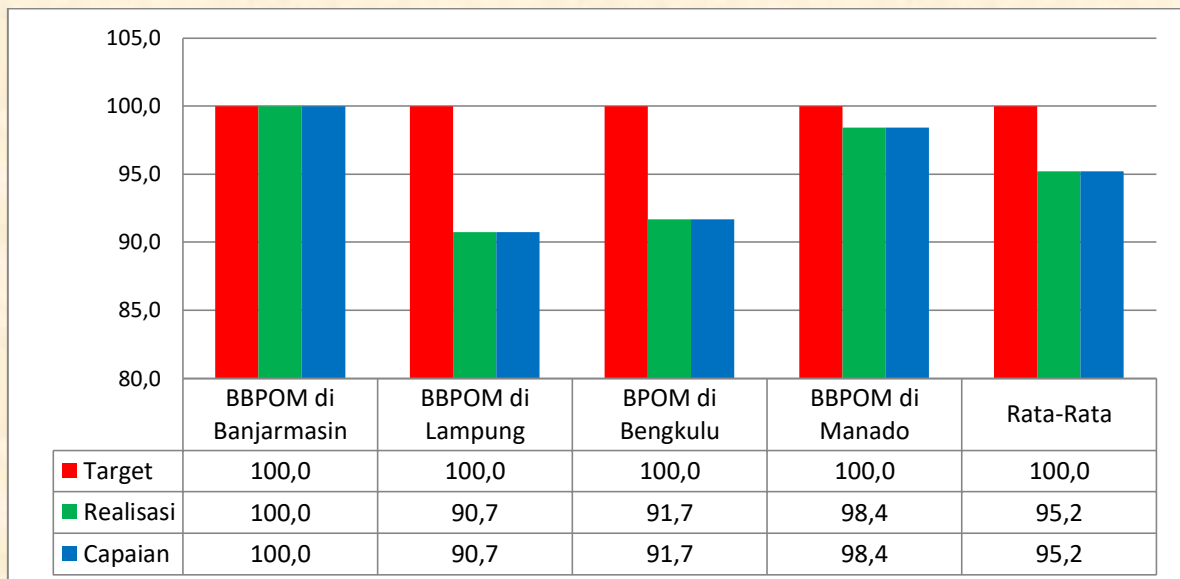
Apabila dibandingkan terhadap target tahun 2021 sebesar 100%, capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan IV tahun 2021 telah mencapai target sebesar 100%.

Selanjutnya realisasi kinerja yang diperoleh tersebut apabila dibandingkan dengan tahunan tahun 2021 serta target akhir renstra tahun 2024, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :



Grafik 3.2.6.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.6.1 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024

Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat pada Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 berada di posisi tertinggi dibandingkan dengan Balai Besar/Balai POM seklaster, yaitu sebagai berikut :



Grafik 3.2.6.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.6.1 Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021

Balai Besar POM di Banjarmasin telah berhasil mencapai target tahun 2021 dengan kriteria baik, dengan capaian 100,00%. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan sampling terhadap produk Obat dengan pembagian sampel target dan acak sesuai pedoman sampling.
- b) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen.
- c) Perencanaan pengadaan alat, reagensia, media dan suku cadang secara cepat dan tepat sehingga membantu mempercepat proses pengujian serta pemenuhan parameter uji kritis.
- d) Pengadaan baku pembanding sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp213.321.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.213.306.454,- atau 99,99%.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
100%	99,99%	1,00	0,00	100%	Efisien

Tabel 3.2.6.1.2. Efisiensi Anggaran IK.6.1 Tahun 2021

Dari data tersebut dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,00 sehingga capaian efisiensi pada tahun 2021 adalah sebesar 100% (**Efisien**).

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar antara lain:

- a) Perencanaan pengadaan alat, reagensia, media dan suku cadang secara cepat dan tepat sehingga membantu mempercepat proses pengujian serta pemenuhan parameter uji kritis.
- b) Pengadaan baku pembanding sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis.

Tindak lanjut hasil evaluasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi persentase sampel Obat yang memenuhi syarat antara lain:

- a) Penambahan anggaran untuk pengadaan suku cadang alat laboratorium dan pemeliharaan alat laboratorium.
- b) Pengadaan alat laboratorium sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis yang tertuang pada pedoman sampling.
- c) Peningkatan kompetensi melalui bimtek atau pelatihan yang diselenggarakan secara daring.

Berdasarkan uraian di atas, realisasi indikator kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 telah berhasil dengan memperoleh capaian yang baik, yaitu 100% dari target yang ditetapkan, dan Balai Besar POM di Banjarmasin optimis akan berhasil mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

Indikator Kinerja 6.2 :

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
100	100	100%	Baik

Tabel 3.2.6.2.1. Realisasi Kinerja IK.6.2 Tahun 2021

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dengan rumus:

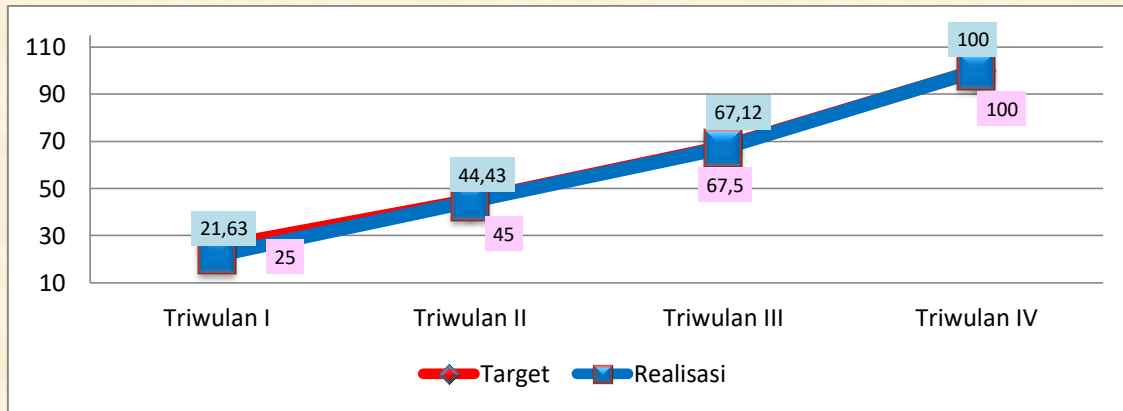
$$\% \text{ Makanan Std} = \frac{\text{Jumlah Makanan Diperiksa sesuai Standar} + \text{Jumlah Makanan Diuji sesuai Standar s.d Triwulan } n}{\text{Jumlah Target Makanan Diperiksa} + \text{Jumlah Target Makanan Diuji Tahun } n} \times 100$$

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium, baik pengujian kimi maupun mikrobiologi.

Berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan tahun 2021, diperoleh Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar 100%, yang diperhitungkan dari :

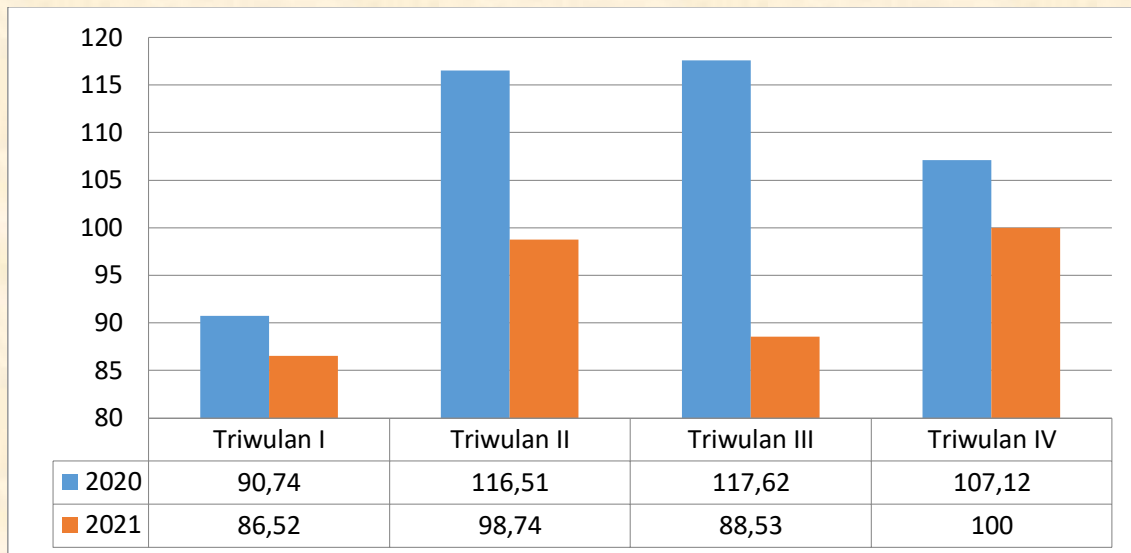
- Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar 853 sampel
- Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa 853 sampel
- Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar 851 sampel
- Jumlah target sampel Makanan yang diuji dikurangi sampel TIE, rusak, kadaluarsa 851 sampel

Rangkuman target, realisasi, capaian dan kriteria triwulanan tahun 2021 adalah sebagai berikut :



Grafik 3.2.6.2.1. Realisasi Kinerja IK.6.2 Pertriwulan Tahun 2021

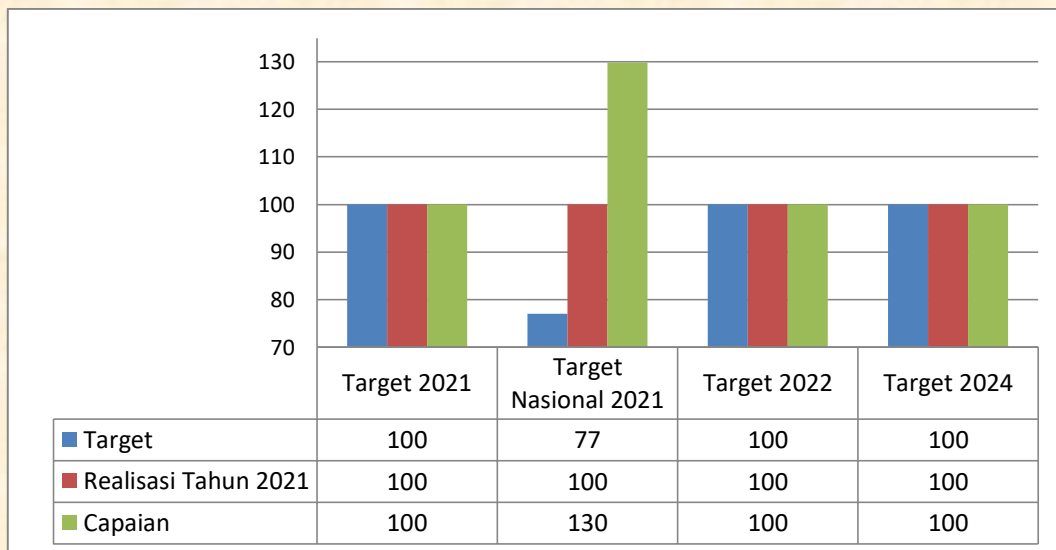
Apabila capaian kinerja triwulan I, II, III dan IV tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, tergambar sebagaimana grafik berikut:



Grafik 3.2.6.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.6.2 Tahun 2020-2021

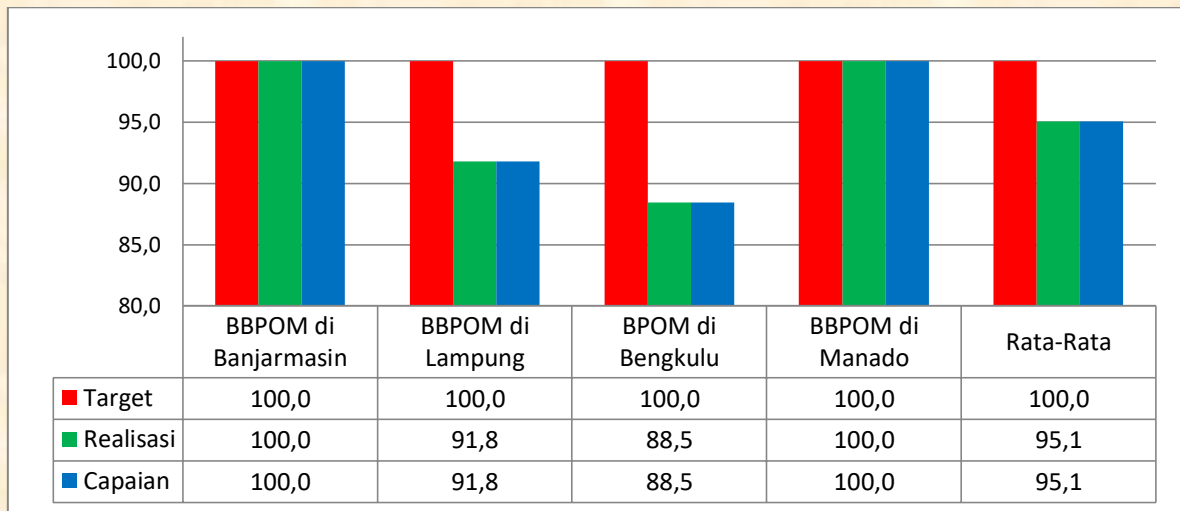
Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan capaian kinerja pada tahun 2021 dibanding tahun 2020 yang memperoleh capaian sebesar 107,12%. Hal tersebut terjadi karena target kinerja indikator ini pada tahun 2021, yang sebesar 100%, lebih tinggi dibanding tahun 2020 yang hanya sebesar 90%. Namun berdasarkan jumlah sampel terjadi peningkatan, dimana pada tahun 2020, jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 568 sampel dari 613 sampel Makanan yang masuk laboratorium, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 853 sampel dari 853 sampel Makanan yang masuk laboratorium.

Selanjutnya realisasi kinerja yang diperoleh tersebut apabila dibandingkan dengan tahunan tahun 2021 serta target akhir renstra tahun 2024, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :



Grafik 3.2.6.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.6.2 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024

Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 berada di posisi tertinggi bersama dengan Balai Besar POM di Manado dibandingkan dengan dua Balai Besar/Balai POM lain yang seklaster, yaitu sebagai berikut :



**Grafik 3.2.6.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.6.1
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

Balai Besar POM di Banjarmasin telah berhasil mencapai target tahun 2021 dengan kriteria baik, dengan capaian 100,00%. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Pelaksanaan sampling terhadap produk Makanan dengan pembagian sampel target dan acak sesuai pedoman sampling.
- Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen.
- Perencanaan pengadaan alat, reagensia, media dan suku cadang secara cepat dan tepat sehingga membantu mempercepat proses pengujian serta pemenuhan parameter uji kritis.
- Pengadaan baku pembanding sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis.

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebesar Rp.120.363.400,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.120.353.312,- atau 85,89%.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
100%	99,99%	1,00	0,00	100%	Efisien

Tabel 3.2.6.2.2. Efisiensi Anggaran IK.6.2 Tahun 2021

Dari data tersebut dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,00 sehingga capaian efisiensi pada tahun 2021 sebesar 100% (**Efisien**).

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar antara lain:

- a) Perencanaan pengadaan alat, reagensia, media dan suku cadang secara cepat dan tepat sehingga membantu mempercepat proses pengujian serta pemenuhan parameter uji kritis.
- b) Pengadaan baku pembanding sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis.

Tindak lanjut hasil evaluasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar antara lain:

- a) Penambahan anggaran untuk pengadaan suku cadang alat laboratorium dan pemeliharaan alat laboratorium.
- b) Pengadaan alat laboratorium sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis yang tertuang pada pedoman sampling.
- c) Peningkatan kompetensi melalui bimtek atau pelatihan yang diselenggarakan secara daring.

Berdasarkan uraian di atas, realisasi indikator kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 telah berhasil dengan memperoleh capaian yang baik, yaitu 100% dari target yang ditetapkan, dan Balai Besar POM di Banjarmasin optimis akan berhasil mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

Saran Kegiatan 7 :

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja, dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

Indikator Kinerja 7.1

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
90	95,53	106,14%	Baik

Tabel 3.2.7.1.1. Realisasi Kinerja IK.7.1 Tahun 2021

Penindakan merupakan hilir pengawasan Obat dan Makanan yang dapat memberikan dampak signifikan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian pelaksanaan misi Badan POM yaitu *meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga*, Balai Besar POM di Banjarmasin telah merumuskan tujuan yang salah satunya yaitu *Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan dengan sasaran strategis Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin*. Tercapainya tujuan ini diukur dengan indikator kinerja tujuan yang merupakan indikator kinerja

sasaran strategis, yaitu Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan.

Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran strategis ini, pada tahun 2021 Balai Besar POM di Banjarmasin melaksanakan fungsi cegah tangkal, siber, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebanyak 10 (sepuluh) perkara pidana, terdiri dari 8 perkara yang ditangani oleh Balai Besar POM di Banjarmasin, 1 perkara ditangani oleh Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara, dan 1 perkara ditangani oleh Loka POM di Kab. Tanah Bumbu. Selain itu pada tahun 2021 Balai Besar POM di Banjarmasin juga menyelesaikan perkara *carry over* tahun 2020 sebanyak 2 perkara, yang terdiri dari 1 perkara dari Balai Besar POM di Banjarmasin, dan 1 perkara dari Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara.

Sebagaimana dalam Dokumen Renstra 2020-2024 Balai Besar POM di Banjarmasin, telah ditetapkan target indikator kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin. Pada tahun 2021 wabah Covid-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan relatif bisa dikendalikan, sehingga dilakukan reviu target indikator kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin. Target Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Balai Besar POM di Banjarmasin **dinaikkan** dari semula 83% menjadi **90%**. Target tersebut mencakup kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin, Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara, dan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu.

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Semula	81	83	85	88	90
Menjadi	89,69 (Realisasi)	90	92	94	96

Tabel 3.2.7.1.2. Perubahan Target IK 7.1.

Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024

Setelah dilakukan kegiatan di tahun 2021 sesuai dengan reviu target kinerja tersebut, didapatkan hasil realisasi nilai kinerja indikator persentase

keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan pada tahun 2021 adalah sebesar **95,53%** yang diukur berdasarkan pembobotan setiap tahap penyidikan sebagaimana tabel berikut :

Tahapan	Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi
	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over				
Target	10	2				
SPDP	0	0	1,00		0,15	15,00%
Tahap I	3	0	1,00	0,15	0,4	40%
P21	1	0	0,70	0,15	0,3	22,91%
Tahap II	7	2	0,60	0,15	0,15	10,27%
Realisasi Tahun 2021	11	-				88,18%
Realisasi Carry Over	-	2				

Uraian	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over	Total Realisasi Perkara	Total Target	Capaian Perkara	Nilai Kinerja
Realisasi Perkara	11	2	13	12	108,33%	95,53%
Target Perkara	10	2				

Tabel 3.2.7.1.3. Perhitungan Realisasi Kinerja IK 7.1.

Realisasi nilai kinerja indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan pada tahun 2021 lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan (90%), sehingga capaian realisasi terhadap target tahun 2021 adalah sebesar **106,14%**.

Terdapat perbedaan definisi operasional indikator kinerja antara tahun 2021 dan tahun 2020 dengan tahun 2019. Pada tahun 2019, definisi operasional indikator

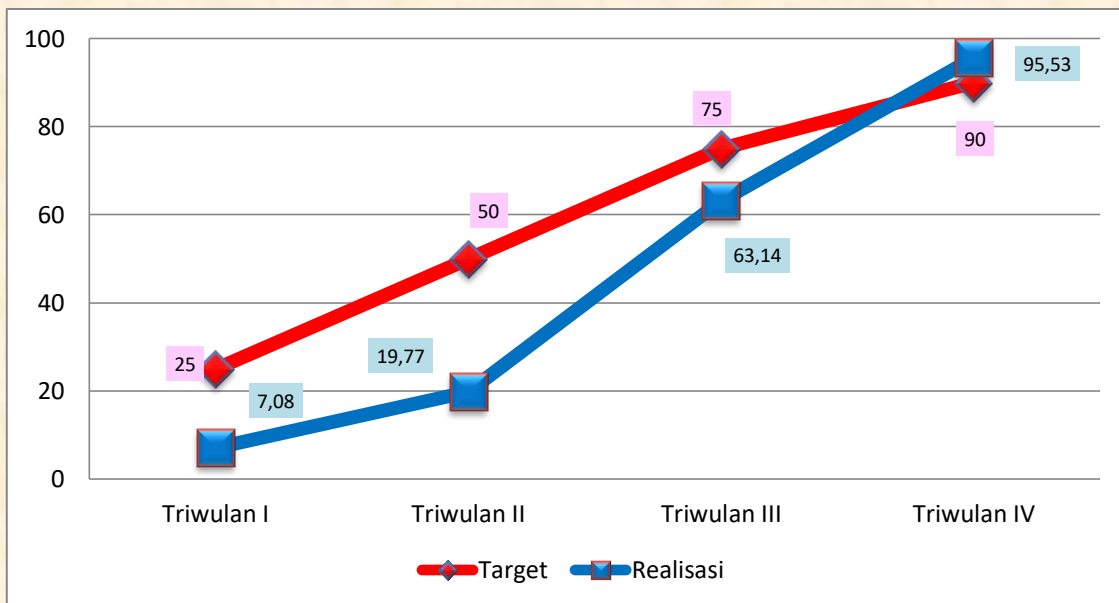
kinerja adalah penyelesaian perkara hingga dilaksanakannya Tahap II, sedangkan untuk tahun 2020 dan tahun 2021, definisi operasional indikator kinerja adalah persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan yang dihitung dengan pembobotan setiap tahapan penyidikan. Perbandingan kinerja penindakan tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tahun	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
2019	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	90%	68,75%	76,39%
2020	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	81%	89,69%	110,73%
2021	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	90%	95,53%	106,14%

Tabel 3.2.7.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 7.1. Tahun 2019-2021

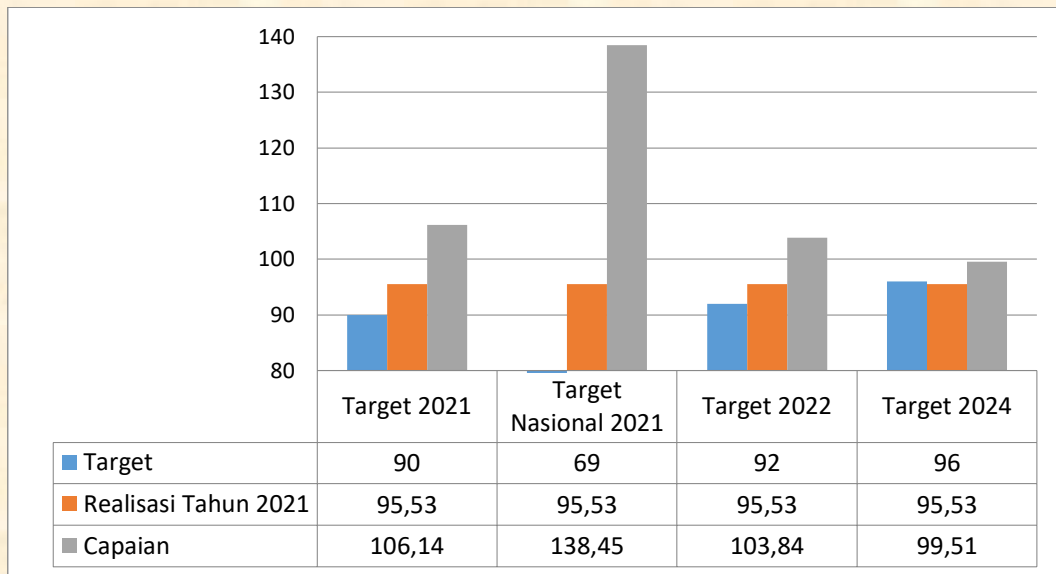
Capaian kinerja tahun 2021 yaitu 106,14 % lebih rendah daripada capaian kinerja tahun 2020 sebesar 110,73 % dan lebih tinggi daripada capaian kinerja tahun 2019 sebesar 76,39%. Namun target kinerja tahun 2021 sebesar 90% lebih tinggi daripada target kinerja tahun 2020 sebesar 81% dan sama dengan target kinerja tahun 2019 sebesar 90%. Sedangkan realisasi kinerja menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan, yaitu dari 68,75% di tahun 2019, naik menjadi 89,69% di tahun 2020 dan menjadi 95,53% di tahun 2021.

Jika dilihat berdasarkan Pelaksanaan Hasil Kegiatan setiap triwulan sampai dengan akhir tahun 2021, diperoleh data sebagai berikut :



Grafik 3.2.7.1.1. Realisasi Kinerja IK.7.1 Pertriwulan Tahun 2021

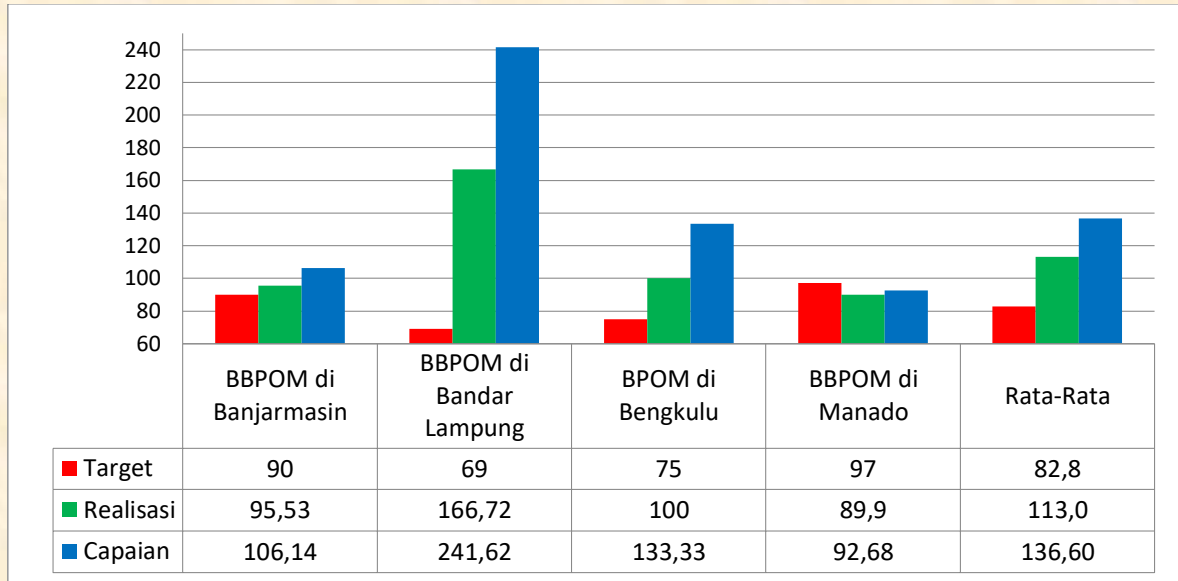
Selanjutnya realisasi kinerja tahun tersebut apabila dibandingkan dengan target BBPOM di Banjarmasin tahun 2021, target nasional tahun 2021, target BBPOM di Banjarmasin tahun 2022 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Grafik 3.2.7.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.7.1 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024

Dari grafik di atas tergambar bahwa capaian kinerja tahun 2021 lebih tinggi daripada target kinerja balai tahun 2021 dan tahun 2022 namun sedikit lebih rendah daripada target kinerja balai tahun 2024. Sehingga diharapkan Balai Besar POM di Banjarmasin akan mampu mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2020-2024. Sedangkan capaian kinerja tahun 2021 tersebut sebenarnya tidak dapat dibandingkan dengan target nasional tahun 2021 karena terdapat perbedaan definisi operasional indikator kinerja balai dengan pusat, yaitu pusat menggunakan definisi operasional indikator kinerja berupa persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah.

Perbandingan realisasi kinerja penindakan Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 dengan capaian kinerja penindakan Balai Besar / Balai POM dalam kluster 4 tahun 2021 adalah sebagai berikut :



**Grafik 3.2.7.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.7.1
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa realisasi kinerja penindakan Balai Besar POM di Banjarmasin lebih tinggi daripada Balai Besar POM di Manado namun lebih rendah daripada Balai Besar POM di Bandar Lampung dan Balai Besar POM di Bengkulu. Realisasi kinerja tersebut berbeda antar UPT dikarenakan karakteristik tiap daerah berbeda-beda, baik modus operandi kejahatannya, penyebaran perkara, tingkat kesulitan perkara, hingga sistem koordinasi lintas sector *Criminal Justice System* (CJS) dalam penanganan perkara.

Realisasi capaian kinerja penindakan Balai Besar POM di Banjarmasin lebih tinggi daripada Balai Besar POM di Manado, sedangkan capaian kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung dan Balai Besar POM di Bengkulu tidak dapat disimpulkan karena melebihi rentang $100\% \leq x \leq 125\%$. Sehingga capaian kinerja penindakan Balai Besar POM di Banjarmasin adalah yang tertinggi daripada Balai Besar/ Balai POM lain di klaster 4.

Capaian kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin pada tahun 2021 telah melebihi target tahun 2021. Hal ini dicapai dengan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan cegah tangkal, siber dan operasi intelijen sehingga diperoleh target operasi penindakan yang valid dan dapat terpenuhi unsur-unsur pasal disangkakan ketika dilakukan tahap penyidikan. Selain itu, karena tahapan kegiatan penyidikan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh internal dan sangat berhubungan dengan pihak eksternal khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, maka peningkatan kekuatan koordinasi lintas sektor dalam lingkup CJS sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Balai Besar POM di Banjarmasin dalam meraih realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 ini..

Dalam meraih capaian kinerja ini, diperlukan sumber daya yang menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan. Selain sumber daya manusia, diperlukan sumber daya anggaran sebagai input untuk meraih output yang akan dicapai berupa capaian kinerja. Dalam meraih capaian kinerja tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memanfaatkan anggaran sebagaimana dalam DIPA tahun anggaran 2021 sebesar Rp.926.329.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.921.314.648,- atau 99,45%. Dari data tersebut dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 1,07 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,07 sehingga capaian efisiensi pada triwulan IV tahun 2021 sebesar 100% (**Efisien**).

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
106,14%	99,46%	1,07	0,07	100%	Efisien

Tabel 3.2.7.1.5. Efisiensi Anggaran IK 7.1 Tahun 2021

Berdasarkan uraian di atas, realisasi indikator kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 telah berhasil dengan memperoleh capaian yang baik, yaitu 106,14% dari target yang ditetapkan, dan Balai Besar POM di Banjarmasin optimis akan berhasil mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

Sasaran Kegiatan 8 :

Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal.

Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja, dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

Indikator Kinerja 8.1 :

Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
89	80,76	99,95 %	Baik

Tabel 3.2.8.1.1. Realisasi Kinerja IK 8.1 Tahun 2021

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan dan harus dilakukan dalam rangka memastikan tata kelola pemerintahan dilakukan dengan baik, efektif dan efisien. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama untuk mendukung pembangunan Nasional Indonesia. Kualitas tata kelola pemerintahan akan berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan RB juga dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) bidang pengawasan Obat dan Makanan, BPOM berkomitmen untuk terus melaksanakan RB. Sejak tahun 2010, BPOM menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan RB, dan saat ini merupakan periode pembangunan jangka menengah (5 tahunan) ketiga BPOM melaksanakan RB.

Berbagai pencapaian dalam pelaksanaan RB telah diraih oleh BPOM. Meskipun demikian, perubahan lingkungan strategis, perubahan kebijakan nasional, harapan masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meneguhkan BPOM untuk terus berkomitmen dalam melakukan transformasi

organisasi melalui RB. Reformasi Birokrasi BPOM dilaksanakan sesuai dengan *Grand Design* RB Nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010.

Sesuai dengan *Grand Design*, saat ini masuk dalam periode ketiga, yaitu tahun 2020-2024 dengan harapan RB akan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan RB periode ketiga ini, Kementerian PANRB telah mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, dengan sasaran RB pada periode ketiga ini adalah:

- 1) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
- 2) Birokrasi yang kapabel; dan
- 3) Pelayanan Publik yang Prima.

Untuk mendukung pelaksanaan RB BPOM yang selaras dan sinergi dengan *Grand Design* dan *Road Map* RB, maka perlu disusun dokumen perencanaan pelaksanaan RB BPOM 2020-2024. Selain itu, dokumen perencanaan tersebut juga harus sinergis dan selaras dengan Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020. Dokumen perencanaan RB BPOM juga harus dapat mengakomodasi perkembangan dunia saat ini, mulai dari perubahan komposisi pegawai BPOM dengan generasi milenial menjadi generasi terbanyak saat ini, perubahan akibat revolusi industri 4.0, dan juga perubahan *landscape* dunia akibat masifnya perkembangan teknologi informasi yang berpengaruh terhadap perubahan sosial budaya dan *life style* manusia.

Dengan dasar tersebut, maka disusun dokumen *Road Map* RB BPOM 2020-2024 yang lebih implementatif, dan tergambar jelas perubahan yang akan dilakukan di BPOM. *Road Map* RB BPOM disusun dengan analisis dan sudut pandang yang lebih holistik, melibatkan berbagai pihak dan unsur dalam internal BPOM dengan harapan *Road Map* disusun lebih komprehensif, dan antisipatif sehingga diperoleh potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan dalam pelaksanaan RB yang lebih utuh di BPOM. Melalui dokumen *Road Map* RB BPOM 2020-2024, diharapkan dapat menjadi

panduan dalam pelaksanaan RB di BPOM periode 2020-2024 sehingga target perubahan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan di BPOM.

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Unit Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024 Unit Kerja

- sesuai Keputusan BPOM Nomor HK.02.02.1.2.07.20.296 Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Target Indeks RB Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM sesuai Surat Inspektur Utama No B-PI.06.01.7.72.01.20.133 Tanggal 31 Januari 2020 tentang Penyampaian target, Definisi Operasional, dan Cara Perhitungan Indeks RB dan Nilai AKIP Badan POM serta Unit Kerja Tahun 2020 s.d 2024,

No	IKU	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks RB Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM (nilai rata-rata nasional tahun 2019 adalah 75,81)					
a.	≤75,81	85	89	93	94	95
b.	>75,81 – 81,81	88	90	93	94	95
c.	>81,81 – 86,81	90	91	93	94	95
d.	>86,81	91	92	93	94	95

Tabel 3.2.8.1.1. Target Indeks RB Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM Tahun 2020-2024

Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai salah satu UPT Badan POM, yang perolehan nilai Indeks RB tahun 2019 adalah **65,33** di bawah rata-rata nasional 75,81, maka target Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020 adalah 85 dan pada akhir RPJM tahun 2024 targetnya adalah 95.

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana

Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Semula	85	89	93	94	95
Menjadi	74,08 (Realisasi)	80.8	83.3	85.8	88.3

**Tabel 3.2.8.1.2. Perubahan Target IK 8.1.
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024**

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.02.21.101 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM sebagai acuan setiap Unit Kerja di Lingkungan Badan POM serta Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.02.21.01 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2021, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) beserta data dukungannya dalam rangka menuju WBK dan WBBM pada Balai Besar POM di Banjarmasin.

Tujuan evaluasi PMPZI tersebut adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja **yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)**,

serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total yang terdiri dari komponen pengungkit dan komponen hasil pada Balai Besar POM di Banjarmasin sebesar **89,4** dengan rincian sebagai berikut :

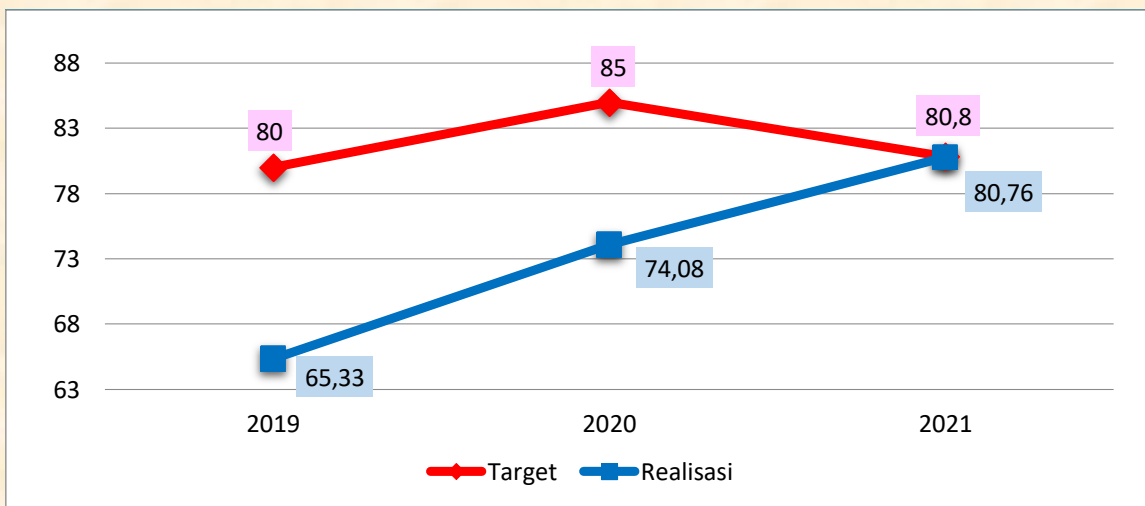
PENILAIAN (BOBOT)		Nilai	%	Keterangan	
A.	PROSES (60)				
	I. MANAJEMEN PERUBAHAN (8)	7,16	89,47%	MS	
	II. PENATAAN TATALAKSANA (7)	6,00	85,71%	MS	
	III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10)	8,03	80,28%	MS	
	IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)	9,69	100%	MS	
	V. PENGUATAN PENGAWASAN (15)	13,03	86,83%	MS	
	VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)	8,12	81,19%	MS	
TOTAL PENGUNGKIT		52,02		MS	
B.	HASIL (40)				
	I.	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)	19,03	95,13%	MS
		1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)	14,03	93,50%	MS
		2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)	5,00	100,00%	MS
	II.	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)	18,35	91,75%	MS
1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)		18,35	91,75%	MS	
TOTAL HASIL		37,38			
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI		89,4			

Tabel 3.2.8.1.3. Hasil evaluasi PMPZI Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2021

Sesuai dengan Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.72.09.21.22 tentang Konversi Nilai Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas oleh Tim Penilai Internal di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021, dengan adanya **perbedaan** hasil penilaian TPI Badan POM dengan hasil penilaian KemenPANRB untuk penetapan WBK serta WBBM yang cukup tinggi maka **nilai komponen pengungkit PMPZI** dikonversikan dengan hasil penilaian BB/BPOM oleh KemenPANRB dibagi nilai rata-rata TPI pada tahun 2020.

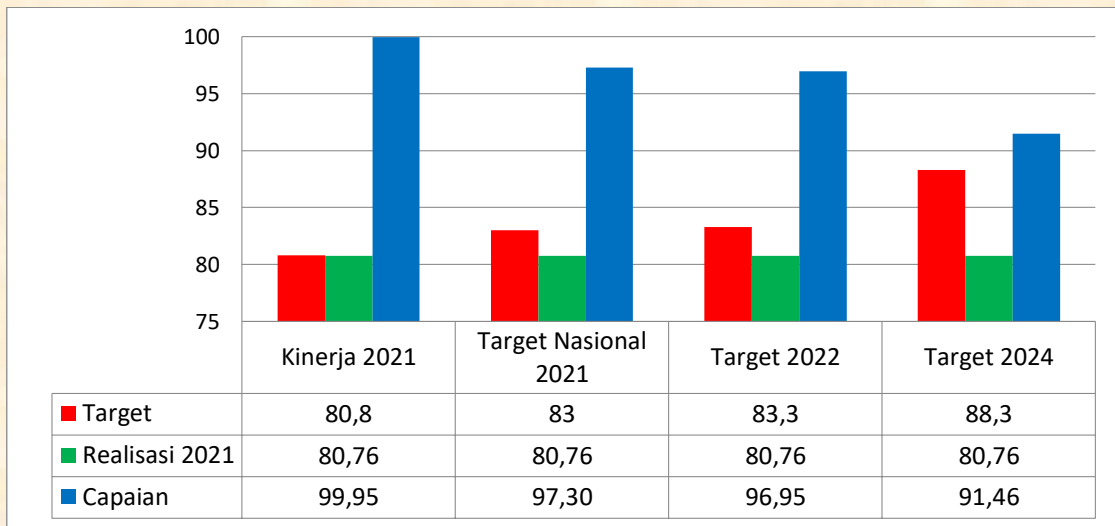
Dari perhitungan konversi tersebut diperoleh nilai koefisien konversi sebesar 0,834 sehingga menghasilkan Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Banjarmasin sebesar **80,76**.

Realisasi Indikator Kinerja ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan realisasi di tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dan 2020, seperti yang tergambar dalam grafik berikut :



Grafik 3.2.8.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 8.1 Tahun 2019-2021

Berikut adalah gambaran perbandingan realisasi kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Banjarmasin terhadap target Nasional tahun 2021, target Balai tahun 2022 dan 2024, :



Grafik 3.2.8.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.8.1 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024

Faktor-faktor yang mendukung capaian nilai IK ini adalah :

1. Pembangunan ZI dilakukan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan unit kerja. Terhadap pelaksanaan rencana kerja telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap Triwulan termasuk terhadap capaian target prioritas;
2. Komitmen terhadap perubahan telah dibangun dengan baik oleh seluruh anggota organisasi. Hal ini menunjukkan kontribusi dari *Agent of Change* (AoC) bersama dengan Kepala Balai yang berperan sebagai *role model* perubahan dan pelaksanaan nilai organisasi;
3. Kebijakan keterbukaan informasi publik telah diterapkan, hasil monitoring dan evaluasi telah dilakukan tindak lanjut;
4. Pimpinan telah terlibat dalam perencanaan kinerja dan melaksanakan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala;
5. Telah mengembangkan berbagai inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik maupun inovasi yang mendorong efisiensi pengelolaan kinerja dan penguatan integritas, antara lain :
 - a. KERLING (Kelotok Laboratorium Keliling),
 - b. BAP TWO (Percepatan Penyelesaian Berkas Perkara menjadi 2 Bulan),
 - c. FAST SERVICE 24 (Pelayanan Cepat Selesai Hasil Uji 24 Jam),

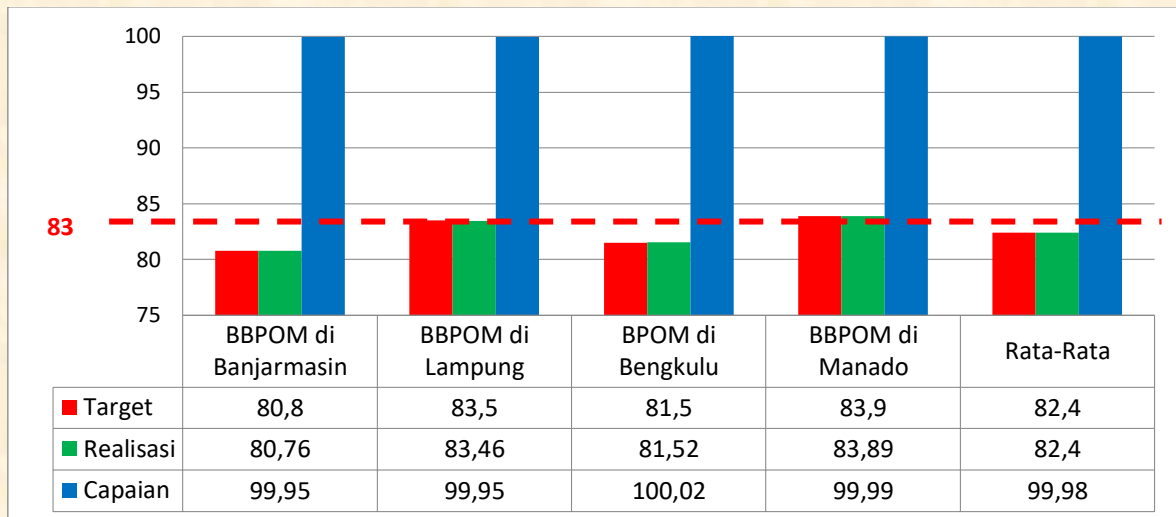
- d. GANII UMKM (Pendampingan jemput bola secara bagi UMKM),
 - e. JANGAN LALAI (Jaga Ruang agar Masyarakat tidak Laporkan Kabal),
 - f. Ini SOP (Digitalisasi Dokumen SOP),
 - g. AMDK (Aplikasi Manajemen Data Kepegawaian),
 - h. SOLID (Sosialisasi Digital),
 - i. SIAP GRAK (Aksi Nyata Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan),
 - j. Mal Pelayanan Publik Barokah,
 - k. Si ANANG GALUH BANJAR (Sistem Informasi Analisa Anggaran dan Gampang Laporkan Akuntabilitas Hasil Kerja BBPOM di Banjarmasin),
 - l. Rubrik Anda Bertanya BPOM Menjawab,
 - m. LOBSTER (Lomba Poster dan Video),
 - n. ECO (English Comic),
 - o. Sambut Ulun,
 - p. SUARA EMAS (Sounding Suara Embak dan Mas),
 - q. SOBAT (Sosialisasi Kegiatan Balai melalui TV),
 - r. SEGAR (Senam Gaya PIKKIR),
 - s. KALEM (Kata Role Model),
 - t. TIKAR (Sticker WA PIKKIR),
 - u. KRIPIK BANJAR (Kreativitas Ber-PIKKIR BBPOM Banjarmasin),
 - v. MIE TALAS (Silaturahmi Elektronik setiap Tanggal Tujuh Belas),
 - w. NAGA RAPID (Nanang Galuh Rajin Rapi Disiplin),
 - x. Si AMAT (Inovasi Akibat Mucil dan Terlambat);
6. Disamping mengembangkan berbagai inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, BBPOM di Banjarmasin telah menetapkan Standar Pelayanan Unit Kerja dan melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.
 7. Hasil survei Persepsi Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3,67 (syarat 3,2) dan survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,74 (syarat 3,6) di atas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mencapai target pada Indikator Kinerja ini adalah yang terkait Layanan Dukungan Manajemen Satker, khususnya penyusunan dokumen, evaluasi dan laporan, dan konsultasi/koordinasi serta peningkatan kompetensi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 251.607.000,- dengan realisasi anggaran yang baik yaitu sebesar Rp. 251.456.036,- atau 99,94%, apabila dibandingkan dengan capaian realisasi indikator kinerjanya sebesar 99,95% maka Capaian Tingkat Efisiensinya adalah 100% atau **Efisien**.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
99,95	99,94%	1,00	0,00	100%	Efisien

Tabel 3.2.8.1.4. Tingkat Efisiensi Anggaran IK 8.1 Tahun 2021

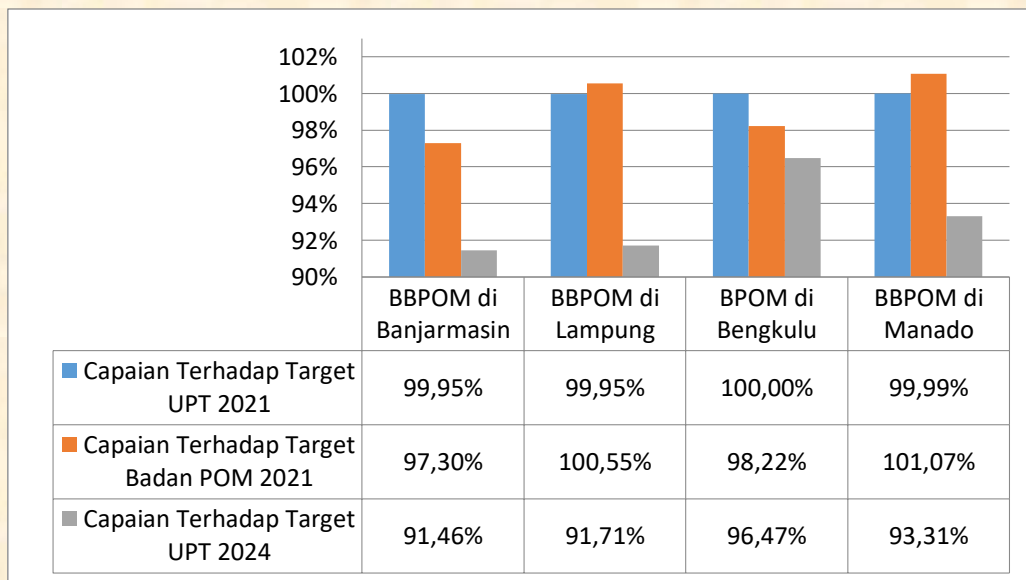
Perbandingan nilai indeks RB BBPOM di Banjarmasin terhadap Balai Besar/Balai POM dalam Klaster 4 dapat dilihat pada grafik berikut :



--- Target Nasional Tahun 2021 = 83

Grafik 3.2.8.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.8.1 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024

Perolehan nilai tersebut menempatkan Balai Besar POM di Banjarmasin berada di urutan ke empat, dimana nilai tertinggi diperoleh BBPOM di Manado, diikuti oleh BBPOM di Bandar Lampung dan BBPOM di Bengkulu. Namun apabila yang dibandingkan capaiannya maka BBPOM di Banjarmasin dan BBPOM di Bandar Lampung berada di posisi yang sama, di bawah BPOM di Bengkulu dan BBPOM di Manado, serta di bawah rata-rata capaian Klaster 4.



Grafik 3.2.8.1.5. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks BB/BPOM dalam Klaster 4 Tahun 2021 dengan Target UPT dan Target Nasional 2021 dan Target UPT 2024

Meskipun realisasi Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin lebih rendah dibandingkan dengan ke 3 BB/BPOM lain dalam klaster 4, namun Balai Besar POM di Banjarmasin termasuk ke dalam kelompok UPT yang diusulkan untuk Penilaian Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM oleh KemenPAN RB, dan berhasil meraih predikat WBK.

Beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI oleh Balai Besar POM di Banjarmasin, sebagai berikut :

1. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan ZI namun demikian belum seluruh kegiatan pembangunan ZI terlaksana sesuai rencana kerja dan belum terdapat justifikasi atas kegiatan yang belum terlaksana;

2. Belum terdapat analisa dampak atas inovasi yang telah dibangun BBPOM di Banjarmasin terhadap masyarakat/stakeholder;
3. Belum terdapat perhitungan dan analisis penentuan gap kompetensi manajerial pegawai;
4. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi, namun data hasil monitoring belum disahkan oleh pimpinan Unit Kerja;
5. Telah dilakukan cascading hingga level individu, namun belum sampai pada level indikator dan belum sesuai dengan PerMenPAN No 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS;
6. Telah menyusun laporan kinerja namun masih sebagian besar pelaporan kinerja memberikan informasi tentang kinerja
7. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima, namun belum diikuti oleh seluruh petugas;
8. Belum terdapat replikasi inovasi pelayanan publik secara formal.

Yang harus dilakukan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI adalah sebagai berikut :

1. Menyusun justifikasi atas realisasi maupun capaian pelaksanaan kegiatan ZI yang tidak sesuai dengan rencana kerja;
2. Melakukan analisa dampak atas inovasi yang telah dibangun BBPOM di Banjarmasin terhadap masyarakat/stakeholder;
3. Melakukan perhitungan dan analisis penentuan gap kompetensi manajerial pegawai sebagai dasar perencanaan pengembangan kompetensi untuk setiap pegawai;
4. Melakukan pengesahan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi secara berkala;
5. Menyusun cascading hingga indikator level individu sesuai dengan PerMenPAN No 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS;
6. Menyusun laporan kinerja yang memberikan seluruh informasi atas kinerja

7. Melaksanakan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima serta diikuti oleh seluruh petugas layanan;
8. Terus melakukan pengembangan inovasi baik yang sudah ada maupun inovasi baru, sesuai dengan karakteristik unit kerja dan kebutuhan stakeholder disertai analisis dampak kemanfaatan inovasi terhadap perbaikan unit kerja sehingga diharapkan dapat direplikasi oleh unit kerja lain maupun instansi diluar BPOM.

Berdasarkan realisasi, capaian kinerja dan tingkat efisiensi yang diperoleh pada tahun 2021, meskipun belum mencapai target 100% namun dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Banjarmasin telah dicapai baik. Keberhasilan ini juga dapat dilihat dari diraihnya predikat WBK oleh BBPOM di Banjarmasin pada tahun 2021. Sedangkan target tahun 2024 sebagai akhir renstra 2020-2024 secara optimis akan tercapai juga.

Indikator Kinerja 8.2 :

Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
78,1	76,14	97,49 %	Baik

Tabel 3.2.8.2.1. Realisasi Kinerja IK 8.2. Tahun 2021

Tujuan pelaksanaan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2021, khususnya pada Balai Besar POM di Banjarmasin oleh Inspektorat Utama Badan POM adalah :

1. Menilai penerapan SAKIP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta pencegahan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN);
2. Menilai pelaksanaan program dan kegiatan pada BBPOM di Banjarmasin
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya;

5. Memberikan informasi kinerja pada BBPOM di Banjarmasin, dan
6. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas pada BBPOM di Banjarmasin

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Semula	80	84	89	91	92
Menjadi	74,16 (Realisasi)	78.1	80.1	82.1	84.1

**Tabel 3.2.8.2.2. Perubahan Target IK 8.2.
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024**

Terhadap Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2020 telah dilakukan tindak lanjut perbaikan sebagai berikut:

1) Perencanaan

- Mempublikasikan Renstra 2020-2024 pada website BPOM dan subsite Balai Besar POM di Banjarmasin.
- Melengkapi kertas kerja penetapan target dengan justifikasi penetapan target kinerja dengan penjelasan mengenai tren kenaikan/penurunan.
- Mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rencana aksi untuk memastikan bahwa Program/Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan

2) Pengukuran

- Melakukan pemetaan dan mendokumentasikan *cascading* target kinerja eselon III dan IV sampai ke tingkat individu secara memadai.

3) Pelaporan

- Menyampaikan laporan kinerja tepat waktu dan memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/ peningkatan kinerja
- Melakukan monitoring sub kegiatan dan target per triwulan serta analisisnya yaitu hambatan dan rencana tindak lanjut)
- Mengkaji ulang ketentuan terkait pemberian *reward* dan *punishment* terhadap pegawai untuk diterapkan ke semua pegawai dan tingkat unit kerja
- Membuat kesimpulan atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran pada periode akhir Renstra

4) Evaluasi Internal

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja atas target kinerja secara periodik yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi sebelum dan setelah rencana aksi.

5) Capaian Kinerja

- Meningkatkan capaian kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal dan meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur.

Tindak Lanjut Perbaikan yang telah dilaksanakan :

- ✓ Renstra 2020-2024 telah dipublikasikan pada website BPOM dan subsite Balai Besar POM di Banjarmasin.
- ✓ Membuat kertas kerja pada saat pengusulan/ penetapan target dilengkapi justifikasi penetapan target kinerja dengan penjelasan mengenai tren kenaikan/penurunan.
- ✓ Sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan telah dicantumkan dalam rencana aksi
- ✓ Pemetaan dan dokumentasikan *cascading* target kinerja sampai ke tingkat individu telah dilaksanakan namun terkendala belum ditentukannya Indikator Kinerja Individu, sehingga masih menggunakan butir kegiatan SKP sebagai indikator kinerja.
- ✓ Penyampaian laporan kinerja dengan baik dan tepat waktu
- ✓ Melakukan monitoring sub kegiatan dan target per triwulan melalui rapat monev bulanan dan laporan triwulanan, namun belum dilengkapi hambatan dan rencana tindak lanjut
- ✓ Memperbaiki mekanisme pemberian *reward* dan *punishment* terhadap pegawai untuk diterapkan ke semua pegawai dan tingkat unit kerja, namun terkendala pengumpulan data kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja pimpinan
- ✓ Dilaksanakan rapat setiap bulan, namun masih sebatas menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan, sedangkan monitoring dan evaluasi masih belum maksimal.

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2021 pada Balai Besar POM di Banjarmasin telah dilaksanakan oleh Inspektorat I Badan POM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pedoman Penyelenggaraan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020, dan Surat Tugas Inspektur Utama Nomor : PI.04.7.72.07.21.189 tanggal 10 Oktober 2021.

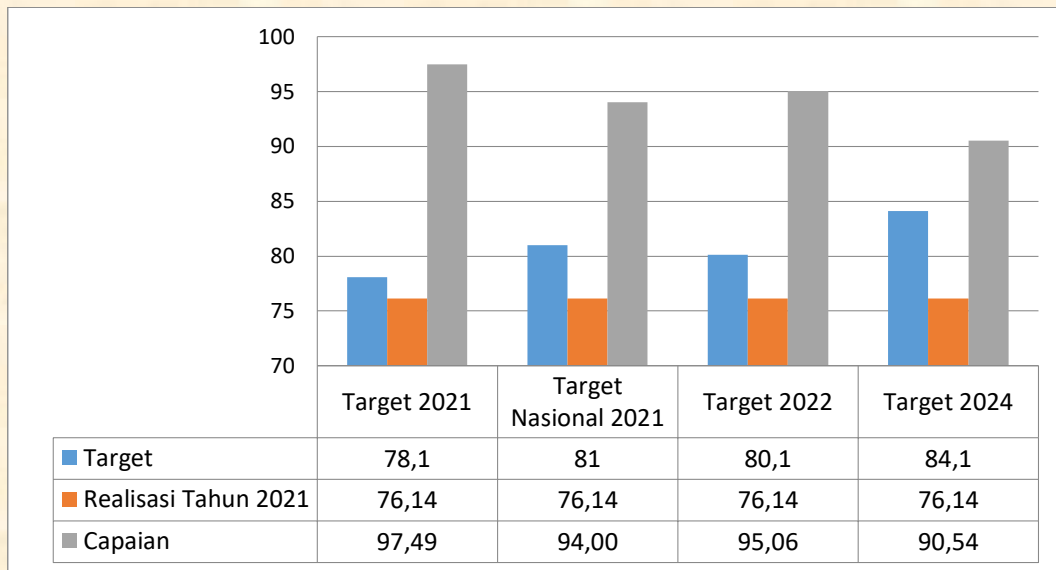
Dengan fokus evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai Besar POM di Banjarmasin meliputi evaluasi atas proses/penerapan SAKIP, evaluasi atas keluaran (*output*) dan evaluasi atas hasil (*outcome*), diperoleh penilaian dengan rincian hasil evaluasi tiap komponen SAKIP disajikan pada tabel berikut:

	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
a	Perencanaan Kinerja	30	25,93
b	Pengukuran Kinerja	25	18,44
c	Pelaporan Kinerja	15	12,09
d	Evaluasi Internal	10	7,20
e	Capaian Kinerja	20	12,49
	Nilai Hasil Evaluasi	100	76,14
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Tabel 3.2.8.2.4. Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

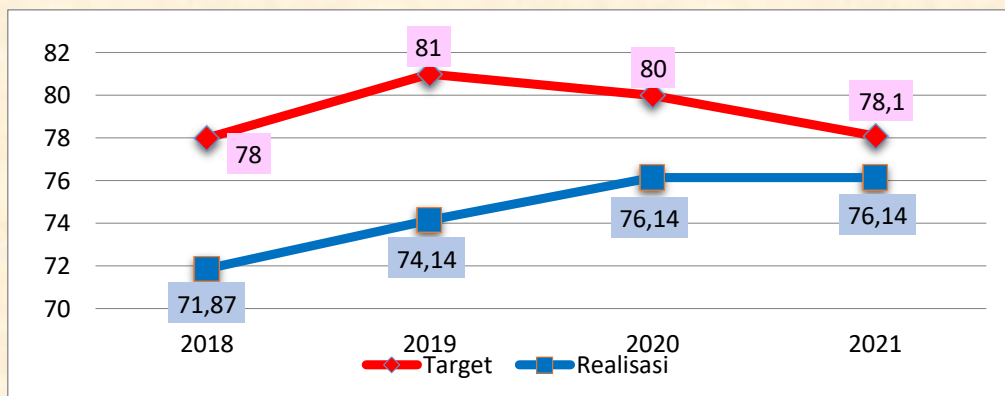
Dari hasil penilaian tersebut diatas dapat terlihat bahwa implementasi SAKIP Tahun Anggaran 2021 pada Balai Besar POM di Banjarmasin dapat dikategorikan **BB** atau **Sangat Baik**, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, namun perlu sedikit perbaikan.

Untuk Indikator Kinerja ini, Balai Besar POM di Banjarmasin belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, baik target tahun 2021 yaitu 78,1 maupun terhadap target akhir RPJM tahun 2024 yaitu 84,1. Capaian terhadap target 2020 adalah 90,54%, sedangkan capaian terhadap target tahun 2024 adalah 82,76%.



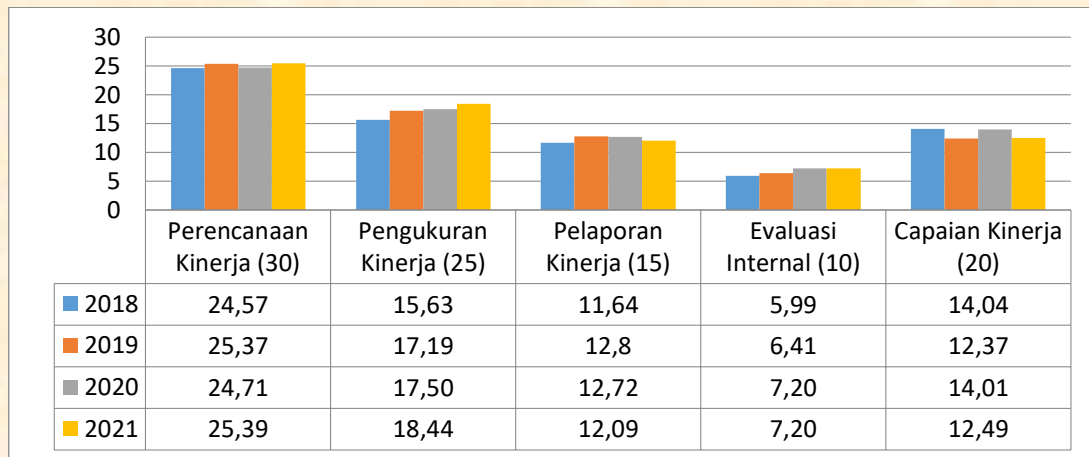
Grafik 3.2.8.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.8.2 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024

Apabila dibandingkan dengan perolehan nilai AKIP 2018 dan 2019 telah mengalami peningkatan namun apabila dibandingkan dengan tahun 2020 nilai yang diperoleh tetap, sebagaimana tergambar pada grafik berikut :



Grafik 3.2.8.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.8.2 Tahun 2018-2021

Dari 5 komponen penilaiannya, 2 komponen mengalami peningkatan, 1 komponen tetap dan 2 komponen mengalami penurunan dari tahun 2020, sebagaimana tergambar pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.2.8.2.3. Perbandingan Nilai Komponen Penilaian AKIP Tahun 2018-2021

Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin yang meningkat adalah pada komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja, yang tetap adalah komponen Evaluasi Internal, sedangkan yang menurun adalah komponen Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja, dengan uraian singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

1) Perencanaan

- a. Dokumen Rencana Strategis 2020-2024 sudah disahkan oleh Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin pada tanggal 18 Mei 2020 dan telah memuat tujuan, sasaran, IKU yang telah disertai target keberhasilan yang relevan. Renstra juga telah dipublikasikan pada website Badan POM.
- b. BBPOM di Banjarmasin telah menetapkan target kinerja yang telah dilengkapi dengan kertas kerja yang mencantumkan tren kenaikan dan penurunan target kinerja, namun belum terdokumentasi dengan baik dalam penyusunan baseline penetapan target kinerja yang berupa notulen/justifikasi peningkatan target setiap tahun;
- c. Terdapat perbedaan target kinerja pada beberapa indikator dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, serta Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2021.
- d. RAPK telah menyajikan target per triwulan beserta anggaran dan dibreakdown sampai subkegiatan;

2) Pengukuran

- a. BBPOM di Banjarmasin telah memiliki Tim Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan dengan melibatkan seluruh substansi yang diformalkan dalam bentuk Surat Keputusan, serta telah ditetapkan jadwal rapat monitoring dan evaluasi kinerja secara bulanan.
- b. Telah memiliki SOP Mikro nomor POM-12.01/CFM.02/SOP.01.109/IK.02 tentang Pengumpulan Pengukuran Data Kinerja dan Penyusunan Laporan yang memuat tahapan verifikasi data kinerja oleh Subkoordinator Program dan Evaluasi. Namun SOP belum secara eksplisit menyebutkan langkah yang perlu dilakukan apabila terjadi kesalahan data.
- c. Pengukuran kinerja belum didukung cascading kinerja yang memadai sampai ke level individu
- d. Telah disusun SK pemberian reward dan punishment tahun 2021 yang diberikan pada level substansi/bagian, berdasarkan capaian perjanjian kinerja dengan sumber data e-performance Badan POM atau nilai rata-rata dari capaian indikator kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Namun demikian, belum terdapat bukti implementasi. Belum terdapat mekanisme reward and punishment yang diberikan pada level unit kerja dan individu.

3) Pelaporan

- a. Laporan Kinerja BBPOM di Banjarmasin telah menyajikan informasi capaian kinerja dan evaluasi/analisis capaian kinerja di setiap capaian per indikator, serta pembahasan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, dan juga telah dimonitoring dalam bentuk laporan interim per triwulan. Namun untuk beberapa indikator baru dengan sumber data yang sama belum dibandingkan dengan indikator tahun sebelumnya, seperti "Persentase Obat yang memenuhi syarat" dan "Persentase Makanan yang memenuhi syarat".
- b. Belum memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan

memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja.

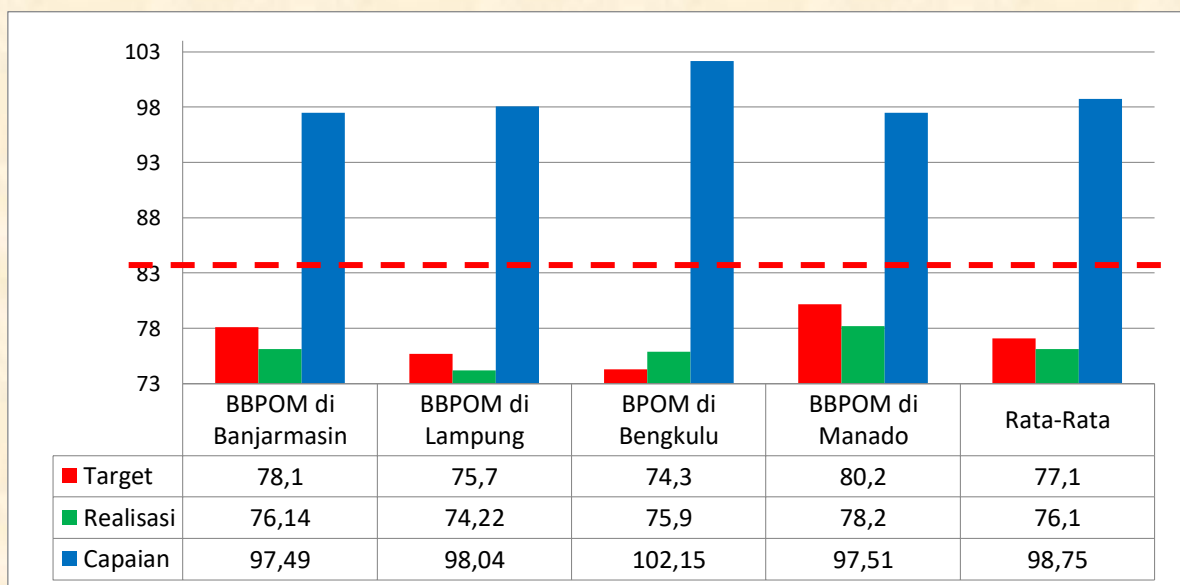
4) Evaluasi Internal

Balai Besar POM di Banjarmasin telah melakukan evaluasi kinerja secara periodik melalui Laporan Interim setiap triwulan tetapi belum dilakukan monitoring terhadap progres rencana aksi yang sudah ditetapkan di triwulan sebelumnya serta tidak terdapat kesimpulan analisis keberhasilan/kegagalan terhadap rencana aksi yang nyata yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja.

5) Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin secara umum sudah sesuai dengantarget, namun masih terdapat indikator yang capaiannya masuk dalam kategori cukup yaitu Indeks RB dan Nilai AKIP.

Perbandingan Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 dengan nilai AKIP Balai Besar / Balai POM dalam kluster 4 tahun 2021 adalah sebagai berikut :

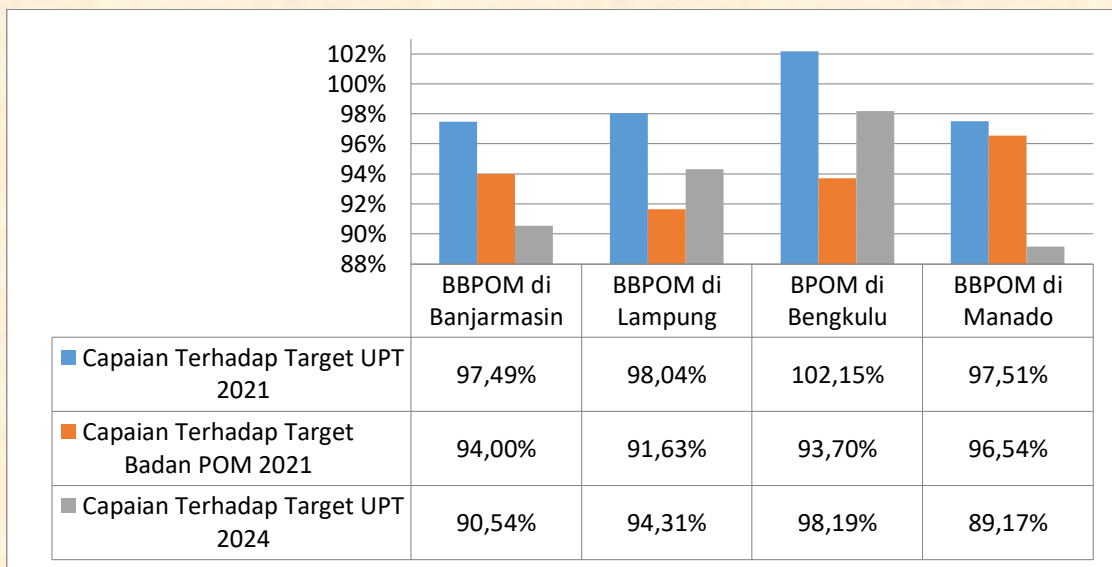


--- Target Nasional 2021 = 83

**Grafik 3.2.8.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.8.2
Balai Besar/ Balai POM dalam Kluster 4 Tahun 2021**

Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa nilai AKIP Balai Besar/ Balai POM klaster 4 belum mencapai target masing-masing maupun target Badan POM tahun 2021, dimana nilai AKIP Balai Besar BPOM di Banjarmasin menempati posisi ke dua setelah BBPOM di Manado, diikuti oleh BPOM di Bengkulu, sedangkan yang terendah diperoleh Balai Besar POM di Bandar Lampung.

Capaian terhadap masing-masing target tahun 2021 dipengaruhi oleh penetapan target masing-masing Balai Besar/ Balai POM yang berbeda baik target tahun 2021 maupun target 2024, sedangkan target Badan POM adalah 81, maka diperoleh data sebagai berikut :



Grafik 3.2.8.2.5. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai AKIP BB/BPOM dalam Klaster 4 Tahun 2021 dengan Target UPT dan Target Nasional 2021 dan Target UPT 2024

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target kinerja tahun 2021 adalah pemantauan, evaluasi dan koordinasi antara lain berupa :

- Peningkatan kompetensi dan diseminasi terkait SAKIP, antara lain Workshop/Bimtek SAKIP dan Monev Online tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM;
- Rapat Monitoring Evaluasi Bulanan, yang dilaksanakan di awal bulan berikutnya;

- Konsultasi/ Koordinasi baik dengan unit pusat di Badan POM yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan, Inspektorat, ULP, maupun instansi terkait lainnya seperti Kanwil DJPB Prov Kalsel.
- Supervisi Pelaksanaan Kegiatan, Monev Anggaran dan Kinerja ke Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
- Pengelolaan dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara, baik Balai Besar POM di Banjarmasin maupun Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu,

Pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai target pada Indikator Kinerja ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 128.733.000,- dengan realisasi anggaran yang sangat baik yaitu sebesar Rp. 125.488.928,- atau 97,48%, dan apabila dibandingkan dengan capaian realisasi indikator kinerjanya sebesar 97,49% maka diperoleh Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,00 dan Tingkat Efisiensi sebesar 0,00 , dan Capaian Tingkat Efisiensinya adalah 100% atau **Efisien**.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
97,49	97,48	1,00	0,00	100%	Efisien

Tabel 3.2.8.2.5. Efisiensi Anggaran IK.8.2 Tahun 2021

Meskipun Indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin telah dicapai dengan kriteria baik (97,49%) dan penggunaan anggaran yang Efisien, namun dapat disimpulkan bahwa Indikator Nilai AKIP Birokrasi Balai Besar POM di Banjarmasin belum berhasil, dapat dilihat dari realisasi Nilai AKIP yang sama dengan tahun 2020, dengan beberapa nilai komponen mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Masih dibutuhkan kerja keras untuk melakukan perbaikan agar dapat mencapai target tahun berikutnya yang semakin meningkat, dengan target tertinggi di akhir tahun Renstra, yaitu tahun 2024.

Beberapa hal yang harus dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin dalam rangka meningkatkan Nilai AKIP adalah sebagai berikut :

1) Perencanaan

- a. Menetapkan target kinerja jangka menengah, jangka pendek, dan triwulanan dengan memenuhi kriteria penetapan target yang baik berdasarkan basis data yang memadai, dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan organisasi.
- b. Melakukan reviu Dokumen Renstra secara berkala menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Badan POM serta menyelaraskan dokumen perencanaan kinerja meliputi Rencana Strategis, RKT, PK, dan RAPK. Pada saat pelaksanaan assesment, Renstra 2020-2024 yang sudah disahkan belum dipublikasikan pada website BPOM maupun Subsite Balai Besar POM di Banjarmasin.

2) Pengukuran

- a. Menyusun dokumen cascading target kinerja yang memadai sampai ke level individu.
- b. Melengkapi mekanisme pengumpulan data kinerja dengan menambahkan klausul apabila terjadi kesalahan dalam pengumpulan data yang terkait dengan pelaporan kinerja.
- c. Melakukan monitoring dan memanfaatkan/mengimplementasikan hasil pengukuran kinerja sebagai wujud nyata pemberian reward dan punishment yang dilakukan secara berkala (triwulan/semester).

3) Pelaporan

- a. Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja mengenai perbandingan data kinerja serta menyajikan kesimpulan atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran pada periode akhir Renstra. *Reward* dan *punishment* belum mencakup untuk semua pegawai,
- b. Melakukan monitoring capaian kinerja secara konsisten hingga level subkegiatan dan target per triwulan serta analisis faktor keberhasilan maupun hambatan dan rencana tindak lanjut;

4) Evaluasi Internal

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin belum dilakukan monitoring sampai dengan sub kegiatan serta analisisnya

5) Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin masih terdapat beberapa indikator yang capaiannya masih dibawah target yang telah ditetapkan dan informasi mengenai kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

Tindak lanjut dan rencana perbaikan terhadap rekomendasi tersebut di atas adalah :

- ✓ Telah menyusun Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin 2020-2024
- ✓ Melaksanakan rapat penetapan target kinerja bersama pimpinan organisasi.
- ✓ Melaksanakan pemetaan dan dokumentasikan *cascading* target kinerja sampai ke tingkat individu namun terkendala belum ditentukannya Indikator Kinerja Individu dan perubahan struktur organisasi.
- ✓ Memperbaiki SOP mekanisme pengumpulan data kinerja.
- ✓ Mengimplementasikan pemberian *reward dan punishment* berdasarkan hasil pengukuran kinerja
- ✓ Melengkapi laporan kinerja dengan informasi sesuai dengan pedoman pelaporan dan ketentuan yang berlaku.
- ✓ Meningkatkan kompetensi petugas monitoring evaluasi dan pelaporan.
- ✓ Melanjutkan pelaksanaan rapat monev setiap bulan, dan akan dilengkapi dengan pelaporan sesuai ketentuan.
- ✓ Meningkatkan koordinasi antar substansi agar pelaksanaan monev dapat dilaksanakan dengan baik.
- ✓ Meningkatkan koordinasi antar substansi agar hasil pelaksanaan monev dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan capaian kinerja.
- ✓ Mengembangkan aplikasi untuk mempermudah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, kendala : keterbatasan sumberdaya dan duplikasi dengan aplikasi pusat.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun realisasi Indikator Kinerja Nilai AKIP Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 belum berhasil mencapai target, hanya memperoleh capaian 97,49%, namun pelaksanaan kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini dapat dikategorikan berhasil, dan Balai Besar POM di Banjarmasin optimis akan mampu mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

Sasaran Kegiatan 9 :

Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal.

Sasaran Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja, dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

Indikator Kinerja 9.1 :

Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin.

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
81	83,09	102,58 %	Baik

Tabel 3.2.9.1.1. Realisasi Kinerja IK.9.1 Tahun 2021

Sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 pasal 16 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara berkala setiap tahun. Adapun dalam pengukuran Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin ini berdasarkan 4 (empat) Dimensi yaitu : .

- 1) Dimensi Kualifikasi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi Pendidikan formasi PNS dari jenjang paling tinggi hingga paling rendah, dengan bobot nilai sebesar 25%. Semakin tinggi Pendidikan, maka semakin besar nilainya.
- 2) Dimensi Kompetensi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai Riwayat pengembangan kompetensi yang diikuti oleh PNS dan memiliki

kesesuaian dengan pelaksanaan tugas. Pengembangan kompetensi yang dimaksud meliputi diklat kepemimpinan untuk pejabat struktural, diklat fungsional untuk pejabat fungsional, diklat teknis 20JP untuk seluruh pegawai, seminar/workshop/sejenis 20 JP untuk seluruh pegawai. Penilaian kompetensi ini mempunyai bobot nilai sebesar 40 %.

- 3) Dimensi Kinerja, digunakan untuk mengukur data/informasi penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku. Penilaian kinerja ini mempunyai bobot nilai sebesar 30%.
- 4) Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman disiplin yang pernah diterima oleh pegawai, dengan bobot nilai sebesar 5%.

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

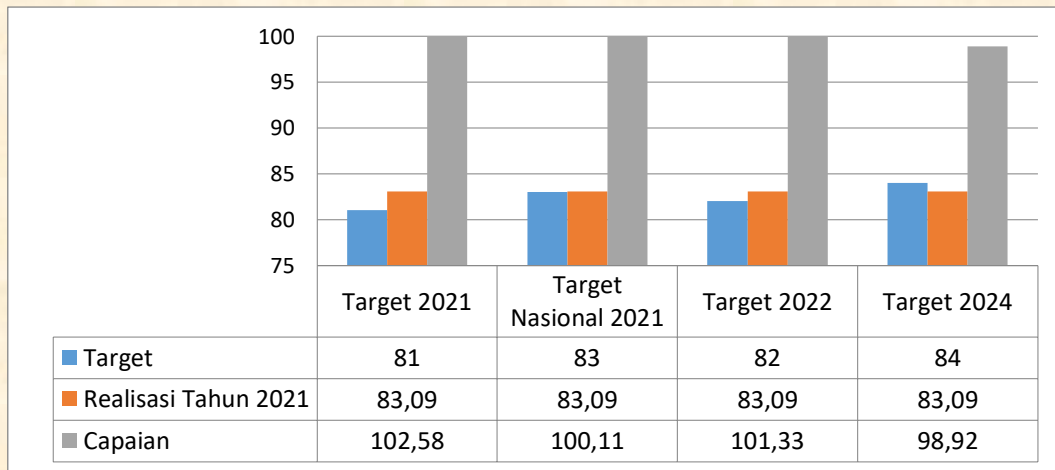
Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Semula	75	77	80	82	85
Menjadi	80,16 (Realisasi)	81	82	83	84

Tabel 3.2.9.1.2. Perubahan Target IK 9.1.

Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024

Untuk Indikator Kinerja ini, Balai Besar POM di Banjarmasin telah dapat mencapai target yang telah ditetapkan, baik target tahun 2021 yaitu 81, target tahun 2022 yaitu 82, dan target 2023 yang sama dengan target Nasional 2021 yaitu 83.



Grafik 3.2.9.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.9.1 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024

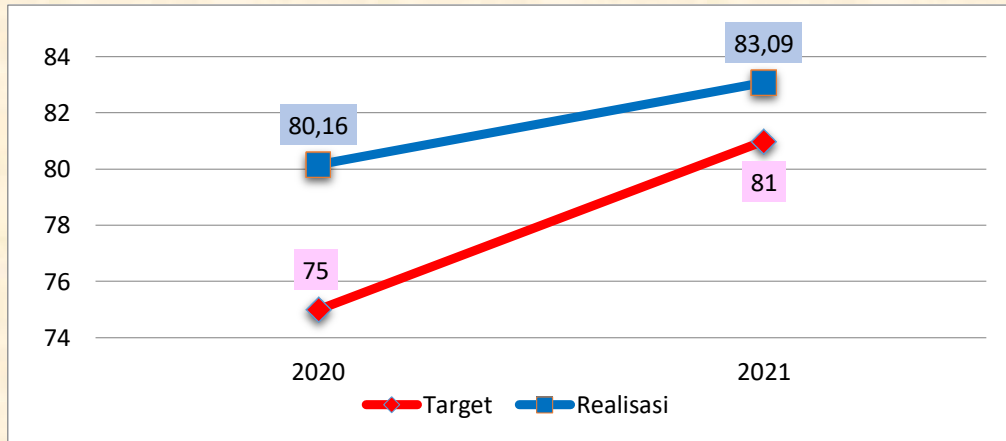
Penetapan target balai lebih tinggi jika dibandingkan dengan target nasional, karena mengacu pada realisasi di tahun sebelumnya di mana realisasi tahun 2020 adalah 81.06%. Realisasi tahun 2021 jika dibandingkan dengan target nasional, maka capaiannya sebesar 107,9 %

Pada tahun 2021 ini persentase indeks profesionalitas ASN merupakan indikator kinerja tahun kedua sehingga hanya bisa disandingkan dengan data 1 tahun terakhir. Realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 salah satunya karena pemenuhan pengembangan kompetensi dan tidak ada pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu pada tahun 2024, target 84% masih belum tercapai sehingga diharapkan pada tahun 2024 dapat tercapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024

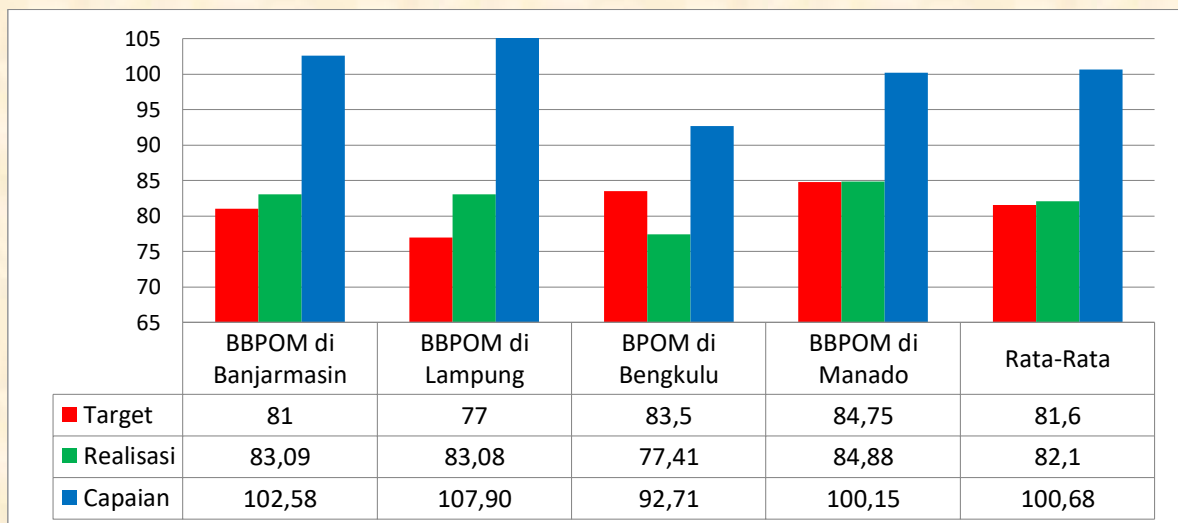
salah satunya dengan adanya peningkatan kualifikasi Pendidikan di mana saat ini ada 8 (delapan) pegawai sedang melaksanakan tugas belajar.

Apabila dibandingkan dengan perolehan 2020 telah mengalami peningkatan, sebagaimana tergambar pada grafik berikut :



Grafik 3.2.9.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.9.1 Tahun 2020-2021

Jika realisasi kinerja dibandingkan dengan kinerja unit kerja lain yang seklaster dapat dilihat dari grafik berikut :



Grafik 3.2.9.1. 3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.9.1 Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021

Setiap Balai Besar/Balai mempunyai pegawai yang berbeda-beda baik dari sisi latar belakang Pendidikan, kesempatan dalam pengembangan kompetensi, kinerja maupun penegakan disiplin. Jika dilihat pada grafik diatas BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Manado , BPOM di Bengkulu dan BBPOM di Banjarmasin mempunyai target yang berbeda akan tetapi % capaiannya mendapatkan kriteria yang sama yaitu baik.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja ini adalah Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja, khususnya Pengelolaan Kepegawaian. Kegiatan yang diselenggarakan antara lain Peningkatan Kompetensi Pegawai berupa seminar, diklat fungsional bagi fungsional yang baru diangkat, penegakan disiplin pegawai dengan membuat inovasi Si Amat dan Naga Rapid yaitu inovasi dari pokja SDM terkait disiplin pegawai, dengan pagu anggaran sebesar Rp 627.683.000,- dengan realisasi anggaran yang sangat baik yaitu sebesar Rp. 625.674.414,- atau 99,68%.

Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi indikator kinerjanya sebesar 102,58% maka diperoleh Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,03 dan Tingkat Efisiensi sebesar 0,03, serta Capaian Tingkat Efisiensinya adalah 100% atau **Efisien**.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
102,58%	99,68%	1,03	0,03	100%	Efisien

Tabel 3.2.9.1.3. Efisiensi Anggaran IK.9.1 Tahun 2021

Berdasarkan uraian di atas, realisasi indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 telah berhasil dengan memperoleh capaian yang baik, yaitu 102,58% dari target yang ditetapkan, dan Balai Besar POM di Banjarmasin optimis akan berhasil mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

Sasaran Kegiatan 10 :

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan.

Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja, dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

Indikator Kinerja 10.1 :

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
73	73,4	100,55	Baik

Tabel 3.2.10.1.1. Realisasi Kinerja IK.10.1 Tahun 2021

Pada tahun 2020 telah diterbitkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1114 tahun 2020 tentang Standar Kemampuan Laboratorium BPOM yang berlaku untuk tahun 2020-2024, yang merupakan acuan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL di BPOM sebagai upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM. Penilaian kemampuan laboratorium dilakukan terhadap 3 (tiga) parameter yaitu:

1. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL),
2. Standar Kompetensi dan
3. Standar Peralatan.

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) dengan menggunakan tools penilaian sesuai Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1115 tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan Laboratorium BPOM.

Metode penilaian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Penilaian Standar Ruang Lingkup (SRL)

Pemenuhan terhadap SRL pengujian menggunakan bukti Catatan Pengujian/ Lembar Catatan Pengujian (CP/ LCP), hasil uji profisiensi yang inlier, hasil uji kolaborasi yang diikuti untuk pengujian terkait. Perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh parameter yang mempunyai angka 1 dan dibagi dengan target kemudian dikalikan dengan 100%. Pemenuhan laboratorium terhadap Standar Ruang Lingkup apabila hasil penilaiannya lebih dari 65%.

2) Penilaian Standar Kompetensi

Komponen penilaian kompetensi terdiri dari Pengetahuan dan Keterampilan. Bukti fisik untuk aspek pengetahuan adalah sertifikat pelatihan/bukti pelatihan/bukti diseminasi/surat keterangan supervise tentang pelatihan terkait. Bukti fisik untuk keterampilan berupa CP/LCP pengujian minimal melakukan satu kali pengujian terkait parameter yang dimaksud/Laporan Pengujian hasil supervisi.

- a. Hitung nilai kompetensi masing-masing personel yang terdapat dalam Formulir Informasi Kompetensi. Hasil dinyatakan dalam bentuk persen (%).
- b. Hasil perhitungan kompetensi personel dari masing-masing laboratorium direkap pada Rekapitulasi Persentase Pemenuhan Kompetensi Personel.
- c. Hasil rekapitulasi masing-masing laboratorium kemudian digabungkan pada Profil Kompetensi Personel Penguji.

Pemenuhan laboratorium terhadap Standar Kompetensi apabila hasil penilaiannya lebih dari 75%.

3) Penilaian Standar Peralatan

- a. Untuk perhitungan persentase masing-masing alat adalah jumlah alat yang dimiliki dibagi dengan standar dikalikan 100%.
- b. Untuk jumlah alat yang angka persentasenya lebih dari 100% maka angka yang digunakan adalah 100%.

- c. Pemenuhan standar peralatan dihitung dengan menjumlah persentase seluruh peralatan dibagi dengan jumlah jenis peralatan yang tercantum pada standar.

Pemenuhan laboratorium terhadap Standar Peralatan apabila hasil penilaiannya lebih dari 70%.

Hasil penilaian ketiga parameter tersebut di atas kemudian dirata-ratakan, dan menjadi nilai capaian indikator. Pada tahun 2021 penilaian terhadap pemenuhan standar SKL dilaksanakan oleh PPPOMN secara daring.

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, yang diantaranya dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Semula	76	77	78	79	80
Menjadi	67,2 (Realisasi)	73	78	83	88

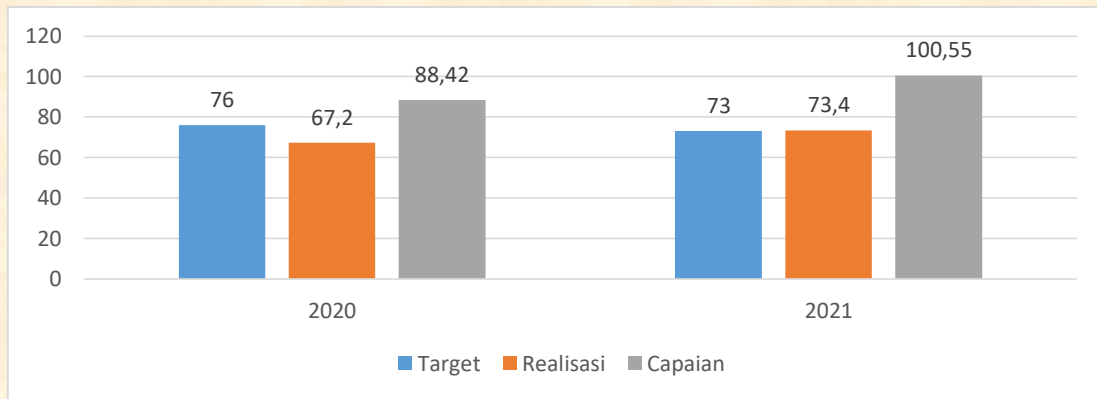
Tabel 3.2.10.1.2. Perubahan Target IK 10.1.

Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024

Target indikator kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP (*Good Laboratory Practice*) yang untuk tahun 2021 adalah 73, lebih rendah dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 76.

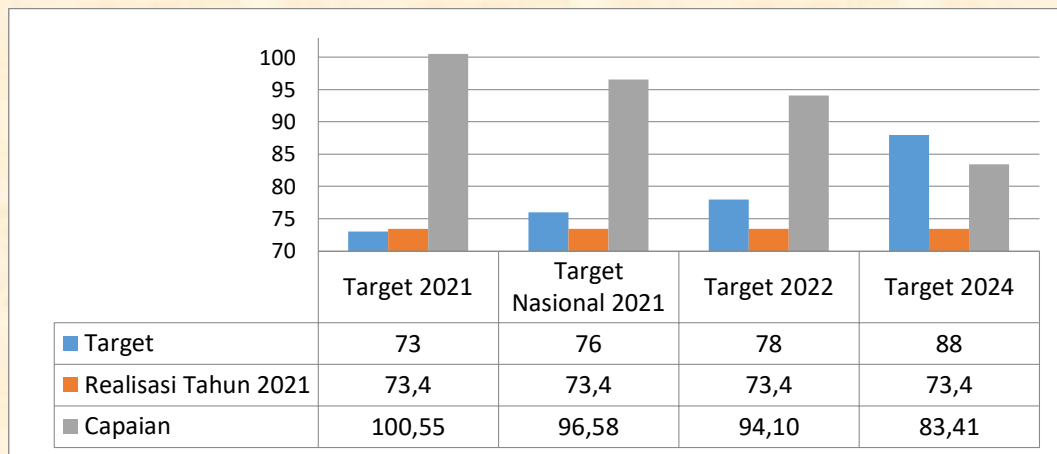
Perubahan target menjadi lebih rendah karena untuk pemenuhan peralatan (capaian 2021 masih 68,2 %) bergantung pada pemenuhan sarana dan prasarana Lab yang masih terus diadakan secara bertahap sampai 2022 yaitu gedung laboratorium yang baru di Banjarbaru.

Apabila dibandingkan dengan perolehan 2020 telah mengalami peningkatan, sebagaimana tergambar pada grafik berikut :



Grafik 3.2.10.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.10.1 Tahun 2020-2021

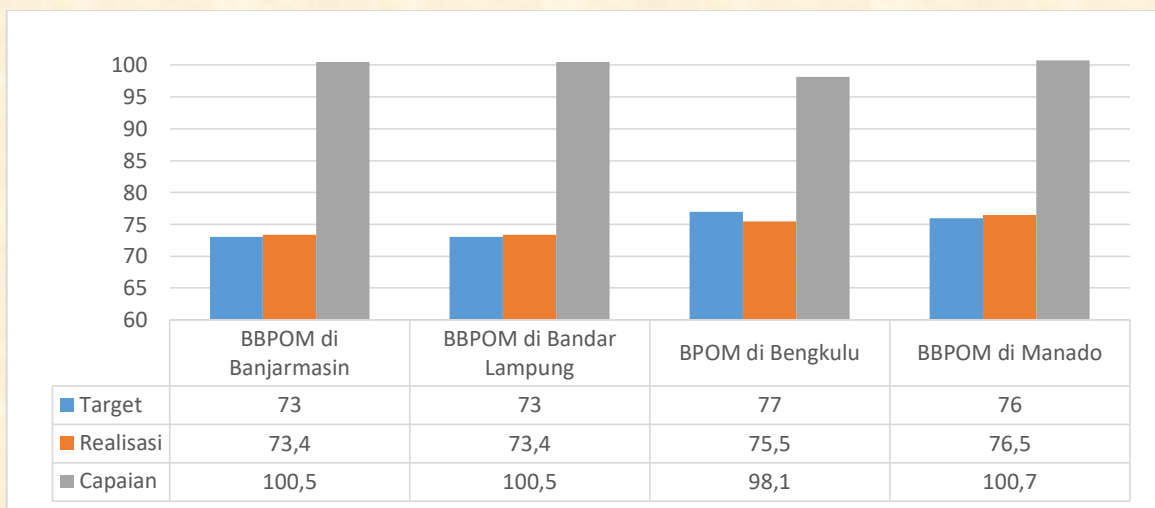
Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi kenaikan capaian kinerja tahun 2021 dibanding tahun 2020.



Grafik 3.2.10.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.10.1 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024

Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 88% (Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024). Jika realisasi kinerja pada tahun 2021 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sasaran kegiatan ini sebesar 83,41% dengan kriteria "cukup", sehingga masih perlu dilakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 sehingga capaian kinerja dalam kriteria "baik" atau bahkan "sangat baik".

Capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 dibandingkan dengan Balai Besar/Balai POM seklaster, yaitu sebagai berikut:



**Grafik 3.2.10.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.10.1
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

Balai Besar POM di Banjarmasin telah berhasil mencapai target tahun 2021 dengan kriteria baik, dengan capaian 100,55 %. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Menambah kemampuan ruang lingkup dengan mengikuti uji kolaborasi dan melakukan verifikasi MA yang belum terlaksana tahun sebelumnya
2. Menambah kompetensi penguji dengan memanfaatkan pelatihan secara daring selama masa pandemi Covid 19

3. Menambah peralatan Lab PCR dan alat pendukungnya dengan adanya tambahan anggaran khusus penanganan Covid 19

Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pencapaian target SKL adalah sebagai berikut :

1. Beberapa pemenuhan ruang lingkup Balai POM belum dapat dipenuhi karena tidak tersedianya sampel yang beredar di wilayah kerja serta tidak tersedianya beberapa baku pembanding.
2. Standar peralatan di Balai POM belum terpenuhi dikarenakan sedang mempersiapkan sarana dan prasarana Lab baru yang dilaksanakan bertahap serta refocussing anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19.

Alternatif solusi:

1. Dengan adanya regionalisasi Lab, beberapa SRL akan mengikuti mekanisme pembagian di regional masing-masing, sehingga pemenuhan SRL menjadi berkurang.
2. Mengadakan pelatihan internal untuk menambah kompetensi penguji
3. Mengajukan kembali pengadaan peralatan yang tertunda karena belum siapnya sarana dan prasana Lab.

Untuk mencapai target indikator kinerja ini, Balai Besar POM di Banjarmasin telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 22.878.339.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.267.920.500 atau 88,59%. Dari data tersebut dicapai efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sebesar 1,13 dengan tingkat efisiensi sebesar 0,13 sehingga capaian efisiensi tahun 2021 sebesar 100% (**Efisien**).

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
100,55%	88,59%	1,13	0,13	100%	Efisien

Tabel 3.2.10.1.3. Efisiensi Anggaran IK.10.1 Tahun 2021

Berdasarkan uraian di atas, realisasi Indikator Kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 telah berhasil dengan capaian 100,55%, dan Balai Besar POM di Banjarmasin optimis akan mampu mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

Indikator Kinerja 10.2 :

Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
2	2,025	101,25 %	Baik

Tabel 3.2.10.1.1. Realisasi Kinerja IK.10.1 Tahun 2021

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan dalam sistem BCC
 - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - c. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - d. Terdapat 42 jenis data dan informasi dalam BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:

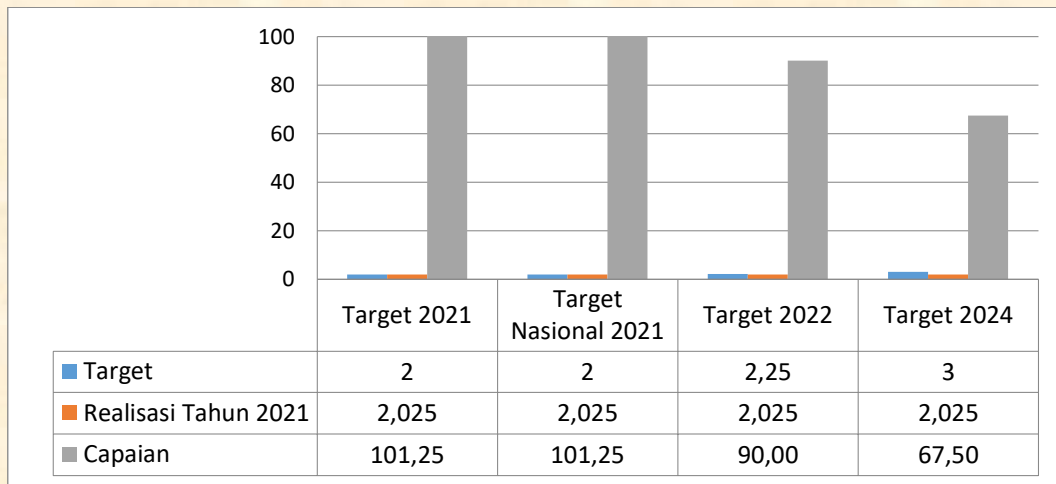
- UPT : SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) dan SPIMKER (Sistem Pelaporan Informasi Keracunan)
 - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
- a. Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - b. Pusat : email dan dashboard BCC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu. Kriteria yang digunakan adalah :

2,26 – 3	: Optimal	0,76 – 1,5	: Kurang Optimal
1,51 – 2,25	: Cukup	0 – 0,75	: Sangat Kurang

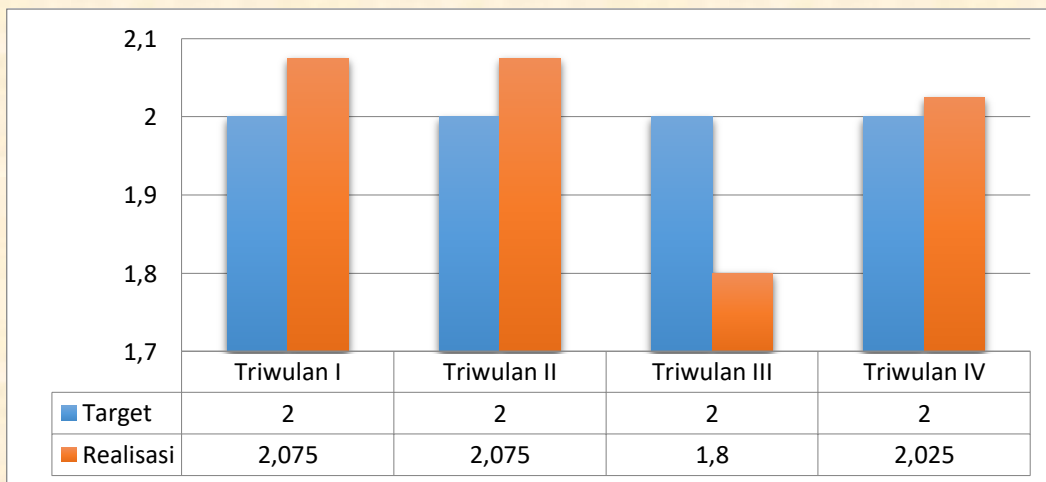
Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, namun untuk indikator ini tidak ada perubahan.

Pada akhir tahun 2021, informasi Balai Besar POM di Banjarmasin memperoleh Indeks pengelolaan data dan yang optimal sebesar 2,02 dari target 2 yang juga merupakan target nasional, dengan capaian sebesar 101,25%, sedangkan terhadap target akhir RPJM tahun 2024 sebesar 3 , capaiannya adalah 60,67%.



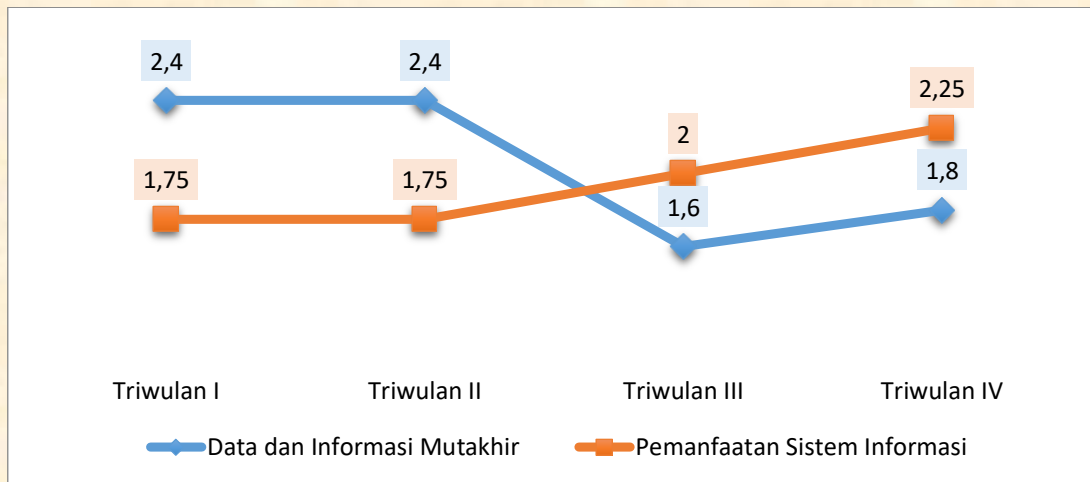
Grafik 3.2.10.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.10.2 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024

Perolehan Nilai Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal tahun 2020 per triwulan adalah sebagai berikut :



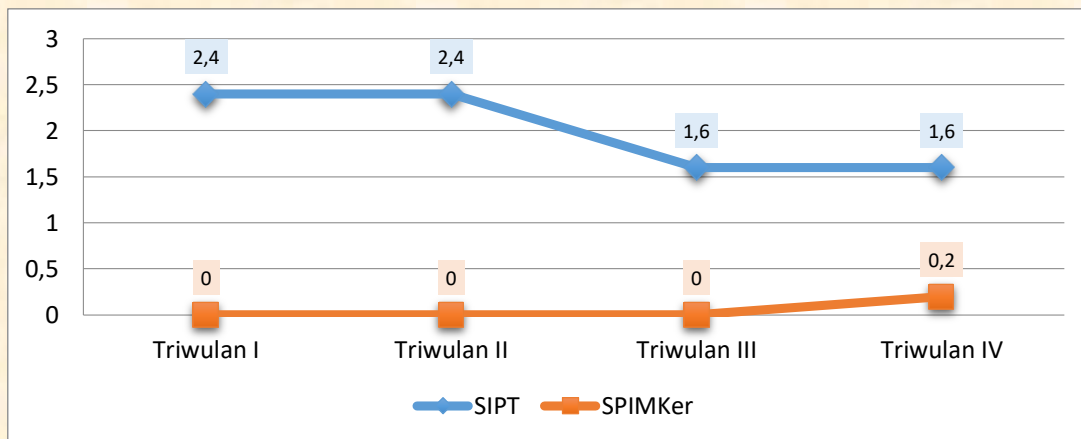
Grafik 3.2.10.2.2. Realisasi Kinerja IK.10.2 Pertriwulan Tahun 2021

Nilai indeks tersebut di atas, diperoleh dari komponen-komponen pengelolaan data dan informasi, dengan perhitungan rata-rata dari Nilai Data dan Informasi Mutakhir ditambah Nilai Pemanfaatan Sistem Informasi, gambaran sebagai berikut :



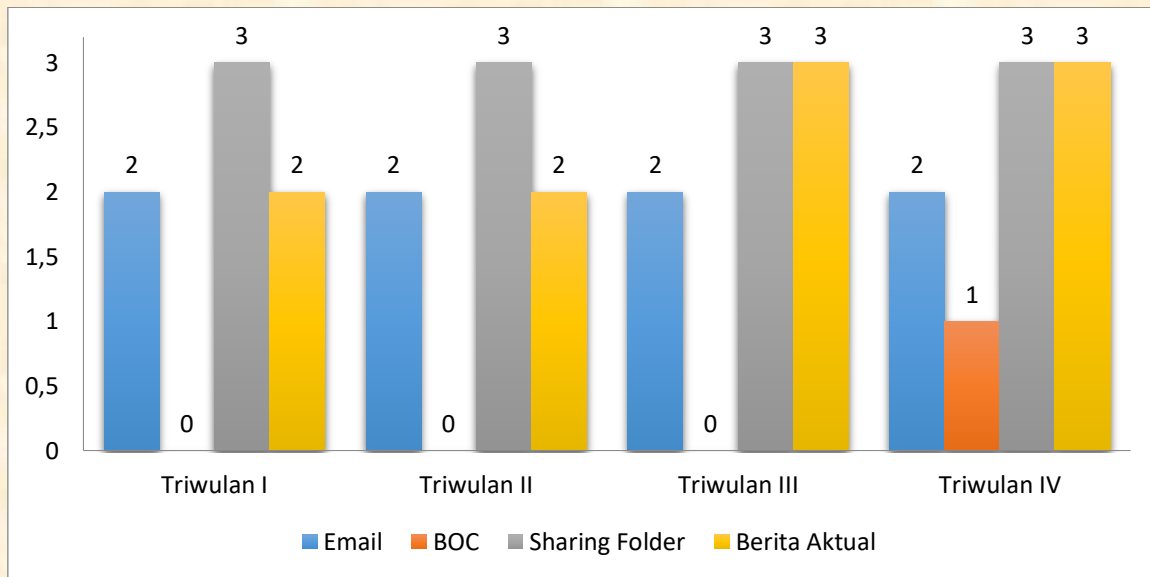
Grafik 3.2.10.2.3. Nilai Komponen Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2021

Komponen Data dan Informasi Mutakhir, merupakan jumlah nilai SIPT dan SPIMKer, dengan nilai pertriwulannya sebagai berikut :



Grafik 3.2.10.2.4. Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC Tahun 2021

Sedangkan komponen Pemanfaatan Sistem Informasi, merupakan rata-rata dari nilai pemanfaatan Email Corporate, Sharing Folder, Dashboard BCC dan Berita Aktual, dengan nilai pertriwulannya sebagai berikut :



Grafik 3.2.10.2.5. Nilai Indeks Pemanfaatan Data dan Informasi Tahun 2021

Dari data kedua komponen di atas dapat terlihat bahwa untuk komponen Data dan Informasi Mutakhir selama tahun 2021, untuk SIPT pada triwulan I hanya dilakukan penilaian terhadap data hasil pemeriksaan sarana, pada triwulan II penilaian terhadap data hasil pemeriksaan sarana dan sampling, selanjutnya pada triwulan III dan IV, dilakukan penilaian kepada ketiga subkomponennya yaitu data hasil pemeriksaan sarana, sampling dan hasil pengujian. Untuk aplikasi SPIMKer tidak ada pemutakhiran data karena adanya kendala koordinasi dengan petugas Rumah Sakit yang biasanya melakukan pelaporan. Kendala ini terkait dengan merebaknya Pandemi Covid-19, yang membatasi aktifitas dan pengurangan anggaran yang terkait koordinasi SPIMKer pada saat APBNP tahun 2021.

Untuk komponen Pemanfaatan Sistem Informasi, yang paling baik pemanfaatannya adalah Sharing Folder, dengan memperoleh nilai maksimal 3 setiap triwulannya. Diikuti Berita Aktual yang pada triwulan I dan II memperoleh nilai 2, dan mampu ditingkatkan pada triwulan III dan IV menjadi 3.

Selanjutnya email corporate juga dimanfaatkan dengan cukup baik dimana pada tahun 2021 memperoleh nilai indeks 2 setiap triwulannya dengan nilai subkomponennya semakin meningkat hingga akhir tahun. Peningkatan ini disebabkan

oleh gencarnya sosialisasi pemanfaatan Email Corporate. Pemanfaatan email corporate ini belum maksimal karena adanya kendala yang terjadi yaitu lambatnya tindak lanjut atas laporan akun Email Corporate yang terblokir karena lupa password, serta adanya akun yang tidak dapat digunakan pemiliknya karena akun tersebut menggunakan nama yang sama dengan pegawai UPT lain, namun tetap terhitung sebagai akun tidak aktif sampai akhir tahun.

Sedangkan Dashboard BOC, belum dimanfaatkan dengan baik dan hanya mampu memperoleh nilai indeks 1 pada triwulan IV.

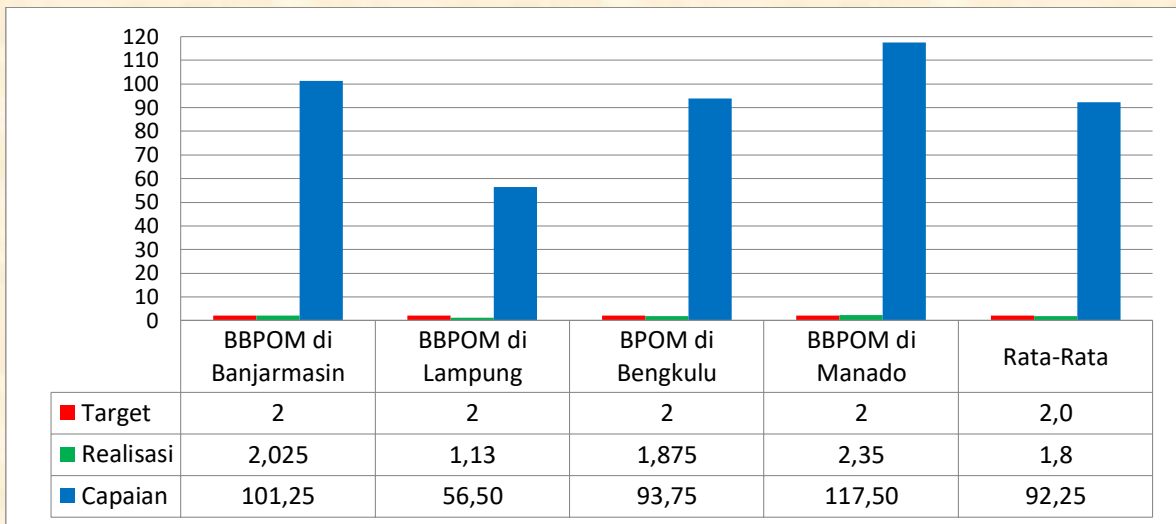
Pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai target pada Indikator Kinerja ini adalah yang terkait Layanan Sarana dan Prasarana Internal, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 499.247.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 499.197.075,- atau 99,99%. Pagu anggaran tersebut merupakan total dari Pagu anggaran pengadaan alat pengolahan data dan komunikasi, peralatan fasilitas perkantoran.

Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi indikator kinerjanya sebesar 101,5% maka diperoleh Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,02 dan Tingkat Efisiensi sebesar 0,02, serta Capaian Tingkat Efisiensinya adalah 100% atau **Efisien**.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
102,58%	99,68%	1,03	0,03	100%	Efisien

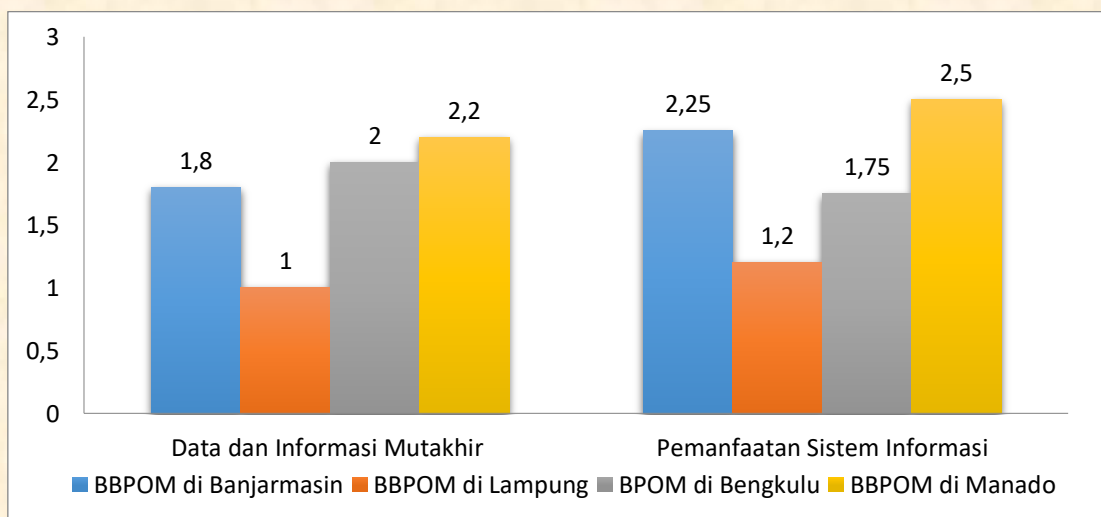
Tabel 3.2.10.2.2. Efisiensi Anggaran IK.10.2 Tahun 2021

Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021, berada di posisi ke tiga dibandingkan dengan Balai Besar/Balai POM seklaster, adalah sebagai berikut :



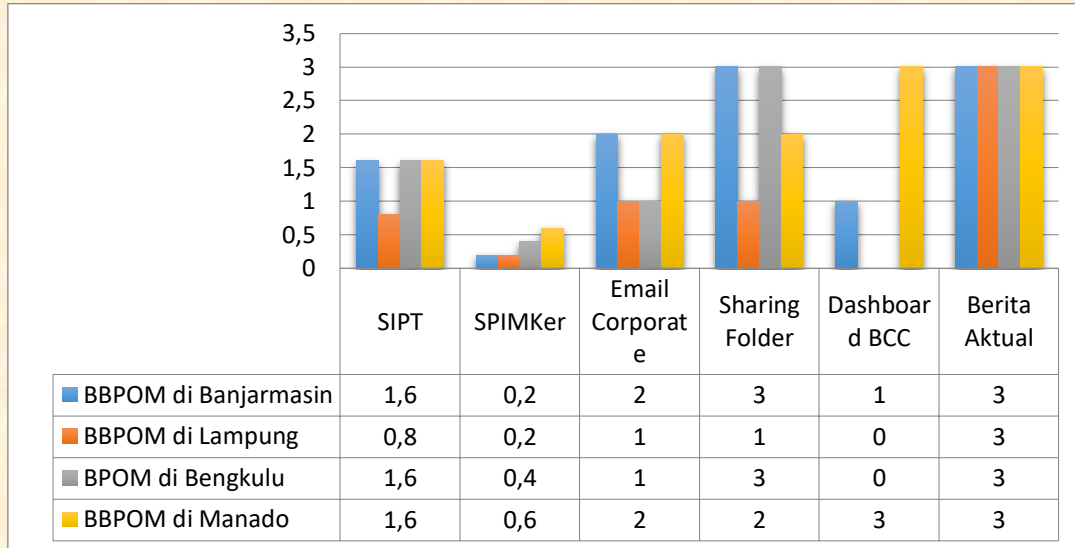
**Grafik 3.2.10.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.10.2
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

Berdasarkan Nilai komponennya maka posisi Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebagai berikut :



**Grafik 3.2.10.2.7. Perbandingan Nilai Komponen IK.10.2
Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021**

Dan apabila dilihat dari Nilai subkomponen masing-masing maka posisi Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebagai berikut :



Grafik 3.2.10.2.7. Perbandingan Nilai Sub Komponen IK.10.2 Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021

Dari keempat Balai Besar/Balai POM seklaster, semua sudah memanfaatkan Berita Aktual dengan baik sehingga memperoleh nilai 3. Kemudian untuk update SIPT dan SPIMKer juga sudah dilaksanakan, namun belum optimal bahkan khusus untuk SPIMKer masih sangat rendah.

Pemanfaatan email corporate yang paling baik adalah BBPOM di Banjarmasin dan BBPOM di Manado. Sedangkan pemanfaatan Dashboard BCC yang paling baik adalah BBPOM di Manado.

Untuk lebih mengoptimalkan nilai kinerja ini, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan Balai Besar POM di Banjarmasin adalah :

- Melaksanakan pemutakhiran data SIPT secara optimal sesuai timeline
- Melakukan koordinasi kepada Petugas RS agar dapat melaksanakan pelaporan SPIMKer.

- Terus melakukan sosialisasi dan reminder pemanfaatan email corporate kepada seluruh pegawai.
- Melakukan koordinasi dan konsultasi untuk dapat memanfaatkan dashboar BCC sebagai sumber informasi dan bahan evaluasi.
- Meningkatkan pemanfaatan sharing folder dan aktifitas penyampaian berita aktual pada subsite BBPOM di Banjarmasin

Sekaitan dengan pemanfaatan SPIMKer yang diluar kendali, karena sangat tergantung dari kasus keracunan dan keaktifan operator SPIMKer yang merupakan petugas Rumah Sakit, diusulkan untuk mengeluarkannya atau mengganti subkomponen penilaian ini dengan pemanfaatan aplikasi lain yang kendalinya berada di UPT.

Berdasarkan uraian di atas, realisasi Indikator Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal tahun 2021 dapat dinyatakan telah berhasil dengan capaian 101,25%, dan Balai Besar POM di Banjarmasin optimis akan mampu mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

Sasaran Kegiatan 11 :

Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal.

Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja, dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja masing-masing Indikator Kerjanya sebagai berikut :

Indikator Kinerja 11.1 :

Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
92,5	89,87	97,16 %	Baik

Tabel 3.2.11.1.1. Realisasi Kinerja IK.11.1 Tahun 2021

Pada Renstra BPOM tahun 2020-2024 telah ditetapkan bahwa Nilai Kinerja Anggaran menjadi salah satu indikator untuk penilaian kinerja Badan POM dan UPT di lingkungannya. Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA), dengan komposisi 60% Nilai IKPA ditambah 40% Nilai EKA.

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

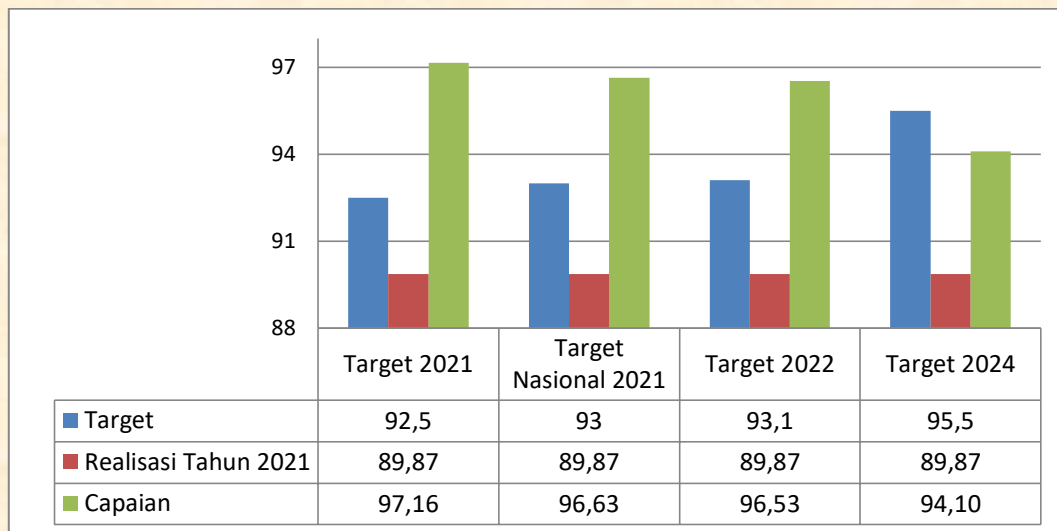
Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Semula	93	94	95	96	97
Menjadi	90,96 (Realisasi)	92.5	93.1	94.3	95.5

Tabel 3.2.11.1.2. Perubahan Target IK 11.1.

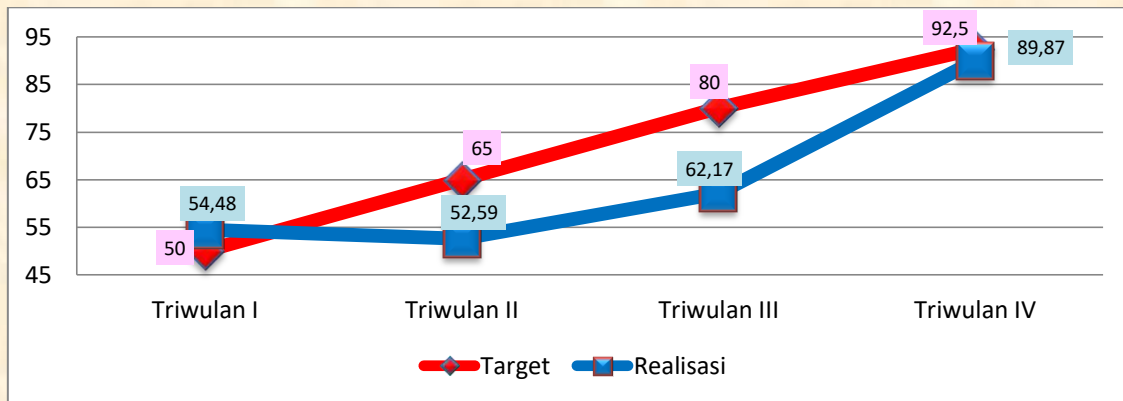
Berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2021-2024

Pada akhir tahun 2021, Balai Besar POM di Banjarmasin memperoleh nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 91,29 dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) 88,92, sehingga Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021 adalah 89,87 dari target 92,5 yang juga merupakan target nasional, dengan capaian sebesar 97,16%.



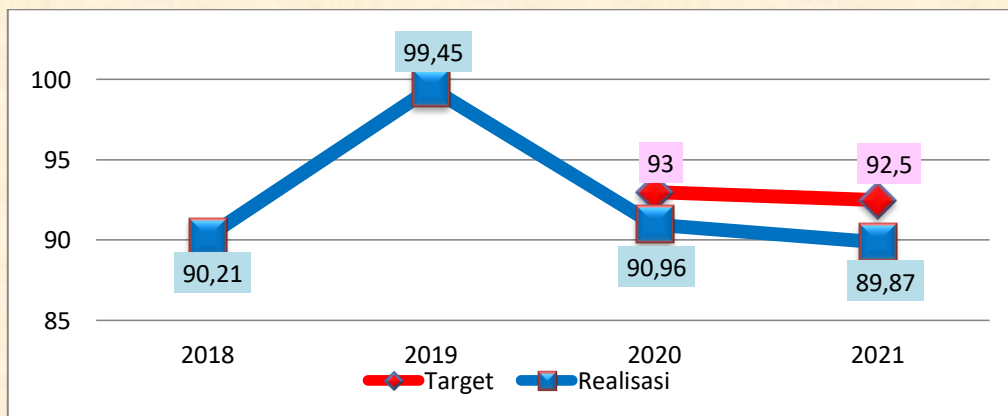
Grafik 3.2.11.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.11.1 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024

Perolehan Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 per triwulan adalah sebagai berikut :



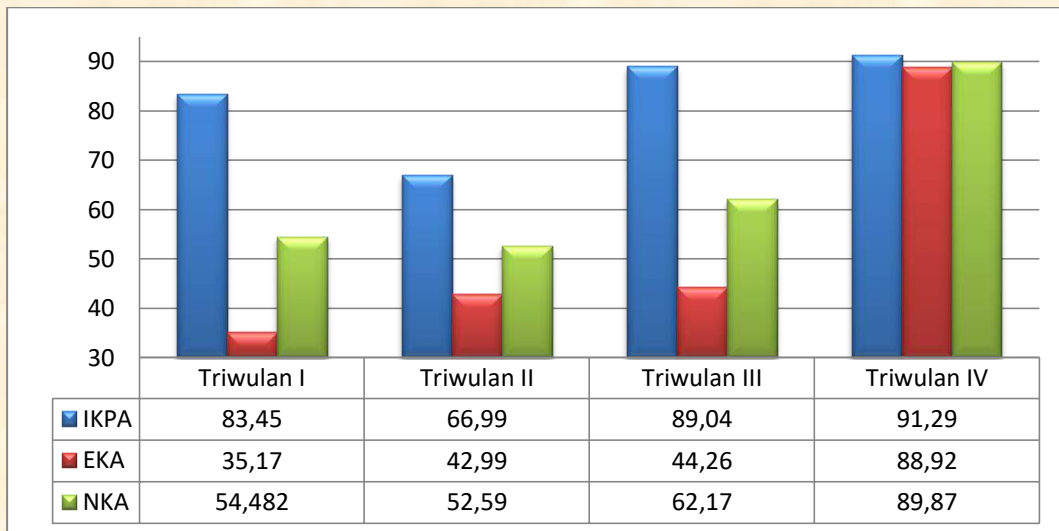
Grafik 3.2.11.1.2. Realisasi Kinerja IK 11.1 Pertriwulan Tahun 2021

Meskipun Nilai Kinerja Anggaran menjadi indikator penilaian kinerja baru mulai digunakan sebagai penilaian kinerja pada Renstra 2020-2014, namun Nilai Kinerja Anggaran sudah diperhitungkan sebagai evaluasi pelaksanaan anggaran UPT Badan POM oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM sejak periode sebelumnya, dimana berdasarkan grafik di bawah, dapat dilihat perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2018-2021.



Grafik 3.2. 11.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.11.1 Tahun 2020-2021

Dari grafik tersebut di atas dapat dilihat bahwa NKA BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun 2020. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut, harus ditelaah dari ke dua sumber penilaian, yaitu Nilai IKPA dan Nilai EKA, dimana untuk tahun 2021 perolehan nilai tiap triwulannya adalah sebagai berikut :



Grafik 3.2. 11.1.4. Realisasi Kinerja IK. 11.1 Pertriwulan Tahun 2021

A. Nilai IKPA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 195 tahun 2018 tentang Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/ Lembaga, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi, dengan hasil pengukuran yang disebut Nilai IKPA.

Pada tahun 2021 terdapat perubahan regulasi yang mengatur petunjuk teknis penilaian IKPA yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang mencabut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020.

Pada PER-4/PB/2021, terdapat reformulasi indikator Capaian Output yaitu adanya perubahan nomenklatur dari Konfirmasi Capaian Output menjadi Capaian Output. Perhitungan Capaian Output ini dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO.

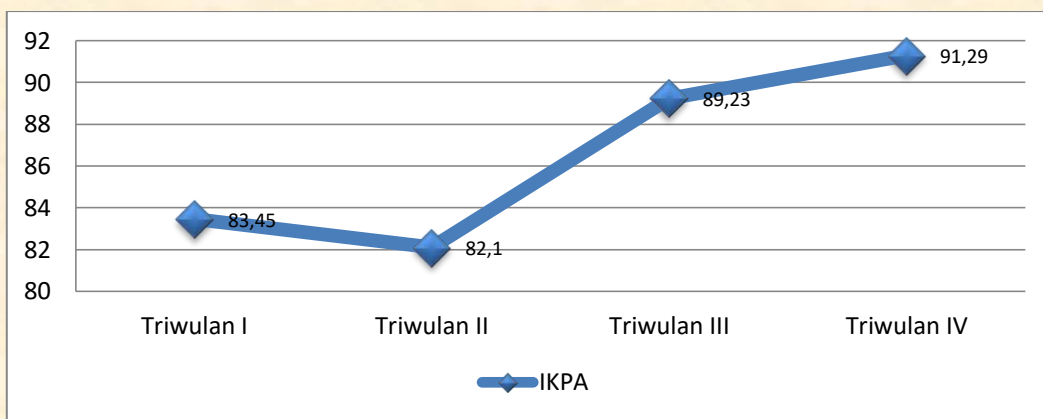
Selain itu juga terdapat penyesuaian bobot 13 (tiga belas) indikator IKPA yang dapat digambarkan pada tabel dibawah ini.

No.	Indikator	Bobot 2019	Bobot 2020	Bobot 2021
1	Penyerapan Anggaran	20%	15%	15%
2	Data Kontrak	15%	15%	10%
3	Penyelesaian Tagihan	15%	12%	10%
4	Konfirmasi Capaian Output	-	10%	17%
5	Pengelolaan UP dan TUP	10%	8%	8%
6	Revisi DIPA	5%	5%	5%
7	Deviasi Halaman III DIPA	5%	5%	5%
8	LPJ Bendahara	5%	5%	5%
9	Renkas	5%	5%	5%
10	Kesalahan SPM	6%	5%	5%
11	Retur SP2D	6%	5%	5%
12	PaguMinus	4%	5%	5%
13	Dispensasi	4%	5%	5%
	TOTAL	100%	100%	100%

Tabel 3.2.11.1.3. Perbandingan Indikator dan Bobot IKPA tahun 2019-2021

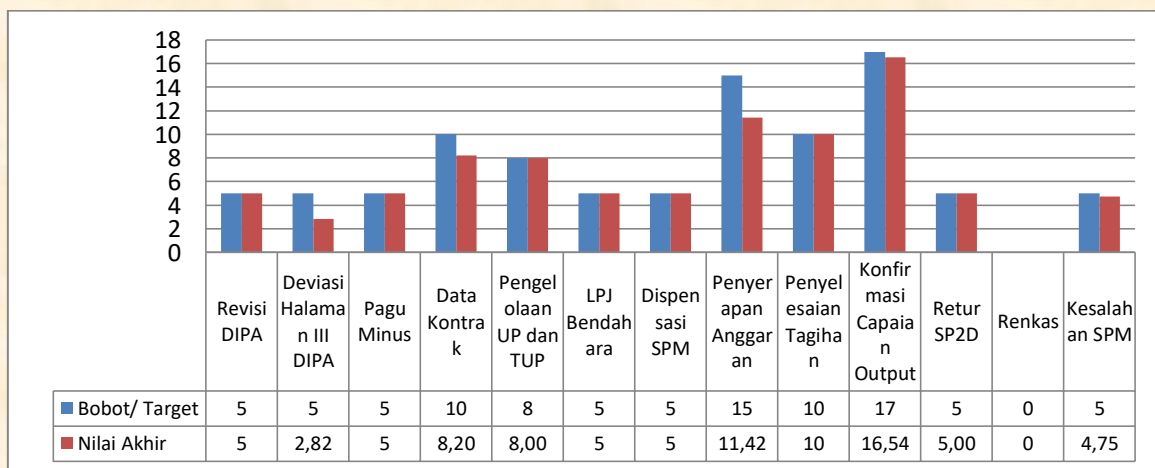
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, khusus penilaian IKPA Tahun Anggaran 2021 dengan indikator Halaman III DIPA dan Capaian Output dimulai pada periode triwulan II tahun 2021.

Kedua kebijakan tersebut diatas cukup berpengaruh terhadap perolehan Nilai IKPA Balai Besar POM di Banjarmasin, sehingga diperoleh nilai sebagai berikut :



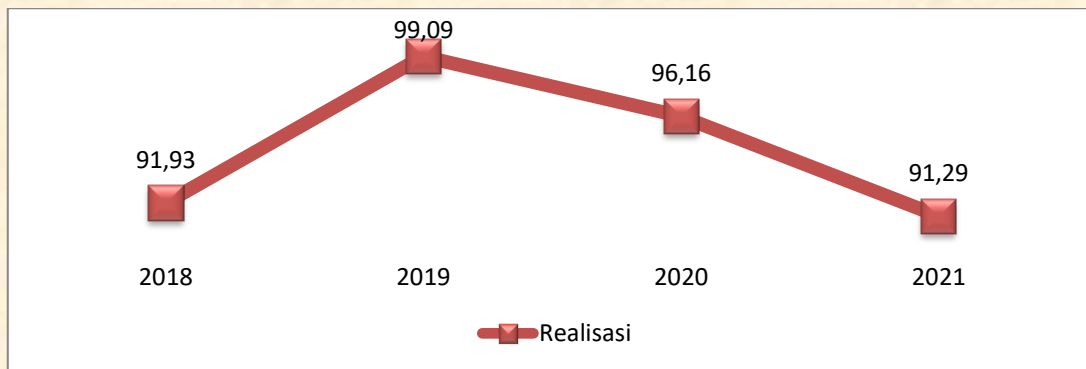
Grafik 3.2. 11.1.4. Nilai IKPA Pertriwulan Tahun 2021

Berdasarkan komponennya Nilai IKPA Tahun 2020, dapat digambarkan sebagai berikut :



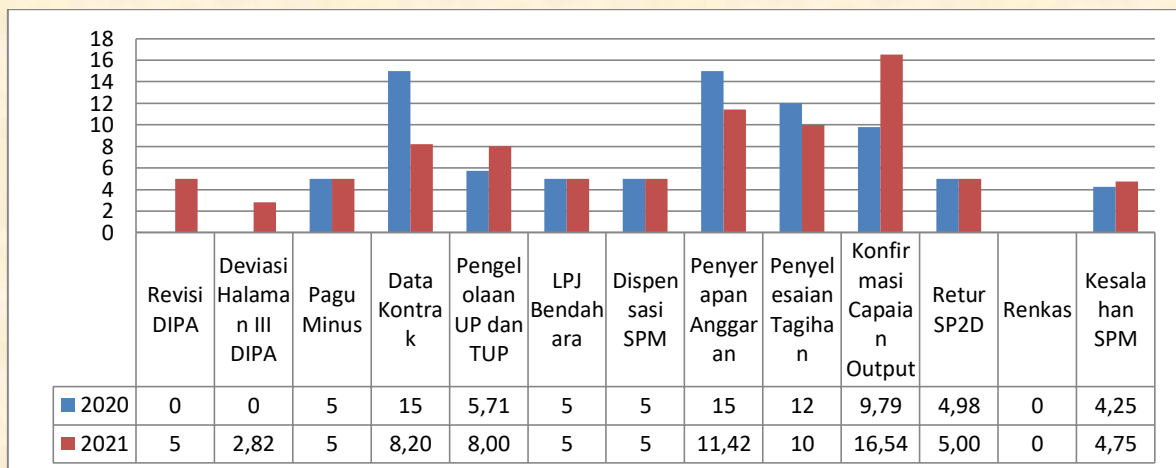
Grafik 3.2.11.1.5. Nilai IKPA berdasarkan Komponen Tahun 2021 Tahun 2021

Nilai IKPA BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2018-2020, sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.2.11.1.6. Perbandingan Nilai IKPA Tahun 2018-2021

Penurunan nilai tersebut disebabkan oleh penurunan nilai beberapa komponen, sebagaimana grafik berikut :



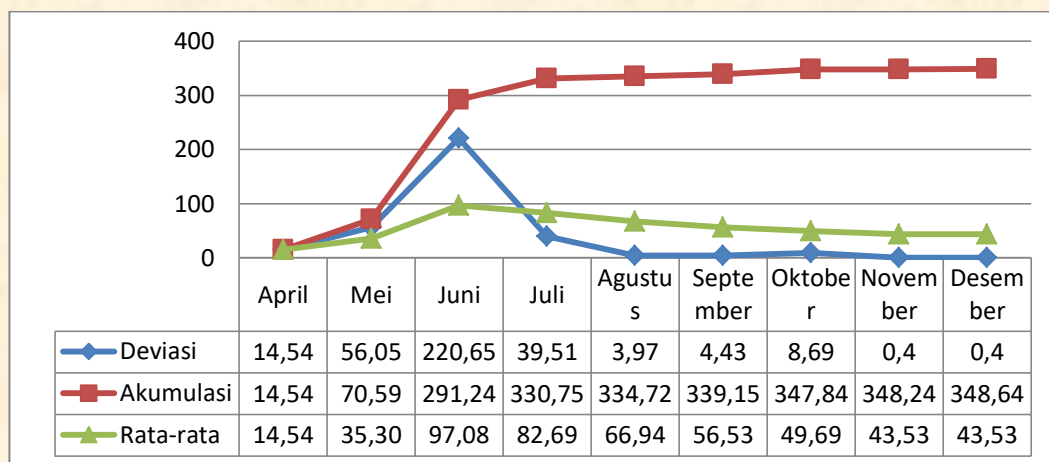
Grafik 3.2.11.1.7. Nilai IKPA Berdasarkan Komponen Tahun 2020-2021

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021, indikator yang belum maksimal capaian nilainya adalah Deviasi Halaman III DIPA, Data Kontrakt, Penyerapan Anggaran, Capaian Output, dan Kesalahan SPM, dengan faktor penyebab sebagai berikut :

1. Deviasi Halaman III DIPA

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, khusus penilaian IKPA Tahun Anggaran 2021 dengan indikator Halaman III DIPA mulai diperhitungkan pada periode triwulan II tahun 2021.

Adanya keterlambatan realisasi belanja modal di triwulan II dan awal triwulan III sangat mempengaruhi nilai indikator ini, dimana pada kurun waktu tersebut akumulasi deviasi yang terjadi sebesar 330,75% dengan rata-rata 82,69%, sebagaimana tergambar dalam grafik berikut :



Grafik 3.2.11.1.8. Deviasi Halaman III DIPA Tahun 2021

Dari grafik tersebut di atas dapat dilihat bahwa Deviasi terbesar terjadi pada bulan Juni yaitu 220,65% , hal ini disebabkan adanya pergeseran pembayaran uang muka pekerjaan konstruksi sebesar lebih kurang 2,6 milyar, yang awalnya direncanakan dibayar pada bulan Mei, namun baru terlaksana di bulan Juni. Kemudian pergeseran juga terjadi pada bulan Juli, namun deviasi yang dihasilkan lebih kecil dari bulan Juni.

2. Data Kontrak

Pada tahun 2021 terdapat 33 Data Kontrak, dan yang mengalami keterlambatan sebanyak 6 Data Kontrak, dengan perincian :

- Januari 4 (empat) Data Kontrak, masing-masing terlambat 16 hari kerja, berupa kontrak sewa kantor dan mobil operasional perkantoran untuk Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu.
- Februari 1 (satu) Data Kontrak, terlambat 29 hari kerja, berupa kontrak pengadaan Reagensia Prekursor,
- Mei 1 (satu) Data Kontrak, terlambat 2 hari kerja, berupa kontrak Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung laboratorium dan pelayanan publik tahap III.

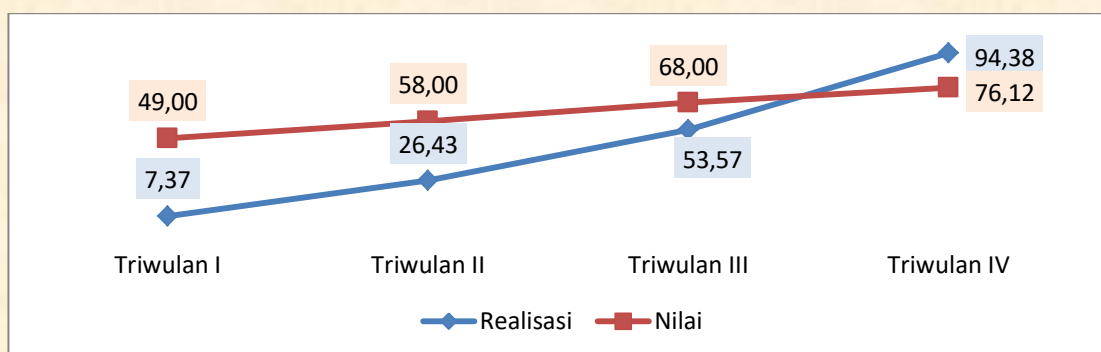
3. Penyerapan Anggaran (Realisasi)

Target minimal penyerapan anggaran tiap adalah :

- triwulan I = 15% ;
- triwulan II = 40% ;
- triwulan III = 70% ; dan
- triwulan IV = 90% ,

dimana untuk penilaiannya dihitung rata-rata dari persentase capaian triwulan yang dinilai dengan persentase capaian triwulan sebelumnya.

Dengan komposisi pagu anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021, yang didominasi belanja modal sebesar 45%, sangat sulit untuk dapat mencapai target realisasi tersebut, sehingga pada akhir tahun anggaran, meskipun pada akhir tahun 2021 penyerapan anggaran telah melebihi 90% yaitu 94,38%, namun hanya memperoleh nilai 76,12.



Grafik 3.2.11.1.9. Realisasi Anggaran Pertriwulan Tahun 2021

4. Capaian Output

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, terjadi perubahan nomenklatur dari Konfirmasi Capaian Output menjadi Capaian Output, yang dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO.

Capaian output yang terkonfirmasi pada akhir tahun 2021 sebanyak 37 RO, dengan 36 RO mencapai 100% dan 1 RO hanya mencapai 93,36% , yaitu 3165.CAB.003. Layanan Prasarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, yang terdiri dari pembangunan gedunglaboratorium dan pelayanan publik tahap III realisasi 80,074% ; pengadaan jaringan listrik realisasi 100% ; dan sertifikasi tanah Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan realisasi 100%.

5. Kesalahan SPM

Pada tahun 2021 telah dibuat 1.056 SPM, yang 8 diantaranya terjadi kesalahan dan harus diperbaiki. Kesalahan SPM yang terjadi pada bulan Januari (2), April (3), Juni (1), Oktober (1) dan Desember (1), sehingga nilai yang diperoleh 95% dari bobot indikatornya sebesar 5 yaitu 4,75.

Selain ke 5 indikator tersebut di atas ada 1 indikator yang pelaksanaannya belum sempurna, yaitu Retur SP2D. Selama tahun 2021 telah diterima 1.048 SP2D, pada bulan Agustus terdapat 1 retur SP2D akibat adanya kesalahan rekening penyedia, sehingga nilai yang diperoleh 99,9% , namun ketika diperhitungkan dengan bobot indikatornya sebesar 5 masih menghasilkan nilai akhir 5.

B. Nilai EKA

EKA merupakan instrumen money kinerja anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sesuai dengan PMK 214/PMK.02/2017 yang terdiri atas 4 indikator pada aspek implementasi, yaitu: Capaian Keluaran, Konsistensi, Penyerapan Anggaran, dan Efisiensi.

Untuk mendapatkan nilai kinerja, maka seluruh indikator (penyerapan, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, pencapaian keluaran dan efisiensi) harus memiliki skala yang sama yaitu 0%-100%, dari keempat variabel pengukuran tersebut hanya variabel efisiensi yang tidak memiliki skala 05_100%.

Nilai EKA BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 adalah sebesar 88,92, dengan rincian nilai 4 indikator sebagai berikut :

1. Penyerapan 94,38%

- Pagu anggaran BBPOM di Banjarmasin pada awal tahun 2021 sebesar Rp.55.781.064.000,- dan mengalami pemotongan anggaran melalui 3 kali Revisi APBNP sebesar Rp.8.424.122.000,- atau 15,10% sehingga pagu akhirnya adalah Rp.47.356.942.000,-
- Berdasarkan data realisasi anggaran per jenis belanja, serapan anggaran paling tinggi adalah belanja pegawai (51) dengan rata-rata 99,86%, dimana dari total anggaran Rp.11.896.159.000,- hanya tersisa Rp.17.241.327,- atau 0,14%. Kemudian diikuti oleh belanja barang (52) yang penyerapannya 99,76%.
- Sedangkan belanja modal (53) penyerapannya hanya 87,77% yaitu Rp.18.274.899.395,- dari pagu Rp.21.335.122.000,-. Anggaran belanja modal yang tidak terserap Rp.2.610.222.605,- (12,23%) merupakan sisa pembayaran termin terakhir untuk Pembangunan Gedung Laboratorium dan Kantor Pelayanan Publik Tahap III yang gagal diselesaikan pekerjaannya oleh penyedia sehingga terjadi putus kontrak.

2. Konsistensi Penyerapan Anggaran 95,53%

Merupakan rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi rencana penarikan dana dengan deviasi realisasi anggaran dan rencana penarikan dana kumulatif.

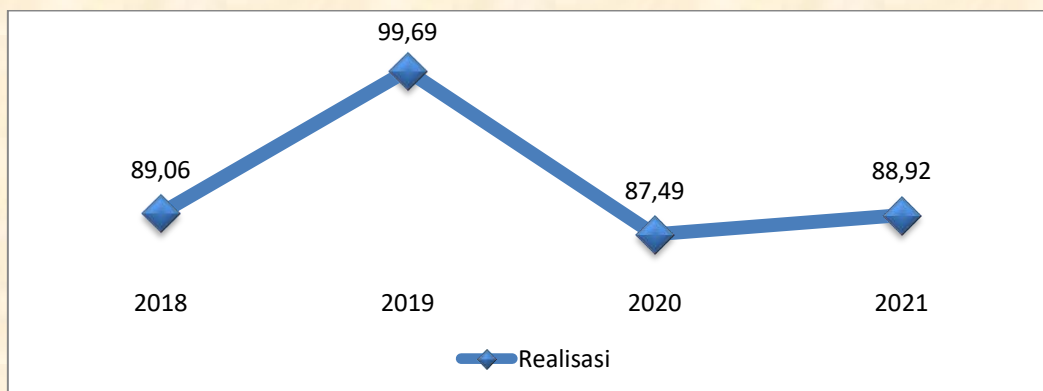
3. Capaian Keluaran (output) 100%

Merupakan rata-rata dari capaian keluaran 37 output yang dimiliki, dimana seluruh output berhasil mencapai 100 %, bahkan 12 output diantaranya memperoleh capaian lebih dari 100%,

4. Nilai Efisiensi 66,02%

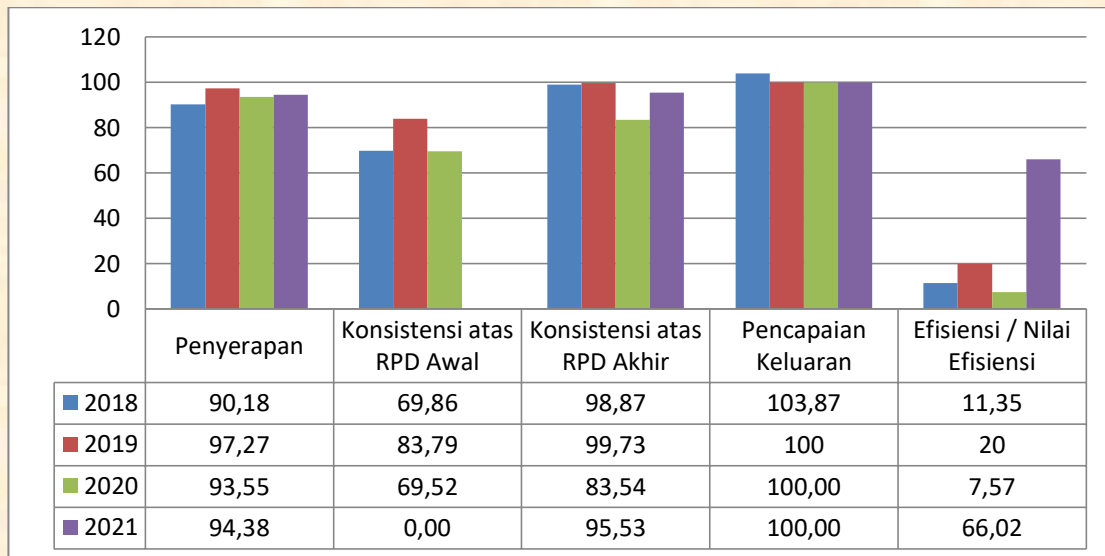
Nilai Efisiensi merupakan hasil pengukuran efisiensi RO di tingkat satuan kerja. Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan paling tinggi sebesar 20%.

Nilai EKA BBPOM di Banjarmasin tahun 2021 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2020, sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.2.11.1.10. Perbandingan Nilai EKA Tahun 2018-2021

Penurunan nilai tersebut disebabkan oleh penurunan nilai beberapa komponen, sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.2.11.1.11. Nilai EKA berdasarkan Komponen Tahun 2018-2021

Berdasarkan nilai komponen tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyerapan Anggaran

- Faktor penghambat penyerapan anggaran tahun 2021 ini adalah adanya kegagalan pihak penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Gedung Laboratorium dan Pelayanan Publik Tahap III, dimana penyedia hanya mampu mencapai 80,074% sehingga tidak bisa direalisasikan anggaran pembayaran termin V (lima) sebesar kurang lebih 2,6 milyar.
- Untuk menghindari hal tersebut terjadi kembali di tahun anggaran berikutnya, dalam rangka melanjutkan pembangunan di tahap IV, Balai Besar POM di Banjarmasin harus meningkatkan koordinasi, baik dengan UKPBJ Badan POM pada proses pemilihan pelaksana melalui tender untuk memperoleh penyedia yang mampu melaksanakan dengan baik, dan juga dengan pelaksana agar proses pekerjaan pembangunan gedung dapat terlaksana sesuai jadwal perencanaan serta dapat diselesaikan dalam tahun anggaran yang sama, maupun dengan pihak lain yang berwenang, apabila terjadi kendala dalam pelaksanaannya.

2. Konsistensi Penyerapan Anggaran.

- Penyusunan RPD melalui aplikasi SAKTI setiap awal triwulan tahun Anggaran berjalan. Dinamisnya pelaksanaan kegiatan yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi mengakibatkan sulitnya menentukan RPD yang sesuai dengan Realisasi.
- Komitmen para pengelola kegiatan yang cukup baik, dan telah dilakukan upaya perbaikan RPD melalui mekanisme Revisi Halaman III DIPA secara berkala, sehingga meminimalkan deviasi yang terjadi.

3. Capaian Keluaran

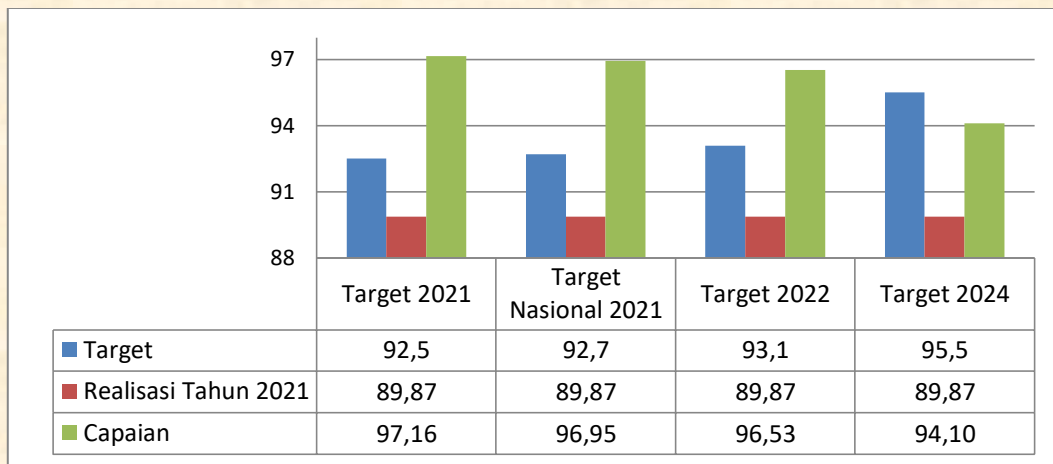
- Faktor yang menghambat pencapaian keluaran kegiatan adalah adanya keluaran yang pencapaiannya dapat dinilai pada akhir tahun anggaran, seperti RO QDB.001. Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS); QDB.002. Desa Pangan Aman; dan QDB.003. Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.
- Target keluaran pada dasarnya sudah sesuai dengan kemampuan balai, sehingga dapat dipenuhi dengan baik

4. Efisiensi

- Faktor penghambat efisiensi diantaranya adalah adanya kegagalan pihak penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga tidak mencapai tingkat efisiensi yang baik. Disamping itu adanya RO dengan target volume RO generik yang membatasi kemungkinan pencapaian tidak dapat melebihi 100%.
- Faktor pendukung efisiensi adalah, pencapaian keluaran dari beberapa RO yang melebihi target, seperti :
 - 1) BDC.001.Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM, capaian keluarannya 120,67%;
 - 2) BDC.002.Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM I, capaian keluarannya 125%;
 - 3) BDC.003.Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM II, capaian keluarannya 125%;

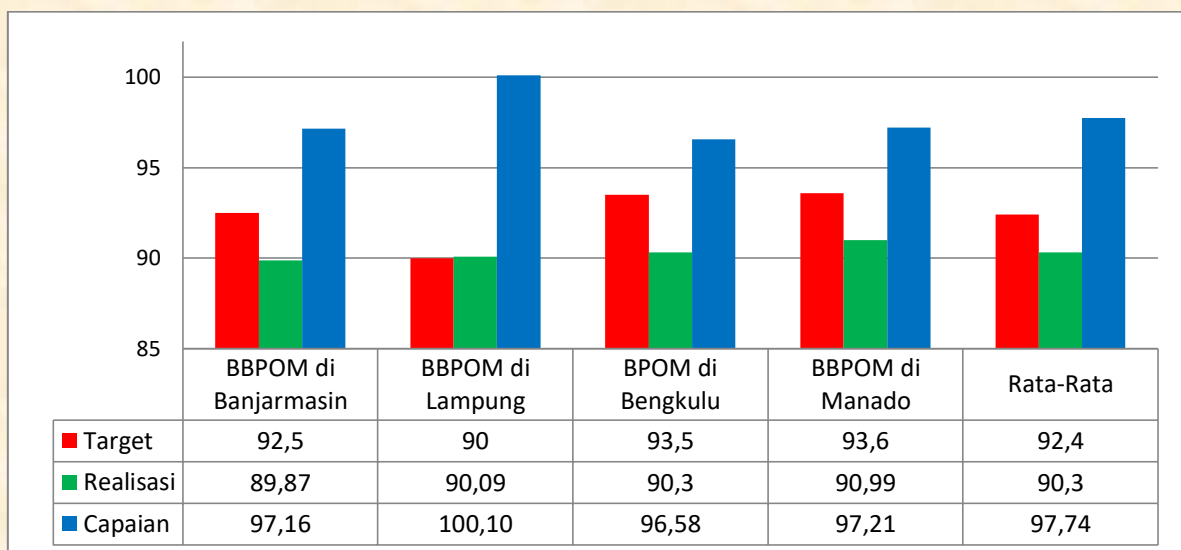
- 4) BMB.001. Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM, capaian keluarannya 123,08%;
 - 5) BMB.002. Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM I, capaian keluarannya 116%;
 - 6) BMB.003. Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM II, capaian keluarannya 120%;
 - 7) QCD.U35. Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan capaian 200%.
 - 8) QIC.001.Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM, capaian keluarannya 110,87%;
 - 9) QIC.002.Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM I, capaian keluarannya 110%;
 - 10) QIC.003.Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II, capaian keluarannya 125%;
 - 11) QIC.004.Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM, capaian keluarannya 111,94%;
 - 12) QIC.005.Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM I, capaian keluarannya 101,42%;
 - 13) QIC.006.Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II, capaian keluarannya 120,79%;
- Karena efisiensi didapatkan dari perbandingan capaian realisasi anggaran dengan capaian keluaran, maka gap antra kedua capaian tersebut harus dipertahankan, di satu sisi penyerapan anggaran harus sesuai dengan perencanaan, realisasi anggaran minimal 90 %, di sisi lain realisasi volume keluaran harus maksimal dengan tetap memperhatikan batas anomali, tidak lebih dari 200%.

Realisasi Indikator Kinerja ini apabila dibandingkan target tahun 2024 sebagai akhir RPJM memiliki capaian yang Baik, yang artinya BBPOM di Banjarmasin optimis akan mencapai target tahun 2024 tersebut, berikut gambaran lengkapnya :



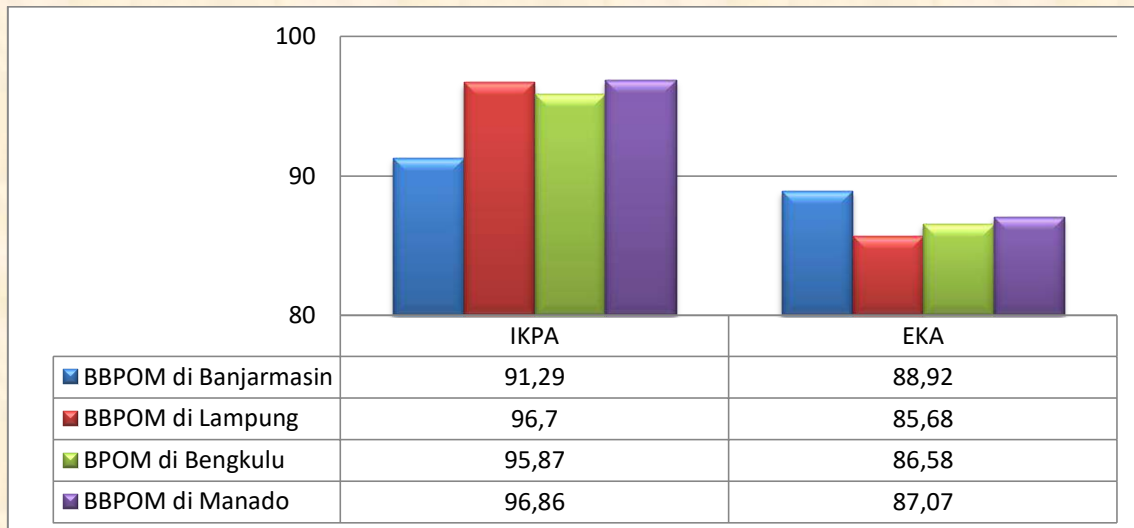
Grafik 3.2.11.1.12. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.11.1 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024

Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021, berada di posisi ke 4 dibandingkan dengan Balai Besar/Balai POM seklaster, sebagai berikut :



Grafik 3.2.11.1.13. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.11.1 Balai Besar/ Balai POM dalam Klaster 4 Tahun 2021

Nilai IKPA tertinggi diperoleh Balai Besar POM di Manado (96,86), sedangkan Nilai EKA tertinggi diperoleh Balai Besar POM di Banjarmasin (88,92), sebagai berikut :



Grafik 3.2.11.1.14. Nilai IKPA dan Eka BB/BPOM dalam Klaster 4 Tahun 2021

Pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai target pada Indikator Kinerja ini adalah yang terkait Dukungan Manajemen, menggunakan anggaran sebesar Rp. 152.341.000,- dengan realisasi anggaran yang baik yaitu sebesar Rp. 133.054.629,- atau 87,34%

Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi indikator kerjanya sebesar 97,16% maka diperoleh Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,11 dan Tingkat Efisiensi sebesar 0,11, serta Capaian Tingkat Efisiensinya adalah 100% atau **Efisien**.

Capaian (Output)	Serapan anggaran (Input)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
97,16	87,34	1,11	0,11	100%	Efisien

Tabel 3.2.5.11.1.4. Efisiensi Anggaran IK.11.1 Tahun 2021

Berdasarkan uraian di atas, meskipun realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 hanya memperoleh capaian 97,16% dari target yang ditetapkan, namun kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini dapat dinyatakan berhasil, dan Balai Besar POM di Banjarmasin optimis akan berhasil mencapai target tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJM 2020-2024.

Indikator Kinerja 11.2 :

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin

Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Efisien 92%	Efisien 100%	108,70%	Baik

Tabel 3.2.11.2.1. Realisasi Kinerja IK 11.2 Tahun 2021

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Untuk mengetahui efisiensi suatu kegiatan, dibutuhkan pengukuran dan penetapan beberapa hal sebagai berikut :

a. Indeks efisiensi (IE)

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi persentase capaian output dengan persentase capaian input. Persentase Capaian Output yang dimaksud adalah Persentase Capaian Indeks Kinerja atau Rata-rata Persentase Capaian Indeks Kinerja, sedangkan Persentase Capaian Input adalah Persentase Penyerapan Anggaran per Indeks Kinerja atau Persentase Penyerapan Anggaran seluruhnya.

- b. Standar efisiensi (SE) ditetapkan dengan nilai 1
- c. Tingkat Efisiensi (TE) diukur dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE).
- Apabila Indeks Efisiensi (IE) lebih besar atau sama dengan Standar Efisiensi (SE) maka kegiatan dianggap **Efisien**,
 - Apabila Indeks Efisiensi (IE) lebih kecil dari Standar Efisiensi (SE) maka kegiatan dianggap **Tidak Efisien**.
 - Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut :

✓ 0 - 0,2	: 100%	→ Efisien
✓ 0,21 - 0,4	: 95%	→ Efisien
✓ 0,41 - 0,6	: 92%	→ Efisien
✓ 0,61 - 0,8	: 90%	→ Efisien
✓ 0,81 - 1,0	: 88%	→ Efisien
✓ 1,01 - 1,2	: 86%	→ Tidak Efisien
✓ 1,21 - 1,4	: 84%	→ Tidak Efisien
✓ 1,41 - 1,6	: 80%	→ Tidak Efisien
✓ 1,61 - 1,8	: 78%	→ Tidak Efisien
✓ > 1,81	: 75%	→ Tidak Efisien
 - Dengan kata lain penentuan kriteria Efisien sebagai berikut :
 - Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
 - Tidak Efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

Sehubungan adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024.

Dalam Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, dilakukan penyesuaian target dari beberapa Indikator Kinerja, diantaranya target Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banjarmasin, sebagai berikut :

Target Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Semula	Efisien 90%	Efisien 92%	Efisien 93%	Efisien 94%	Efisien 95%
Menjadi	Efisien 100% (Realisasi)	Efisien 92%	-	-	-

Tabel 3.2.11.2.2. Perubahan Target IK 11.2

berdasarkan Reviu Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2024

Indikator Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT mulai tahun 2022 tidak akan dipergunakan lagi, karena Efisiensi Anggaran telah terdapat dalam perhitungan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang merupakan komponen penilaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT.

Pada tahun 2021 berdasarkan perhitungan dan kriteria di atas, Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin adalah Efisien dengan nilai 100%, dengan kata lain Balai Besar POM di Banjarmasin telah mampu menghasilkan capaian output yang lebih besar dibandingkan dengan capaian realisasi penggunaan anggaran sebagai inputnya. Capaian output rata-rata yang diperoleh adalah 102,62% sedangkan capaian realisasi anggaran seluruhnya adalah 94,38%.

Adapun Capaian Tingkat Efisiensi dari masing-masing IK adalah sebagai berikut :

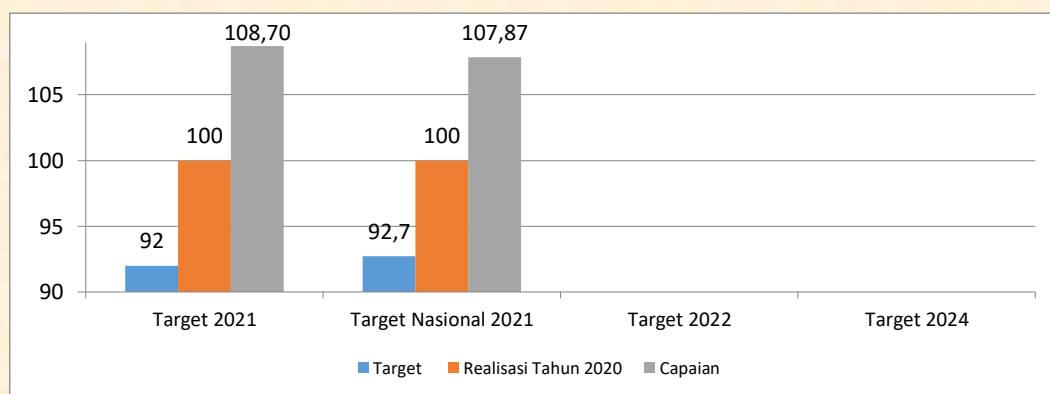
No.	Indikator Kinerja	Output (%)	Input (%)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	95,49	99,99	0,95	-0,05	75%	Tidak Efisien
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	106,08	99,99	1,06	0,06	100%	Efisien
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	108,66	99,99	1,09	0,09	100%	Efisien
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	104,23	99,99	1,04	0,04	100%	Efisien
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	99,18	99,91	0,99	-0,01	75%	Tidak Efisien

No.	Indikator Kinerja	Output (%)	Input (%)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	97,63	99,85	0,98	-0,02	75%	Tidak Efisien
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	101,32	100,00	1,01	0,01	100%	Efisien
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	93,23	99,76	0,93	-0,07	75%	Tidak Efisien
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	102,03	100,00	1,02	0,02	100%	Efisien
10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	112,68	99,95	1,13	0,13	100%	Efisien
11	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	119,65	99,95	1,20	0,20	100%	Efisien
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	1,00	0,00	100%	Efisien
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	112,59	100,00	1,12	0,12	100%	Efisien
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	109,16	99,96	1,09	0,09	100%	Efisien
15	Indeks Pelayanan Publik	101,79	99,96	1,02	0,02	100%	Efisien
16	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	102,79	99,63	1,03	0,03	100%	Efisien
17	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100,00	100,00	1,00	0,00	100%	Efisien
18	Jumlah desa pangan aman	100,00	100,00	1,00	0,00	100%	Efisien
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100,00	100,00	1,00	0,00	100%	Efisien
20	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	99,99	1,00	0,00	100%	Efisien
21	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	99,99	1,00	0,00	100%	Efisien
22	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	106,14	99,46	1,07	0,07	100%	Efisien

No.	Indikator Kinerja	Output (%)	Input (%)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
23	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	99,95	99,94	1,00	0,00	100%	Efisien
24	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	97,49	97,48	1,00	0,00	100%	Efisien
25	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	102,58	99,68	1,03	0,03	100%	Efisien
26	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	100,55	88,59	1,13	0,13	100%	Efisien
27	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	101,50	99,99	1,02	0,02	100%	Efisien
28	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	97,37	87,34	1,11	0,11	100%	Efisien
29	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banjarmasin	108,70	99,93	1,09	0,09	100%	Efisien
	TOTAL	102,62	94,38	1,09	0,09	100 %	Efisien

Tabel 3.2.11.2.3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Per Indikator Kinerja Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 29 indikator kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin, 25 indikator kinerja berhasil memperoleh capaian tingkat efisiensi anggaran Efisien dengan nilai antara 95% sampai dengan 100%, sedangkan 4 indikator kinerja lainnya hanya mampu memperoleh nilai 75% atau Tidak Efisien.



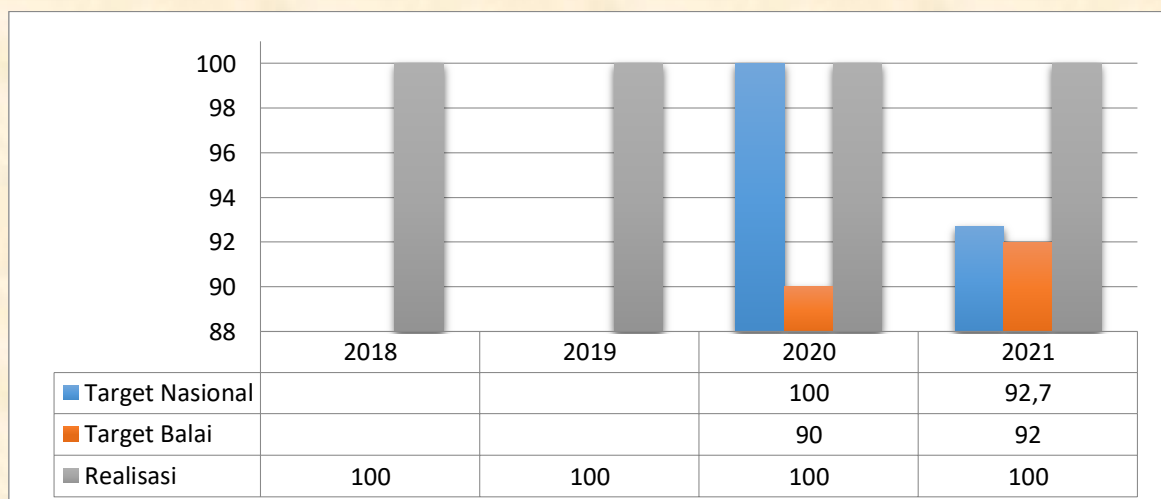
Grafik 3.2.11.2.11. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.11.2 Tahun 2021 dengan Target Nasional 2021 dan Target Tahun 2022 dan 2024

Realisasi Tingkat efisiensi penggunaan anggaran tahun 2021 ini melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu Efisien dengan nilai 92% dengan capaian 108,70%, dan dengan target nasional yaitu Efisien dengan nilai 92,7% capaiannya 107,87%.

Pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai target pada Indikator Kinerja ini adalah yang terkait Layanan Perkantoran, khususnya operasional dan pemeliharaan kantor, baik yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin, maupun oleh Loka POM di Kabupaten HSU dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk kegiatan tersebut tersedia pagu anggaran sebesar Rp17.440.132.000,- dengan realisasi anggaran yang sangat baik yaitu sebesar Rp.17.427.313.376,- atau 99,93%.

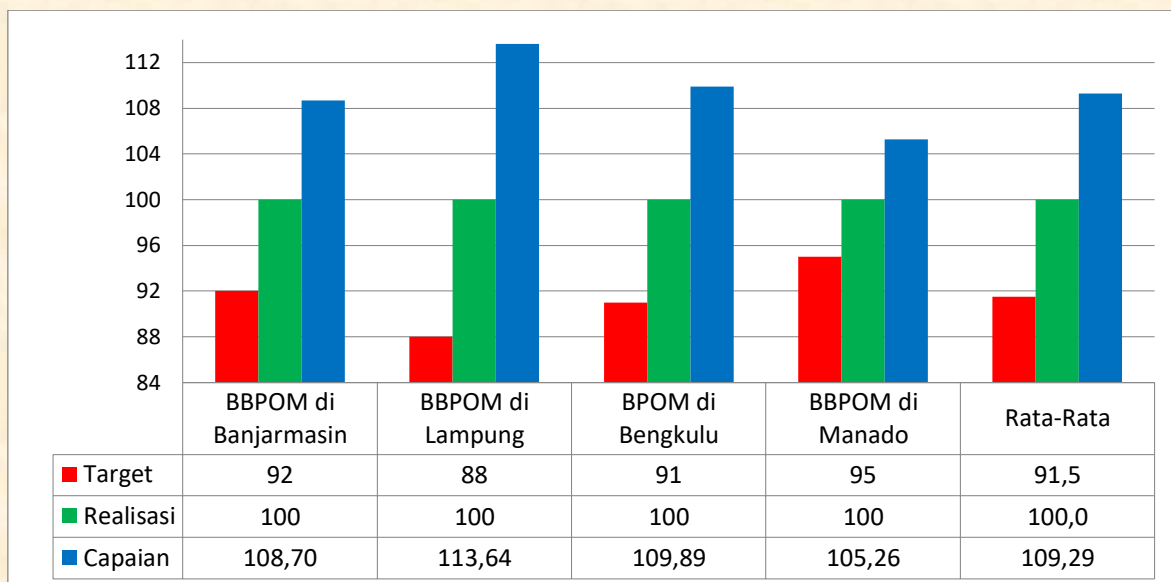
Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi indikator kinerjanya sebesar 108,70% maka diperoleh Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,09 dan Tingkat Efisiensi sebesar 0,09, serta Capaian Tingkat Efisiensinya adalah 100% atau **Efisien**.

Meskipun pada Renstra BPOM tahun 2015-2019 Tingkat efisiensi penggunaan anggaran tidak menjadi indikator penilaian kinerja, namun Tingkat efisiensi penggunaan anggaran sudah diperhitungkan sebagai evaluasi pelaksanaan anggaran UPT Badan POM oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM, dimana berdasarkan grafik di bawah, dapat dilihat perbandingan Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2018-2021.



Grafik 3.2.11.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja IK 11.2 Tahun 2018-2021

Berdasarkan data dari 3 Balai Besar/ Balai POM lain dalam kluster 4, seluruhnya dapat memperoleh Capaian Tingkat Efisiensi Anggaran yang Efisien dengan nilai 100%, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan oleh masing-masing UPT dengan perbandingan sebagai berikut :



**Grafik 3.2.11.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja IK.11.2
Balai Besar/ Balai POM dalam Kluster 4 Tahun 2021**

Tingkat Efisiensi anggaran per Indikator Kinerja tahun 2021 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan Tingkat Efisiensi Anggaran per Indikator Kinerja tahun 2020, dimana pada tahun 2020, dari 28 Indikator Kinerja yang dimiliki, hanya 20 indikator kinerja yang Capaian Tingkat Efisiensinya Efisien, selebihnya 8 indikator kinerja masih Tidak Efisien, sebagaimana tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja	2020		2021	
		Capaian TE	Kriteria	Capaian TE	Kriteria
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	75%	Tidak Efisien	75%	Tidak Efisien
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	100%	Efisien	100%	Efisien

No.	Indikator Kinerja	2020		2021	
		Capaian TE	Kriteria	Capaian TE	Kriteria
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75%	Tidak Efisien	100%	Efisien
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75%	Tidak Efisien	100%	Efisien
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	75%	Tidak Efisien
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	100%	Efisien	75%	Tidak Efisien
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	100%	Efisien	100%	Efisien
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	100%	Efisien	75%	Tidak Efisien
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	100%	Efisien	100%	Efisien
10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	75%	Tidak Efisien	100%	Efisien
11	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75%	Tidak Efisien	100%	Efisien
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95%	Efisien	100%	Efisien
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	88%	Efisien	95%	Efisien
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	100%	Efisien	100%	Efisien
15	Indeks Pelayanan Publik	100%	Efisien	100%	Efisien
16	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	100%	Efisien	100%	Efisien
17	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100%	Efisien	100%	Efisien
18	Jumlah desa pangan aman	100%	Efisien	100%	Efisien
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100%	Efisien	100%	Efisien
20	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%	Efisien	100%	Efisien
21	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%	Efisien	100%	Efisien

No.	Indikator Kinerja	2020		2021	
		Capaian TE	Kriteria	Capaian TE	Kriteria
22	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	100%	Efisien	100%	Efisien
23	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	75%	Tidak Efisien	100%	Efisien
24	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	75%	Tidak Efisien	100%	Efisien
25	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	100%	Efisien	100%	Efisien
26	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75%	Tidak Efisien	100%	Efisien
27	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	88%	Efisien	100%	Efisien
28	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	100%	Efisien	100%	Efisien
29	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banjarmasin	100%	Efisien	100%	Efisien

Tabel 3.2.11.2.3. Perbandingan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Per Indikator Kinerja Tahun 2020-2021

Faktor penghambat pencapaian indikator kinerja ini adalah adanya 4 indikator kinerja yang capaian outputnya masih belum mencapai target, sementara penyerapan anggarannya sudah cukup maksimal dan melebihi capaian outputnya.

Berdasarkan uraian di atas, realisasi Indikator Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2021 dapat dinyatakan berhasil, dengan capaian terhadap target sebesar 108,70% . Untuk tahun selanjutnya hingga akhir RPJM 2020-2024 indikator kinerja ini tidak lagi dimunculkan, karena sudah diperhitungkan sebagai salah satu komponen indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT. Sebagaimana optimisme Balai Besar POM di Banjarmasin untuk mencapai target Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan akhir tahun RPJM 2020-2024, maka Balai Besar POM di Banjarmasin pun optimis dapat menjaga dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan seluruh kegiatannya.

3.3. Realisasi Anggaran

Pengelolaan anggaran BBPOM di Banjarmasin dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Berdasarkan DIPA No. SP DIPA-063.01.2.432881/2021 tanggal 23 November 2020, Balai Besar POM di Banjarmasin mendapat anggaran sebesar Rp.55.781.064.000,-, yang kemudian seiring berjalannya tahun 2021 mengalami 3 (tiga) kali refocusing anggaran melalui APBNP Tahap I, III dan IV, dengan jumlah pengurangan sebesar 15,10% sehingga pagu akhir menjadi sebesar Rp.47.356.942.000,-, dengan perincian Belanja Pegawai (51) sebesar Rp. 11.896.159.000,-, Belanja Barang (52) sebesar Rp. 21.335.122.000,- dan Belanja Modal (53) sebesar Rp. 14.125.661.000,-.

Berikut Capaian Anggaran BBPOM di Banjarmasin berdasarkan beberapa teknis perhitungan.

1. Capaian anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan.

Setelah dilakukan pengelompokan anggaran baik pagu dan realisasinya berdasarkan Indikator Kinerja, dilakukan pengelompokan lagi ke tingkat Sasaran Kegiatan, dengan hasil sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1.334.737.600	1.334.638.668	99,99
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	365.172.000	394.579.242	99,85
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	127.500.000	127.362.264	99,89

No	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Capaian
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	680.210.500	679.961.478	99,96
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1.557.291.000	1.556.733.499	99,96
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	333.684.400	333.659.667	99,99
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	926.329.000	921.314.648	99,46
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal	380.340.000	376.994.964	99,11
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	627.683.000	625.674.414	99,68
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	23.420.541.500	20.803.310.221	88,83
11	Terkelolanya keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel	17.573.453.000	17.541.971.851	99,82
	JUMLAH	47.356.942.000	44.696.149.310	94,38

Data berdasarkan OMSPAN

Rata-rata capaian realisasi anggaran tiap sasaran kegiatan adalah 98,77%, hal ini dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin berbanding lurus dengan program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yang secara fisik mencapai 100% (data terlampir).

2. Capaian anggaran berdasarkan Kelompok Rincian Output (KRO).

No	Kode KRO	KRO	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	3165ADD	Standarisasi Lembaga	2.187.494.000	2.184.265.742	99,85
2	3165AEA	Koordinasi	53.857.000	53.857.000	100,00
3	3165BAH	Pelayanan Publik Lainnya	116.166.000	116.166.000	100,00
4	3165BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	292.184.000	292.184.000	100,00
5	3165BKB	Pemantauan produk	1.503.393.000	1.501.369.889	99,87
6	3165BMB	Komunikasi Publik	247.000.000	247.000.000	100,00
7	3165CAB	Sarana Bidang Kesehatan	21.335.122.000	18.724.899.395	87,77
8	3165QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	872.472.000	872.472.000	100,00
9	3165QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.411.199.000	1.411.199.000	100,00
10	3165QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	1.668.422.000	1.668.422.000	100,00
11	3165QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	709.340.000	709.340.000	100,00
	6384EAA	Program Dukungan Manajemen	16.960.293.000	16.914.974.284	99,73
		JUMLAH	47.356.942.000	44.696.149.310	94,38

Data berdasarkan OMSPAN

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2021 sebesar 94,38%; realisasi tertinggi adalah pada belanja pegawai (51) sebesar 99,86% ; selanjutnya diikuti oleh belanja barang (52) sebesar 99,76% ; dan yang paling rendah realisasinya adalah belanja modal (53) 87,77%.

Rendahnya realisasi belanja modal, disebabkan adanya kegagalan pihak penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Gedung Laboratorium dan Layanan Publik tahap III, dimana mereka hanya mampu mencapai 80,074%, sehingga tidak bisa direalisasikan anggaran berupa pembayaran termin terakhir / termin ke 5 (lima) sebesar lebih kurang Rp. 2,6 Milyar.

Balai Besar POM di Banjarmasin telah melaksanakan seluruh program/ kegiatan sesuai perjanjian kinerja dengan baik walaupun masih ada sisa anggaran yang tidak terserap. Agar capaian realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat optimal, dilakukan perbaikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara baik dan tepat.

Upaya yang dilakukan BBPOM di Banjarmasin dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
2. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi.

BAB IV KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Untuk mencapai tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tahun 2020-2024, telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan dalam 3 (tiga) perpektif. Pada tahun 2021, BBPOM di Banjarmasin memperoleh Nilai Pencapaian Strategis (NPS) sebesar 101,69% dengan kriteria Baik. Nilai tersebut diperoleh dari 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan dengan kriteria nilai NPS Baik (NPS antara 97,63% sampai dengan 109,31%).

Sasaran Kinerja dengan NPS paling tinggi adalah SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin dengan NPS sebesar 109,31%. Pencapaian tersebut disebabkan oleh adanya 3 (tiga) Capaian Indikator Kinerja mencapai target dengan kriteria Sangat Baik, yaitu :

- 1) IK.4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan NPS 112,68%
- 2) IK.4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan NPS 119,65%
- 3) IK.4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan NPS 112,59%

Sasaran Kinerja dengan NPS paling rendah adalah SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin dengan NPS sebesar 97,63%.

Dari 29 Indikator Kinerja BBPOM di Banjarmasin tahun 2021, terdapat 15 (lima belas) Indikator Kinerja dengan capaian kinerja tahun 2021 telah mencapai

target tahun 2022, bahkan 8 (delapan) Indikator Kinerja diantaranya telah mencapai target akhir RPJM tahun 2024.

Pagu anggaran BBPOM di Banjarmasin sesuai DIPA tahun 2021 No. SP DIPA-063.01.2.432881/2021 tanggal 23 November 2020 sebesar **Rp. 55.781.064.000,-** (Lima Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah), Pada bulan Juni dan Agustus mengalami refocusing anggaran melalui APBN tahap II, III dan IV tahun 2021, yang dimaksudkan untuk penanganan Pandemi Covid-19, dimana pagu anggaran tersebut dipotong lebih kurang 15% yaitu sebesar Rp 8.424.122.000,- sehingga pagu yang tersisa sebesar Rp.47.356.942.000,-. Realisasi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 47.356.942.000,- atau 94,38%.

Hasil pengukuran tingkat efisiensi menunjukkan BBPOM di Banjarmasin memperoleh Indeks Efisiensi (IE) 1,08 dan Tingkat Efisiensi (IE) 0,08 sehingga Capaian Tingkat Efisiensi adalah Efisien dengan nilai 100%. Nilai tersebut berasal dari 29 Indikator Kinerja Utama, dimana 3 (tiga) dari 11 Sasaran Kinerja dan 25 (dua puluh lima) dari 29 Indikator Kinerja memperoleh Capaian Tingkat Efisiensi Efisien.

Berdasarkan capaian-capaian di atas, Balai Besar POM di Banjarmasin dapat menyatakan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakannya selama tahun 2021 telah berhasil dengan baik, namun tentunya harus tetap ditingkatkan di masa mendatang sehingga capaiannya dapat optimal.

4.2. Saran

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan oleh BBPOM di Banjarmasin dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan capaian kinerja di tahun berikutnya antara lain:

1. Perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian target terhadap 15 (lima belas) Indikator Kinerja dengan capaian kinerja tahun 2021 telah mencapai target tahun 2022, bahkan 8 (delapan) Indikator Kinerja telah mencapai target akhir RPJM tahun 2024. Evaluasi dan penyesuaian target dapat dilakukan melalui Reviu Renstra BBPOM di Banjarmasin 2020-2024 secara berkala dan menyampaikan hasilnya kepada Badan POM untuk mendapatkan arahan dan keputusan terhadap tindak lanjutnya
2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan. Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan dilakukan sesuai kebutuhan riil agar mengurangi sisa anggaran yang tidak terserap. Selain itu, juga perlu melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penggunaan anggaran agar lebih optimal dan efisien, sesuai perencanaan dan akuntabilitas.
3. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran yang lebih matang yang berdaya ungkit dalam pencapaian *outcome* sasaran kegiatan, membangun komitmen dalam melaksanakan perencanaan yang telah disusun serta monitoring dan evaluasi ketat terhadap pelaksanaan kegiatan pendukung capaian indikator dan realisasi anggaran setiap bulan dalam pencapaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
4. Menyusun langkah-langkah strategis pencapaian Indikator Kinerja yang capaiannya kurang dari 100% yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat (95,49%), Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat (99,18%), Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan (93,23%), Indeks RB BBPOM di Banjarmasin (99,95%), Nilai AKIP BBPOM di

Banjarmasin (97,49%) dan Nilai kinerja anggaran BBPOM di Banjarmasin (97,16%).

5. Internalisasi budaya organisasi PIKKIR secara optimal ke seluruh individu pendukung organisasi untuk mendukung capaian kinerja
6. Penyempurnaan penjenjangan kinerja (cascading indicator dan non-indicator) berdasarkan beban kerja maupun proses bisnis untuk mendukung capaian kinerja
7. Peningkatan pengelolaan kinerja yang bertujuan menumbuhkan budaya organisasi, meningkatkan kepedulian dan kesadaran terhadap tata kelola pencapaian kinerja yang baik dan mendapatkan umpan balik untuk penyempurnaan pencapaian kinerja
8. Peningkatan pelayanan publik untuk mempermudah pelanggan dalam mendapatkan layanan publik dengan pengembangan inovasi-inovasi layanan publik

LAMPIRAN

1. Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin tentang Reviu Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024



- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Revisi Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

- 3 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TAHUN 2020-2024.
- Kesatu :** Menetapkan Revisi Rencana Strategis Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua :** Revisi Rencana Strategis Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai salah satu acuan dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 5 Oktober 2021.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Desember 2021

KEPALA BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARMASIN ,



LEONARDI DUMA

2. Perubahan Target Indikator Kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024

Rencana Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Berkala)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Masa Depan)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Tersajutnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,8	83,80	80,6	80	82,3	78,00	82	83	84	85
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80,00	82	84	85	81,24	80	81	82	83
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berbantuan hasil pengawasan	94	82,00	94	92	93	68,17	70	72	74	76
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berbantuan hasil pengawasan	89	80,00	87	88	89	70,46	85,8	88	86,5	88,7
	Persentase Pangan Fortifikan yang Memenuhi Syarat	-	-	-	-	-	-	92	93	94	95

Rencana Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Berkala)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Masa Depan)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Indeks kesadaran masyarakat terpenuhi informasi terkait Obat dan Makanan aman dan bermutu	68	71,00	74	76	81	78,06	81	84	86	89
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pembekuan izin/bayar dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	87,50	89	90,5	92	96,25	91,1	92,2	93,4	94,6
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72	75,00	77	80	83	78,11	78,03	80,06	82,08	83,01
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	88,5	90,55	91	91,5	92	89,18	90	91	91,5	92

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Rencana)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Mendagri)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya efektivitas pemberian sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase kepatuhan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	67	69	91	93	95	81,64	82	83	85	87
	Persentase kepatuhan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kompetensi	53	60	65	70	75	50,52	60	62	65	70
	Persentase kepatuhan produk sertifikasi yang dilaksanakan tepat waktu	82	86	88	88	90	99,81	100	100	100	100
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	30	30	22	22	24	20,10	45	50	55	60
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	53	57	60	60	65	59,99	63	66	68	71

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Rencana)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Mendagri)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	3,11	3,46	3,51	4,10	4,31	3,09	3,91	4,12	4,34	4,55
	Persentase UMKM yang Menerahi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Konstrak yang Baik	-	-	-	-	-	-	-	77	79	81
Meningkatnya efektivitas kewarifan, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Tingkat Efektivitas KIR Obat dan Makanan	83,73	85,41	78	81	85	88,80	90	91,6	93,6	95,2
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20 (16%)	40	60	80	100	16	40	60	80	100
	Jumlah rese pangan aman	6 (14%)	12	19	25	32	4	12	19	25	32
	Jumlah pasar aman dan lahan budidaya (2020) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2021-2024)	2	4	6	8	10	2	4	6	8	10

Rencana Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Bersada)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Bersada)				
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	90,00	91	91	92	97,27	100	100	100	100	
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	90,00	91	91	92	96,41	100	100	100	100	
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81	83,00	83	88	90	89,69	90	92	94	96	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	Indeks KR Balai Besar POM di Banjarmasin	83	89,00	81	84	85	74,08	80,8	83,3	85,8	88,3	
	Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin	88	84,00	88	91	92	78,18	78,1	80,1	82,1	84,1	
Terwujudnya BSM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkualitas optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin	73	77,00	80	82	88	80,18	81	82	83	84	

Rencana Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Bersada)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Bersada)				
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
Merguainya laboratorium, pengolahan data dan informasi penggunaan Obat dan Makanan	Persentase penuntdan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	77,20	78	79	80	67,3	73	78	81	86	
	Indeks pengolahan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	1,50	2,00	2,20	2,30	2,50	1,82	2	2,20	2,3	3	
Terbaiknya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel	Mula Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	92	94,00	95	96	97	90,96	92,5	93,1	94,3	95,3	
	Target Efisiensi Pengawasan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	Efisien (90%)	Efisien (92%)	Efisien (93%)	Efisien (94%)	Efisien (95%)	Efisien (100%)	Efisien (92%)	-	-	-	

* Karena adanya relokasi anggaran, Target IK Jumlah sekolah dengan Program Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2020 dikurangi dari 20 sekolah menjadi 16 dan Target IK Jumlah desa program aman tahun 2020 dikurangi dari 6 desa menjadi 4 desa.

3. Perhitungan Tingkat Efisiensi Anggaran per Indikator Kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2021

Sistem Strategi	Indikator	Rencana			Fisik			RE	TE	Capaian TE	Kategori
		Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%				
2. Terpapatnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1.1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	81	78,08	95,18	426.642.000	426.642.000	99,99	0,99	0,83	73%	Tidak Efisien
	1.2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	84,06	105,07	231.876.400	231.862.180	99,99	1,00	0,06	100%	Efisien
	1.3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengujian	70	76,08	108,85	426.642.000	426.642.000	99,99	1,00	0,00	100%	Efisien
	1.4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengujian	83,3	88,12	104,23	231.876.400	231.862.180	99,99	1,00	0,00	100%	Efisien
	1.5. Persentase pangan Fortifikasi yang sesuai	91	91,25	99,18	11.760.000	11.888.000	99,91	0,99	0,01	73%	Tidak Efisien
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	3.1. Indeks kesadaran masyarakat (socioeconomic index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	81	78,08	95,63	390.172.000	394.579.200	99,06	0,98	0,82	73%	Tidak Efisien
3. Meningkatnya kesadaran pejabat/instansi dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	3.1. Indeks kepuasan pejabat/instansi terhadap pelayanan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91,4	92,38	101,08	37.313.500	37.313.500	100	1,00	0,01	100%	Efisien
	3.2. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Pengawasan Obat dan Makanan	70,33	73,03	93,22	37.399.000	37.252.200	99,76	0,99	0,07	73%	Tidak Efisien
	3.3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pokok BBPOM	80	81,03	101,29	32.376.500	32.576.000	100	1,00	0,00	100%	Efisien
4. Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	4.1. Persentase kepatuhan/akomodasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	82	81,4	112,68	171.515.000	171.438.700	99,99	1,13	0,13	100%	Efisien
	4.2. Persentase kepatuhan/akomodasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan oleh pemangku tingkat tinggi	80	71,79	119,65	121.179.000	121.217.900	99,99	1,10	0,20	100%	Efisien
	4.3. Persentase kepatuhan/akomodasi pelayanan yang dilaksanakan tingkat wilayah	100	100,00	100,00	10.920.000	10.920.000	100	1,00	0,00	100%	Efisien
	4.4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85	88,07	112,8	218.942.000	218.942.000	100	1,120	0,12	100%	Efisien

Sistem Strategi	Indikator	Rencana			Fisik			RE	TE	Capaian TE	Kategori	
		Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%					
	4.5. Persentase sarana obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85	88,07	102,18	218.942.000	218.942.000	99,98	1,00	0,00	100%	Efisien	
	4.6. Indeks Pelayanan Publik	3,00	3,00	100,00	48.600.000	48.611.700	99,98	1,00	0,00	100%	Efisien	
5. Meningkatnya efektivitas pemantauan, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	5.1. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	90	92,13	102,36	146.042.000	143.351.400	98,13	1,00	0,00	100%	Efisien	
	5.2. Jumlah website tentang Pangan (Pangan Anak Sekolah, PLSA, BSA)	80	48,00	60,00	348.000.000	338.011.312	97,13	1,00	0,00	100%	Efisien	
	5.3. Jumlah daya jangkau siaran	12	12,00	100,00	728.000.000	728.000.000	100	1,00	0,00	100%	Efisien	
	5.4. Jumlah panel atau teras berkearifan	9	8,00	88,89	108.430.000	108.427.700	99,99	1,00	0,00	100%	Efisien	
6. Meningkatnya efektivitas pemantauan produk dan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	6.1. Persentase sampel Obat yang dipantau dan obat yang beredar dipantau	100	100,00	100,00	218.321.000	218.386.454	99,99	1,00	0,00	100%	Efisien	
	6.2. Persentase sampel makanan yang dipantau dan obat tradisional dipantau	100	100,00	100,00	118.363.000	118.391.213	99,99	1,00	0,00	100%	Efisien	
7. Meningkatnya efektivitas pemantauan kepatuhan/akomodasi kepatuhan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	7.1. Persentase kepatuhan/akomodasi kepatuhan di wilayah Obat dan Makanan	90	92,33	102,14	908.129.000	925.118.648	99,48	1,00	0,00	100%	Efisien	
8. Terpapatnya sarana pelayanan BBPOM di Banjarmasin yang optimal	8.1. Indeks EF BBPOM di Banjarmasin	80,8	88,76	109,95	371.687.000	355.439.800	95,63	1,00	0,00	100%	Efisien	
	8.2. Nilai EF BBPOM di Banjarmasin yang optimal	70,5	76,14	107,99	128.719.000	128.480.900	97,48	1,00	0,00	100%	Efisien	
9. Terpapatnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkualitas	9.1. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	91	89,09	97,78	627.685.000	625.634.414	99,68	1,00	0,00	100%	Efisien	
10. Meningkatnya laboratorium pengujian data dan indikator pengawasan obat dan makanan	10.1. Peningkatan pemantauan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar BIF	73	73,48	100,65	22.811.194.500	23.304.115.348	102,09	1,13	0,13	100%	Efisien	
	10.2. Indeks pengujian data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	2	2,05	101,25	499.247.000	499.197.875	99,99	1,00	0,00	100%	Efisien	
11. Terfungsinya Kelembagaan BBPOM di Banjarmasin secara Akomodasi	11.1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	82,5	89,87	107,75	152.244.000	133.054.629	87,39	1,11	0,11	100%	Efisien	
	11.2. Tingkat Efektivitas Pengawasan Anggaran BBPOM di Banjarmasin	100,00%	100,00%	100,00%	17.821.122.000	17.608.927.222	98,81	1,00	0,00	100%	Efisien	
TOTAL					482,79	47.316.942.000	44.096.149.310	96,30	1,00	0,00	100%	Efisien

4. Capaian RAPK Balai Besar/ Balai POM Klaster 4 Tahun 2021

Kecamatan/kegiatan	Indikator	BBPOM di Banjarmasin			BBPOM di Bontar Lampung			BBPOM di Bengkulu			BBPOM di Manado		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1. Terpenuhinya OHS dan Mutu yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT	1.1. Pemenuhan OHS yang memenuhi syarat	81	78,30	95,44	91	91,17	90,01	88	79,04	93,68	88	98,51	100,00
	1.2. Pemenuhan Mutu yang memenuhi syarat	80	100,00	100,00	88	92,90	100,00	87	98,52	100,00	90	99,61	97,90
	1.3. Pemenuhan OHS yang aman dan sesuai berdasarkan hasil pengamatan	70	79,86	100,00	84	92,34	100,00	95	92,11	98,20	90	98,80	100,00
	1.4. Pemenuhan Mutu yang aman dan sesuai berdasarkan hasil pengamatan	100,0	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00
	1.5. Pemenuhan program Partisipasi yang memenuhi syarat	81	91,23	98,50	94	98,69	100,00	98	93,54	98,50	91	98,80	100,00
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	2.1. Indeks kesadaran masyarakat (pengetahuan) terhadap OHS dan Mutu: aman dan sesuai di wilayah kerja UPT	81	78,80	97,60	88	72,23	81,76	88	98,29	100,00	81	78,10	98,80
3. Meningkatnya kepuasan publik atau masyarakat terhadap kinerja pelayanan OHS dan Mutu di wilayah kerja UPT	3.1. Indeks kepuasan publik untuk pelayanan terhadap prosedur pengurusan OHS dan Mutu	99,1	92,90	100,00	91,1	90,19	90,00	91,1	88,00	95,48	90,0	95,80	95,21
	3.2. Indeks kepuasan masyarakat pra-konsumen/ Pengurusan Obat dan Makanan	98,00	71,60	98,20	78,00	107	83,96	78,00	71,00	81,20	81,20	80,7	80,80
	3.3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM	80	91,80	100,00	100,00	94,11	100,00	94	98,00	98,00	98	98,70	100,00

Kecamatan/kegiatan	Indikator	BBPOM di Banjarmasin			BBPOM di Bontar Lampung			BBPOM di Bengkulu			BBPOM di Manado		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4. Meningkatnya efektivitas pemantauan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT	4.1. Persentase inspeksi/ pemeriksaan hasil kegiatan secara rutin dan distribusi yang dilaksanakan	81	91,4	112,00	94	100,00	100,00	88	92,80	100,00	91	94,67	100,00
	4.2. Persentase inspeksi/ pemeriksaan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat/pemerintah	80	72,79	119,60	84	81,90	100,00	88	100,00	97,07	91	80,00	100,00
	4.3. Persentase inspeksi/ pemeriksaan distribusi yang dilaksanakan tepat waktu	100	100,00	100,00	99	99,00	100,00	99	99,00	100,00	90	99,00	100,00
	4.4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85	100,00	112,00	94	100,00	100,00	97	100,00	100,00	71	100,00	100,00
	4.5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	84	88,77	100,00	88	94,50	100,00	90	95,22	100,00	80	95,70	100,00
	4.6. Indeks Pelayanan Publik	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00
5. Meningkatnya efektivitas pemantauan, informasi, edukasi OHS dan Makanan di wilayah kerja UPT	5.1. Tingkat kehadiran BKB OHS dan Makanan	80	90,31	100,00	94,0	90,30	98,70	90	94,80	100,00	92	98,00	98,70
	5.2. Jumlah website/ blog/ Forum/ Jaringan Arah Selatan (JAS) OHS	80	100,00	100,00	88	100,00	100,00	88	100,00	100,00	80	100,00	100,00
	5.3. Jumlah titik pengujian	10	12,00	100,00	10	10,00	100,00	10	12,00	100,00	10	10,00	100,00
	5.4. Jumlah point-counter hasil pemeriksaan	4	4,00	100,00	4	4,00	100,00	4	4,00	100,00	4	4,00	100,00

Rencana Strategis	Indikator	BBPOM di Banjarmasin			BBPOM di Standar Langsung			BBPOM di Kegiatan			BBPOM di Masalah		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
6. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan produk dan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja LPT	6.1. Persentase surat Izat yang diterbitkan dan siap untuk standar	100	100,00	100,00	100	93,71	96,71	100	91,69	91,30	100	93,12	95,12
	6.2. Persentase surat tindakan yang diterbitkan dan siap untuk standar	100	100,00	100,00	100	91,80	91,80	100	88,96	88,96	100	100,00	100,00
7. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja LPT	7.1. Persentase keberhasilan pemeliharaan kepatuhan di bidang Obat dan Makanan	90	92,53	100,34	85	100,71	101,62	75	100,00	100,00	97	99,09	102,09
8. Meningkatkan keterlibatan penyelenggara LPT yang optimal	8.1. Indeks KE LPT	80,8	80,79	80,80	83,1	83,46	84,91	82,8	81,31	80,61	83,9	83,81	84,99
	8.2. Nilai AKIP LPT	70,1	70,14	71,00	73,7	74,21	74,84	74,3	75,90	100,15	80,3	70,18	71,51
9. Meningkatkan SDM LPT yang berkarya optimal	9.1. Indeks Profesionalitas KSM LPT	91	93,04	100,00	77	83,86	100,00	83,5	77,41	82,71	94,31	84,08	100,00
10. Meningkatkan keterlibatan, pengetahuan dan daya inferensi penyelenggara obat dan makanan	10.1. Persentase pemenuhan keterlibatan pengawas Obat dan Makanan sesuai standar IUP	79	73,68	100,00	71	71,41	100,00	71	71,33	100,00	76	76,17	100,00
	10.2. Indeks pengetahuan data dan informasi PT yang optimal	2	1,000	100,00	2	1,120	100,00	2	1,870	100,00	2	1,110	100,00
11. Terlibatnya Kelompok APT (KSM, Masyarakat)	11.1. Nilai Kinerja Anggaran APT	91,3	89,07	91,30	91	90,89	100,00	91,3	90,39	94,30	91,6	90,99	91,21
	11.2. Target Efisiensi Pengeluaran Anggaran APT	10000 (100%)	10000 (100%)	100,00 (100%)	10000 (100%)	10000 (100%)	10000 (100%)	10000 (100%)	10000 (100%)	10000 (100%)	10000 (100%)	10000 (100%)	10000 (100%)

5. Pengukuran Kinerja Kegiatan Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2021

KRO / RO	INDICATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%	
063.01.DR.	Program Pengawasan Obat dan Makanan				
3165.	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Input : Dana	30.396.649.000	27.774.528.794	91,57
		Output : Jumlah Laboratorium	4.121	4.295	104,22
3165.ADD.	Standarisasi Lembaga	Input : Dana	2.187.494.000	2.184.265.742	99,85
		Output : Jumlah Lembaga	1	1	100,00
3165.ADD.001.	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Input : Dana	2.187.494.000	2.184.265.742	99,85
		Output : Jumlah Laboratorium	1	1	100,00
3165.AEA.	Koordinasi	Input : Dana	53.857.000	53.774.125	99,85
		Output : Jumlah Kegiatan	5	5	100,00
3165.AEA.001.	Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh BB/BPOM	Input : Dana	10.026.000	10.014.450	99,88
		Output : Jumlah Laporan	1	1	100,00
3165.AEA.002.	Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh Loka POM I	Input : Dana	21.127.000	21.060.000	99,72
		Output : Jumlah Laporan	1	1	100,00
3165.AEA.003.	Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh Loka POM II	Input : Dana	22.704.000	22.691.675	99,95
		Output : Jumlah Laporan	1	1	100,00
3165.BAH.	Pelayanan Publik Lainnya	Input : Dana	116.165.000	116.165.913	100,00
		Output : Jumlah Layanan	7	7	100,00
3165.BAH.001.	Keputusan/ Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM	Input : Dana	88.519.000	88.519.000	100,00
		Output : Jumlah Keputusan	1	1	100,00
3165.BAH.002.	Keputusan/ Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM I	Input : Dana	14.071.000	14.072.913	100,00
		Output : Jumlah Keputusan	2	2	100,00
3165.BAH.003.	Keputusan/ Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM II	Input : Dana	13.574.000	13.574.000	100,00
		Output : Jumlah Keputusan	2	2	100,00
3165.BDC.	Fasilitasi dan Pembituan Masyarakat	Input : Dana	292.184.000	291.106.134	99,63
		Output : Jumlah Peserta KIE	358	431	123,14
3165.BDC.001.	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM	Input : Dana	142.184.000	142.183.820	100,00
		Output : Jumlah Peserta KIE	150	181	120,67
3165.BDC.002.	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM I	Input : Dana	75.000.000	74.968.800	99,96
		Output : Jumlah Peserta KIE	100	125	125,00
3165.BDC.003.	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM II	Input : Dana	75.000.000	73.953.514	98,60
		Output : Jumlah Peserta KIE	100	125	125,00
3165.BKB.	Pantauan produk	Input : Dana	1.503.393.000	1.501.369.889	99,87
		Output : Jumlah Laporan	1	1	100,00
3165.BKB.001.	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Input : Dana	1.503.393.000	1.501.369.889	99,87
		Output : Jumlah Laporan	1	1	100,00

KRO / RD		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1165.DMB.	Kemitraan Publik	Input : Dana	247.000.000	246.946.327	99,98
		Output : Jumlah Layanan	76	93	119,74
1165.BMR.001.	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BBPOM	Input : Dana	124.000.000	123.973.000	99,98
		Output : Jumlah Layanan	26	32	123,08
1165.BMR.002.	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM I	Input : Dana	49.000.000	48.999.663	100,00
		Output : Jumlah Layanan	25	29	116,00
1165.BMR.003.	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM II	Input : Dana	74.000.000	73.971.674	99,96
		Output : Jumlah Layanan	25	38	128,00
1165.CAR.	Sarana Bidang Keselamatan	Input : Dana	21.335.122.000	18.724.899.395	87,77
		Output : Jumlah Paket Pengadaan	3	3	100,00
1165.CAR.001.	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Input : Dana	6.117.524.000	6.117.804.900	99,99
		Output : Jumlah Paket Pengadaan	1	1	100,00
1165.CAR.002.	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Input : Dana	545.949.000	545.919.206	99,99
		Output : Jumlah Paket Pengadaan	1	1	100,00
1165.CAR.003.	Layanan Prasarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	Input : Dana	14.671.649.000	12.061.895.289	82,21
		Output : Jumlah Paket Pengadaan	1	1	100,00
1165.QCB.	Perikara Hakim Bastas Usaha	Input : Dana	872.472.000	867.548.521	99,43
		Output : Jumlah Layanan	10	11	110,00
1165.QCD.034.	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI ESPDM BANJARMASIN	Input : Dana	713.344.000	706.496.398	99,32
		Output : Jumlah Keputusan	8	8	100,00
1165.QCD.035.	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB HULU SUNGAI UTARA	Input : Dana	88.564.000	80.491.000	90,91
		Output : Jumlah Keputusan	1	2	200,00
1165.QCD.036.	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB TANAH BUMBU	Input : Dana	88.564.000	80.551.125	90,99
		Output : Jumlah Keputusan	1	1	100,00
1165.QDB.	Fasilitasi dan Pembiayaan Lembaga	Input : Dana	1.411.199.000	1.411.388.432	100,00
		Output : Jumlah Lembaga	56	56	100,00
1165.QDB.001.	Sekolah dengan Pangan (jajanan) di Sekolah (PIAS) aman	Input : Dana	538.668.000	530.651.312	100,00
		Output : Jumlah Sekolah yang diintervensi PIAS	40	48	100,00
1165.QDB.002.	Desa Pangan Aman	Input : Dana	728.093.000	720.891.400	100,00
		Output : Jumlah Desa Pangan Aman	12	12	100,00
1165.QDB.003.	Pasar aman dari bahan berbahaya	Input : Dana	168.438.000	160.437.720	100,00
		Output : Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	4	4	100,00

KRO / RO		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
3165.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	Input : Dana	1.668.422.000	1.668.298.135	99,99
		Output : Jumlah Sampel Obat dan Makanan yang Diperiksa dan Diaji	2.928	2.928	100,00
3165.QIA.001.	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	Input : Dana	525.075.000	525.044.549	99,99
		Output : Jumlah Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diaji	666	666	100,00
3165.QIA.002.	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM I	Input : Dana	24.428.000	24.425.600	99,99
		Output : Jumlah Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diaji	41	41	100,00
3165.QIA.003.	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	Input : Dana	35.188.000	35.185.325	99,99
		Output : Jumlah Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diaji	41	41	100,00
3165.QIA.005.	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	Input : Dana	940.839.000	940.787.825	99,99
		Output : Jumlah Sampel Obat yang Diperiksa dan Diaji	1.671	1.671	100,00
3165.QIA.006.	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM I	Input : Dana	62.388.000	62.364.762	99,98
		Output : Jumlah Sampel Obat yang Diperiksa dan Diaji	221	221	100,00
3165.QIA.007.	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM II	Input : Dana	63.386.000	63.379.683	99,99
		Output : Jumlah Sampel Obat yang Diperiksa dan Diaji	183	183	100,00
3165.QIA.008.	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	Input : Dana	17.126.000	17.118.600	99,99
		Output : Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Diaji	105	105	100,00
3165.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Input : Dana	709.340.000	708.981.969	99,95
		Output : Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa	684	761	111,26
3165.QIC.001.	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	Input : Dana	88.500.000	88.487.800	99,99
		Output : Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa	92	102	110,87
3165.QIC.002.	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM I	Input : Dana	16.000.000	15.999.500	100,00
		Output : Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa	20	22	110,00
3165.QIC.003.	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	Input : Dana	43.000.000	42.989.721	99,98
		Output : Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa	20	25	125,00

KRO / RO	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%	
3165.QC.004.	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/SPOM	Input : Dana	455.012.000	454.600.520	99,93
		Output : Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa	310	347	111,94
3165.QC.005.	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM I	Input : Dana	69.872.000	69.868.478	99,99
		Output : Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa	141	143	101,42
3165.QC.006.	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	Input : Dana	36.956.000	36.956.000	100,00
		Output : Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa	101	122	120,79
DICI.BI.WA.	Program Dukungan Manajemen				
6384.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Input : Dana	16.960.293.000	16.945.422.196	99,91
		Output : Jumlah Keputusan	1	1	100,00
W084.TAA.	Layanan Perkhitanan	Input : Dana	16.960.293.000	16.945.422.196	99,91
		Output : Jumlah Layanan	1	1	100,00
6384.EAA.004.	Layanan Perkhitanan UPT	Input : Dana	16.960.293.000	16.945.422.196	99,91
		Output : Jumlah Keputusan	1	1	100,00